



KAJIAN FISKAL REGIONAL

Provinsi Kepulauan Riau



Triwulan I
2024

Disusun Oleh:
Kanwil DJPb Provinsi
Kepulauan Riau

Tim Penyusun
Kajian Fiskal Regional
Triwulan I Tahun 2024

Penanggung Jawab

Indra Soeparjanto

(Kepala Kanwil DJPb Provinsi Kepulauan Riau)

Ketua Tim

Anisah Alfada

(Kepala Bidang Pembinaan Pelaksanaan Anggaran II)

Tim Penyusun

Rolly Indra

(Kepala Seksi Pembinaan Pelaksanaan Anggaran II A)

Muhadi

(Kepala Seksi Pembinaan Pelaksanaan Anggaran II B)

Budi Indrawan

(Kepala Seksi Pembinaan Pelaksanaan Anggaran II C)

Lorensia Kristina Br. S.

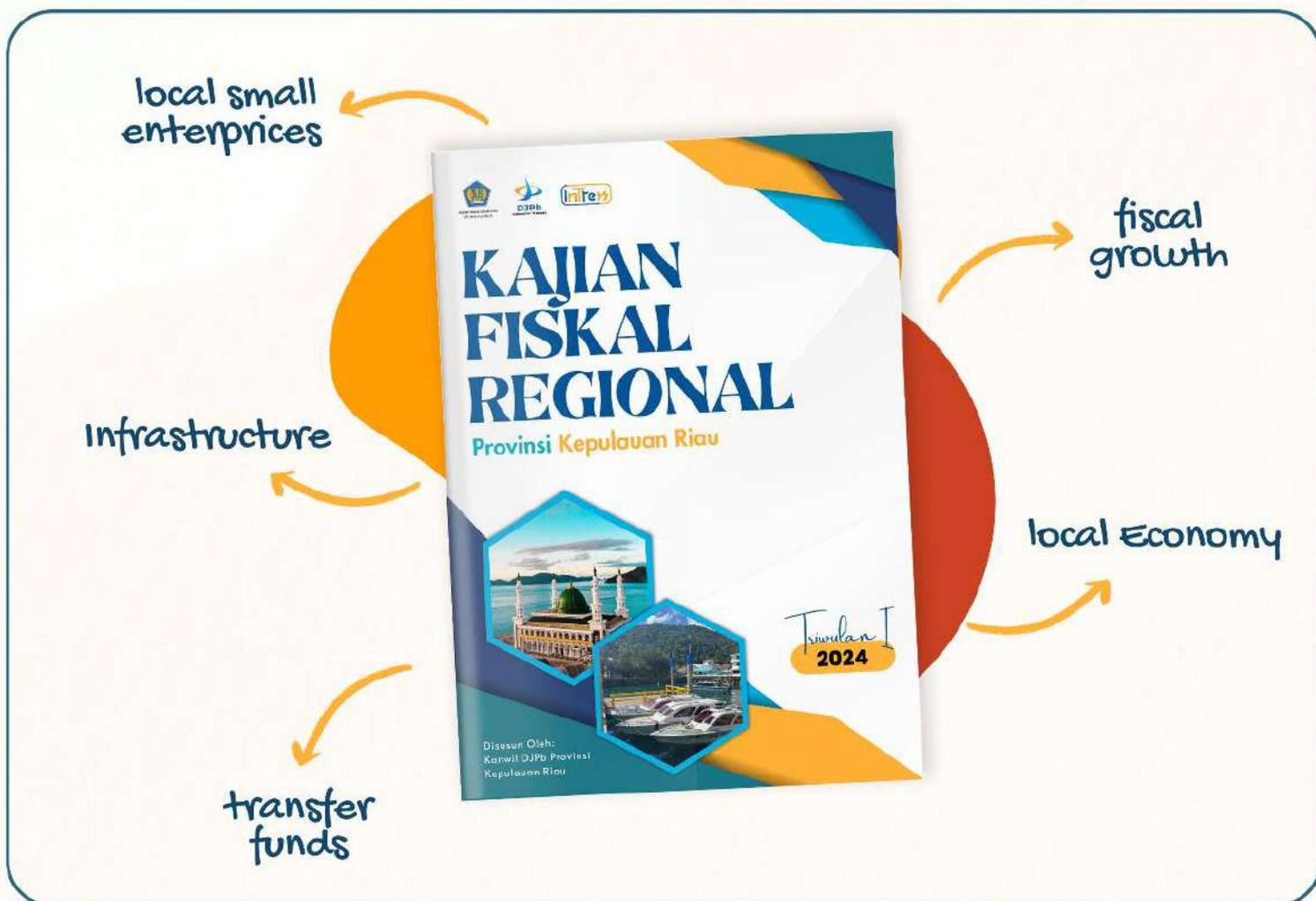
Erika Krissanta

Muhammad Rizki Firdaus



Design dan Layout
Erika Krissanta

Pergi ke Batam lewat pelabuhan..
Sampai di Batam tidak lupa membeli baju..
KFR Triwulan I 2024 kami persembahkan..
Semoga bermangfaat dan mendorong Kepri Jaya..



Korespondensi
Bidang Pembinaan Pelaksanaan Anggaran II
Kanwil DJPb Prov. Kepulauan Riau
Jalan Sultan Muhammad Syah Dompok
Kota Tanjungpinang, Prov. Kep. Riau, 29124
djpb.kemenkeu.go.id/kanwil/kepri/

Find Us:

 @djpbkepri
 @djpbkepri
 Kanwil DJPb
Kepulauan Riau

Indra Soeparjanto

Kepala Kanwil DJPb
Provinsi Kepulauan Riau



Kata Pengantar

Kepala Kanwil DJPb Provinsi Kepulauan Riau

Para Stakeholders dan Pembaca yang terhormat,

Segenap puji dan syukur dipanjatkan kepada Allah SWT atas limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga Kajian Fiskal Regional (KFR) Triwulan I Tahun 2024 dapat diselesaikan dengan baik dan tepat waktu. KFR merupakan aktivitas telaah makro pelaksanaan anggaran yang menjadi salah satu output pelaksanaan tugas dan fungsi Kanwil Ditjen Perbendaharaan (DJPb) untuk mengkaji keterkaitan antara implementasi kebijakan fiskal dengan pencapaian output dan outcome yang terwujud dalam capaian indikator perekonomian dan kesejahteraan masyarakat.

KFR diharapkan dapat memberikan sumbangsih pemikiran untuk pembangunan perekonomian daerah dan menjadi referensi yang kredibel atas implementasi kebijakan fiskal di daerah untuk peningkatan kualitas tata kelola fiskal pusat dan daerah.

Penyusunan kajian ini juga akan meningkatkan sinergi antar stakeholders untuk bersama-sama berkontribusi dalam mendukung pertumbuhan perekonomian di Provinsi Kepulauan Riau. KFR Triwulan I Tahun 2024 mencakup informasi Perkembangan Ekonomi Regional, Kinerja Fiskal Regional (APBN, APBD dan Konsolidasian), serta analisis tematik atas "Efektivitas Belanja Pembangunan Infrastruktur konektivitas".

Kami menyampaikan apresiasi dan penghargaan yang sebesar-besarnya kepada para pihak yang telah mendukung penyusunan KFR ini, terutama kepada Gubernur Kepulauan Riau, Kanwil DJP Provinsi Kepulauan Riau, Kanwil DJBC Khusus Provinsi Kepulauan Riau, KPU BC Batam, KPKNL Batam, BPS Provinsi Kepulauan Riau, Kantor Perwakilan BI Provinsi Kepulauan Riau, OJK Provinsi Kepulauan Riau, Dr. Suyono Saputro selaku Local Expert dan akademisi dari Universitas Internasional Batam, dan seluruh jajaran pemerintah daerah lingkup Provinsi Kepulauan Riau. Kami berharap kedepannya sinergi yang telah terbangun dengan baik ini dapat semakin ditingkatkan.

Kami menyadari bahwa dalam penyusunan maupun pelaporan KFR masih terdapat kekurangan dan kelemahan, oleh karena itu kami sangat mengharapkan saran dan masukan yang konstruktif untuk peningkatan kualitas kajian kedepannya. Besar harapan kami bahwa KFR yang disusun dapat memberikan manfaat untuk kemajuan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat Provinsi Kepulauan Riau.

Tanjungpinang, Mei 2024

Ditandatangani secara elektronik
Indra Soeparjanto



Table of Content

DAFTAR ISI

#	Pengantar			
	Kata Pengantar	i	Daftar Gambar	vi
	Daftar Isi	ii	Daftar Istilah	vii
	Daftar Tabel	iii	Dashboard	xiii
	Daftar Grafik	iv	Ringkasan Eksekutif	xvii
1	BAB I			
	Analisis Ekonomi Regional			01
	Analisis Indikator Makro Ekonomi			01
	Analisis Indikator Kesejahteraan			07
2	BAB II			
	Analisis Fiskal Regional			16
	Analisis Laporan Realisasi Anggaran			16
	Pelaksanaan Anggaran Konsolidasian Triwulan I 2024			49
	Analisis Neraca Pemerintah Pusat-Tingkat Wilayah			50
3	BAB III			
	Pengembangan Ekonomi Daerah			56
	Pendahuluan			56
	Kategori UMKM			57
	Hasil Profiling dan Analisis UMKM Binaan			58
4	BAB IV			
	Analisis Tematik: Efektivitas Belanja Pembangunan Infrastruktur Konektivitas			65
	Analisis Perkembangan Belanja Dukungan Infrastruktur Konektivitas			66
	Analisis Atas Capaian Indikator Infrastruktur konektivitas			69
	Analisis Efektivitas Belanja Pembangunan Infrastruktur Konektivitas			71
5	BAB V			
	Kesimpulan dan Rekomendasi			77
	Kesimpulan			77
	Rekomendasi			81
#	Daftar Pustaka			

List of Tables

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 - Inflasi pada Daerah Perhitungan Inflasi di Provinsi Kepri per Maret 2024	4
Tabel 1.2 - Rincian Andil Infasi Bulan Maret 2024 per Komoditas (%yoy)	5
Tabel 2.1 - Pagu dan Realisasi I-Account APBN di Kepri, 2023 s.d. 2024 (dalam miliar rupiah)	16
Tabel 2.2 - Pagu dan Realisasi Penerimaan Perpajakan di Kepri, 2023 s.d. 2024 (Rp Miliar) I-Account (Miliar Rupiah)	18
Tabel 2.3 - Perkembangan Perpajakan di Kepri Triwulan I 2024	19
Tabel 2.4 - Realisasi Perpajakan per Sektor Dominan di Kepri Triwulan I 2024 (Rp Miliar)	20
Tabel 2.5 - Kontribusi Realisasi Pajak Sektoral terhadap PDRB Kepri Triwulan I 2024	21
Tabel 2.6 - Perkembangan Bea dan Cukai di Kepri, Triwulan I 2024 (Rp Miliar)	22
Tabel 2.7 - Realisasi Pajak Sektoral Kanwil DJBC Kepulauan Riau	24
Tabel 2.8 - Realisasi Pajak Sektoral KPU BC Batam	24
Tabel 2.9 - Realisasi Pajak Sektoral KPU BC Batam	25
Tabel 2.10 - Perkembangan Tax Ratio 2021 - 2024	25
Tabel 2.11 - Prognosis Pendapatan Negara s.d. Akhir Tahun	26
Tabel 2.12 - Kontribusi Belanja Pemerintah Triwulan I Tahun 2021-2024 terhadap PDRB (Rp M)	31
Tabel 2.13 - Kontribusi Belanja Pemerintah per Kapita	32
Tabel 2.14 - Analisis Capaian Output Program Strategis Pemerintah	32
Tabel 2.15 - Prognosis Belanja s.d. Akhir Tahun 2024	35
Tabel 2.16 - Pagu dan Realisasi I-Account APBD di Kepri, TW I 2023 dan TW I 2024 (Rp Miliar)	36
Tabel 2.17 - Klaster Kondisi Kemandirian Fiskal	43
Tabel 2.18 - Kontribusi Belanja Daerah terhadap PDRB TW I 2021, 2022, 2023 dan 2024 (Rp miliar)	48
Tabel 2.19 - Realisasi Pelaksanaan Anggaran Konsolidasi, TW I 2023 dan TW I 2024 (Rp miliar)	49
Tabel 2.20 - Realisasi Pelaksanaan Anggaran Konsolidasi, TW I 2023 dan TW I 2024 (Rp miliar)	50
Tabel 2.21 - Belanja Modal Pemerintah Pusat Tingkat Wilayah, TW I 2023 dan TW I 2024	53
Tabel 2.22 - Realisasi PNBPN Tahunan 2021 - 2023	54
Tabel 2.23 - Realisasi PNBPN Triwulanan 2023 - 2024	54
Tabel 2.24 - Pertumbuhan Aset Tetap dan Properti Investasi 2023 - 2024	55
Tabel 3.1 - Hasil Profiling UMKM	61
Tabel 4.1 - Path Coefficients Analisis SEM	73
Tabel 4.2 - Hasil Koefisien Efisiensi DEA	75

List of Graphs

DAFTAR GRAFIK

Grafik 1.1 - Perkembangan Pertumbuhan Ekonomi Kepri Tahun 2019-2024 (%yoy)	1
Grafik 1.2 - Perkembangan Pertumbuhan Ekonomi Kepri Tahun 2019-2024 (%qtq)	1
Grafik 1.3 - Pertumbuhan Ekonomi Regional Sumatera Triwulan I-2024 (%yoy)	1
Grafik 1.4 - Share PDRB Berdasarkan Pengeluaran Triwulan I-2024 (%yoy)	1
Grafik 1.5 - Share PDRB Berdasarkan Lapangan Usaha Triwulan I-2024 (%yoy)	2
Grafik 1.6 - Kontribusi Belanja APBN dan APBD Terhadap Sektor Riil Ekonomi Kepri Triwulan I-2024	3
Grafik 1.7 - Perkembangan Inflasi Kepri Tahun 2022-2024 (%yoy)	4
Grafik 1.8 - Perkembangan Inflasi Kepri Tahun 2022-2024 (%mtm)	5
Grafik 1.9 - Inflasi pada Provinsi di Regional Sumatera per Maret 2024 (%yoy)	5
Grafik 1.10 - Neraca Perdagangan di Provinsi Kepri Tahun 2022-2024 (US\$ Juta/mtm)	6
Grafik 1.11 - Perkembangan Ekspor Provinsi Kepri Bulanan Tahun 2022-2024 (mtm)	6
Grafik 1.12 - Perkembangan Impor Provinsi Kepri Bulanan Tahun 2022-2024 (mtm)	7
Grafik 1.13 - Perkembangan Jumlah Penduduk Miskin Provinsi Kepri Tahun 2019-2023 (ribu jiwa dan %)	7
Grafik 1.14 - Perkembangan Jumlah Penduduk Miskin Provinsi Kepri Berdasarkan Perkotaan dan Pedesaan Tahun 2019-2023 (ribu jiwa dan %)	8
Grafik 1.15 - Perkembangan Persentase Penduduk Miskin Regional Sumatera Tahun 2019-2023 (%)	8
Grafik 1.16 - Perkembangan Angka TPT di Provinsi Kepri Tahun 2020-2024 (%)	9
Grafik 1.17 - Angka TPT Per Provinsi di Regional Sumatera per Februari 2024 (%)	9
Grafik 1.18 - Distribusi dan Perubahan Penyerapan Tenaga Kerja Menurut Sektor Lapangan Usaha (%)	9
Grafik 1.19 - Perkembangan Gini Ratio Provinsi Kepri Tahun 2020-2023	10
Grafik 1.20 - Perkembangan Gini Ratio Regional Sumatera Tahun 2020-2023	10
Grafik 1.21 - Perkembangan Nilai Tukar Petani Provinsi Kepri Tahun 2022-2024 (%yoy)	11
Grafik 1.22 - Perkembangan Nilai Tukar Petani Provinsi Kepri Tahun 2022-2024 (%yoy)	11
Grafik 1.23 - Perkembangan IPM Provinsi Kepri, Nasional, dan Target Tahun 2020-2023	12
Grafik 1.24 - Indeks Pembangunan Manusia Regional Sumatera Tahun 2020-2023	13
Grafik 1.25 - Tren IPM Per Kab/Kota di Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2020-2023	14
Grafik 1.26 - Nilai Indikator Indeks Pembangunan Manusia di Kepri Tahun 2020-2023	14
Grafik 2.1 - Perkembangan Realisasi Pendapatan Negara, 2023 s.d. 2024	17
Grafik 2.2 - Porsi Realisasi Pendapatan Negara, 2024	17
Grafik 2.3 - Realisasi Pendapatan Perpajakan 2023-2024	18
Grafik 2.4 - Realisasi Pendapatan Perpajakan Triwulan I 2024	18
Grafik 2.5 - Perkembangan Tax Ratio 2021 - 2024	26
Grafik 2.6 - Realisasi Belanja 2024	27
Grafik 2.7 - Perbandingan Realisasi BPP dan TKD, 2024	27
Grafik 2.8 - Pagu dan Realisasi Belanja Pemerintah Pusat 2023 - 2024	28
Grafik 2.9 - Pagu dan Realisasi BPP 2023 - 2024 (Rp Miliar)	28
Grafik 2.10 - Komposisi per Jenis Belanja 2024	28

List of Graphs

DAFTAR GRAFIK

Grafik 2.11 - Realisasi Belanja Pemerintah Pusat per Fungsi Triwulan I 2024 (Rp Miliar)	29
Grafik 2.12 - Belanja Berdasarkan K/L (Rp Miliar)	29
Grafik 2.13 - Realisasi Belanja TKD Triwulan I 2024 (Rp Miliar)	30
Grafik 2.14 - Belanja TKD per Pemda 2024	30
Grafik 2.15 - Belanja TKD per Jenis TKD 2024	31
Grafik 2.16 - Pagu dan Realisasi PAD, TW I 2023 dan TW I 2024 (Rp miliar)	39
Grafik 2.17 - Breakdown Realisasi PAD per Kab/Kota, TW I 2023 (Rp miliar)	39
Grafik 2.18 - Pagu dan Realisasi Pendapatan Transfer, TW I 2023 dan TW I 2024 (Rp miliar)	42
Grafik 2.19 - Pagu dan Realisasi Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah, TW I 2023 dan TW I 2024 (Rp miliar)	42
Grafik 2.20 - Tax Ratio Kepri, TW I 2022, 2023, dan 2024	43
Grafik 2.21 - Indeks Kemandirian Fiskal I, 2017 s.d.2023	44
Grafik 2.22 - Indeks Kemandirian Fiskal (IKF) I, Triwulan I 2024	44
Grafik 2.23 - Indeks Kemandirian Fiskal II, 2017 s.d. 2023	45
Grafik 2.24 - Indeks Kemandirian Fiskal (IKF) II, Triwulan I 2024	45
Grafik 2.25 - Breakdown Realisasi Belanja per Kab/Kota, TW I 2024 (Rp miliar)	46
Grafik 4.1 - Pagu Belanja Infrastruktur Terhadap Total Pagu - Kementerian PUPR (Rp M)	67
Grafik 4.2 - Pagu Belanja Infrastruktur Terhadap Total Pagu - Kementerian Perhubungan (Rp M)	67
Grafik 4.3 - Perbandingan Pagu Fisik dan Non Fisik – Tahun 2021 (Rp M)	67
Grafik 4.4 - Perbandingan Pagu Fisik dan Non Fisik – Tahun 2022 (Rp M)	67
Grafik 4.5 - Perbandingan Pagu Fisik dan Non Fisik – Tahun 2023 (Rp M)	68
Grafik 4.6 - Realisasi Belanja Infrastruktur Konektivitas – Kementerian PUPR (Rp M)	68
Grafik 4.7 - Realisasi Belanja Infrastruktur Konektivitas – Kementerian Perhubungan (Rp M)	68
Grafik 4.8 - Perkembangan Konektivitas Darat Tahun 2020-2023 – Kondisi Jalan Provinsi Kepri	69
Grafik 4.9 - Perkembangan Konektivitas Jalan Tahun 2020-2023 – Kemantapan Jalan Provinsi Kepri	69
Grafik 4.10 - Perkembangan Konektivitas Laut Tahun 2019-2022 – Pelabuhan Yang Tidak Diusahakan	70
Grafik 4.11 - Perkembangan Konektivitas Laut Tahun 2019-2022 – Kapal Penjaga dan Patroli	70
Grafik 4.12 - Perkembangan Konektivitas Udara Tahun 2019 - 2022 – Pembangunan Bandara	70
Grafik 4.13 - Perkembangan Konektivitas Udara Tahun 2019 - 2022 – Penumpang Pesawat Domestik (jiwa)	70
Grafik 4.14 - Perkembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi Tahun 2019-2022 – Indeks Pembangunan TIK	71
Grafik 4.15 - Perkembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi Tahun 2021-2022 – Indeks Penguatan TIK	71
Grafik 4.16 - Grafik Scatter Plot – Belanja Konektivitas Tahun 2021-2023 – Kondisi Baik	72
Grafik 4.17 - Grafik Scatter Plot – Belanja Konektivitas Tahun 2021-2023 – Kondisi Sedang	72
Grafik 4.18 - Grafik Scatter Plot – Hubungan Belanja Infrastruktur Jalan dengan Peningkatan Jalan Kondisi Mantap Tahun 2020-2023	74

List of Pictures

DAFTAR GAMBAR

Gambar 3.1 - Profiling UMKM oleh Kanwil DJPb Kepri (1)	59
Gambar 3.2 - Profiling UMKM oleh Kanwil DJPb Kepri (2)	59
Gambar 3.3 - Profiling UMKM oleh KPPN Tanjungpinang (1)	59
Gambar 3.4 - Profiling UMKM oleh KPPN Tanjungpinang (2)	60
Gambar 3.5 - Profiling UMKM oleh KPPN Batam (1)	60
Gambar 3.6 - Profiling UMKM oleh KPPN Batam (2)	60
Gambar 4.1 – Alur Pengaruh Antar Variabel dalam Analisis Efektivitas Pembangunan Jalan di Provinsi Kepri	73
Gambar 4.2 – Alur Inner Model Evaluation	73

Abbreviations

DAFTAR ISTILAH

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah di Indonesia yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. APBD berisi daftar sistematis dan terperinci yang memuat rencana penerimaan dan pengeluaran daerah selama satu tahun anggaran (1 Januari - 31 Desember). APBD, perubahan APBD (APBD-P), dan pertanggungjawaban APBD setiap tahun ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan negara Indonesia yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat. APBN berisi daftar sistematis dan terperinci yang memuat rencana penerimaan dan pengeluaran negara selama satu tahun anggaran (1 Januari - 31 Desember). APBN, perubahan APBN (APBN-P), dan pertanggungjawaban APBN setiap tahun ditetapkan dengan Undang-Undang.

Badan Layanan Umum (BLU) instansi di lingkungan Pemerintah Pusat yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktifitas. BLU memiliki fleksibilitas pengelolaan keuangan berupa keleluasaan untuk menggunakan langsung pendapatannya (tanpa harus menyetor ke Rekening Kas Umum Negara/RKUN) dan menetapkan praktek-praktek bisnis yang sehat dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. (Contoh: BLU Perguruan Tinggi Negeri, BLU Rumah Sakit Pemerintah, dan BLUD Pengelola Dana Bergulir).

Bea Masuk (BM)/Impor Duty adalah pungutan negara berdasarkan undang-undang yang dikenakan terhadap barang yang memasuki daerah pabean. Pengenaan bea masuk biasanya memiliki tujuan untuk meningkatkan pendapatan pemerintah, memberikan proteksi terhadap produksi local, dan/atau untuk menghukum negara tertentu dengan mengenakan tarif yang sangat tinggi untuk negara tersebut.

Bea Keluar (BK)/Export Duty adalah pungutan negara berdasarkan undang-undang yang dikenakan terhadap barang yang keluar dari daerah pabean. Saat ini, pengenaan bea keluar sudah jarang diterapkan karena tidak sejalan dengan kebijakan berorientasi ekspor yang membutuhkan harga kompetitif di pasar internasional.

Cukai adalah pungutan negara yang dikenakan terhadap barang-barang tertentu yang mempunyai sifat dan karakteristik tertentu, yaitu: konsumsinya perlu dikendalikan, peredarannya perlu diawasi, pemakaiannya dapat menimbulkan dampak negatif bagi masyarakat atau lingkungan hidup, atau pemakaiannya perlu pembebanan pungutan negara demi keadilan dan keseimbangan (Contoh: minuman beralkohol dan tembakau).

Cumulative to Cumulative (C to C) adalah metode perbandingan dua peristiwa yang diukur dengan basis kumulatif waktu. (Contoh: penerimaan pemerintah pada Triwulan I s.d Triwulan IV 2022 dibandingkan dengan penerimaan pemerintah pada Triwulan I s.d Triwulan IV 2021)

Dana Abadi Daerah adalah dana yang bersumber dari APBD yang bersifat abadi dan dana hasil pengelolaannya dapat digunakan untuk Belanja Daerah dengan tidak mengurangi dana pokok

Dana Alokasi Khusus Fisik (DAK Fisik) dana pada ABPN yang dialokasikan untuk ditransfer kepada pemerintah daerah dengan penggunaan yang sudah ditentukan sebelumnya dan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan pembangunan fisik. (Contoh penggunaan: gedung sekolah, infrastruktur irigasi, energy skala kecil, prasarana pemerintah daerah, infrastruktur jalan, transportasi perdesaan sarpras pasar, dan lain sebagainya).

Abbreviations

DAFTAR ISTILAH

Dana Alokasi Khusus Non Fisik (DAK Non Fisik) dana pada ABPN yang dialokasikan untuk ditransfer kepada pemerintah daerah dengan penggunaan yang sudah ditentukan sebelumnya dan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan non fisik. (Contoh penggunaan: bantuan operasional sekolah (BOS), tunjangan profesi guru PNSD, bantuan operasional kesehatan, dan lain sebagainya).

Dana Alokasi Umum (DAU) adalah dana transfer yang dialokasikan kepada setiap Daerah Otonom (Provinsi/Kabupaten/Kota) di Indonesia setiap tahunnya sebagai dana pembangunan. DAU merupakan salah satu komponen belanja pada APBN, dan menjadi salah satu komponen pendapatan pada APBD. Tujuan DAU adalah sebagai pemerataan kemampuan keuangan antardaerah untuk mendanai kebutuhan Daerah Otonom dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.

Dana Bagi Hasil (DBH) adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah berdasarkan angka persentase tertentu untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Dana Bagi Hasil terdiri dari DBH Pajak dan DBH Sumber Daya Alam (SDA).

Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa dan Desa Adat yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, serta pemberdayaan masyarakat, dan kemasyarakatan. Kenario awal Dana Desa ini diberikan dengan mengganti program pemerintah yang dulunya disebut PNPM,

Dana Insentif Daerah (DID) adalah dana yang dialokasikan dalam APBN kepada daerah tertentu berdasarkan kriteria tertentu dengan tujuan untuk memberikan penghargaan atas pencapaian kinerja tertentu

Defisit/Surplus Anggaran adalah kebijakan atau realisasi pengeluaran dan penerimaan negara. Pengeluaran lebih besar dari penerimaan disebut sebagai defisit anggaran, sedangkan pengeluaran lebih kecil dari penerimaan disebut sebagai surplus anggaran.

Data Envelopment Analysis (DEA) adalah suatu metodologi yang digunakan untuk mengevaluasi efisiensi dari suatu unit pengambilan keputusan (unit kerja) yang bertanggung jawab menggunakan sejumlah input untuk memperoleh suatu output yang ditargetkan.

Free Trade Zone (FTZ)/Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas (Kawasan Bebas) merupakan kawasan yang berada dalam wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia yang terpisah dari daerah pabean, sehingga bebas dari pengenaan Bea Masuk, PPN, PPnBM, dan Cukai.

Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan (HPKD) merupakan pendapatan asli daerah (PAD) yang berasal dari bagian laba atas penyertaan modal pada BUMD, BUMN, Perusahaan Swasta atau kelompok usaha masyarakat.

High Base-effect adalah kecenderungan pertumbuhan dari nilai yang kondisi awalnya tinggi.

Indeks Pembangunan Manusia/Human Development Index (IPM/HDI) menjelaskan bagaimana penduduk dapat mengakses hasil pembangunan dalam memperoleh pendapatan, kesehatan, pendidikan, dan sebagainya. IPM dibentuk oleh 3 dimensi dasar yakni umur panjang dan hidup sehat, pengetahuan, serta standar hidup layak.

Abbreviations

DAFTAR ISTILAH

Industri Kecil adalah industri yang memiliki karyawan maksimal 19 orang, memiliki nilai investasi kurang dari 1 miliar rupiah, tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.

Industri Menengah adalah industri yang memiliki karyawan maksimal 19 orang dan nilai investasi minimal 1 miliar rupiah atau memiliki karyawan minimal 20 orang dan nilai investasi maksimal 15 miliar rupiah.

Inflasi adalah suatu proses meningkatnya harga-harga secara umum dan terus- menerus (continue) berkaitan dengan mekanisme pasar yang dapat disebabkan oleh berbagai faktor, antara lain, konsumsi masyarakat yang meningkat, berlebihnya likuiditas di pasar yang memicu konsumsi atau bahkan spekulasi, sampai termasuk juga akibat adanya ketidaklancaran distribusi barang.

Inflasi Tahun Kalender adalah perubahan kenaikan tingkat harga secara umum dari barang/jasa, atau merosotnya daya beli atau nilai riil uang selama satu tahun kalender (dari bulan Januari tahun ini sampai dengan bulan ini tahun ini). Ini dihitung dari persentase perubahan IHK bulan ini tahun ini terhadap IHK bulan Desember tahun lalu.

Kawasan Ekonomi Khusus (KEK)/Special Economic Zone (SEZ) adalah kawasan dengan batas tertentu dalam wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia yang ditetapkan untuk menyelenggarakan fungsi perekonomian dan memperoleh fasilitas tertentu..

Ketimpangan Fiskal Vertikal adalah perbedaan kapasitas/potensi fiskal dan kebutuhan fiskal antara pemerintah pusat dengan tingkat pemerintahan yang lebih rendah.

Ketimpangan Fiskal Horizontal adalah perbedaan kapasitas/potensi fiskal dan kebutuhan fiskal antara daerah satu dengan daerah lainnya.

Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah (LLPAD) merupakan pos penganggaran penerimaan asli daerah yang tidak termasuk ke dalam pajak daerah, retribusi daerah, dan HPKD. LLPAD meliputi jasa giro, bunga, tuntutan ganti rugi, denda pajak, denda retribusi, pendapatan BLUD, dan lain sebagainya.

Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah (LLPD) merupakan pos penerimaan Pemda untuk menampung penerimaan selain PAD dan Dana Perimbangan. Pos LLPD meliputi hibah, dana darurat, DBH dari provinsi, bantuan keuangan, dan lain sebagainya.

Month to Month (mtm) adalah metode perbandingan dua peristiwa yang diukur dengan basis bulanan. (Contoh: penerimaan pemerintah pada bulan September 2022 dibandingkan dengan penerimaan pemerintah pada bulan Agustus 2022.

Obligasi Daerah adalah surat berharga berupa pengakuan utang yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah.

Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)/Property Tax adalah pajak yang dipungut atas tanah dan bangunan karena adanya keuntungan dan/atau kedudukan sosial ekonomi yang lebih baik bagi orang atau badan yang mempunyai suatu hak atasnya atau memperoleh manfaat dari padanya.

Pajak Daerah/Local Tax adalah pajak yang kewenangan pemungutannya berada di tangan Pemerintah Daerah. Pajak daerah meliputi pajak restoran, pajak hiburan, pajak reklame, pajak parkir dan sebagainya.

Pajak Penghasilan (PPH)/Income Tax adalah pajak yang dibebankan pada penghasilan perorangan, perusahaan atau badan hukum lainnya.

Abbreviations

DAFTAR ISTILAH

Pajak Perdagangan Internasional (PPI) adalah semua penerimaan negara yang berasal dari bea masuk dan bea keluar.

Pajak Pertambahan Nilai (PPN)/Value Added Tax (VAT)/Goods and Services Tax (GST) adalah pajak yang dikenakan atas setiap pertambahan nilai dari barang atau jasa dalam peredarannya dari produsen ke konsumen. PPN termasuk jenis pajak tidak langsung, maksudnya pajak tersebut disetor oleh pihak lain (pedagang) yang bukan penanggung pajak atau dengan kata lain, penanggung pajak (konsumen akhir) tidak menyetorkan langsung pajak yang ia tanggung.

Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) adalah pengeluaran untuk barang modal yang mempunyai umur pemakaian lebih dari satu tahun dan tidak merupakan barang konsumsi. PMTB mencakup bangunan tempat tinggal dan bukan tempat tinggal, bangunan lain seperti jalan dan bandara, serta mesin dan peralatan.

Pembiayaan Utang Daerah adalah setiap penerimaan Daerah yang harus dibayar kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan kelompok pendapatan pemerintah daerah yang terdiri dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan LLPAD.

Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Menurut UU no. 20 tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak, PNBP adalah seluruh penerimaan Pemerintah Pusat yang tidak berasal dari penerimaan perpajakan.

Pengeluaran Konsumsi - Lembaga Non Profit Yang Melayani Rumah Tangga (PK-LNPRT) merupakan nilai output non-pasar yang dihasilkan oleh LNPRT.

Pengeluaran Konsumsi – Rumah Tangga (PK-RT) adalah pengeluaran atas barang dan jasa oleh rumah tangga untuk tujuan konsumsi.

Pinjaman Daerah adalah pembiayaan utang daerah yang diikat dalam suatu perjanjian pinjaman dan bukan dalam bentuk surat berharga, yang mengakibatkan daerah menerima sejumlah uang atau menerima manfaat yang bernilai uang dari pihak lain, sehingga daerah tersebut dibebani kewajiban untuk membayar kembali.

Produk Domestik Bruto (PDB) adalah nilai tambah dari semua barang dan jasa (output) yang diproduksi oleh suatu negara pada periode waktu tertentu.

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) adalah nilai tambah dari semua barang dan jasa (output) yang diproduksi oleh suatu wilayah (Provinsi/Kabupaten/Kota) pada periode waktu tertentu

Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku (PDRB ADHB) adalah PDRB yang menghitung nilai barang dan jasanya berdasarkan harga berlaku.

Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan (PDRB ADHK) adalah PDRB yang menghitung nilai barang dan jasanya dengan menggunakan harga tahun tertentu sebagai dasar perhitungannya. Dengan kata lain, PDRB ADHK murni menghitung nilai tambah output tanpa memperhitungkan kenaikan/penurunan harga.

Abbreviations

DAFTAR ISTILAH

Produk Domestik Regional Bruto per Kapita (PDRB/Kapita) merupakan nilai PDRB dibagi dengan jumlah penduduk pada tahun yang sama. PDRB/Kapita digunakan sebagai indikator standar hidup penduduk suatu wilayah.

Quarter to Quarter (qtq) mengacu pada perubahan atau pertumbuhan antara satu kuartal dengan kuartal sebelumnya. Contohnya adalah pada saat melihat pertumbuhan PDRB dari Triwulan II ke Triwulan III.

Retribusi Daerah merupakan pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan pribadi atau badan. Retribusi daerah meliputi retribusi izin mendirikan bangunan (IMB), retribusi parkir, retribusi pelayanan pasar, retribusi terminal dan sebagainya.

Satuan Kerja (Satker) adalah Kuasa Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Barang yang merupakan bagian dari suatu unit organisasi pada Kementerian Negara/Lembaga yang melaksanakan satu atau beberapa kegiatan dari suatu program. Dalam konteks akuntansi, kata Satker ini bisa dipersamakan dengan entitas.

Scatterplot adalah diagram matematika yang menggunakan koordinat Cartesien untuk menampilkan nilai dari dua variabel yang khas dalam satu kumpulan data.

Sinergi Pendanaan adalah sinergi sumber-sumber pendanaan dari APBD dan selain APBD dalam rangka pelaksanaan program prioritas nasional dan/atau daerah.

Sisa Lebih/Kurang Perhitungan Anggaran (SiLPA/SiKPA) adalah selisih lebih/kurang antara realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama satu periode anggaran. Selisih positif (sisa lebih) dapat digunakan untuk membiayai defisit anggaran di tahun anggaran berikutnya.

Skala Ekonomi/Economy of Scale merupakan fenomena turunnya biaya produksi per unit dari suatu perusahaan yang terjadi bersamaan dengan meningkatnya jumlah produksi (output). Dalam konteks industrialisasi, skala ekonomi menciptakan efisiensi bagi suatu unit produksi sampai dengan titik tertentu.

Sukuk Daerah adalah surat berharga berdasarkan prinsip syariah sebagai bukti atas bagian penyertaan aset Sukuk Daerah yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah.

Tax Ratio adalah rasio yang membandingkan antara realisasi pajak dengan PDB/PDRB pada periode yang sama. Rasio tersebut menjadi indikator keberhasilan penggalan potensi pajak.

Tingkat Kemiskinan/Persentase Penduduk Miskin/Head Count Index (HCI-Po) adalah persentase penduduk yang berada di bawah Garis Kemiskinan (GK).

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) adalah suatu indikator ketenagakerjaan yang memberikan gambaran tentang penduduk yang aktif secara ekonomi dalam kegiatan sehari-hari merujuk pada suatu waktu dalam periode survei. TPAK dihitung dengan cara membagi jumlah angkatan kerja dengan jumlah penduduk berusia 15 tahun keatas. Penduduk yang termasuk angkatan kerja adalah penduduk usia kerja (15 tahun dan lebih) yang bekerja, atau punya pekerjaan namun sementara tidak bekerja dan pengangguran. Penduduk yang termasuk bukan angkatan kerja adalah penduduk usia kerja (15 tahun dan lebih) yang masih sekolah, mengurus rumah tangga atau melaksanakan kegiatan lainnya selain kegiatan pribadi.

Abbreviations

DAFTAR ISTILAH

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) adalah indikasi tentang penduduk usia kerja yang termasuk dalam kelompok pengangguran. Kegunaan dari indikator pengangguran terbuka ini baik dalam satuan unit (orang) maupun persen berguna sebagai acuan pemerintah bagi pembukaan lapangan kerja baru. TPT dihitung dengan cara membagi jumlah pengangguran dengan jumlah angkatan kerja.

Tingkat Kesempatan Kerja (TKK) adalah ukuran yang digunakan untuk menunjukkan seberapa banyak peluang pekerjaan yang tersedia dalam suatu wilayah atau industri pada suatu waktu tertentu.

Tugas Pembantuan (TP) adalah penugasan dari Pemerintah kepada daerah dan/atau desa atau sebutan lain dengan kewajiban melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaannya kepada yang menugaskan. Untuk pelaksanaannya, diberikan dana tugas pembantuan dari APBN yang dilaksanakan oleh daerah dan desa yang mencakup semua penerimaan dan pengeluaran.

Vokasional dalam konteks pendidikan/pelatihan merupakan pendidikan/pelatihan yang lebih terfokus pada sisi keahlian atau kemahiran praktis dalam berkerja dibandingkan sisi akademik. Di era cepatnya perubahan teknologi seperti saat ini, kebutuhan akan keahlian seorang pekerja seringkali berubah-ubah sehingga permintaan akan pendidikan/pelatihan vokasional terus meningkat.

Volatilitas/Volatility dalam konteks ekonomi merupakan kecenderungan suatu variabel untuk berubah-ubah. Semakin tinggi volatilitas, semakin sering suatu variabel berubah-ubah.

Year on Year (yoy) adalah metode perbandingan dua peristiwa yang diukur dengan basis tahunan. (Contoh: penerimaan pemerintah pada triwulan III 2022 dibandingkan dengan penerimaan pemerintah pada triwulan III 2021).

Path Coefficients merupakan ukuran statistik yang digunakan dalam analisis jalur (path analysis) dan model struktural untuk menunjukkan kekuatan dan arah hubungan antara variabel-variabel dalam model.

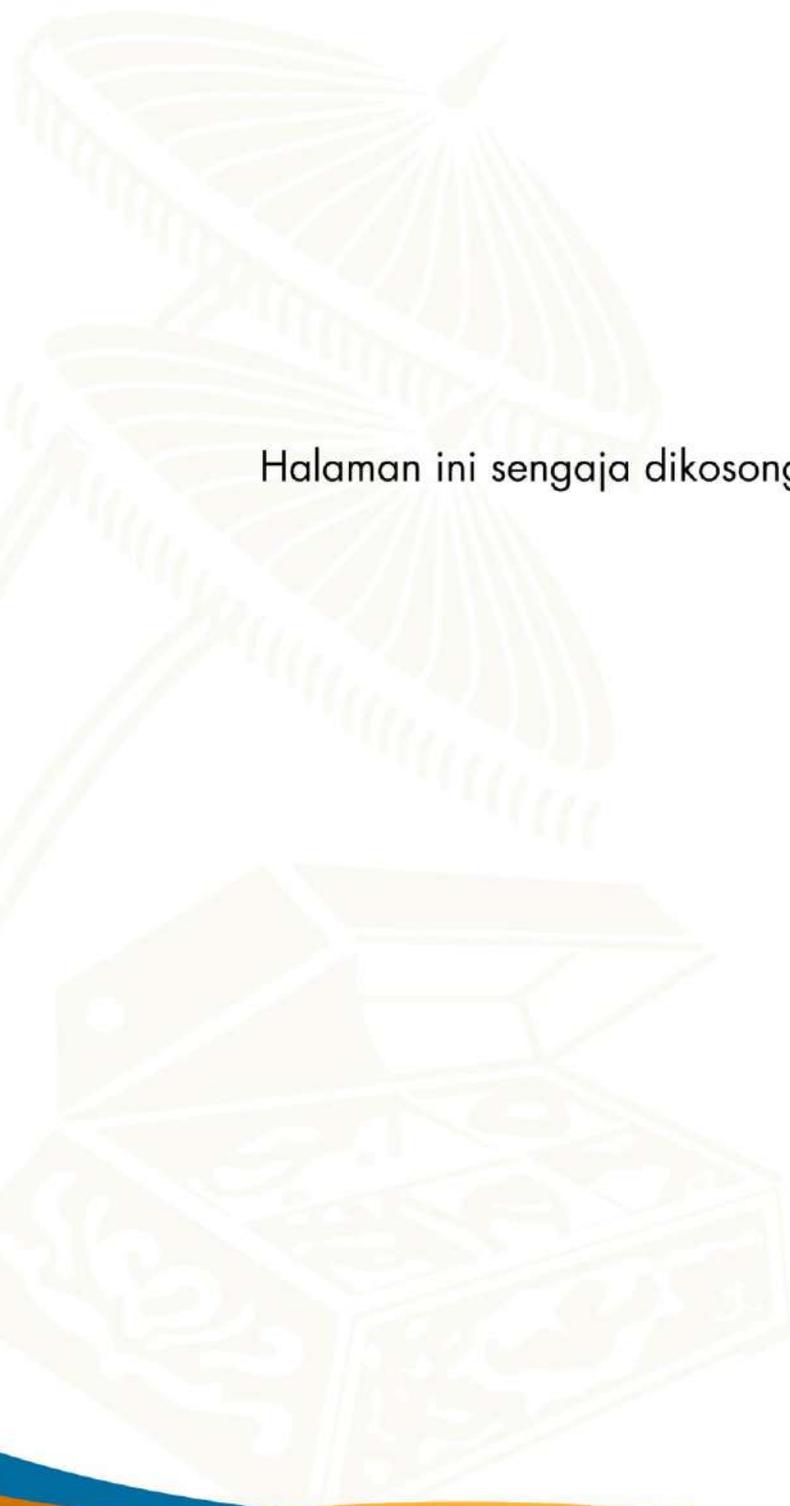
P-value adalah ukuran yang digunakan dalam statistik untuk menentukan seberapa signifikan hasil suatu uji statistik.

Structural Equation Modeling (SEM) adalah sebuah teknik statistik yang digunakan untuk menguji hubungan antara variabel-variabel yang kompleks dalam suatu model secara simultan.

Random Effect Model (REM) merupakan pendekatan untuk mengestimasi data panel yang residual memiliki kemungkinan saling berhubungan antar waktu dan individu.

Fixed Effect Model (FEM) merupakan pendekatan bahwa suatu objek memiliki konstanta yang tetap besarnya untuk berbagai periode waktu.

Halaman ini sengaja dikosongkan



DASHBOARD

Perkembangan Ekonomi Regional



Dashb

Indikator Makro Ekonomi



Pertumbuhan Ekonomi **↑ 5,01%** YoY



Nilai PDRB

Atas Dasar Harga Berlaku

Rp85,60 T

Atas Dasar Harga Konstan

Rp51,25 T

Distribusi PDRB di Regional Sumatera **7,41%**

Share by Production (%yoy)



Industri Pengolahan 41,47%



Konstruksi 20,57%



Pertambangan & Pengalihan 9,78%

Share by Expenditure (%yoy)



PMTB 44,62%



PK-RT 42,36%



Net Ekspor 10,82%

Tingkat Inflasi **↑ 0,46% (yoy)**
↑ 3,37% (mtm)

Beras 0,42% Angkutan Udara 0,32% Cabai Merah 0,31%

Nilai Tukar Petani



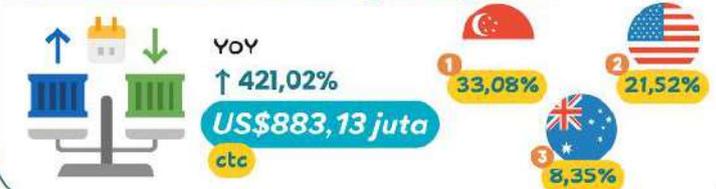
Nilai Tukar Nelayan



Nilai Ekspor **↓ 10,05** YoY
US\$4.587,40 juta ctc

Nilai Impor **↓ 24,87%** YoY
US\$3.704,27 juta ctc

Neraca Perdagangan



Tingkat Pengangguran **6,94%**



Tingkat Kemiskinan



Tingkat Ketimpangan



Indeks Pembangunan Manusia





DASHBOARD

Kinerja Fiskal Regional



Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara **APBN**



Realisasi Pendapatan YoY ↑ **20,15%**

20,13% Rp2.847,02 Miliar

Pajak Dalam Negeri
Pajak Internasional



Pendapatan Perpajakan

Rp2.217,51 M
↑ 4,93% YoY

Pendapatan Negara Bukan Pajak

Rp629,51 M
↑ 145,62% YoY

Pendapatan BLU
PNBP Lainnya

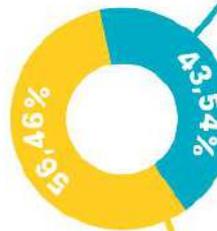


Realisasi Belanja YoY ↑ **22,80%**

19,68% Rp3.459,78 Miliar

Belanja Pemerintah Pusat YoY ↑ **53,25%**
Rp1.506,43 M

Belanja Pegawai Rp 573,67 M
Belanja Barang Rp714,46 M
Belanja Modal Rp215,39 M



Transfer ke Daerah YoY ↑ **6,49%**
Rp1.953,35 M

Transfer ke Daerah Rp1.846,69 M
Dana Desa Rp102,83 M
Dana Insentif Fiskal Rp3,84 M



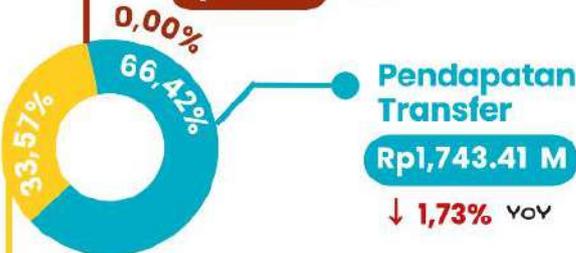
APBD Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah



Realisasi Pendapatan YoY ↑ **0,47%**

18,07% Rp2,624.58 Miliar

Lain-Lain Pendapatan yang Sah
Rp0,00 M ↓ ∞ YoY



Pendapatan Transfer
Rp1,743.41 M
↓ 1,73% YoY

Pendapatan Asli Daerah
Rp881,17 M ↓ 7,51% YoY



Realisasi Belanja YoY ↑ **3,03%**

11,73% Rp1.787,46 Miliar

Belanja Tak Terduga

Rp0,31 M ↓ 70,82% YoY

Belanja Transfer

Rp91,88 M ↓ 61,76% YoY



Belanja Operasi

Rp1.571,31 M ↑ 11,21% YoY

Belanja Modal

Rp123, 97 M ↑ 53,55% YoY



DASHBOARD

Pengembangan Ekonomi Daerah



Profiling UMKM Binaan Kanwil DJPb

Let's support our local enterprices!



From

6 UMKM Rintisan Binaan Kanwil

- Fenny Y. - **Craft Industry**
- Ema K. - **Food Industry**
- Farisa A - **Food Industry**
- Nissa - **Food Industry**
- Ratna S.D - **Food Industry**
- Maryanti - **Food Industry**



Result..



Semua UMKM Rintisan belum memiliki/pernah/memahami:

- Rekening Usaha terpisah
- Laporan Keuangan Usaha
- Ikut Bazaar/Pameran Dalam negeri
- Tata Cara Ekspor
- Akses ke Pembeli Luar Negeri



Beberapa UMKM telah:

- Pencatatan Usaha Sederhana (2/6)
- Akses Pembiayaan Usaha Formal (1/6)
- Pemasaran Online Luar Kota (1/6)
- Punya NIP (4/6)
- Punya NPWP (3/6)
- Produk Berorientasi Ekspor (1/6)



Kebutuhan

UMKM Rintisan



Pelatihan Pembukuan Keuangan



Literasi Ekspor



Sertifikasi Halal



Kinerja Analisis Tematik

Efektivitas Belanja Pembangunan Infrastruktur Konektivitas

Highlight!

Belanja APBN dan APBD untuk Menghubungkan Kepri!



Perkembangan Belanja Infrastruktur 2023



Rp1.427,73 M ↑ 185% YoY

Pagu Kementerian PUPR
65,43% dari Pagu Total

Pagu Kementerian Perhubungan
66,53% dari Pagu Total

Rp1.080,49 M 93,67%

Rp347,24 M 82,96%

↑ 191,86% YoY

↑ 165,48% YoY



Perkembangan Infrastruktur 2019-2023



Konektivitas Darat

- Jalan Rusak Berat Turun 94,58% (yoy)
- Jalan Kondisi Mantap Naik 9,82% (yoy)



Konektivitas Laut

- Pembangunan Pelabuhan Yang Tidak Diusahakan Bertambah 2 Pelabuhan
- Kapal Penjagaan dan Patroli Berkurang 6 Buah



Konektivitas Udara

- Penambahan 2 Bandara
- Penumpang Pesawat Domestik Tumbuh 65,96% (yoy)



Pengembangan Teknologi

- Indeks Pembangunan TIK Naik 1,67% (yoy)
- Indeks Penguatan TIK naik 1,53% (yoy)

Data Envelopment Analysis (DEA)

- Belanja Infrastruktur paling efisien di Provinsi Kepri yaitu pada tahun 2020, dengan bertambahnya jalan kondisi Mantap sepanjang 56,47 km, dari sebelumnya sepanjang 589,09 km pada 2019, menjadi 645,56 km pada 2020.
- Tahun 2023, Belanja Infrastruktur sebesar 1.024,62 miliar, meningkatkan jalan kondisi Mantap hanya sepanjang 1,46 km, dari sebelumnya sepanjang 722,70 km pada tahun 2022, menjadi 724,16 km pada tahun 2023. Menunjukkan belanja infrastruktur yang kurang efisien apabila dibandingkan terhadap output yang dihasilkan.
- Keterbatasan pada analisis DEA, yaitu tidak dapat mengukur kualitas yang dihasilkan dari output belanja, dan tidak menggunakan perpetual inventory method dalam perhitungannya.

Structural Equation Modeling (SEM)

- Berdasarkan hasil analisis metode SEM, belanja infrastruktur konektivitas di Provinsi Kepri telah efektif dalam meningkatkan kondisi kemandapan jalan.
- Belanja infrastruktur konektivitas memiliki pengaruh signifikan positif terhadap kondisi jalan di Kepri
- Setiap peningkatan belanja infrastruktur konektivitas berdampak pada meningkatnya jalan dengan kondisi baik dan kondisi sedang.
- Hasil analisis tersebut sejalan dengan grafik scatterplot yang menunjukkan bahwa belanja infrastruktur konektivitas di Kepri berdampak pada peningkatan jalan dengan kondisi baik dan kondisi sedang.



Ringkasan Eksekutif

Analisis Ekonomi Regional

Pertumbuhan Ekonomi di Kepri pada triwulan 1 2024 tetap terjaga ditengah ketidakpastian global.

Perbaikan Tingkat Kemiskinan, Tingkat Pengangguran, Rasio Gini, dan IPM tunjukkan kinerja positif ekonomi dan kesejahteraan di Provinsi Kepri.

Kinerja ekonomi Kepulauan Riau triwulan I 2024 tumbuh positif 5,01 persen (yoy) dan menjadi provinsi dengan pertumbuhan ekonomi tertinggi ke-dua di regional Sumatera. Dengan PDRB ADHK sebesar Rp87,97 triliun, perkembangan ekonomi di Kepri dari sisi Komponen Pengeluaran ditopang oleh peningkatan Pembentukan Modal Tetap Bruto yang berkontribusi sebesar 44,62 persen dari total PDRB. Dari sisi Lapangan Usaha, PDRB di Kepri didorong oleh pertumbuhan Industri Pengolahan yang menyumbang 41,47 persen dari total PDRB di triwulan I 2024.

Indeks Harga Konsumsi (IHK) Provinsi Kepri pada bulan Maret 2024 menunjukkan terjadinya inflasi sebesar 3,37 persen (yoy), lebih rendah dibandingkan tahun 2023 sebesar 4,77 persen (yoy) dan tetap stabil dan masih dalam rentang target inflasi Provinsi Kepri Tahun 2024 sebesar 3 ± 1 (yoy). Inflasi di Kepri disebabkan oleh peningkatan dari kelompok Makanan, Minuman, dan Tembakau, Transportasi dan Perawatan Pribadi dan Jasa Lainnya. Hal tersebut terutama dipengaruhi oleh peningkatan harga beras, angkutan udara, dan cabai merah yang sejalan dengan meningkatkan permintaan menjelang HBKN Idul Fitri dan libur Panjang. Neraca perdagangan di Provinsi Kepri hingga triwulan I 2024 sebesar US\$883,21 Juta, dengan Nilai Ekspor sebesar US\$4.587,40 Juta dan Nilai Impor sebesar US\$3.704,27 Juta.

Tingkat kemiskinan pada Maret 2023 masih tergolong baik dengan berada pada urutan ke-6 terendah se Indonesia sebesar 5,69 persen dari total penduduk Kepri atau sejumlah 142,50 ribu orang. Sementara itu, **Gini Rasio** pada periode ini mencapai 0,340. **Tingkat pengangguran** yang turut menurun 0,67 persen (yoy) dari periode sebelumnya pada Februari 2024 telah mencapai 6,94 persen. Di sisi lain, **Nilai Tukar Petani** pada bulan Maret 2024 mencapai 105,44 sedangkan **Nilai Tukar Nelayan** pada Maret 2023 mencapai 105,78. Berdasarkan indikator kesejahteraan Kepri yang terus membaik, pembangunan manusia yang diukur melalui **IPM** pada Provinsi Kepri mengalami kemajuan pesat di tahun 2023 meningkat dengan nilai 79,08.

Analisis Ekonomi Regional

Pelaksanaan APBN Tingkat Provinsi Tunjukan Kinerja Positif

Alokasi Pendapatan APBN tahun 2024 sebesar Rp14.139,81 miliar, terdiri dari Penerimaan Perpajakan sebesar Rp11.474,64 miliar dan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sebesar Rp2.665,17 miliar.

Realisasi Penerimaan Perpajakan sampai dengan triwulan I 2024 sebesar Rp2.847,02 miliar mengalami pertumbuhan 4,93 persen (yoy). Pertumbuhan tersebut didorong oleh extra effort yang dilakukan oleh pemerintah pusat dalam menggali potensi PPh di daerah. Hal tersebut



Ringkasan Eksekutif

juga sejalan dengan perbaikan aktivitas ekonomi di Regional Kepulauan Riau yang terus memberikan kontribusi positif terhadap Penerimaan Perpajakan.

Realisasi Pendapatan PNBPNBP sampai dengan triwulan I 2024 sebesar Rp629,51 miliar tumbuh signifikan sebesar 145,62 persen (yoy). Capaian tersebut didorong oleh alu lintas keluar masuk Indonesia oleh wisatawan asing maupun wisatawan lokal berdampak pada pertumbuhan realisasi akun PNBPNBP Lainnya, serta kinerja pertumbuhan Pendapatan BLU yang ditopang dengan semakin meningkatnya kinerja empat satker BLU di Provinsi Kepri.

Alokasi Belanja APBN tahun 2024 sebesar Rp17.584,58 miliar, terdiri dari Belanja Pemerintah Pusat (BPP) Rp9.541,41 miliar, dan Transfer ke Daerah (TKD) sebesar Rp8.043,16 miliar. **Realisasi BPP** sampai dengan triwulan I 2024 sebesar Rp1.506,43 miliar mengalami pertumbuhan sebesar 15,79 persen (yoy). Tingginya growth BPP pada triwulan I 2024 didorong oleh pelaksanaan pemilu presiden dan wakil presiden, serta perayaan HBKN yang mendorong pembayaran gaji dan THR. Namun demikian terdapat kontraksi yang terjadi pada jenis Belanja Lainnya, karena satker BA BUN, yaitu BP Karimun, Bintan, Tanjungpinang yang belum dapat melakukan realisasi anggaran karena terdapat permasalahan kelembagaan s.d. triwulan I 2024. Dari sisi Pendapatan, Penerimaan Negara direalisasikan sebesar Rp2.847,02 miliar (20,13 persen dari Target) meningkat 20,15 persen (yoy), menunjukkan kinerja yang positif sepanjang triwulan I 2024.

Alokasi Belanja TKD sebagian besar dialokasikan pada Dana Alokasi Umum (DAU) sebesar Rp4.817,40 miliar (59,89 persen dari total Pagu TKD), dan DAK Non Fisik sebesar Rp1.239,24 miliar (15,40 persen dari total Pagu TKD). **Realisasi Belanja TKD** tertinggi pada secara nominal DAU sebesar 1.333,84 miliar (27,69 persen dari Pagu), meningkat 7,14 persen (yoy). Peningkatan realisasi TKD di triwulan I tahun 2024 ini dipengaruhi oleh perubahan mekanisme penyaluran dana TKD DAK Nonfisik, dan Dana Desa yang sebelumnya disalurkan sebanyak 3 tahap pada tahun 2023, kemudian disalurkan menjadi 2 tahap pada tahun 2024. Dari sisi Belanja TKD tertinggi berdasarkan persentase realisasi ada pada Dana Desa sebesar Rp102,83 miliar (46,99 persen dari Pagu), meningkat signifikan 31,14 persen (yoy). Selanjutnya DAK Non Fisik turut mengalami peningkatan secara yoy, sebesar 10,39 persen, yang telah direalisasikan sebesar Rp340,56 miliar (27,48 persen dari Pagu).



Ringkasan Eksekutif

Pelaksanaan APBD Tingkat
Provinsi Terus Menggali
Potensi Pendapatan Daerah

Pendapatan Daerah dapat direalisasikan sebesar 2.741,86 miliar atau 18,88 persen dari Target dan mengalami penurunan 0,47 persen (yoy). Realisasi Pendapatan Daerah masih didominasi oleh Pendapatan Transfer, yaitu sebesar Rp1.860,62 miliar (67,86 persen dari realisasi Pendapatan Pemerintah Daerah) dibandingkan realisasi PAD sebesar Rp881.172,13 miliar (32,14 persen dari realisasi Pendapatan Pemerintah Daerah). Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah daerah masih belum dapat mengandalkan PAD sebagai penopang utama keuangan daerah dan masih sangat bergantung pada dana transfer dari pemerintah pusat.

PAD dapat direalisasikan sebesar Rp881.172,13 miliar dari target. Dibandingkan Target, realisasi PAD pada Triwulan I masih rendah, hanya 18,32 persen. Pajak Daerah merupakan komponen terbesar penyumbang PAD yaitu Rp758,01 miliar atau 86,02 persen dari total PAD. Kemudian, komponen PAD yang memberikan kontribusi terbesar berturut-turut adalah Retribusi Daerah (6,94 persen), Lain-lain PAD yang Sah (6,82 persen), dan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan (0,83 persen). Meskipun beberapa jenis Pajak Daerah mengalami pertumbuhan minus dengan nominal rupiah besar (seperti penerimaan Pajak Sarang Burung Walet yang turun 50,38 persen), pertumbuhan Penerimaan BPHTB sebesar 32,56 persen (yoy) atau Rp33.276.704.814 memberikan efek positif terhadap total Pajak Daerah sehingga tidak mengalami pertumbuhan minus yang tinggi. Penerimaan BPHTB paling tinggi terdapat pada Kota Batam, yaitu Rp126.387.248.896 atau 93,30 persen dari total BPHTB lingkup Provinsi Kepri.

Penerimaan BPHTB Kota Batam meningkat 53,80 persen (yoy). Peningkatan BPHTB Kota Batam dipengaruhi oleh kebijakan tentang Pemberian Pengurangan dan Pembebasan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan yang juga mengakomodir kebijakan pemerintah pusat yaitu PTSL program sertifikasi tanah. Program ini bertujuan untuk memberikan sertifikat gratis bagi warga yang mendaftarkan tanahnya untuk pertama kali. Dengan kombinasi fasilitas pengajuan sertifikat gratis dan tarif BPHTB hanya 50 persen, hal ini akan semakin menarik minat warga untuk mendaftarkan sertifikat kepemilikan tanah.

Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah terkontraksi sebesar Rp31,94 miliar atau minus 34,69 persen. Apabila ditinjau dari persentase pertumbuhan, Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan merupakan yang tertinggi dengan pertumbuhan sebesar 677,25 persen atau Rp1,57 miliar. Namun demikian, hal ini menunjukkan bahwa terdapat peningkatan keterlambatan pelaksanaan pekerjaan



Ringkasan Eksekutif

yang dilakukan oleh pihak ketiga atas pekerjaan pemerintah daerah yang seharusnya dapat diminimalisir oleh Pemda.

Rasio PAD terhadap PDRB pada triwulan I 2024 sebesar 3,20 persen. Rasio tersebut menunjukkan penurunan sebesar 5,82 persen (yoy). Rasio PAD terhadap PDRB menurun karena persentase peningkatan PAD (0,37 persen) lebih kecil dibandingkan persentase peningkatan PDRB (6,57 persen). Hal ini menunjukkan penurunan optimalisasi PAD dibandingkan peningkatan PDRB.

Indeks Kemandirian Fiskal I (PAD/Total Pendapatan) menunjukkan bahwa mayoritas kabupaten/kota (enam dari tujuh) berada pada klasifikasi "Belum Mandiri". Hanya Kota Batam berada pada klasifikasi "Menuju Kemandirian". **Hasil Indeks Kemandirian Fiskal II** (PAD+DBH / Total Pendapatan) menunjukkan bahwa Kota Batam dan Kabupaten Karimun yang masuk klaster "Mandiri". Kabupaten Natuna, Kabupaten Kepulauan Anambas, dan Kota Tanjungpinang berada pada klasifikasi "Menuju Kemandirian". Kabupaten Bintan dan Kabupaten Lingga berada pada kategori "Belum Mandiri".

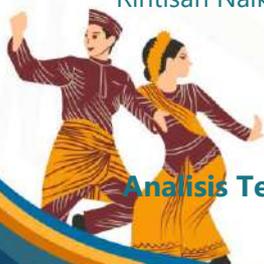
Belanja Daerah dapat direalisasikan sebesar Rp1.695,58 miliar atau 12,18 persen dari Pagu. Belanja Daerah tumbuh 13,44 persen (yoy). Pertumbuhan tersebut ditopang oleh tumbuhnya hampir seluruh komponen Belanja Daerah, yaitu Belanja Operasional yang tumbuh sebesar 11,21 persen dan Belanja Modal yang tumbuh sebesar 53,55 persen.

Analisis neraca pemerintah pusat-tingkat wilayah menunjukan penambahan nilai Aset sebesar Rp2.060,44 miliar, terdapat peran Belanja Modal Pemerintah yang mendorong pertumbuhan Aset dan infrastruktur sebesar Rp2.472,89 miliar, atau 120 persen dari pertumbuhan Aset. Dari sisi pendapatan, Nilai Penerimaan PNBPN Aset pada triwulan I 2024 sebesar Rp62,31 miliar, turun dibandingkan tahun 2023 dengan nilai penerimaan Rp101,59 miliar. Penurunan penerimaan PNBPN pada triwulan I 2024 ini dipengaruhi oleh periode pencatatan Pendapatan Sewa yang tidak termasuk pada triwulan I 2024.

Hasil Profiling UMKM menunjukkan bahwa secara umum seluruh pelaku UMKM termasuk kategori UMKM Rintisan dengan karakteristik belum memiliki rekening usaha yang terpisah dengan rekening pribadi, belum melakukan pelaporan keuangan usaha, belum mengikuti bazar/pameran dalam negeri, belum berorientasi ekspor dikarenakan belum memiliki pengetahuan terkait tata cara ekspor, dan belum memiliki akses calon pembeli luar negeri.

Kinerja APBN dan APBD Turut
Menambah Nilai Aset di
Provinsi Kepri

**Pengembangan Ekonomi
Daerah**
Jalankan peran RCE untuk
Mengembangkan UMKM
Rintisan Naik Kelas



Analisis Tematik

Ringkasan Eksekutif

Belanja Pembangunan
Infrastruktur Konektivitas
Terlaksana Efektif dan Efisien

Belanja Infrastruktur Konektivitas memiliki pengaruh signifikan terhadap indikator kualitas SDM, dengan arah positif sesuai nilai original sample sebesar 0,781. Hal ini berarti, setiap peningkatan Belanja Infrastruktur Konektivitas, berdampak positif pada peningkatan kondisi jalan di Provinsi Kepri.

Beberapa tahun terakhir output perbaikan jalan semakin menurun, sedangkan anggaran belanja semakin meningkat, apabila fenomena ini terus terjadi akan menurunkan kualitas infrastruktur yang telah dibangun sebelumnya di wilayah Kepri.

Pelabuhan Malaysia dan Singapura telah menerapkan teknologi dalam pengelolaan pelabuhan, melalui sistem EDI yang terkoneksi dengan sistem informasi kepabeanan, otomatisasi integrated monitoring system, dan interkoneksi antar moda transportasi.

Pembangunan infrastruktur pelabuhan yang lebih canggih dan maju di Kepri seperti Pelabuhan Batu Ampar di Batam dibutuhkan untuk dapat bersaing dengan Malaysia dan Singapura.

Dukungan pemerintah juga dibutuhkan untuk keberlangsungan bisnis transportasi maritim, misalnya melalui Dana Abadi dan insentif khusus bagi pelaku bisnis transportasi maritim.

Terdapat korelasi yang signifikan antara tingkat pengangguran, jumlah cargo throughput dan jumlah impor dengan PDRB. Selain itu, terdapat korelasi yang signifikan antara tingkat pengangguran dan jumlah ekspor dengan jumlah impor.

Rekomendasi Kebijakan Pengembangan Ekonomi Regional

Pemerintah daerah agar meningkatkan alokasi belanja pada sektor Industri Pengolahan, Konstruksi dan Pertambangan dalam rangka meningkatkan Pembentukan Modal Tetap Bruto (investasi) yang memiliki kontribusi paling besar 44,62 persen terhadap PDRB sehingga dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi Kepri 5,01 persen pada triwulan I. Penambahan alokasi belanja pada sektor tersebut diharapkan dapat menstimulasi pertumbuhan ekonomi Kepri pada triwulan selanjutnya.

Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) diharapkan memperkuat sinergi antar instansi daerah untuk menjaga kestabilan target inflasi dengan menerbitkan kebijakan dan program yang tepat dengan mempertimbangkan kondisi fiskal dan moneter, melalui berbagai upaya meliputi Operasi Pasar Murah secara berkala, kerjasama antar daerah dalam penyediaan pangan dan penyaluran pangan sampai ke pulau terpencil untuk menjaga pasokan.



Ringkasan Eksekutif

Dalam rangka meningkatkan Surplus Perdagangan Luar Negeri, Dinas Perindustrian dan Perdagangan agar melaksanakan pemasaran yang lebih agresif dan partisipasi dalam pameran dagang internasional untuk menggaet pasar ekspor potensial baru khususnya Bahan Bakar Mineral (Non Migas) yang menjadi produk ekspor andalan.

Pemerintah daerah agar melaksanakan upaya pengentasan kemiskinan dengan cara: a) Dinas Sosial perlu mengkaji Belanja Perlindungan Sosial dengan mengintegrasikan data penerima bantuan sosial di daerah dengan data pusat, agar pelaksanaan penyaluran Bansos dapat menjangkau keluarga penerima manfaat secara tepat sasaran; b) Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah agar melaksanakan pelatihan keterampilan dan pendampingan usaha untuk meningkatkan pendapatan (mandiri secara ekonomi).

Aspek pemerataan harus menjadi perhatian, Pemprov Kepri agar melakukan upaya menurunkan tingkat ketimpangan (gini ratio) dengan cara meningkatkan program Balai Latihan Kerja dan penambahan alokasi dana pada Program Kewirausahaan dengan Bunga 0 (nol) persen dari Pemprov Kepri.

Pemerintah daerah agar lebih menggiatkan program pemberdayaan ekonomi untuk menurunkan tingkat pengangguran meliputi pelatihan keterampilan, memudahkan akses terhadap modal usaha, dan pembangunan infrastruktur yang mendukung pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).

Khusus untuk Pemerintah Kota Batam yang masih memiliki isu tingkat pengangguran yang tinggi diharapkan untuk menyediakan lebih banyak sekolah vokasi setingkat SMK dan Politeknik melakukan kerja sama dengan industri (program link and match industry) sehingga tercipta kualitas tenaga kerja high-skilled worker yang sesuai dengan kebutuhan industri di Kota Batam.

Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Pesehatan Hewan agar memberikan akses petani terhadap teknologi pertanian modern untuk meningkatkan Nilai Tukar Petani dengan cara pemberian insentif berupa benih unggul, pupuk organik, pestisida yang ramah lingkungan, dan teknik pertanian berkelanjutan untuk meningkatkan kualitas produk sehingga meningkatkan nilai jual.

Agar Dinas Kelautan dan Perikanan membentuk koperasi nelayan atau kelompok usaha bersama untuk meningkatkan Nilai Tukar Nelayan dengan memfasilitasi akses nelayan ke pasar yang lebih besar dan stabil. Pemerintah daerah diharapkan dapat membantu mempromosikan produk ikan lokal, dan membuka akses ke pasar



Ringkasan Eksekutif

ekspor membangun kemitraan dengan sektor swasta, termasuk perusahaan pengolahan ikan, restoran, hotel, dan ritel, untuk memastikan pasokan ikan yang berkualitas dan berkelanjutan.

Untuk meningkatkan skor IPM, Pemprov Kepulauan Riau sebagai pemilik IPM tertinggi ke-tiga Nasional sebesar 79,08 pada tahun 2023, agar meningkatkan formasi tenaga pendidik (guru) sampai ke pulau perintis, kesehatan (fasilitas kesehatan sampai ke pelosok) dan penguatan mata pencaharian sesuai dengan kondisi daerah kepulauan, seperti pelatihan budidaya perikanan dan kelautan.

Rekomendasi Kebijakan Pengembangan **APBN Regional**

Pemerintah Pusat (Direktorat Jenderal Pajak) agar dapat meningkatkan pengawasan pajak terhadap pengenaan tarif progresif PPh 21 yang mulai berlaku efektif di Januari 2024. Kegiatan extra effort seperti sosialisasi dan layanan langsung pada perusahaan besar juga dapat dilakukan dalam meningkatkan potensi penerimaan pajak di Kepri.

Badan Layanan Umum (BLU) di Provinsi Kepri agar terus menggali dan meningkatkan potensi pendapatan PNBPN di Kepri, baik melalui optimalisasi tarif dan diversifikasi layanan yang sesuai dengan kebutuhan daerah. Peningkatan kualitas dan efisiensi layanan juga terus dioptimalkan melalui digitalisasi layanan, pelatihan dan pengembangan SDM, serta optimalisasi aset yang dapat dilakukan dengan kerja sama dengan pihak ketiga.

Pemerintah Pusat (Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian dan Ditjen Perbendaharaan Kementerian Keuangan) agar berkoordinasi dengan Badan Pengusahaan (BP) Karimun, Bintan, Tanjungpinang untuk menyelesaikan pengurusan status kelembagaannya dari BA BUN 999.08 menjadi satker Badan Layanan Umum sesuai amanat PP No. 41 Tahun 2021 sehingga pengelolaan dan administrasi keuangannya, termasuk penerimaan hibah, dan PNBPN dapat dilakukan sesuai ketentuan.

KPPN dan Kanwil DJPb Prov. Kepri agar secara aktif berkoordinasi dengan pemerintah daerah untuk mengkonsolidasikan perubahan mekanisme penyaluran Belanja TKD dan melaksanakan bimbingan pemenuhan dokumen administrasi dalam mempercepat pencairan Dana TKD setelah terbitnya juknis dan peraturan Menteri Keuangan tentang DAK Fisik.



Ringkasan Eksekutif

Pengembangan APDB Kepulauan Riau

Untuk meningkatkan PAD hingga dapat meningkatkan kemandirian fiskal, **pemerintah daerah** dapat melakukan hal-hal sebagai berikut:

Mengoptimalkan PAD dari Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan mengingat realisasi masih sangat rendah, yaitu 2,83 persen dari Target sehingga hanya memberikan kontribusi 0,83 persen terhadap PAD. Pemda daerah perlu memetakan BUMD yang belum optimal dalam menghasilkan profit dan menemukan permasalahan serta solusi konkrit hingga menghasilkan profit yang akhirnya dapat memberikan dividen bagi pemda.

Pendapatan BLUD turun hingga 42,70 persen atau Rp30,83 miliar (yoy). Penurunan ini sangat signifikan pada pos Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah karena sebagai kontributor mayoritas. Pemerintah daerah agar memetakan BLUD yang mengalami penurunan pendapatan dan menemukan permasalahan serta solusi konkrit. Hal tersebut penting dilakukan mengingat seharusnya BLUD merupakan salah satu penyumbang pendapatan bagi pemerintah daerah.

Penerimaan Pajak Sarang Burung Walet menurun 50,38 persen (yoy) atau hanya sebesar Rp6.320.000 sepanjang periode Triwulan I tahun 2024. Dengan tarif pajak sebesar 10 persen dari omzet, dan perkiraan harga jual Rp8 juta/kg maka penjualan Sarang Burung Walet hanya sebanyak 8 kg saja di lingkup wilayah Provinsi Kepulauan Riau. Potensi Pajak tersebut sangat tinggi mengingat jumlah ekspor sarang burung walet sangat tinggi dalam beberapa tahun terakhir. Agar PAD dapat optimal, pemerintah daerah agar terus mengembangkan potensi penjualan/ekspor sarang burung walet. Semakin tinggi penjualan/ekspor sarang burung walet maka seharusnya berbanding lurus dengan penerimaan pajak Sarang Burung Walet.

Peningkatan Pendapatan Denda Atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan menunjukkan bahwa terdapat peningkatan keterlambatan pelaksanaan pekerjaan, Pemda dan dinas terkait agar mengawasi perencanaan, pelaksanaan, pembayaran sampai dengan pertanggungjawaban secara terus menerus atas pekerjaan pembangunan fisik sehingga tidak mengalami keterlambatan penyelesaian.

Untuk meningkatkan rasio PAD terhadap PDRB, pemerintah daerah agar melakukan diversifikasi sumber pendapatan daerah melalui pengembangan sektor potensial dengan memberikan insentif kepada investor, mendukung pengembangan UMKM meningkatkan promosi produk lokal.



Ringkasan Eksekutif

Pemerintah Kabupaten Lingga agar meningkatkan penerimaan DBH untuk meningkatkan kemandirian fiskal melalui Dinas Dinas DPMPTSP agar menyusun mapping terhadap potensi SDA maupun sektor lainnya yang dapat ditawarkan kepada investor sehingga mampu memberikan bagi hasil kepada Kabupaten Lingga. Saat ini, Kabupaten Lingga belum melakukan mapping potensi tersebut, untuk menarik investor menanamkan investasi di Kabupaten Lingga.

Dalam rangka meningkatkan realisasi Belanja Daerah, pemerintah daerah agar menyusun rencana kerja secara matang dengan prioritas daerah melalui analisis kebutuhan, konsultasi dan koordinasi kepada semua OPD untuk mendiskusikan rencana bersama menggapai tujuan, sasaran dan tahapan realisasi yang tepat waktu.

Pemerintah pusat dan pemerintah daerah agar berkoordinasi dalam optimalisasi peningkatan pendapatan PNBPN dari pemanfaatan BMN Pelabuhan Mocco yang baru saja diresmikan pada awal tahun 2024 setelah lebih dari 10 tahun mangkrak.

Rekomendasi Kebijakan Pengembangan **UMKM** di Kepulauan Riau

Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah agar melakukan upaya pengembangan sektor UMKM dengan cara:

Memberikan pelatihan dan bimbingan usaha kepada para pengusaha UMKM rintisan dalam berbagai aspek bisnis, seperti manajemen, pemasaran, keuangan, dan teknologi untuk meningkatkan kapasitas SDM. **Menggiatkan profiling UMKM** yang membutuhkan pembiayaan dan menghubungkan dengan lembaga pembiayaan untuk mendapatkan Kredit Usaha Rakyat, kredit UMi dan lainnya. **Membangun jaringan kolaborasi dan kemitraan** antara UMKM rintisan, industri besar, perguruan tinggi, Kanwil DJPB Prov. Kepri, KPPN setempat dan lembaga pendukung ekosistem bisnis lokal lainnya untuk meningkatkan pasar jual dan lebih sering melaksanakan bazar untuk memperkenalkan usaha UMKM binaan.

Rekomendasi Kebijakan Pengembangan **Efektivitas Infrastruktur** **Konektivitas di Kepri**

Pemda dan pempus agar meningkatkan alokasi belanja konektivitas dan menambahkan alokasi anggaran untuk perbaikan dan perawatan jalan, seperti peningkatan kualitas permukaan jalan dan perbaikan struktur jalan yang rusak. Kepri sebagai provinsi kepulauan sangat menggantungkan diri pada transportasi maritim yang menghubungkan antar pulau, belanja konektivitas dapat difokuskan pada pembangunan jembatan, pelabuhan, bandara lokal dan penyediaan transportasi laut yang aman dan cepat.



Ringkasan Eksekutif

Dalam menunjang optimalisasi kualitas infrastruktur jalan, pemerintah daerah agar melakukan: a) pengembangan sistem drainase yang lebih baik. untuk mencegah kerusakan jalan akibat genangan air, terutama di wilayah kepulauan yang cenderung rentan terhadap banjir; b) Pemda melalui Dinas PUPP agar melaksanakan evaluasi dan studi komparasi terhadap penggunaan material jalan yang berkualitas, tahan lama dan lebih ramah lingkungan. Hal ini dapat membantu dalam memperpanjang umur jalan dan mengurangi biaya pemeliharaan jalan jangka panjang

Pemda dan pempus agar melakukan investasi teknologi pengelolaan pelabuhan melalui Artificial Intelligence yang terintegrasi dengan kepabeanan dan monitoring system sehingga membantu memelihara pelabuhan secara lebih efisien, hemat waktu dan mengurangi biaya pemeliharaan jangka panjang.

Pemda dan pempus agar meningkatkan alokasi anggaran untuk membangun Pelabuhan Batu Ampar di Batam yang menjadi sentral keluar masuk wisatawan sehingga memiliki fasilitas dan kenyamanan yang tidak kalah dari Singapura dan Malaysia.

Pemerintah daerah agar berkoordinasi dengan pemerintah pusat untuk menginisiasi pembentukan dana khusus dan pemberian insentif bagi pelaku bisnis transportasi maritim untuk mengakomodir pengembangan bisnis transportasi maritim.

Pemerintah daerah agar melaksanakan pemberdayaan ekonomi dengan pemberian pelatihan keterampilan, pemberian akses terhadap usaha potensial dan membentuk jaringan pasar komoditi dengan luar negeri dalam rangka meningkatkan bisnis sektor ekspor-impor untuk meningkatkan pendapatan daerah sekaligus mengurangi tingkat pengangguran.



BAB I

Analisis Ekonomi Regional

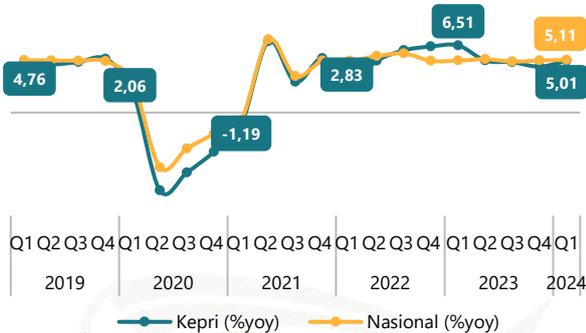


Masjid Raya Sultan Riau,
Kota Tanjungpinang

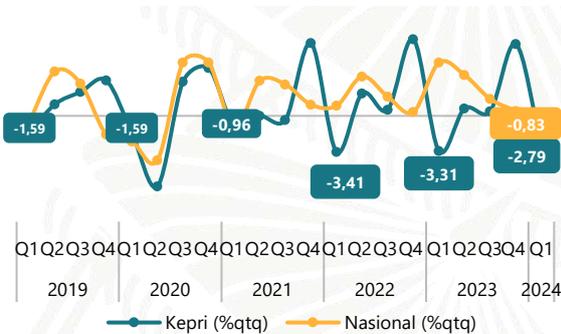


1.1 Analisis Perkembangan Indikator Makro Ekonomi

Grafik 1.1 Perkembangan Pertumbuhan Ekonomi Kepri Tahun 2019-2024 (%yoy)



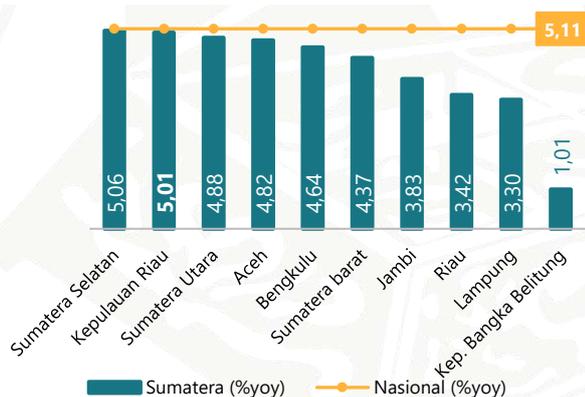
Grafik 1.2 Perkembangan Pertumbuhan Ekonomi Kepri Tahun 2019-2024 (%qtq)



Sumber: BPS Kepri, 2024 (diolah)

Kinerja **perekonomian** Kepulauan Riau tumbuh sebesar 5,01 persen (*yoy*) pada triwulan I 2024, angka **pertumbuhan ekonomi** tersebut cukup baik namun bila dibandingkan dengan angka pertumbuhan Nasional yang tumbuh 5,11 persen (*yoy*) lebih rendah. Perekonomian Kepulauan Riau triwulan I 2024 yang diukur berdasarkan Produk Domestik Regional Bruto

Grafik 1.3 – Pertumbuhan Ekonomi Regional Sumatera Triwulan I-2024 (%yoy)



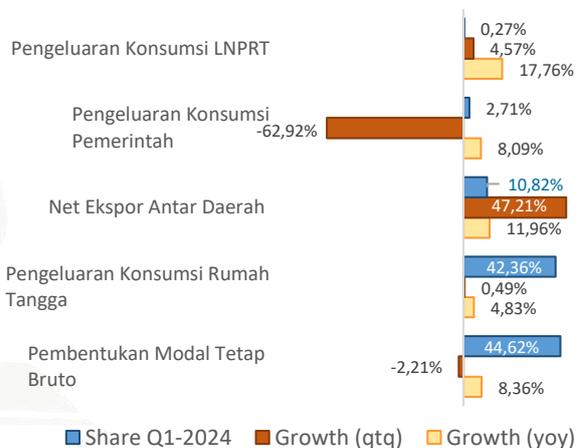
(PDRB) atas dasar harga berlaku (ADHB) mencapai Rp87,97 triliun dan atas dasar harga konstan (ADHK) mencapai Rp52,72 triliun.

Di **Regional Sumatera**, Provinsi Kepulauan Riau menyumbang 7,41 persen dari total PDRB di Regional Sumatera. Percepatan pertumbuhan ekonomi Kepri pada triwulan I 2024 tersebut juga menjadikan Kepri Provinsi dengan angka **pertumbuhan ekonomi yang tertinggi ke-2** di Sumatera 5,01 persen (*yoy*), setelah Provinsi Sumsel 5,06 persen (*yoy*). Pertumbuhan ekonomi tersebut dipengaruhi oleh HBKN Ramadhan, Imlek, Nyepi, dan Paskah di triwulan I 2024, kemudian aktivitas parpol menjelang masa kampanye juga turut mendorong pergerakan ekonomi di Kepri.

1.1.1 Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Berdasarkan Pengeluaran dan Sektor/Lapangan Usaha

1.1.1.1 PDRB Berdasarkan Pengeluaran

Grafik 1.4 – Share PDRB Berdasarkan Pengeluaran Triwulan I-2024 (%yoy)



Sumber: BPS Kepri, 2024 (diolah)

Dari sisi Pengeluaran, PDRB Provinsi Kepri triwulan I 2024 didominasi oleh **Komponen Pembentukan Modal Tetap Bruto (PM-TB)** atau Investasi dengan *share* sebesar 44,62 persen dari total PDRB dan tumbuh 8,36 persen (*yoy*).

Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB)

Kontribusi dan pertumbuhan PMTB di triwulan I 2024 didorong dengan pertumbuhan





realisasi **Penanaman Modal Dalam Negeri** (PMDN) yang pada triwulan I 2024 sudah mencapai Rp2.054,84 miliar dengan 3.339 proyek.

Berdasarkan data *National Single Window for Investment* (NSWI), dari sisi nominal, realisasi tersebut tumbuh 16,6 persen (*yoy*). Pertumbuhan realisasi investasi terbesar ada pada sektor tersier, khususnya **kelompok Perumahan, Kawasan Industri dan Perkantoran** yang meningkat sebesar Rp260,73 miliar (*yoy*). Selanjutnya, dari sisi persentase, pertumbuhan realisasi terbesar ada pada sektor primer yang tumbuh sebesar 61,76 persen (*yoy*), khususnya pada kelompok Tanaman Pangan, Perkebunan, dan Peternakan.

Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga (PKRT)

PKRT pada triwulan I 2024 berkontribusi sebesar 42,36 persen dari PDRB dan tumbuh 4,83 persen (*yoy*). Pertumbuhan PKRT tersebut tumbuh sejalan dengan meningkatnya mobilitas masyarakat dari kegiatan menjelang dan pada masa Hari Raya Idul Fitri. Mobilitas masyarakat menguat pada kelompok transportasi, komunikasi, serta hotel dan restoran.

Net Ekspor

Komponen **Net Ekspor** triwulan I 2024 berkontribusi sebesar 10,82 persen dari total PDRB Provinsi Kepri. Selama periode triwulan I 2024, nilai Ekspor Kepri sebesar US\$4.587,39 Juta, aktivitas tersebut didominasi dari **sektor Non Migas**, terutama dari Kelompok Industri dengan kontribusi sebesar 76,03 persen dari total nilai Ekspor. Dari sisi Impor, pada triwulan I 2024 senilai US\$3.704,27 Juta. Capaian tersebut juga didominasi dari sektor Industri dengan kontribusi sebesar 85,01 persen.

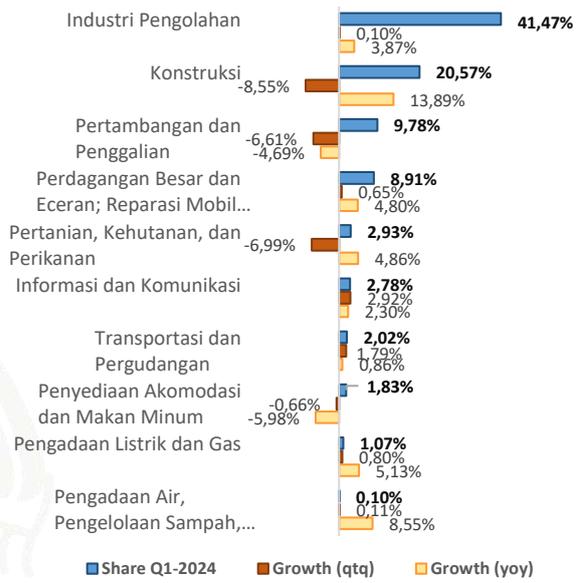
Pengeluaran Konsumsi Pemerintah (PKP)

Komponen **Konsumsi Pemerintah** pada triwulan I 2024 tumbuh 8,09 persen (*yoy*) dan berkontribusi sebesar 2,71 persen dari total PDRB Kepri. Konsumsi Pemerintah dilihat dari

realisasi APBN dan APBD. Realisasi Belanja APBN telah mencapai Rp3.459,78 miliar dan tumbuh 22,80 persen (*yoy*). Realisasi Belanja APBD telah mencapai Rp1.904,74 miliar dan tumbuh 9,79 persen (*yoy*).

1.1.1.2 PDRB Berdasarkan Lapangan Usaha

Grafik 1.5 – Share PDRB Berdasarkan Lapangan Usaha Triwulan I-2024 (%yoy)



Sumber: BPS Kepri, 2024 (diolah)

Dari sisi Lapangan Usaha (LU), **Industri Pengolahan** menjadi penyumbang *share* PDRB Provinsi Kepri terbesar pada triwulan I 2024 dengan kontribusi sebesar 41,47 persen dari total PDRB dan tumbuh sebesar 3,87 persen (*yoy*).

Industri Pengolahan

Pertumbuhan tersebut sejalan dengan **kinerja Industri Pengolahan melalui nilai Ekspor Non Migas** Provinsi Kepri yang terus tumbuh setiap tahunnya. LU Industri Pengolahan di Kepri terus berkembang dengan hadirnya *Foreign Direct Investment* (FDI) dari negara tetangga, khususnya Singapura, dalam berbagai proyek. Berdasarkan data *singstat.gov.sg.*, *Index of Industrial Production* (IIP) Singapura untuk *Machinery & Equipment* juga tumbuh sebesar 1,48 persen (*yoy*) hal tersebut mengindikasikan kinerja industri pengolahan di Batam yang dipengaruhi oleh Singapura juga semakin





berkembang. Investasi tersebut terus diarahkan pada proyek strategis di Kepri, khususnya pada Zona Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) dan perkembangan infastruktur di Provinsi Kepri.

Konstruksi

LU konstruksi pada triwulan I 2024 menjadi LU dengan pertumbuhan tercepat sebesar 13,89 persen (*yoy*) dan berkontribusi sebesar 20,57 persen terhadap PDRB. Perkembangan LU **Konstruksi di Kepri sejalan dengan berjalannya 22 proyek infrastruktur dikota Batam** dengan 5 kegiatan prioritas nasional. Proyek tersebut antara lain pembangunan jalan koridor utama dari simpang Laluan Madani hingga ke Simpang Bundaran Punggur, pembangunan Jalan Yos Sudarso tahap III, jalan koridor utama sepanjang 2,6 kilo meter dari Bundaran Punggur hingga ke Simpang Bandara Hang Nadim, serta pembangunan bundaran Pelabuhan Punggur dan bundaran Bandara Hang Nadim.

Pertambangan dan Penggalian

LU Pertambangan dan Penggalian berkontribusi sebesar 9,78 persen dari PDRB Kepri triwulan I 2024. **Kinerja Pertambangan dan Penggalian mengalami pertumbuhan negatif** sebesar 4,69 persen (*yoy*) yang disebabkan oleh sisi harga minyak dunia yang berkontraksi di triwulan I 2024.

Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Motor

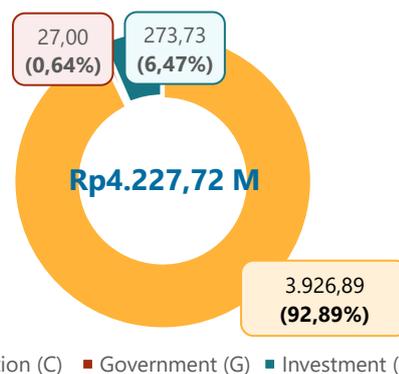
Kinerja LU **Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Motor tumbuh** sebesar 4,80 persen (*yoy*) pada triwulan I 2024 dan berkontribusi 8,91 persen terhadap PDRB Kepri. Kinerja tersebut didorong dengan tumbuhnya sektor perdagangan di Provinsi Kepri, khususnya dari kelompok mesin dan listrik dan peningkatan konsumsi dari masyarakat terhadap kebutuhan tersier.

1.1.2 Kontribusi Fiskal

Pertumbuhan ekonomi, yang diukur dengan peningkatan PDRB adalah proses peningkatan output per kapita dari satu periode ke periode berikutnya. Ini mencerminkan perkembangan aktivitas ekonomi yang meningkatkan produksi barang dan jasa dalam masyarakat. Oleh karena itu, di setiap negara, selalu ada intervensi pemerintah untuk memastikan pembangunan ekonomi berjalan secara optimal dan pertumbuhan tetap stabil.

Menurut **konsep Keynesian**, pertumbuhan pendapatan nasional dipengaruhi oleh besarnya Pengeluaran Konsumsi, Pengeluaran Pemerintah, Investasi, dan Net ekspor ($Y=C+I+G+NX$). Oleh karena itu, menurut Keynes, diperlukan peningkatan permintaan konsumsi, investasi, pengeluaran pemerintah, serta ekspor dan impor untuk meningkatkan pendapatan nasional. Peran pemerintah dalam hal ini tercermin melalui APBN dan APBD, yang berfungsi sebagai instrumen fiskal untuk mendukung pembentukan PDRB.

Grafik 1.6 – Kontribusi Belanja APBN dan APBD Terhadap Sektor Riil Ekonomi Kepri Triwulan I-2024



Sumber: Laporan ALCo Maret 2024, Kanwil DJPb Provinsi Kepri, (*diolah*)

Kontribusi fiskal terhadap perekonomian berperan sebagai stimulus pertumbuhan ekonomi yang secara riil bergerak dalam mengembangkan infrastruktur, pendidikan, kesehatan, serta aktivitas ekonomi lainnya yang berakhir pada peningkatan PDRB. Berdasarkan hasil *mapping* atau proksi konsolidasi Belanja





APBN dan APBD Regional Kepri periode triwulan I 2024 terhadap perekonomian triwulan I 2024, diperoleh hasil relasi kontribusi fiskal terhadap Pembentukan PDRB pada sektor riil Kepri sebagai berikut:

1. Belanja Pegawai, serta belanja lain seperti Belanja Barang, Belanja Bantuan Sosial, Belanja Tak Terduga/Belanja Lain-Lain, dan Transfer ke Daerah, yang berpotensi memberikan kontribusi terhadap Pengeluaran Pemerintah (G) dalam pembentukan PDRB adalah sebesar Rp3.926,89 miliar (92,89 persen).
2. Belanja Barang, Belanja Subsidi, dan Belanja Bantuan Sosial yang berpotensi memberikan kontribusi terhadap Konsumsi Pemerintah (C) dalam pembentukan PDRB adalah sebesar Rp27,00 miliar (0,64 persen).
3. Belanja Modal yang berpotensi memberikan kontribusi terhadap Investasi (I) dalam pembentukan PDRB adalah sebesar Rp273,73 miliar (6,47 persen).

Selanjutnya, kontribusi fiskal terhadap perekonomian juga mengacu terhadap peran dan dampak kebijakan fiskal pemerintah dalam perekonomian negara, salah satunya mencakup penggunaan atau komposisi belanja pemerintah terhadap sektor ekonomi.

1.1.3 Tingkat Inflasi

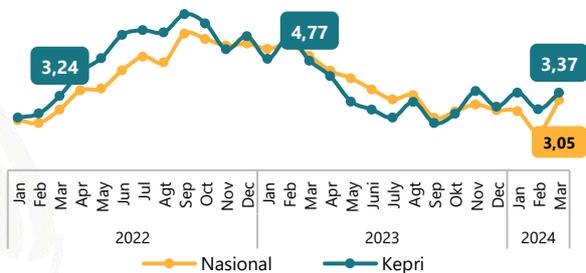
Inflasi adalah kenaikan harga barang dan jasa yang secara umum dan berkelanjutan terjadi selama periode tertentu. Analisis inflasi menjadi alat untuk memahami stabilitas ekonomi di suatu regional, khususnya dalam melihat potensi dan kemampuan daya beli masyarakat. Pada tahun 2024, tekanan inflasi di Provinsi Kepri dihitung dari 2 kota dan 1 kabupaten (Kota Batam, Kota Tanjungpinang, dan Kabupaten Karimun).

Tabel 1.1 – Inflasi pada Daerah Perhitungan Inflasi di Provinsi Kepri per Maret 2024

Daerah Perhitungan Inflasi	April 2024		
	IHK	Inflasi (%yoy)	Inflasi (%mtm)
Kab. Karimun	105,61	2,57	0,53
Kota Batam	106,12	3,56	0,45
Kota Tanjungpinang	104,98	2,68	0,35
Provinsi	105,94	3,34	0,46

Sumber: BPS Kepri, 2024 (diolah)

Grafik 1.7 – Perkembangan Inflasi Kepri Tahun 2022-2024 (%yoy)



Sumber: BPS Kepri, 2024 (diolah)

Provinsi Kepulauan Riau mengalami inflasi sebesar 3,37 persen (yoy) dengan Indeks Harga Konsumen (IHK) sebesar 105,94. Inflasi tertinggi terjadi di Kota Batam sebesar 3,56 persen dengan IHK sebesar 106,12 dan terendah terjadi di Kabupaten Karimun sebesar 2,57 persen dengan IHK sebesar 105,61. Sedangkan Kota Tanjungpinang inflasi sebesar 2,68 persen dengan IHK sebesar 104,98.



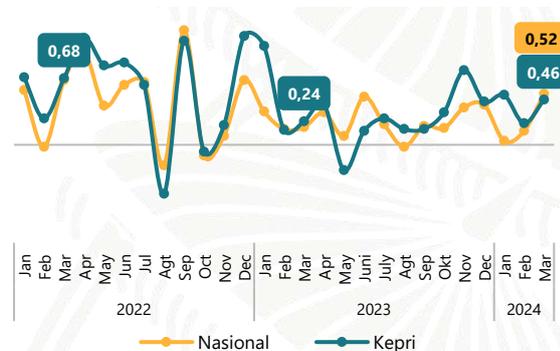


Tabel 1.2 – Rincian Andil Infasi Bulan Maret 2024 per Komoditas (%yoy)

No.	Rincian	Inflasi	Andil Inflasi
Inflasi Umum		3,37	3,37
1	Makanan, Minuman, dan Tembakau	6,38 ▲	1,84
2	Transportasi	4,33 ▲	0,59
3	Perawatan Pribadi dan Jasa Lainnya	4,34 ▲	0,26
4	Pendidikan	2,49 ▲	0,17
5	Pakaian dan Alas Kaki	3,35 ▲	0,16
6	Perumahan, Air, Listrik, dan Bahan Bakar Rumah Tangga	0,98 ▲	0,16
7	Penyediaan Makanan dan Minuman/Restoran	1,03 ▲	0,10
8	Kesehatan	3,53 ▲	0,09
9	Perlengkapan, Peralatan dan Pemeliharaan Rutin Rumah Tangga	0,23 ▲	0,01
10	Informasi, Komunikasi, dan Jasa Keuangan	-0,02 ▼	0,00
11	Rekreasi, Olahraga, dan Budaya	-0,35 ▼	-0,01

Sumber: BPS Kepri, 2024 (diolah)

Grafik 1.8 – Perkembangan Inflasi Kepri Tahun 2022-2024 (%mtm)



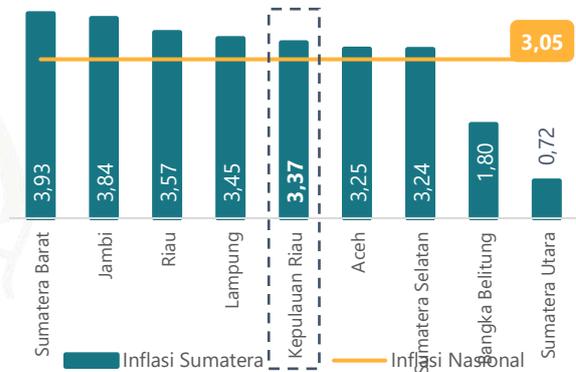
Sumber: BPS Kepri, 2024 (diolah)

Tingkat inflasi Provinsi Kepulauan Riau bulan Maret 2024 sebesar 0,06 persen (*mtm*), inflasi terjadi karena kenaikan Indeks Harga Konsumen (IHK) dari 105,46 pada Februari 2024 menjadi 105,94 pada Maret 2024. Sedangkan tingkat inflasi sebesar 0,75 persen (*ytd*).

Pada Maret 2024, inflasi yang terjadi di Provinsi Kepulauan Riau disebabkan oleh adanya kenaikan harga yang ditunjukkan oleh naiknya harga sembilan indeks kelompok pengeluaran.

Inflasi di Kepri pada bulan Maret 2024 berada pada peringkat ke-lima di Regional Sumatera. **Tiga kelompok terbesar yang menjadi penyumbang terbesar inflasi pada bulan Maret 2024 adalah kelompok makanan, minuman dan tembakau** naik sebesar 6,38 persen; kelompok transportasi naik sebesar 4,33 persen; serta kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya naik sebesar 4,34 persen.

Grafik 1.9 – Inflasi pada Provinsi di Regional Sumatera per Maret 2024 (%yoy)



Sumber: BPS Kepri, 2024 (diolah)

Selanjutnya, jika dilihat dari rincian komoditas dengan andil inflasi terbesar bulan Maret 2024 (*yoy*) didominasi oleh Beras (0,42 persen), Angkutan Udara (0,32 persen), Cabai Merah (0,31 persen), Tarif Parkir (0,18 persen), dan Emas Perhiasan (0,17 persen). Hal tersebut dipengaruhi oleh HBK Idul Fitri yang meningkatkan aktivitas belanja masyarakat pada komoditas tersebut.

Dalam upaya mengendalikan inflasi, TPID Provinsi Kepri yang disertai oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Dinas Pertahanan dan Ketahanan Pangan, Dinas Kelautan dan Perikanan serta Sekretariat Daerah juga melakukan beberapa kegiatan untuk menjaga inflasi di Kepri serta menjaga masyarakat dari *Panic Buying* menjelang bulan Ramadhan. Beberapa kegiatan tersebut, antara lain:





1. Pelaksanaan Operasi Pasar dan Gerakan Pangan Murah (GPM) pada 36 titik di seluruh Kabupaten/Kota se-Kepulauan Riau serta penyaluran sembako bersubsidi sebanyak 64.000 paket di Kota Batam.
2. Pelaksanaan monitoring sekaligus siaran pers ketersediaan pasokan beras Kepri di Gudang Bulog Batam dalam rangka pembentukan ekspektasi inflasi masyarakat.
3. Peningkatan produksi pangan lokal terutama beras dan cabai, optimalisasi KAD yang sudah ada serta penjajakan potensi KAD baru, mendorong inovasi dalam budidaya pertanian, seperti implementasi *smart greenhouse*, serta inisiasi Gerakan Sekolah Menanam Cabai di seluruh SMA/SMK se-Kepri.
4. Koordinasi dengan pihak terkait untuk memastikan distribusi pasokan terjaga dengan aman agar stok pangan tersedia dalam jumlah yang cukup.
5. Dari sisi komunikasi dan koordinasi, TPID akan melaksanakan publikasi dan *talkshow* di media cetak, online serta televisi untuk menjaga ekspektasi masyarakat.

1.1.4 Neraca Perdagangan, Ekspor dan Import

Grafik 1.10 – Neraca Perdagangan di Provinsi Kepri Tahun 2022-2024 (US\$ Juta/*mtm*)



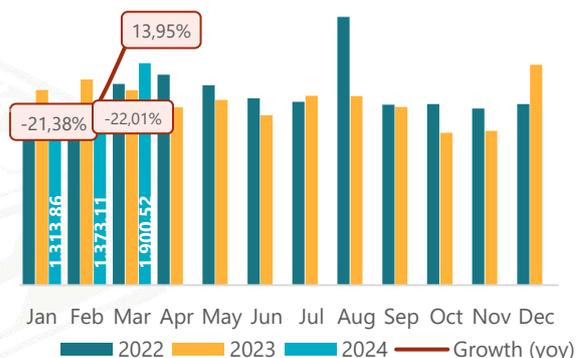
Sumber: BPS Kepri, 2024 (diolah)

Neraca perdagangan luar negeri provinsi Kepulauan Riau pada bulan Maret 2024 menghasilkan **Surplus Perdagangan** sebesar US\$882,63 juta. Jika dihitung secara kumulatif, neraca perdagangan Kepri pada periode triwulan I 2024 juga mencapai Surplus Perdagangan sebesar US\$883,21 Juta. Angka tersebut diperoleh dari total **nilai ekspor** Kepri di bulan Maret yang tinggi, khususnya dari golongan barang Bahan Bakar Mineral (Non Migas) yang tumbuh sebesar 17.286,05 persen (*mtm*).

Total **nilai ekspor** Provinsi Kepulauan Riau pada triwulan I 2024 senilai US\$4.587,39. Pada bulan Maret 2024, nilai ekspor Kepri sebesar US\$1.900,52 juta. Nilai ekspor tersebut mengalami pertumbuhan positif 13,95 persen (*yoy*) dan 38,41 persen (*mtm*). Hal tersebut

didorong oleh penurunan peningkatan ekspor Migas dan Non Migas sebesar 29,07 persen (*mtm*) dan 41,19 persen (*mtm*) secara berturut-turut. Nilai ekspor Provinsi Kepri menurut asal negara didominasi dari Singapura US\$597,41 juta, USA US\$407,84 juta, dan Australia US\$190,73 juta.

Grafik 1.11 – Perkembangan Ekspor Provinsi Kepri Bulanan Tahun 2022-2024 (*mtm*)

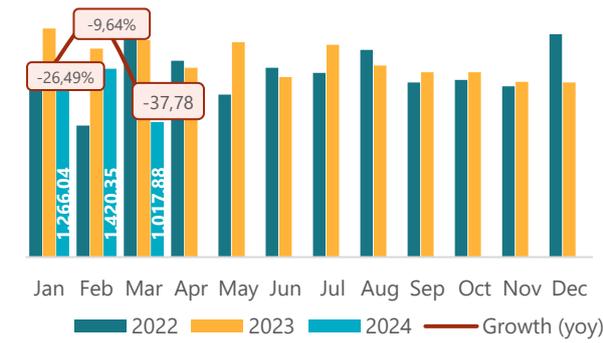


Sumber: BPS Kepri, 2024 (diolah)





Grafik 1.12 – Perkembangan Impor Provinsi Kepri Bulanan Tahun 2022-2024 (mtm)



Sumber: BPS Kepri, 2024 (diolah)

Total **nilai impor** Provinsi Kepulauan Riau sampai dengan triwulan I 2024 sebesar US\$3.704,27, dan pada Maret 2024 sebesar US\$1.017,88 juta. Nilai impor tersebut mengalami pertumbuhan negatif sebesar -37,78 persen (yoy) dan -28,34 persen (mtm). Hal tersebut dipengaruhi oleh penurunan impor migas sebesar -46,90 persen (yoy) dan sektor nonmigas juga mengalami penurunan sebesar -35,62 persen (yoy). Nilai impor berdasarkan negara didominasi oleh Tiongkok US\$242,43 juta, Singapura US\$106,00 juta, dan Korea Selatan US\$185,99 juta.

1.2 Analisis Perkembangan Indikator Kesejahteraan/Pembangunan

1.2.1 Tingkat Kemiskinan

Grafik 1.13 – Perkembangan Jumlah Penduduk Miskin Provinsi Kepri Tahun 2019-2023 (ribu jiwa dan %)



Sumber: BPS Kepri, 2024 (diolah)

Rasio penduduk miskin di sebuah daerah merupakan salah satu indikator dalam mengukur kesejahteraan masyarakat pada daerah tersebut. Penduduk miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran per kapita per bulan di bawah garis kemiskinan.

Penurunan tingkat kemiskinan adalah salah satu ukuran keberhasilan pembangunan dan

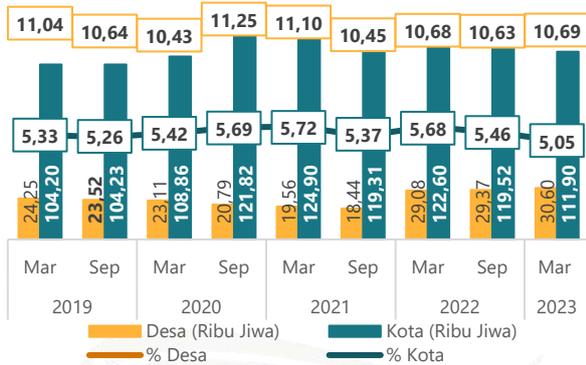
kesejahteraan masyarakat. Perbaikan kesejahteraan penduduk miskin tidak hanya tercermin pada penurunan angka kemiskinan saja namun juga terdapat perbaikan kualitas hidup penduduk miskin.

Berdasarkan ketersediaan data **Angka Kemiskinan** Provinsi Kepri per bulan Maret 2023, Angka Kemiskinan di Provinsi Kepri sebesar 142,50 ribu jiwa atau 5,69 persen dari total penduduk Kepri. Angka tersebut mengalami penurunan, baik dari jumlah penduduk miskin maupun dari persentasenya. Bila dibandingkan dengan bulan Maret 2022, **jumlah penduduk miskin** di Provinsi Kepri bulan Maret 2023 mengalami penurunan yang cukup signifikan sebesar 0,55 persen atau menurun ±9,18 ribu jiwa (yoy) dan bila dibandingkan dengan bulan September 2022, jumlah penduduk miskin di





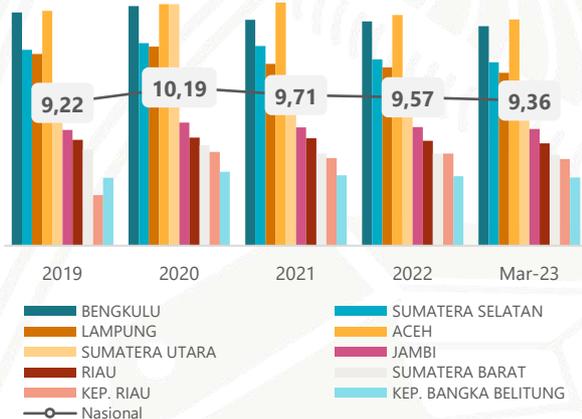
Grafik 1.14 - Perkembangan Jumlah Penduduk Miskin Provinsi Kepri Berdasarkan Perkotaan dan Pedesaan Tahun 2019-2023 (ribu jiwa dan %)



Sumber: BPS Kepri, 2024 (diolah)

Angka kemiskinan terbagi atas daerah perkotaan dan pedesaan dengan garis kemiskinan yang berbeda. Garis kemiskinan di Provinsi Kepri per Maret 2023 adalah sebesar Rp747.258,- di daerah Perkotaan dan Rp708.168,- untuk di daerah Pedesaan. Sampai dengan periode Maret 2023, angka kemiskinan di Perkotaan sebesar 10,69 persen dan di Pedesaan sebesar 5,05 persen.

Grafik 1.15 - Perkembangan Persentase Penduduk Miskin Regional Sumatera Tahun 2019-2023 (%)



Pada bulan Maret 2023, **persentase penduduk miskin di Kepri yang sebesar 5,69 persen menjadi persentase terendah keenam se-Indonesia, atau terendah kedua di Pulau Sumatera** di bawah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Angka ini juga berada di bawah angka kemiskinan Nasional yang sebesar 9,36 persen. Bila dibandingkan dengan target RPJMD Provinsi Kepri yang menargetkan persentase penduduk miskin di Tahun 2023 sebesar 5,74 persen, persentase penduduk miskin di Kepri (5,59 persen) masih berada dalam rentang yang aman dan bahkan lebih baik dibandingkan dengan target yang telah ditetapkan.

Beberapa **upaya pengentasan kemiskinan** yang dilakukan oleh pemerintah daerah adalah dengan adanya operasi pasar murah yang merupakan kegiatan (Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan) GNPIP bekerja sama dengan Bank Indonesia, program subsidi dengan bunga pinjaman nol persen untuk UMKM, dan percepatan belanja pemerintah.

Pemerintah juga turut mendorong daya beli masyarakat, khususnya pada pengembangan ekonomi masyarakat Pedesaan melalui **Dana Desa**.

Pada tahun 2024, **Dana Desa** di Provinsi Kepri dialokasikan sebesar Rp218,84 miliar yang diberikan kepada 5 Kabupaten di Kepri (Bintan, Karimun, Natuna, Lingga, dan Anambas). Dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa, Dana Desa tersebut diprioritaskan atas *Earmark* Bantuan Langsung Tunai (BLT) sebesar Rp33,30 miliar (15,21 persen dari Pagu) kepada 9.251 KPM, *Earmark* Ketahanan Pangan Rp46,09 miliar (21,06 persen dari Pagu) dan *Earmark Stunting* Rp30,06 miliar (13,73 persen dari Pagu).

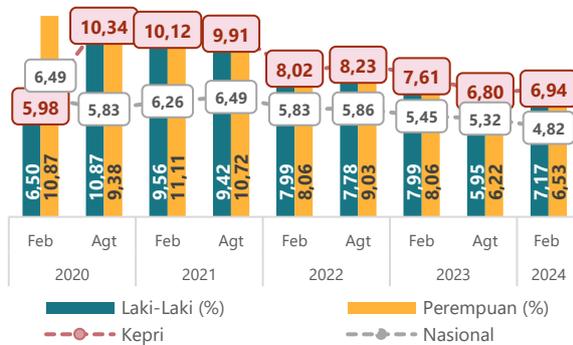




1.2.2 Tingkat Pengangguran

Penurunan **tingkat pengangguran** menjadi salah indikator dari perkembangan ekonomi di suatu regional. Pada bulan Februari 2024, Provinsi Kepulauan Riau mencatat **Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)** sebesar 6,94 persen dengan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) mencapai 67,14 persen. Angka TPT tersebut turun sebesar 0,67 poin dibanding dengan Februari 2023 (yoy), hal tersebut mencerminkan adanya pemulihan yang berkelanjutan dalam sektor ketenagakerjaan di Provinsi Kepri.

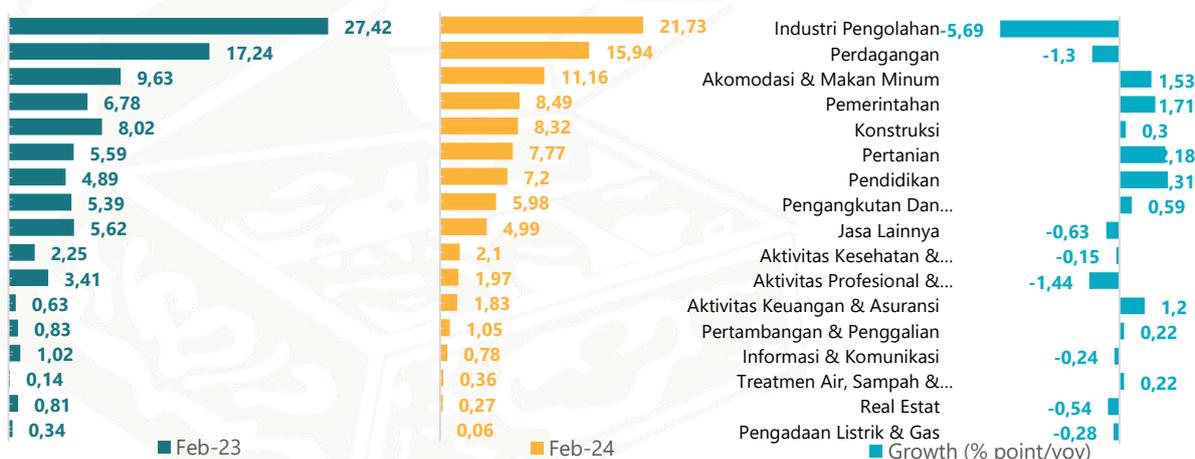
Grafik 1.16 – Perkembangan Angka TPT di Provinsi Kepri Tahun 2020-2024 (%)



Sumber Data: BPS, 2024 (diolah)

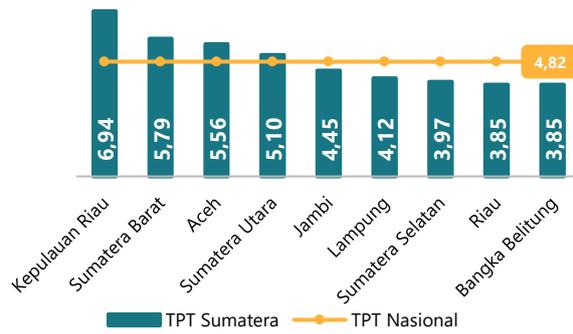
Pada bulan Februari 2024, **jumlah orang yang bekerja** di Provinsi Kepri tercatat mencapai 1.003,39 ribu orang atau 93,06 persen dari total Angkatan Kerja di Provinsi Kepri. Selanjutnya, jika dilihat dari jumlah penduduk, total Angkatan Kerja yang bekerja di bulan Februari 2024 menurun 19,73 ribu orang (yoy).

Grafik 1.20 - Distribusi dan Perubahan Penyerapan Tenaga Kerja Menurut Sektor Lapangan Usaha



Sumber Data: BPS, 2024 (diolah)

Grafik 1.17 – Angka TPT Per Provinsi di Regional Sumatera per Februari 2024 (%)



Sumber Data: BPS, 2024 (diolah)

Sampai dengan periode Februari 2024, **TPT di Provinsi Kepri berada pada peringkat pertama tertinggi di Regional Sumatera dan tertinggi ke-dua tertinggi Nasional**, setelah Banten dengan angka TPT sebesar 7,02. Namun demikian, persentase perubahan penurunan TPT Provinsi Kepri juga menjadi yang tertinggi ke-dua Nasional sebesar 1,58 persen poin (yoy). Penurunan TPT tersebut juga menjadi sinyal positif bahwa masyarakat di Provinsi Kepri telah memiliki akses dan kesempatan yang lebih baik terhadap lapangan pekerjaan dan kesempatan untuk berkontribusi dalam perekonomian.

Selama periode Februari 2023 hingga Februari 2024, komposisi tenaga kerja yang ada di Kepri diserap oleh 3 (tiga) sektor Lapangan Usaha, yaitu sektor Industri Pengolahan (21,73 persen), Perdagangan (15,94 persen) dan Akomodasi dan Makanan Minuman (11,16 persen).

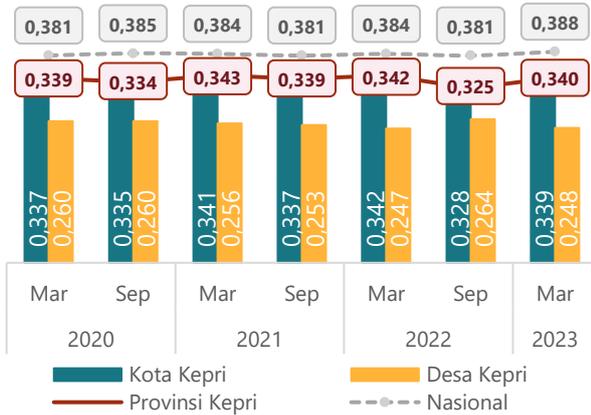




Namun demikian, sektor Industri Pengolahan juga menjadi sektor yang mengalami penurunan penyerapan tenaga kerja terbesar dengan pertumbuhan negatif sebesar 5,69 persen (yoy).

1.2.3 Ketimpangan Pendapatan (Rasio Gini)

Grafik 1.18 - Perkembangan Gini Ratio Provinsi Kepri Tahun 2020-2023



Sumber Data: BPS, 2024 (diolah)

Gini Ratio Kepri per Maret 2023 sebesar 0,34, meningkat 0,015 persen dibandingkan September 2022 sebesar 0,325, artinya ketimpangan pengeluaran meningkat pada periode Maret 2023. Namun bila dibandingkan dengan periode Maret 2022, Pemerintah dengan upaya yang dilakukan, di antaranya dengan tetap menyalurkan bantuan sosial, menciptakan lapangan kerja yang layak serta perbaikan standar pengupahan yang dibutuhkan untuk memperkuat daya beli masyarakat dalam

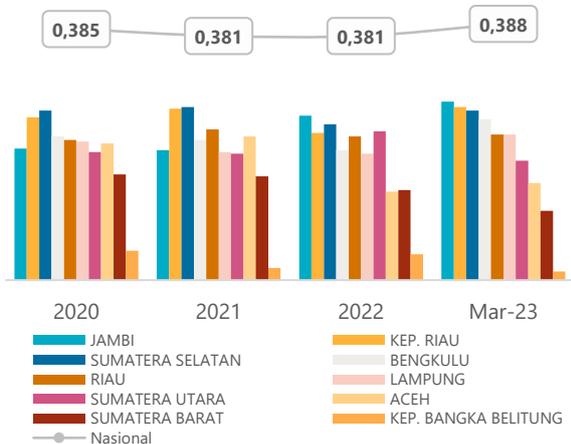
menyambut ketidakpastian ekonomi di masa mendatang.

Angka **gini ratio Provinsi Kepri per Maret 2023 berada pada peringkat kedua tertinggi** di regional Sumatera. Pertumbuhan ekonomi yang terus melaju nyatanya tidak serta merta mengurangi ketimpangan sosial, hal ini menunjukkan bahwa kemanfaatan dari pertumbuhan ekonomi di suatu daerah, khususnya di Kepulauan Riau yang pada periode Maret 2023 tidak dirasakan secara merata. Artinya, golongan masyarakat berpendapatan rendah mempunyai kecepatan yang lebih rendah dalam menikmati "kue" suksesnya pertumbuhan ekonomi.

Dalam memberikan peran hadirnya Pemerintah bagi masyarakat dalam mengurangi tingkat pendapatan masyarakat, terdapat beberapa hal yang telah dilaksanakan oleh Pemda maupun Pempus dalam menurunkan *gini ratio* yang ada di Provinsi Kepri.

Beberapa wujud **peran pemerintah** dilakukan dalam pemberian program pemberdayaan masyarakat melalui Program Kewirausahaan, Usaha Mikro, Kecil Menengah, dan Koperasi, yang pada tahun 2023 telah direalisasikan sebesar Rp458,37 miliar di tahun 2023, program pemberdayaan UMKM juga diberikan dalam pemberian subsidi pembiayaan usaha UMKM baik melalui KUR/UMi/dan Program Pembiayaan Bunga nol persen dari Pemprov Kepri. Kemudian, sebagai **bantalan sosial, APBN** juga telah memberikan BLT kepada para KPM baik melalui TKD ataupun belanja K/L. Selain itu, program pendidikan dan pelatihan juga terus diberikan baik oleh Pempus maupun Pemda, salah satunya adalah melalui Balai Latihan kerja dalam rangka meningkatkan keterampilan dan kualifikasi tenaga kerja lokal.

Grafik 1.19 - Perkembangan Gini Ratio Regional Sumatera Tahun 2020-2023



Sumber Data: BPS, 2024 (diolah)

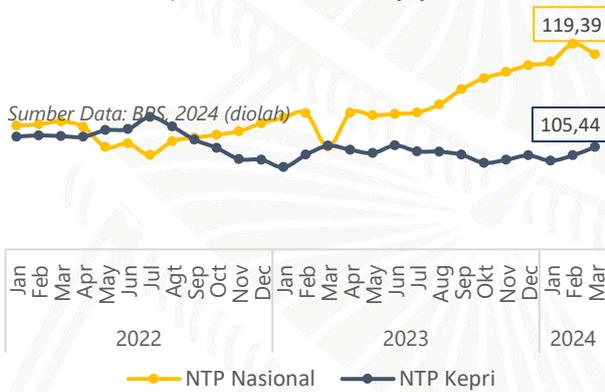




1.2.4 Nilai Tukar Petani

NTP merupakan salah satu indikator yang digunakan dalam memahami kondisi ekonomi dan **kesejahteraan petani** serta dampaknya terhadap ketahanan pangan dan pertumbuhan ekonomi di suatu regional. Nilai tersebut diperoleh dari perbandingan antara harga barang yang dihasilkan petani dengan harga barang yang harus mereka bayar sebagai konsumsi maupun input produksi. Nilai tersebut dipengaruhi oleh produktivitas, permintaan, harga komoditas, harga barang konsumsi, harga pupuk, serta biaya operasi/produksi lain seperti upah dan modal kerja.

Grafik 1.21 – Perkembangan Nilai Tukar Petani Provinsi Kepri Tahun 2022-2024 (%yoy)



Sumber Data: BPS, 2024 (diolah)

NTP Provinsi Kepulauan Riau pada bulan Maret 2024 sebesar 105,44 dan menunjukkan pertumbuhan negatif sebesar 0,17 persen (yoy). Angka NTP Provinsi Kepri masih berada di bawah angka NTP Nasional (119,39), hal tersebut disebabkan oleh kondisi geografis Kepri yang memang belum optimal dijadikan sebagai lahan pertanian. Indeks Harga yang Diterima Petani (It) di Kepri bulan Maret 2024 mengalami kenaikan 1,21 persen dibandingkan dengan Februari 2024.

Pada periode Maret 2024 tercatat seluruh subsektor mengalami peningkatan Indeks Harga yang Diterima Petani (It). NTP subsektor Tanaman Pangan tercatat sebesar 97,72; NTP subsektor Hortikultura sebesar 114,09; NTP subsektor Tanaman Perkebunan Rakyat sebesar 100,97; NTP subsektor Peternakan sebesar 100,53; dan NTP subsektor Perikanan sebesar

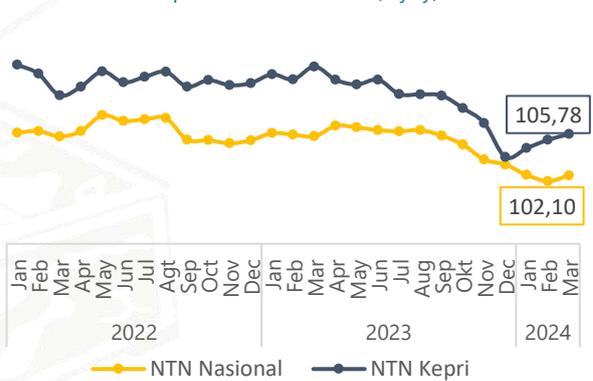
105,78. Dari keseluruhan subsektor, tanaman perkebunan rakyat telah mengalami persentase pertumbuhan tertinggi yaitu sebesar 2,21 persen dan diikuti oleh subsektor peternakan dengan pertumbuhan 2,11 persen (mtm).

Beberapa **tantangan terkait pengembangan sektor pertanian** di Kepri antara lain: **(1)** kurangnya dukungan infrastruktur kegiatan pertanian (irigasi, jalan usaha tani, bangunan pengolahan hasil pertanian); **(2)** belum optimalnya kapasitas petani dan pelaku perkebunan karena karakteristik geografis Kepri yang dikelilingi oleh bakau dan tanah bauksit sehingga perlu SDM yang cakap dalam mengelola pertanian; **(3)** serta perlunya pengembangan penggunaan teknologi pertanian baik dalam pengolahan maupun keberlanjutan pemasaran. Selain itu, lahan pertanian yang tidak terlalu luas juga menjadi tantangan dalam mengembangkan sektor pertanian di Kepri.

1.2.5 Nilai Tukar Nelayan

Kondisi geografis Kepri dengan panjang garis pantai 8.561,33 Km. Dengan kondisi demikian, tentunya Kepri menyimpan potensi kelautan dan perikanan yang sangat besar. Untuk mengelola potensi sumberdaya kelautan dan perikanan, Pemerintah Kepri telah memberikan posisi yang cukup kuat dalam membangkitkan kekuatan ekonomi kelautan dan perikanan untuk kemajuan masyarakat Kepri.

Grafik 1.22 – Perkembangan Nilai Tukar Petani Provinsi Kepri Tahun 2022-2024 (%yoy)



Sumber Data: BPS, 2024 (diolah)





NTN adalah rasio yang digunakan untuk mengukur kemampuan tukar produk perikanan tangkap dan budidaya yang dihasilkan nelayan dengan barang atau jasa yang dikonsumsi oleh rumah tangga nelayan dalam memenuhi kebutuhan rumah tangga dan menghasilkan produksi perikananannya. NTN terdiri atas nilai tukar perikanan tangkap dan nilai tukar perikanan budidaya.

NTN Kepri di bulan Maret 2024 yang tergambar pada Grafik 1.21 sebesar 105,78. Angka NTN tersebut mengalami penurunan sebesar 5,39 persen (*yoy*) dan tumbuh negatif sebesar 0,48 persen (*mtm*) dan berada di atas angka NTN Nasional (102,10). Hal tersebut dipicu oleh kondisi geografis Kepri yang masih diterpa angin utara dan menyebabkan kurangnya aktivitas nelayan.

Namun demikian, capaian NTN tersebut masih berada di bawah **sasaran NTN** pada Renstra Dinas Kelautan dan Perikanan di Kepri yang pada tahun 2024 ditargetkan sebesar 116. Maka dari itu pemerintah akan terus meningkatkan produksi perikanan budidaya dan perikanan tangkap serta meningkatkan kapasitas nelayan terkait teknologi kelautan perikanan.

Peningkatan NTN tersebut dipengaruhi oleh kenaikan Indeks Harga yang Diterima Nelayan (It) sebesar 0,56 persen lebih besar daripada kenaikan Indeks Harga yang Dibayar Nelayan (Ib) sebesar 0,16 persen. Kenaikan Indeks Harga yang Diterima Nelayan secara garis besar didukung oleh naiknya harga komoditas tongkol (3,22 persen) untuk perikanan tangkap dan naiknya harga komoditas kepiting laut (5,41 persen) untuk perikanan budidaya.

Terdapat beberapa **tantangan dalam mengembangkan sektor perikanan** di Kepri, khususnya tantangan dari segi ekonomi dan industri. Beberapa tantangan tersebut antara lain: **(1)** masih terdapat kasus *Illegal, Unreported and Unregulated* (IUU) Fishing di pulau terluar Kepri seperti di Natuna dan berdampak pada

hilangnya hasil laut Kepri yang seharusnya menjadi bagian nelayan lokal; **(2)** pencemaran laut oleh pembuangan limbah (minyak hitam) dari kapal internasional di perairan Selat Malaka; **(3)** lemahnya permodalan dalam menunjang usaha perikanan khususnya, bagi usaha kecil dan menengah; serta **(4)** teknologi pengolahan perikanan yang masih terbatas dan belum terstandar berstandar ekspor.

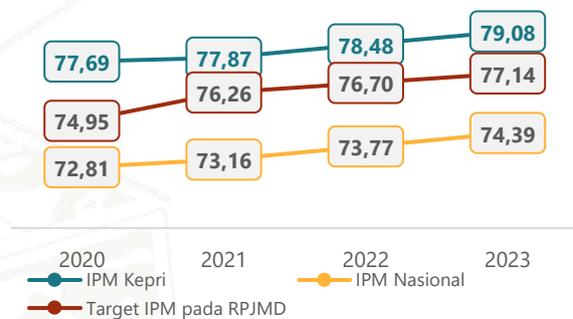
Maka dari itu, pemerintah pusat melalui Kementerian Kelautan dan Perikanan turut mengupayakan perkembangan sektor perikanan di Kepri yang dilaksanakan melalui beberapa program.

Sampai dengan triwulan I 2024, Pagu Belanja pada Kementerian Kelautan dan Perikanan di Kepri adalah sebesar Rp106,06 miliar. Belanja tersebut telah direalisasikan sebesar Rp15,56 miliar atau mencapai 14,67 persen dari total pagu TA 2024.

Beberapa **kegiatan mendorong pengembangan sektor perikanan** melalui beberapa kegiatan, antara lain: **(1)** fasilitasi dan pembinaan masyarakat/kelompok masyarakat; **(2)** operasi pengawasan sumber daya alam; **(3)** dukungan pembinaan UMKM; **(4)** fasilitasi dan pembinaan industri; **(5)** serta beberapa kegiatan lainnya yang membantu para nelayan untuk meningkatkan kualitas produksinya.

1.2.6 Indikator Pembangunan Manusia

Grafik 1.23 - Perkembangan IPM Provinsi Kepri, Nasional, dan Target Tahun 2020-2023



Sumber Data: BPS, 2024 (diolah)





IPM merupakan indikator yang digunakan untuk melihat keberhasilan atas capaian hasil pembangunan suatu wilayah/daerah dalam aspek pembangunan manusia. Tidak hanya mengukur capaian ekonomi semata, IPM juga memiliki esensi dasar sebagai indikator atas kebahagiaan manusia dalam aspek kehidupan.

Dalam kurun waktu lima tahun terakhir, IPM Kepri secara perlahan terus meningkat sejalan dengan pencapaian ekonomi nasional dan daerah. Kenaikan IPM Kepri dari tahun ke tahun menunjukkan peningkatan kualitas pembangunan manusia. Angka dari IPM bukan hanya mengukur tingkat kesejahteraan manusia namun juga mengukur tingkat pendidikan, kesehatan, dan juga kesempatan dalam mendapatkan pengetahuan. **Angka IPM terdiri dari 3 dimensi yaitu umur panjang dan hidup sehat (*a long and healthy life*), pendidikan (*knowledge*), serta standar hidup layak (*decent standard of living*) diukur dari pendapatan per kapita riil yang telah disesuaikan dengan daya beli (*Purchasing Power Parity/PPP*) di wilayah yang bersangkutan.**

Sejak tahun 2023, terdapat perubahan metode perhitungan IPM, yang sebelumnya menggunakan UHH dengan tahun dasar 2010,

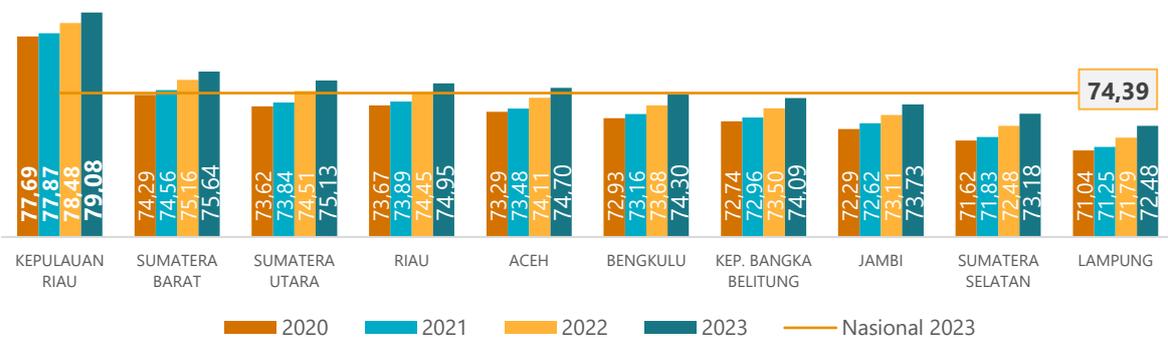
saat ini telah menggunakan UHH dengan tahun dasar 2020. Hal tersebut akhirnya menyebabkan adanya perubahan IPM yang berbeda sejak tahun 2020 hingga tahun 2023.

Pembangunan manusia di Kepri terus mengalami kemajuan. Sejak 2010, status pembangunan manusia di Kepri sudah berada di level "tinggi". Berdasarkan data IPM dengan metode perhitungan baru, **angka IPM Kepri pada tahun 2023 dengan tingkat IPM tertinggi ke-tiga Nasional** sebesar 79,08 dan tumbuh sebesar 0,76 persen (*yoy*). Bila dilihat per kab/kota di Provinsi Kepri, di sepanjang tahun 2023 angka IPM tertinggi berada di Kota Batam sebesar 82,64 dan IPM terendah ada di Kabupaten Lingga pada angka 72,23.

Jika dibandingkan dengan provinsi lain di Regional Sumatera, **IPM Provinsi Kepri berada pada peringkat tertinggi selama empat tahun berturut-turut.** Selanjutnya disusul oleh Provinsi Sumatera Barat, Sumatera Utara, Riau, Aceh, Bengkulu, Kep. Bangka Belitung, Jambi, Sumatera Selatan, dan Lampung secara berturut-turut.

Capaian tersebut merupakan prestasi bagi Kepri yang berhasil menjadi provinsi dengan IPM tertinggi pada Regional Sumatera selama lima tahun berturut-turut. Kemudian, IPM Kepri di tahun 2023 juga telah melampaui angka IPM yang ditargetkan dalam RPJMD Kepri 2021-2026 yaitu 77,14.

Grafik 1.24 - Indeks Pembangunan Manusia Regional Sumatera Tahun 2020-2023

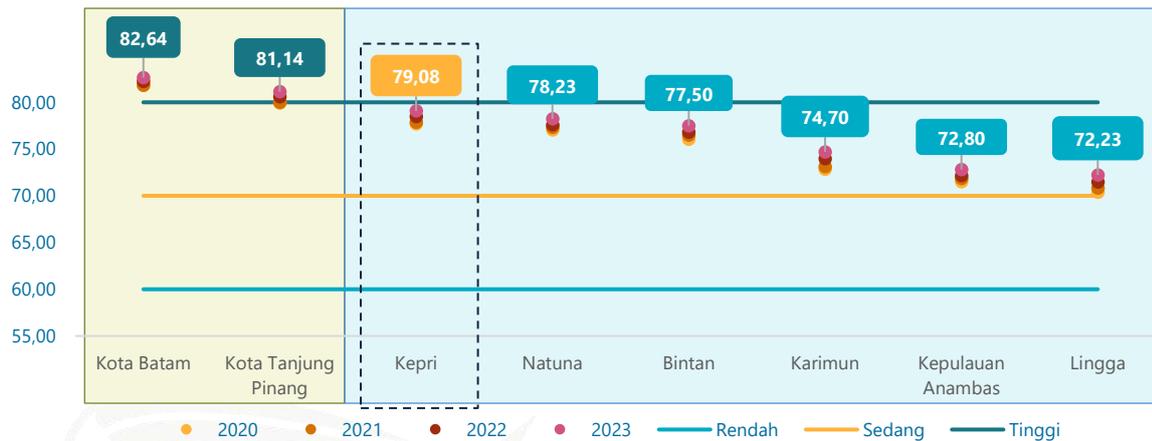


Sumber Data: BPS, 2024 (diolah)





Grafik 1.25 – Tren IPM Per Kab/Kota di Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2020-2023



Sumber Data: BPS, 2024 (diolah)

IPM dikelompokkan ke dalam beberapa kategori, $IPM < 60$ (rendah), $60 \leq IPM < 70$ (sedang), $70 \leq IPM < 80$ (tinggi), $IPM \geq 80$ (sangat tinggi). Bila dilihat berdasarkan Kab/Kota, IPM dengan kategori tertinggi ada di Kota Batam dan Tanjungpinang dengan nilai IPM masing-masing sebesar 82,64 dan 81,14.

Selanjutnya, berdasarkan kategori IPM yang terdapat pada Grafik 1.25, dapat terlihat bahwa profil IPM disepanjang tahun 2020-2023 pada seluruh kab/kota di Provinsi Kepri terbagi atas kategori Tinggi dan Sangat Tinggi. Kota Batam dan Kota Tanjungpinang menjadi Kota dengan kategori IPM "Sangat Tinggi" ≥ 80 dengan IPM di tahun 2023 masing-masing sebesar 82,64 dan 81,14. Kemudian, untuk Provinsi Kepri, Kab. Natuna, Kab. Bintan, Kab. Karimun, Kab. Kep. Anambas, dan Lingga berada di kategori IPM "Tinggi".

Keberlanjutan peningkatan IPM Kepri menunjukkan adanya perbaikan kesejahteraan yang tercermin dari indikator pembentuk IPM, yaitu Umur Harapan Hidup (UHH), harapan lama sekolah (HLS), rata-rata lama sekolah (RLS), dan standar hidup layak yang diukur dari nilai pengeluaran per kapita.

Pada tahun 2023, **UHH** penduduk Kepri mengalami peningkatan sebesar 0,38 persen (yoy), menjadi 74,90 dari sebelumnya 74,62. Peningkatan UHH dapat diartikan bahwa bayi yang baru lahir memiliki peluang untuk hidup hingga usia 70,50 tahun.

Kemudian, **HLS** Kepri di tahun 2023 meningkat 0,46 persen menjadi 13,05 tahun dari yang sebelumnya 12,99 tahun, peningkatan tersebut memberikan arti bahwa anak-anak usia 7 tahun memiliki peluang untuk bersekolah selama 13,05 tahun. Lebih lanjut, RLS di Kepri juga meningkat 0,39 persen menjadi 10,41 tahun dari yang sebelumnya 10,37 tahun.

Grafik 1.26 - Nilai Indikator Indeks Pembangunan Manusia di Kepri Tahun 2020-2023



Sumber Data: BPS, 2024 (diolah)





Artinya penduduk usia 25 tahun ke atas secara rata-rata telah menempuh pendidikan selama 10,37 tahun.

Peningkatan juga terjadi pada **pengeluaran per kapita** yang tumbuh sebesar 3,66 persen di tahun 2023 (yoy) yang menandakan adanya peningkatan pengeluaran masyarakat Kepri, baik dari sisi konsumsi maupun sisi investasi. Perbaikan kesejahteraan masyarakat Kepri yang tergambar melalui keempat indikator pembentuk IPM yang terus meningkat sejak tahun 2020 hingga 2023 menunjukkan adanya kualitas hidup masyarakat Kepri yang semakin baik.

Pemerintah melalui APBN telah mengalokasikan sumber daya yang signifikan untuk meningkatkan IPM di Kepri khususnya untuk mendukung Bidang Kesehatan dan Bidang Pendidikan.

Sampai dengan periode triwulan I 2024, APBN telah mengalokasikan Belanja Fungsi Kesehatan dan Fungsi Pendidikan dengan pagu masing-masing sebesar Rp213,43 miliar dan Rp889,03 miliar.

Sampai dengan triwulan I 2024, **Belanja Fungsi Kesehatan** telah direalisasikan sebesar Rp39,13 miliar atau tercapai 18,34 persen dari Pagu tahun 2023. Belanja tersebut difokuskan pada Program Kesehatan Masyarakat, Pelayanan Kesehatan dan JKN, Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana, Pencegahan dan Pengendalian Penyakit.

Pada tahun 2024, **Belanja Fungsi Pendidikan** di Provinsi Kepri difokuskan untuk kegiatan Peningkatan Kualitas Dan Kapasitas Perguruan Tinggi Vokasi. Sampai dengan akhir bulan Maret 2024, Belanja Bidang Pendidikan telah direalisasikan sebesar Rp110,86 miliar atau mencapai 12,47 persen dari Pagu tahun 2024. Belanja tersebut difokuskan pada peningkatan Program PAUD dan Wajib Belajar 12 Tahun Kualitas Pengajaran dan Pembelajaran, Pemajuan dan Pelestarian Bahasa dan

Kebudayaan, Pendidikan dan Pelatihan Vokasi, Pendidikan Tinggi, serta Program Perpustakaan dan Literasi.

Selain itu, melalui **Belanja Transfer ke Daerah** (TKD) tahun 2024, pemerintah telah mengalokasikan DAK Non Fisik untuk Bantuan Operasional Sekolah (BOS), BOP PAUD dan BOP Kesetaraan dengan Pagu masing-masing sebesar Rp594,55 miliar, Rp287,35 miliar, dan Rp12,24 miliar. Sampai dengan triwulan I 2024, realisasi BOS telah mencapai Rp287,35 miliar atau 38,33 persen dari Pagu, realisasi Dana BOP PAUD telah terealisasikan sebesar Rp11,98 miliar atau 38,41 persen dari Pagu, dan realisasi Dana BOP Kesetaraan sebesar Rp5,83 miliar atau 47,61 persen dari Pagu tahun 2024.

Pemerintah Daerah Provinsi Kepri juga telah melakukan beberapa upaya dalam meningkatkan kualitas Pendidikan di Provinsi Kepri. Pada tahun 2024, Balai Penjamin Mutu Pendidikan (BPMP) Provinsi Kepri fokus pada tiga program prioritas yaitu pengangkatan guru penggerak menjadi kepala sekolah dan pengawas sekolah, percepatan pembentukan satgas dan tim pencegahan dan penanganan kekerasan di satuan pendidikan, dan optimalisasi *chromebook* dan akun belajar *id*.

Dalam meningkatkan IPM, Pemda Provinsi Kepri juga melaksanakan beberapa program diantaranya dengan Penyediaan Rumah Singgah di Jakarta dan Batam dengan fasilitas lengkap secara gratis dalam rangka membantu masyarakat yang akan berobat, penambahan ambulans laut di Lingga, Bantuan Pasang Baru Listrik (BPBL), rehabilitasi rumah masyarakat Suku Laut, serta peningkatan layanan RS Melayu penyediaan layanan pemasangan Ring Jantung dan kerjasama dengan RS dr.Sarjito Yogyakarta pada RSUD Raja Ahmad Tabib.



Special Box #1

Exclusive Economic Zone yang Diperebutkan Negara Asia Timur

"Mampukah Natuna Menghadapi Geopolitical Conflict dan Keluar dari Economic Growth Trap?"

Pendekatan Teori – **A Deadly Triangle** - dan Metode Komparasi Literatur

Latar belakang

Pemda dan Pemerintah Pusat (Setkab.go.id, 2020) telah menegaskan mengenai teritori Natuna *Exclusive Economic Zone* (EEZ), kabupaten di Kepulauan Riau, terhadap pengakuan sepihak nine-dash lines Cina di wilayah laut Cina Selatan yang tidak sesuai dengan *United Nations Conventions on the Law of the Sea* (1982 UNCLOS).

Sampai dengan saat ini, sejumlah konflik terkait eksplorasi minyak dan gas serta perikanan terus terjadi dengan Malaysia, Filipina, Brunei Darussalam, Vietnam, Taiwan dan Cina. Calder (1996) dalam bukunya *Asia's Deadly Triangle-How Arms, Energy and Growth Threaten to Destabilize Asia Pacific* menyimpulkan bahwa konflik wilayah tersebut akan mempengaruhi 3 faktor yaitu pertumbuhan ekonomi, kekurangan energi dan kebutuhan keamanan laut. Konflik ini tidak hanya masalah politik dan ekonomi tapi juga kedaulatan nasional (Sukadis, 2021).

Natuna dengan laut Natuna Utara terletak antara Indonesia EEZ, sebelah selatan Laut Cina Selatan, timur laut Thailand, utara laut Natuna dan perbatasan dengan Vietnam dan Malaysia. Laut Natuna Utara menjadi area strategis karena menjadi perlintasan perdagangan internasional melalui laut yang dilintasi kapal dari Asia Timur (Jepang, Korea, Cina, Taiwan dll) menuju Asia Tenggara dan Tengah. Potensi lautnya luar biasa selain minyak dan gas diperkirakan 14 juta barel minyak dan 112 juta barel gas. Potensi gas *hydrocarbon* adalah yang terbesar di Asia sekitar 46 TCT dengan kurang lebih 16 blok migas aktif. Potensi situs, batu granit, artefak peninggalan dinasti Cina, Vietnam, Thailand, Khmer, Jepang dll, budaya dan sejarah menjadikan Natuna disetujui menjadi Geopark Internasional. Potensi kekayaan biota laut seperti ikan, udang, cumi, lobster, kepiting mencapai volume 27,3 juta ton lebih atau sebesar Rp19,3 miliar lebih (Bateman, 1998).

Komparasi dengan Asia Timur

Perbatasan Maritim

Terdapat tiga jenis perbatasan di daerah maritim (*Tuna Fishery Yearbook 1994*) yaitu 1) perbatasan teritorial laut; 2) perbatasan landasan kontinen dan 3) perbatasan EEZ.

Perbatasan maritim yang berpotensi konflik membutuhkan keamanan dari Angkatan laut, Ditjen Bea Cukai dan polisi laut untuk menjaga tidak hanya sumber daya alam yang ada di landasan kontinen maupun EEZ melainkan yang terpenting adalah kedaulatan negara. Perbatasan Indonesia-Malaysia, Indonesia-Singapura, Korea Selatan-Jepang harus diwaspadai dan dijaga.

Sumber Daya Hayati

EEZ adalah wilayah perairan yang kaya dengan ikan dan sumber daya laut lainnya. Negara maju seperti Jepang, Cina, Korea Selatan telah menggunakan mekanisme *Distant Water Fishing Nations* (DWFN) dengan output yang sangat besar (Saywell, 1997). Cina dengan metode longline fishing di sepanjang barat dan sentral

Pasific menggunakan 461 kapal (*vessels*) dan menghasilkan 14.149 metric ton. Penggunaan DWFN ini juga melahirkan tensi politik ketika menyinggung yurisdiksi negara lain selain isu degradasi habitat laut, pembabatan hutan mangrove, eksploitasi karang laut, sedimentasi, polusi laut, penggunaan dinamit dan illegal fishing. (Valencia, 1996). Isu ini mencuat menjadi diskusi hangat di meja politik terkait ketersediaan politik karena terkait dengan ketersediaan pangan masyarakat

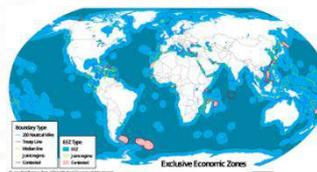
Pertumbuhan Ekonomi

Teori **"A Deadly Triangle"** antara pertahanan, energi dan pertumbuhan ekonomi menjadi topik kajian ini. Cina yang mengalami penurunan stok energi minyak dan gas alam akibat eksploitasi suplai industri secara masif menghasilkan pertumbuhan ekonomi tertinggi di dunia, untuk itu Cina meningkatkan tensi eksploitasi ke negara tetangga. Mekanisme *"beggar thy neighbour"* pun terjadi. Bagaimana dengan Natuna? Natuna menjadi objek dari *"beggar thy neighbour"* sehingga mengakibatkan pengeluaran keamanan menjadi sangat tinggi di kabupaten kecil tersebut dan investor tidak berani melanjutkan eksplorasi melihat tensi panas dengan Cina.

Akibatnya, pertumbuhan ekonomi Natuna tidak mampu meningkat. Natuna masuk kedalam kondisi low income trap dengan PAD yang kecil (8% dari total pendapatan) dan sangat bergantung kepada Transfer ke Daerah (92% dari total pendapatan). Lokasi, geografis yang sangat strategis ditambah sumber daya perikanan dan alam yang melimpah justru mengakibatkan kesulitan bagi ekonomi Natuna untuk tumbuh dan menjadi sejahtera.

Kesimpulan

1. Perbatasan Natuna – Indonesia dengan negara-negara lain ternyata mengakibatkan tingginya pengeluaran keamanan untuk menjaga yurisdiksi dan kedaulatan wilayah Indonesia.
2. Kemampuan perikanan nelayan Natuna tidak mampu berkembang seiring dengan konflik di daerah tengah laut dengan kehadiran Distant Water Fishing Nations (DWFN) negara Cina, Jepang, Korea Selatan dan Taiwan yang mengeksploitasi bahkan sampai melanggar komitmen perbatasan antar negara.
3. Pengeluaran untuk keamanan dan pertahanan menjadi tinggi seiring dengan tensi geopolitik dari negara tetangga yang semakin meruncing. Hal ini menggerus pendapatan Natuna baik dari PAD maupun TKD
4. Pertumbuhan ekonomi Natuna tidak semakin membaik karena adanya trade off antara keberkahan sumber daya alam yang melimpah namun dikuasai negara lain dan tidak dapat dimaksimalkan oleh Natuna, pengeluaran keamanan dan pertahanan yang tinggi dan kesejahteraan masyarakat yang tidak semakin membaik.



Analisis fiskal Regional





2.1 Analisis Laporan Realisasi Anggaran

2.1.1 Pelaksanaan APBN Tingkat Provinsi

Sebagai instrumen kebijakan fiskal dalam mencapai tujuan bernegara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) menjalankan tiga fungsi yaitu stabilisasi, alokasi, dan distribusi. Fungsi stabilisasi dijalankan melalui **peran APBN sebagai shock absorber** untuk menstabilkan harga. Pada fungsi alokasi, APBN berperan untuk membuat ekonomi semakin efisien dan tidak distortif. Pada fungsi

distribusi, APBN berperan sebagai alat pemerataan keadilan. Ketiga fungsi tersebut tak hanya dijalankan dalam skala nasional, tetapi juga pada tingkat regional. APBN dianggarkan dan direalisasikan untuk mencapai tujuan masyarakat Kepri yang sejahtera melalui peningkatan indikator perekonomian dan kesejahteraan masyarakat. Adapun perkembangan APBN di Kepri tergambar pada Tabel 2.1 berikut.

Tabel 2.1 – Pagu dan Realisasi I-Account APBN di Kepri, 2023 s.d. 2024 (dalam miliar rupiah)

I-Account (Miliar Rupiah)	TA 2023			TA 2024			Growth 2023-2024
	Pagu	Real	% Real	Pagu	Real	% Real	
A. Pendapatan dan Hibah	11.510,13	2.369,64	20,59%	14.139,81	2.847,02	20,13%	20,15%
I. Penerimaan Perpajakan	9.209,34	2.113,34	22,95%	11.474,64	2.217,51	19,33%	4,93%
II. Penerimaan Negara Bukan Pajak	2.300,79	256,30	11,14%	2.665,17	629,51	23,62%	145,62%
B. Belanja Negara	19.198,78	2.817,36	14,67%	17.584,58	3.459,78	19,68%	22,80%
I. Belanja Pemerintah Pusat	9.898,32	982,97	9,93%	9.541,41	1.506,43	15,79%	53,25%
1. Belanja Pegawai	2.072,21	408,34	19,71%	2.130,56	573,67	26,93%	40,49%
2. Belanja Barang	4.944,85	434,41	8,79%	4.286,15	714,46	16,67%	64,47%
3. Belanja Modal	2.630,22	122,32	4,65%	2.863,95	215,39	7,52%	76,09%
7. Bantuan Sosial	4,59	1,41	30,68%	5,84	2,91	49,85%	106,49%
8. Belanja Lainnya	246,44	16,49	6,69%	254,91		0,00%	(100,00%)
II. Transfer Ke Daerah	9.300,45	1.834,39	19,72%	8.043,16	1.953,35	24,29%	6,49%
1. Dana Bagi Hasil	2.447,33	197,69	8,08%	1.066,15	172,49	16,18%	(12,75%)
2. Dana Alokasi Umum	4.474,84	1.244,93	27,82%	4.817,40	1.333,84	27,69%	7,14%
3. Dana Transfer Khusus	1.979,78	308,31	15,57%	1.887,60	340,36	18,03%	0,00%
a. Dana Alokasi Khusus Fisik	805,94	0,00	0,00%	648,36	0,00	0,00%	0,00%
b. Dana Alokasi Khusus NonFisik	1.173,84	308,31	26,27%	1.239,24	340,36	27,46%	10,39%
6. Dana Desa	225,94	78,41	34,70%	218,84	102,83	46,99%	31,14%
7. Dana Insentif Fiskal	166,77	5,05	3,03%	53,18	3,84	7,21%	(24,08%)
C. Surplus/Defisit Anggaran	(7.688,65)	(447,72)	5,82%	(3.444,76)	(612,76)	17,79%	36,86%

Sumber: OMSPAN, Sintesa, dan Dit APK, 2024 (data diolah)

Target Pendapatan Negara di Provinsi Kepulauan Riau sebesar Rp14.139,07 miliar, meningkat 20,15 persen (yoy) pada tahun 2024. Penerimaan Perpajakan merupakan sektor dengan Target penerimaan tertinggi dengan Target sebesar 11.474,64 miliar. Apabila dirincikan lebih lanjut, Pajak Dalam Negeri ditargetkan sebesar Rp10.822,28 miliar, dan Pajak Perdagangan Internasional sebesar

Rp652,37 miliar. Tingginya Target Penerimaan Perpajakan ini sesuai dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2023 tentang APBN Tahun Anggaran 2024, terdapat kenaikan Target PPh sebesar 14,0 persen, PPN dan PPnBM sebesar 13,0 persen. Kebijakan ini diharapkan dapat menstimulus perkembangan ekonomi Kepri di berbagai sektor.





Pendapatan sektor **PBB** mengalami penurunan Target sebesar 53,2 persen dikarenakan terjadi pengurangan keluasaan dan perpindahan wajib pajak PBB P5L. Salah satu faktor utamanya diakibatkan oleh penurunan harga komoditas CPO dan perubahan lokasi ekspor pengolahan minyak Propana dan Butana PT. Pertamina ke Provinsi Aceh.

Penerimaan **PNBP** pada tahun 2024 ditargetkan sebesar Rp3.068,43 miliar, yang terbagi pada Pendapatan BLU sebesar Rp2.665,35 miliar dan PNBP lainnya Rp403,08 miliar.

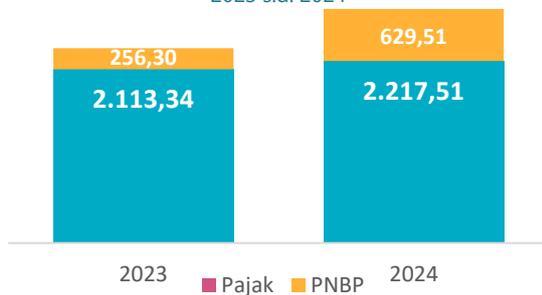
Pagu Belanja APBN 2024 sebesar Rp17.584,58 miliar, terdiri dari Belanja Pemerintah Pusat Rp9.541,41 miliar dan Transfer ke Daerah (TKD) sebesar Rp8.043,16 miliar.

Berdasarkan alokasi Pagu Belanja Pemerintah Pusat tersebut, alokasi tertinggi berada pada Belanja Barang sebesar Rp4.286,15 miliar (44,92 persen dari total Pagu Belanja K/L), dan Belanja Modal sebesar Rp2.863,95 miliar (30,02 persen dari total Pagu Belanja K/L). Belanja Modal tahun 2024 Provinsi Kepulauan Riau difokuskan pada pembangunan Infrastruktur, sektor Pendidikan, Kesehatan dan Perdagangan Investasi.

Apabila dilihat dari sisi **Belanja TKD** sebagian besar dialokasikan pada Dana Alokasi Umum (DAU) sebesar Rp4.817,40 miliar (59,89 persen dari total Pagu TKD), dan DAK Non Fisik sebesar Rp1.239,24 miliar (15,40 persen dari total Pagu TKD).

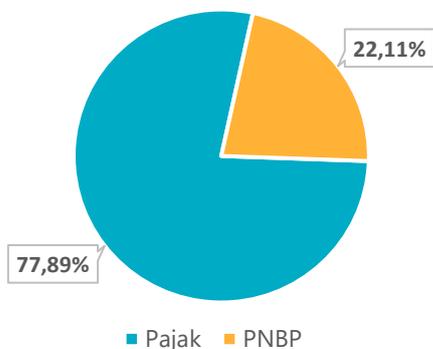
2.1.1.1 Analisis Realisasi Pendapatan Negara dan Hibah

Grafik 2.1 - Perkembangan Realisasi Pendapatan Negara, 2023 s.d. 2024



Sumber: OMSPAN, Sintesa, dan Dit APK, 2024 (data diolah)

Grafik 2.2 - Porsi Realisasi Pendapatan Negara,



Sumber: OMSPAN, Sintesa, dan Dit APK, 2024 (data diolah)

Penerimaan Negara telah terealisasi sebesar Rp2.847,02 miliar (20,13 persen dari Target) meningkat 20,15 persen (yoy), menunjukkan kinerja yang positif sepanjang triwulan I 2024. Dari sisi PNBP lainnya, tingginya lalu lintas keluar masuk Indonesia oleh wisatawan asing maupun wisatawan lokal berdampak pada pertumbuhan realisasi akun PNBP Lainnya, pertumbuhan Pendapatan BLU ditopang dengan semakin meningkatnya kinerja empat satker BLU, yaitu BP Batam, Poltek Negeri Batam, BLU RS Bhayangkara Batam dan BLU RSAL dr. Midiyato Tanjungpinang.

BLU BP Batam memberikan kontribusi terbesar pada **PNBP Lainnya** yang meningkat sebesar 536,11 persen (yoy), dan Pendapatan BLU yang meningkat 83,45 persen (yoy). Peningkatan PNBP ini sejalan dengan pulihnya perekonomian dan kunjungan wisata di Kota Batam.

Realisasi Penerimaan Perpajakan pada triwulan I 2024 sebesar Rp2.217,51 miliar (19,33 persen dari Target), meningkat 4,93 persen (yoy).





Kemudian Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) telah terealisasi sebesar Rp629,51 miliar (23,62 persen dari Target), meningkat 145,62 persen (yoy), terdiri dari Pendapatan BLU sebesar

Rp405,59 miliar (17,93 persen dari Target) dan PNBP Lainnya sebesar Rp223,93 miliar (55,58 persen dari Target). Peningkatan tertinggi pada PNBP Lainnya sebesar 536,11 persen (yoy).

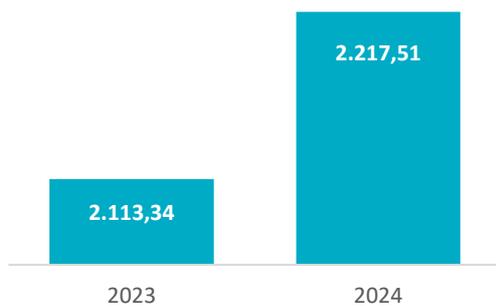
2.1.1.1 Analisis Realisasi dan Growth Pendapatan Perpajakan dan Bea Cukai

Tabel 2.2 – Pagu dan Realisasi Penerimaan Perpajakan di Kepri, 2023 s.d. 2024 (Rp Miliar)

I-Account (Miliar Rupiah)	2023			2024			% Growth 2023-2024
	Pagu	Real	% Real	Pagu	Real	% Real	
Penerimaan Perpajakan	9.209,34	2.113,34	22,95%	11.474,64	2.217,51	19,33%	4,93%
Pajak Dalam Negeri	8.528,78	1.833,21	21,49%	10.822,28	2.129,61	19,68%	16,17%
Pajak Perdagangan Internasional	680,56	280,13	41,16%	652,37	87,89	13,47%	-68,63%

Sumber: OMSPAN, Sintesa, dan Dit APK, 2024 (data diolah)

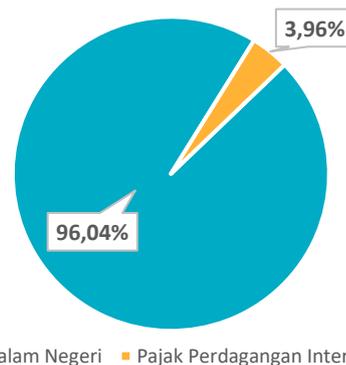
Grafik 2.3 – Realisasi Pendapatan Perpajakan 2023-2024



Sumber: OMSPAN, Sintesa, dan Dit APK, 2024 (data diolah)

Penerimaan Perpajakan telah terealisasi sebesar Rp2.217,51 miliar (19,33 persen dari Target), meningkat 4,93 persen (yoy). Penerimaan Perpajakan tertinggi pada **PPH** Rp778,22 miliar, meningkat 22,88 persen (yoy), diikuti **PPN** sebesar Rp76,17 miliar, meningkat 31,22 persen (yoy). Peningkatan Penerimaan Perpajakan Dalam Negeri tersebut di antaranya didorong oleh pertumbuhan ekonomi Provinsi Kepri pasca pandemi Covid-19, penerapan kebijakan PPN 11 persen yang mulai berlaku sejak 1 April 2023, dan penerapan tarif efektif PPh 21 yang mulai berlaku sejak 1 Januari 2024 berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2023.

Grafik 2.4 – Realisasi Pendapatan Perpajakan Triwulan I 2024



■ Pajak Dalam Negeri ■ Pajak Perdagangan Internasional

Sumber: OMSPAN, Sintesa, dan Dit APK, 2024 (data diolah)

Penerimaan Perpajakan terdiri dari Pajak Dalam Negeri dan Pajak Perdagangan Internasional. **Pajak Dalam Negeri memberikan kontribusi terbesar** yaitu 96,04 persen dengan realisasi Rp2.129,61 miliar, sedangkan Pajak Perdagangan Internasional memberikan kontribusi sebesar 3,96 persen dengan realisasi sebesar Rp87,89 miliar sebagaimana tertera dalam Grafik 2.4. Pada tahun 2024, Penerimaan Perpajakan tumbuh sebesar 4,93 persen. Pertumbuhan terjadi pada Pajak Dalam Negeri sebesar 16,17 persen. Sedangkan **Pajak Perdagangan Internasional** mengalami kontraksi sebesar 68,63 persen.





Sampai dengan triwulan I 2024, **kinerja perpajakan mengalami pertumbuhan signifikan** disebabkan oleh penerapan peraturan penerapan tarif efektif PPh 21 yang mulai berlaku sejak 1 Januari 2024 berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2023.

Meskipun demikian, kinerja Pajak Perdagangan Internasional mengalami kontraksi yang sangat signifikan, kondisi ini dipengaruhi oleh kinerja ekspor impor yang menurun, serta kebijakan hilirisasi produk mentah menjadi produk olahan yang tidak terkena bea keluar.

A. Analisis Kinerja Pendapatan Pajak Menurut Jenisnya

Tabel 2.3 – Perkembangan Perpajakan di Kepri Triwulan I 2024

No	Jenis Pajak	s.d. Maret 2023	s.d. Maret 2024	Growth
1	PPh	1.816.074.438.505	2.131.574.065.120	17,37%
	PPh Migas	6.285.933	20.137.126	220,35%
	PPh Non Migas	1.816.068.152.572	2.131.553.927.994	17,37%
	PPh Pasal 21	588.773.897.751	778.085.628.986	32,15%
	PPh Pasal 22	23.411.470.785	32.884.083.869	40,46%
	PPh Pasal 22 Impor	105.573.188.801	174.932.941.885	65,70%
	PPh Pasal 23	93.267.253.250	119.078.916.037	27,67%
	PPh Pasal 25/29 OP	68.022.920.877	89.534.408.346	31,62%
	PPh Pasal 25/29 Badan	487.447.754.300	446.512.584.332	-8,40%
	PPh Pasal 26	142.751.882.360	145.820.042.936	2,15%
	PPh Final	306.819.784.448	344.705.217.211	12,35%
	PPh Non Migas Lainnya	-	104.392	∞
2	PPN	180.761.635.278	201.664.392.605	11,56%
	PPN Dalam Negeri	168.674.926.606	185.964.727.030	10,25%
	PPN Impor	12.240.220.147	15.685.536.842	28,15%
	PPN Lainnya	- 153.511.475	14.128.733	-109,20%
3	PPnBM	335.740.729	85.810.106	-74,44%
	PPnBM Dalam Negeri	335.740.729	81.677.106	-75,67%
	PPnBM Impor	-	4.133.000	∞
	PPnBM Lainnya	-	-	∞
4	PBB	2.477.634.632	1.459.184.265	-41,11%
	PBB Perkebunan	186.000.000	-	-100,00%
	PBB Kehutanan	-	-	∞
	PBB Pertambangan. Mineral. dan Batu Bara	2.265.417.184	1.458.974.746	-35,60%
	PBB Pertambangan Migas	-	-	∞
	PBB Pertambangan Panas Bumi	-	-	∞
	PBB Lainnya	26.217.448	209.519	-99,20%
5	Pajak Lainnya	18.396.721.657	27.840.004.029	51,33%
6.	Total	2.018.046.170.801	2.362.623.456.125	∞

Sumber: Kanwil DJP Kepri, 2024 (data diolah)

Jenis pajak dengan pertumbuhan tertinggi secara nominal terdapat pada **Pajak Penghasilan (PPh)**, dengan pertumbuhan sebesar Rp315,50 miliar atau 17,37 persen (yoy), khususnya pada PPh Pasal 21 yang meningkat Rp189,78 miliar atau 32,15 persen (yoy). Peningkatan pada PPh Pasal 21 ini didorong oleh penerapan tarif efektif PPh 21 yang mulai berlaku

sejak 1 Januari 2024 berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2023.

DJP Provinsi Kepulauan Riau juga melakukan *extra efforts* berupa **penyuluhan perpajakan** kepada beberapa perusahaan besar dengan jumlah pegawai yang banyak dalam rangka meningkatkan Pajak atas WP Orang Pribadi, seperti pada PT. McDermott, dan





beberapa perusahaan padat karya lainnya. Kanwil DJP Kepri juga menggelar *Executive Dialogue* bersama dengan BP Batam, BPKP, serta Gubernur Provinsi Kepri dalam rangka mengoptimalkan penerimaan pajak di Provinsi Kepri.

PPN juga turut mengalami peningkatan signifikan sebesar Rp92,90 miliar atau 11,56 persen (*yoy*), yang didorong dari penerapan kebijakan PPN 11 persen yang mulai berlaku sejak 1 April 2023 lalu. Hal tersebut menunjukkan

kinerja yang efektif dalam meningkatkan penerimaan Pajak Pertambahan Nilai. Adapun jenis pajak yang mengalami penurunan signifikan salah satunya terdapat pada jenis pajak **PBB yang menurun** sebesar Rp1,02 miliar atau 41,11 persen (*yoy*). Penurunan pada jenis pajak PBB ini dipengaruhi oleh adanya pengurangan keluasaan dan perpindahan wajib pajak PBB P5L ke wilayah lain. Selanjutnya juga terdapat kontraksi yang terjadi pada **Penerimaan PPnBM** yang menurun 74,44 persen, dikarenakan menurunnya kinerja impor barang mewah ke Indonesia.

B. Analisis Kinerja Perpajakan Sektoral

Tabel 2.4 – Realisasi Perpajakan per Sektor Dominan di Kepri Triwulan I 2024 (Rp Miliar)

No.	Nama Sektor	Jan-24	Feb-24	Mar-24	Growth (<i>mtm</i>)	Total	% Kontribusi
1	Industri Pengolahan	340,25	308,49	328,14	6,37%	976,87	41,35%
2	Perdagangan Besar Dan Eceran; Reparasi Dan Perawatan Mobil Dan Sepeda Motor	111,39	88,71	103,89	17,11%	304,00	12,87%
3	Pengangkutan Dan Pergudangan	58,47	44,21	47,38	7,18%	150,07	6,35%
4	Konstruksi	52,20	65,57	72,92	11,20%	190,69	8,07%
5	Aktivitas Keuangan Dan Asuransi	48,95	30,66	40,04	30,61%	119,64	5,06%
6	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan Dan Jaminan Sosial Wajib	46,33	40,20	86,83	116,00%	173,37	7,34%
7	Pengadaan Listrik, Gas, Uap/Air Panas Dan Udara Dingin	31,95	14,13	20,25	43,31%	66,32	2,81%
8	Real Estate	21,34	16,59	20,46	23,34%	58,39	2,47%
9	Pejabat Negara, Karyawan, Pensiunan, Tidak/Belum Bekerja	17,27	14,04	71,26	407,50%	102,57	4,34%
10	Penyediaan Akomodasi Dan Penyediaan Makan Minum	16,23	10,30	9,42	-8,53%	35,95	1,52%
11	Aktivitas Penyewaan Dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi, Ketenagakerjaan, Agen Perjalanan Dan Penunjang Usaha Lainnya	11,73	10,30	10,11	-1,83%	32,15	1,36%
12	Pertambangan Dan Penggalian	9,98	20,63	16,27	-21,13%	46,89	1,98%
13	Aktivitas Profesional, Ilmiah Dan Teknis	8,12	6,59	9,65	46,59%	24,36	1,03%
14	Aktivitas Jasa Lainnya	7,72	4,33	15,24	251,91%	27,29	1,16%
15	Informasi Dan Komunikasi	5,95	6,28	6,72	6,97%	18,96	0,80%
16	Aktivitas Kesehatan Manusia Dan Aktivitas Sosial	5,18	2,98	3,63	21,86%	11,78	0,50%
17	Pertanian, Kehutanan Dan Perikanan	2,80	2,37	2,02	-14,68%	7,19	0,30%
18	Pendidikan	2,23	2,48	2,06	-16,84%	6,76	0,29%
19	Kesenian, Hiburan Dan Rekreasi	1,92	1,41	1,45	3,38%	4,78	0,20%
20	Treatment Air, Treatment Air Limbah, Treatment Dan Pemulihan Material Sampah, Dan Aktivitas Remediasi	1,79	1,22	1,11	-8,81%	4,12	0,17%
21	Aktivitas Rumah Tangga Sebagai Pemberi Kerja;	0,03	0,02	0,39	2361,94%	0,44	0,02%
22	Total	801,83	691,50	869,26	25,71%	2.362,58	100,00%

Sumber: Kanwil DJP Kepri, 2024 (data diolah)





Sektor pajak di Kepri masih didominasi oleh sektor Industri Pengolahan dengan kontribusi sebesar 41,35 persen dan sektor Perdagangan Besar dan Eceran (Reparasi dan Perawatan Mobil dan Sepeda Motor) dengan kontribusi sebesar 12,87 persen, dan sektor Konstruksi sebesar 8,07 persen. Dominasi sektor-sektor tersebut di Provinsi Kepulauan Riau masih terus menguat, didorong oleh kawasan industri di Kota Batam. Dominasi sektor-sektor tersebut masih terus menguat di Provinsi Kepulauan Riau karena aktivitas ekonomi kawasan industri di Kota Batam.

Adapun sektor dengan pertumbuhan tertinggi pada bulan Maret terdapat pada sektor

Pajak Aktivitas Rumah Tangga Sebagai Pemberi kerja yang meningkat sebesar 2.361,94 persen meskipun dengan kontribusi yang terbilang kecil sebesar 0,02 persen menunjukkan pertumbuhan sektor UMKM yang kuat di wilayah Kepri.

Selanjutnya pertumbuhan yang tinggi juga terjadi pada sektor Pajak Pejabat Negara, Karyawan, Pensiunan, Tidak/Belum Bekerja yang meningkat sebesar 407,50 persen dan sektor Pajak Aktivitas Jasa Lainnya yang meningkat 251,91 persen. Tingginya peningkatan pada beberapa sektor tersebut, salah satunya dipengaruhi oleh perayaan HBKN 2024, yang mendorong laju perekonomian dan belanja pemerintah untuk Belanja Pegawai dan THR.

C. Analisis Kinerja Perpajakan Sektoral terhadap PDRB

Tabel 2.5 - Kontribusi Realisasi Pajak Sektoral terhadap PDRB Kepri Triwulan I 2024

No.	Nama Sektor	s.d. Maret 2024	% Kontribusi	PDRB	Kontribusi thdp PDRB
1	Industri Pengolahan	976,87	41,35%	35.495,98	2,75%
2	Konstruksi	190,69	8,07%	17.610,70	1,08%
3	Pertambangan Dan Penggalian	46,89	1,98%	8.370,37	0,56%
4	Perdagangan Besar Dan Eceran; Reparasi Dan Perawatan Mobil Dan Sepeda Motor	304,00	12,87%	7.628,15	3,99%
5	Pertanian, Kehutanan Dan Perikanan	7,19	0,30%	2.512,16	0,29%
6	Informasi Dan Komunikasi	18,96	0,80%	2.380,69	0,80%
7	Aktivitas Keuangan Dan Asuransi	119,64	5,06%	2.329,50	5,14%
8	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan Dan Jaminan Sosial Wajib	173,37	7,34%	1.951,92	8,88%
9	Pengangkutan Dan Pergudangan	150,07	6,35%	1.727,36	8,69%
10	Penyediaan Akomodasi Dan Penyediaan Makan Minum	35,95	1,52%	1.563,64	2,30%
11	Pendidikan	6,76	0,29%	1.105,72	0,61%
12	Real Estat	58,39	2,47%	949,27	6,15%
13	Pengadaan Listrik, Gas, Uap/Air Panas Dan Udara Dingin	66,32	2,81%	913,80	7,26%
14	Aktivitas Kesehatan Manusia Dan Aktivitas Sosial	11,78	0,50%	735,95	1,60%
15	Aktivitas Jasa Lainnya	27,29	1,16%	231,22	11,80%
16	Treatment Air, Treatment Air Limbah, Treatment Dan Pemulihan Material Sampah, Dan Aktivitas Remediasi	4,12	0,17%	86,49	4,77%
17	Pejabat Negara, Karyawan, Pensiunan, Tidak/Belum Bekerja	102,57	4,34%	0,00	0,00%
18	Aktivitas Penyewaan Dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi, Ketenagakerjaan, Agen Perjalanan Dan Penunjang Usaha Lainnya	32,15	1,36%	0,00	0,00%
19	Aktivitas Profesional, Ilmiah Dan Teknis	24,36	1,03%	0,00	0,00%
20	Kesenian, Hiburan Dan Rekreasi	4,78	0,20%	0,00	0,00%
21	Aktivitas Rumah Tangga Sebagai Pemberi Kerja; Aktivitas Yang Menghasilkan Barang Dan Jasa Oleh Rumah Tangga Yang Digunakan Untuk Memenuhi Kebutuhan Sendiri	0,44	0,02%	0,00	0,00%
22	Total	2.362,58	100,00%	85.592,92	2,76%

Sumber: Kanwil DJP Kepri, 2024 (data diolah)





Apabila dilihat **rasio Pendapatan Pajak per sektor terhadap PDRB per jenis lapangan usaha**, sektor dengan rasio pajak tertinggi terdapat pada sektor jasa lainnya sebesar 11,80 persen. Hal ini menunjukkan kinerja yang optimal dalam menggali dan merealisasikan pajak pada sektor jasa lainnya disaat terjadi penurunan pada sektor pajak dominan, peningkatan ini salah satunya dipengaruhi oleh perayaan HBKN yang mendorong perekonomian dari berbagai sektor lapangan usaha.

Administrasi Pemerintahan, Pertahanan Dan Jaminan Sosial Wajib menjadi salah satu sektor dengan rasio pajak yang cukup tinggi sebesar 8,88 persen, didorong oleh pelaksanaan pemilihan umum presiden dan wakil presiden yang turut mendorong belanja pemerintah dan laju perekonomian. Selain itu juga terdapat pembayaran THR menjelang HBKN 2024.

Sektor Pengangkutan dan Pergudangan/Logistik akan menjadi salah satu sektor potensial dalam 5 (lima) tahun mendatang. Hal ini sejalan dengan stimulasi kemajuan teknologi dan komunikasi di era *cyberspace* saat ini. Pada era ini, sektor pengangkutan dan pergudangan/logistik bergantung pada sektor perdagangan sebagai penunjang distribusi barang yang berperan penting dalam sistem transportasi guna memenuhi kebutuhan pokok masyarakat. Sektor

Pengangkutan dan Pergudangan di Provinsi Kepulauan Riau memiliki rasio pajak yang tinggi sebesar 8,69 persen, didorong oleh pertumbuhan ekonomi dan peningkatan aktivitas ekspor impor yang terpusat di wilayah Kepri.

Adapun sektor **Industri Pengolahan** meskipun memiliki kontribusi yang besar terhadap penerimaan perpajakan di Kepri, namun memiliki rasio pajak terhadap PDRB yang cukup rendah, yaitu sebesar 2,75 persen. Cukup rendahnya rasio pajak pada industri pengolahan dipengaruhi oleh terkontraksinya aktivitas ekspor dan impor di triwulan I 2024. Selain itu juga besarnya biaya yang dapat dibebankan sebagai pengurang omzet yaitu beban gaji pegawai dan pembelian barang modal menjadi salah satu faktor rendahnya rasio pajak pada Industri pengolahan.

Kemudian **sektor Pertambangan dan Penggalian, serta Pertanian, Kehutanan Dan Perikanan** meskipun memiliki kontribusi penerimaan yang cukup tinggi, namun memiliki rasio pajak yang sangat rendah, masing-masing sebesar 0,56 persen dan 0,29 persen. Rendahnya rasio pajak pada sektor ini sangat dipengaruhi oleh harga komoditas ekspor yang menurun, serta kebijakan hilirisasi yang menekan ekspor raw material tambang dan hasil perkebunan ke luar negeri.

D. Analisis Kinerja Bea dan Cukai

Tabel 2.6 – Perkembangan Bea dan Cukai di Kepri, Triwulan I 2024 (Rp Miliar)

URAIAN	TW I 2023			TW I 2024			Growth (2023-2024)
	Target	Real	%	Target	Real	%	
Bea Masuk	141,55	243,93	172,33%	90,57	84,05	92,80%	(65,54%)
Bea Keluar	47,32	40,03	84,61%	61,70	8,97	14,54%	(77,59%)
Cukai	3,39	4,09	120,52%	5,16	10,85	210,07%	165,30%
Penerimaan BC lainnya*	0,00	0,80	∞	0,00	0,14	∞	(82,56%)
Total	141,55	243,93	172,33%	90,57	84,05	92,80%	(65,54%)

Sumber: Kanwil DJPBC Kepri dan KPUBC Batam, 2024 (data diolah)





Realisasi Bea dan Cukai di Kepulauan Riau sebesar Rp84,05 miliar, mengalami kontraksi 64,54 persen (yoy). Realisasi ini terdiri atas Bea Masuk Rp84,06 miliar (92,80 persen terhadap Target), Bea Keluar Rp8,97 miliar (14,54 persen terhadap Target), Cukai 10,85 miliar (210,07 persen terhadap Target), dan Penerimaan Bea dan Cukai Lainnya Rp1,14 miliar. Adapun rincian penerimaan Bea dan Cukai mulai dari tahun 2023 sampai dengan 2024 sebagaimana Tabel 2.6.

Growth realisasi Bea dan Cukai cenderung menurun pada tahun 2024, kontraksi tertinggi terjadi pada penerimaan Bea Cukai Lainnya sebesar 82,56 persen (yoy), diikuti oleh penerimaan Bea Keluar sebesar 77,59 persen (yoy) dan Bea Masuk yang berkontraksi 65,54 persen (yoy). Rendahnya realisasi Bea Masuk, Bea Keluar, dan penerimaan Bea Cukai Lainnya sangat dipengaruhi oleh ekspor-impor di Provinsi Kepulauan Riau yang mengalami kontraksi sepanjang triwulan I 2024. **Penurunan harga komoditas** pertambangan dan pertanian seperti CPO, dan Minyak Mentah juga dipengaruhi oleh kebijakan hilirisasi produk *raw material* menjadi produk olahan yang tidak terkena Bea Keluar yang tinggi (mengingat Batam sebagai Kawasan *Free Trade Zone - FTZ*).

Kinerja Ekspor mengalami kontraksi pada bulan Januari dan Februari 2024 sebesar 21,38

persen (yoy) dan 22,01 persen (yoy). Kemudian kinerja impor mengalami kontraksi secara tiga bulan berturut-turut, sebesar 26,49 persen (yoy), 9,64 persen (yoy), dan 37,78 persen (yoy). Kinerja ekspor-impor yang berkontraksi cukup dalam sepanjang triwulan I 2024, sangat mempengaruhi penerimaan perdagangan internasional, baik itu Bea Masuk maupun Bea Keluar.

Realisasi Cukai menjadi satu-satunya jenis penerimaan Bea dan Cukai yang mengalami pertumbuhan positif sangat tinggi, sebesar 165,30 persen (yoy). Peningkatan penerimaan Cukai, khususnya Cukai Hasil Tembakau (CHT) yang didorong oleh peningkatan permintaan pita cukai dari beberapa perusahaan rokok/tembakau yang mengalihkan penjualan dari penjualan luar negeri ke penjualan di daerah lokal yang memerlukan pita cukai rokok. Capaian tersebut juga didorong oleh kinerja yang sangat kuat dari Kanwil Bea dan Cukai Provinsi Kepri, dan KPU BC Batam dalam merealisasikan penerimaan Cukai, disaat terjadi kontraksi yang cukup tinggi ekspor-impor yang mempengaruhi penerimaan perdagangan internasional.

Optimalisasi pendapatan Cukai Hasil Tembakau masih dapat dilakukan oleh pemerintah daerah dengan melaksanakan koordinasi dan inspeksi terhadap pihak terkait dalam upaya pemberantasan maraknya peredaran rokok ilegal yang tidak memiliki cukai.

E. Analisis Kinerja Bea dan Cukai Sektoral Kanwil DJBC Kepulauan Riau

Sebagaimana pada tabel 2.7, sektor dengan kontribusi tertinggi di Kanwil DJBC Provinsi Kepulauan Riau, yaitu pada **Industri Pengolahan Makanan dan Minuman** sebesar 56,12 persen, diikuti sektor Perikanan 26,76 persen, dan hasil Produksi FTZ sebesar 8,25 persen. Penerimaan Bea dan Cukai di Kanwil DJBC Provinsi Kepri, masih didominasi oleh produk mentah, olahan makanan, dan minuman

yang dikirimkan dari dan ke luar negeri seperti Malaysia, dan Singapura. Hal tersebut didorong oleh letak geografis Kabupaten Karimun, sebagai lokasi Kanwil DJBC Provinsi Kepulauan Riau, yang sangat berdekatan dengan negara tetangga Malaysia dan Singapura.





Tabel 2.7 - Realisasi Pajak Sektorial Kanwil DJBC Kepulauan Riau

No.	Nama Sektor	Jan-24	Feb-24	Mar-24	s.d 31 Maret	Kontribusi
1	Industri Pengolahan Makanan dan Minuman	398.881.000	626.991.000	172.013.000	1.197.885.000	56,12%
2	Perikanan	141.165.000	146.043.000	283.941.000	571.149.000	26,76%
3	Industri Konveksi	-	-	36.087.000	36.087.000	1,69%
4	Barang Bawaan Penumpang	-	-	75.142.000	75.142.000	3,52%
5	Bahan Kimia (FTZ)	22.209.000	-	2.682.000	24.891.000	1,17%
6	Hasil Produksi FTZ	105.693.000	-	70.335.000	176.028.000	8,25%
7	Industri Pengeboran Minyak	-	-	-	-	0,00%
8.	Industri Perkapalan	-	-	-	-	0,00%
9.	Lain-lain	7.955.000	26.187.000	19.009.000	53.151.000	2,49%
10.	Total	675.903.000	799.221.000	659.209.000	2.134.333.000	

Sumber: Kanwil DJBC Khusus Provinsi Kepri, 2024 (data diolah)

F. Analisis Kinerja Bea dan Cukai Sektorial KPU BC Batam

Tabel 2.8 - Realisasi Pajak Sektorial KPU BC Batam

No.	Nama Sektor	Jan-24	Feb-24	Mar-24	s.d 31 Maret	Kontribusi
1	Industri Pengolahan	16.427.144.000	19.290.652.000	10.728.333.000	46.446.129.000	58,78%
2	Perdagangan Besar dan Eceran Reparasi dan Perawatan Mobil dan Sepeda Motor	3.808.708.000	5.728.648.000	2.007.311.000	11.544.667.000	14,61%
3	Transportasi dan Pergudangan	1.070.608.000	1.807.119.000	2.964.075.000	5.841.802.000	7,39%
4	Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	856.841.000	-	-	856.841.000	1,08%
5	Pertambangan dan Penggalian	372.001.000	1.340.041.000	381.976.000	2.094.018.000	2,65%
6	Jasa Persewaan, Ketenagakerjaan, Agen Perjalanan dan Penunjang Usaha Lain	-	-	-	-	0,00%
7	Lainnya	3.895.647.000	4.271.374.000	4.062.334.000	12.229.355.000	15,48%
8.	Total	26.430.949.000	32.437.834.000	20.144.029.000	79.012.812.000	

Sumber: KPUBC Batam, 2024 (data diolah)

Sektor dominan di KPU BC Batam didominasi oleh penerimaan dari sektor Industri Pengolahan sebesar 58,78 persen, diikuti sektor lainnya sebesar 15,48 persen, dan sektor Perdagangan Besar dan Eceran Reparasi dan Perawatan Mobil dan Sepeda Motor sebesar 14,61 persen.

Hal ini sejalan dengan Kota Batam sebagai daerah industri, baik itu produksi maupun manufaktur. Banyaknya industri yang ada di Kota Batam sangat memberikan pengaruh signifikan terhadap penerimaan Bea dan Cukai.



2.1.1.1.2. Analisis Realisasi dan Growth Pendapatan PNBPNBP

Tabel 2.9 – Perkembangan PNBPNBP KPKNL di Kepri, 2024 (Rp Miliar)

Uraian	TW I 2023			TW I 2024			Growth (2022-2023)
	Target triwulan I	Real triwulan I	%	Target triwulan I	Real triwulan I	%	
PNBP Aset	17,43	101,59	582,83%	25,91	62,31	240,43%	(38,67%)
PNBP Piutang Negara	0,01	0,03	499,78%	0,01	0,09	1010,10%	203,17%
PNBP Lelang	2,40	1,50	62,62%	2,37	1,53	64,35%	1,77%
Total	19,83	103,12	519,94%	28,30	63,93	225,91%	(38,01%)

Sumber: KPKNL Batam, 2024 (data diolah)

Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sebesar Rp629,51 miliar (23,62 persen dari Target), meningkat 145,62 persen (yoy), terdiri dari Pendapatan BLU sebesar Rp405,59 miliar (17,93 persen dari Target) dan PNBP Lainnya sebesar Rp223,93 miliar (55,58 persen dari Target). Peningkatan tertinggi pada PNBP Lainnya sebesar 536,11 persen (yoy), dikarenakan meningkatnya pertumbuhan ekonomi di Provinsi Kepulauan Riau dan kembalinya kunjungan wisatawan mancanegara yang menyumbangkan peningkatan pendapatan keimigrasian dan izin masuk kembali. Kemudian Pendapatan BLU turut mengalami peningkatan sebesar 83,45 persen

(yoy) didorong oleh peningkatan PNBP BLU BP Batam pada tahun 2024.

Target PNBP yang dikelola oleh KPKNL Batam cenderung meningkat mulai dari triwulan I 2023 sebesar 19,83 miliar, menjadi 28,30 miliar pada triwulan I 2024. Realisasi PNBP yang dikelola oleh KPKNL Batam sebesar 63,93 miliar (225,91 persen dari Target). Namun demikian, kinerja realisasi penerimaan PNBP masih belum optimal apabila dibandingkan dengan realisasi triwulan I 2023, terjadi kontraksi sebesar 38,01 persen (yoy).

2.1.1.1.3 Analisis Perkembangan Tax Ratio

Tabel 2.10 – Perkembangan Tax Ratio 2021 - 2024

Uraian	TW I 2021	TW I 2022	TW I 2023	TW I 2024
Pendapatan Perpajakan Pusat	1.507,88	1.861,92	2.113,34	2.217,51
Pendapatan Perpajakan Daerah	607,41	634,34	952,68	881,17
PDRB	66.896,26	72.514,88	80.319,46	85.595,44
Tax Ratio Pempus	2,25%	2,57%	2,63%	2,59%
Tax Ratio Pemda	0,91%	0,87%	1,19%	1,03%
Tax Ratio Seluruh Pajak	3,16%	3,44%	3,82%	3,62%

Sumber: Kanwil DJPBC Kepri, KPUBC Batam, dan BPS, 2024 (data diolah)

Tax ratio secara keseluruhan mengalami peningkatan sejak tahun 2021 s.d. 2024, dari 3,16 persen menjadi 3,62 persen. Peningkatan *Tax ratio* ini menunjukkan kinerja sektor pajak yang semakin optimal dari tahun ke tahun. Namun demikian apabila dibandingkan dengan tahun 2023, terjadi penurunan *Tax ratio* dari 3,82 persen menjadi 3,62 persen. Hal tersebut tidak

hanya disebabkan oleh penurunan kinerja pajak yang turun, namun dikarenakan terdapat pertumbuhan PDRB yang cukup signifikan pada triwulan I 2024.

Tax ratio perpajakan pemerintah pusat cenderung turut mengalami pertumbuhan, dari tahun 2021 sebesar 2,25 persen menjadi 2,59 persen pada tahun 2024. *Tax ratio* masih terlihat stabil meskipun mengalami kontraksi pada tahun





2024 dibandingkan tahun 2023, sebesar 0,04 persen.

Grafik 2.5 – Perkembangan Tax Ratio 2021 - 2024



Sumber: Kanwil DJPBC Kepri, KPUBC Batam, dan BPS, 2024 (data diolah)

Tingginya kinerja perpajakan pemerintah pusat tersebut didorong oleh beberapa kebijakan yang telah ditetapkan sejak tahun 2023 dan 2024, seperti penerapan PPN 11 persen, dan tarif efektif baru PPh pasal 21 yang mulai berlaku sejak 1 Januari 2024 berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2023. Serta *extra efforts* yang dilakukan Kanwil DJP

Provinsi Kepulauan Riau berupa penyuluhan perpajakan kepada beberapa perusahaan besar dengan jumlah pegawai yang banyak dalam rangka meningkatkan pajak atas WP orang pribadi, dan menggelar *Executive Dialogue* bersama dengan BP Batam, BPKP, serta Gubernur Provinsi Kepri dalam rangka mengoptimalkan penerimaan pajak di Provinsi Kepri.

Tax ratio pemerintah daerah mengalami fluktuatif setiap tahunnya, dari triwulan I 2021 s.d. triwulan I 2024, namun demikian masih cenderung stabil berkisar antara 0,90 persen s.d. 1,20 persen. Penurunan terjadi pada tahun 2024 sebesar 0,16 persen, didorong oleh penurunan pendapatan perpajakan daerah, dan pertumbuhan PDRB yang cukup tinggi. Pemerintah daerah masih terus berupaya untuk meningkatkan Pendapatan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, melalui peningkatan tarif pajak pada sektor hiburan seperti amanat UU HKPD dan peningkatan tarif retribusi parkir di Kota Batam yang mulai berlaku di tahun 2024.

2.1.1.1.4 Prognosis Pendapatan Negara s.d. Akhir Tahun

Tabel 2.11 – Prognosis Pendapatan Negara s.d. Akhir Tahun

	Prognosis Perpajakan dan Bea Cukai	Realisasi Riil	% Realisasi	Prognosis PNB	Realisasi Riil	% Realisasi
Triwulan I	2.379,64	2.217,50	93,19%	262,67	629,51	239,66%
Triwulan II	2.547,34	-	-	529,15	-	-
Triwulan III	2.715,03	-	-	795,63	-	-
Triwulan IV	2.882,73	-	-	1.062,12	-	-
Total	10.524,74	2.217,50	21,07%	2.649,57	629,51	23,76%

Sumber: Kanwil DJP, DJKN, DJPBC Kepri dan KPUBC Batam, 2024 (data diolah)

Proyeksi Penerimaan Perpajakan s.d. akhir tahun anggaran 2024 proyeksikan akan mencapai sebesar Rp10.524,74 miliar. Dengan rincian pada triwulan I sebesar Rp2.379,64 miliar, triwulan II sebesar Rp2.547,34, triwulan III yang terdiri atas Pajak Dalam Negeri sebesar Rp10,822,28 miliar, dan Pajak Perdagangan Internasional Rp652,37 miliar. Kemudian dari

PNBP diproyeksikan sebesar Rp2.715,03, dan triwulan IV sebesar Rp2.882,73 miliar.

Pada triwulan I 2024, **Realisasi Penerimaan Perpajakan** telah mencapai 2.217,50 miliar, atau mencapai 93,19 persen dari Target. Capaian realisasi tersebut terbilang tinggi pada awal tahun anggaran. Tingginya realisasi perpajakan tersebut didorong oleh kebijakan perpajakan berupa penerapan tarif PPN 11 persen dan tarif





efektif baru PPh pasal 21 yang terbit di tahun 2023 dan 2024, serta *extra efforts* yang telah dilakukan oleh Kanwil DJP, DJBC, dan KPU BC Batam dalam merealisasikan Pendapatan Perpajakan.

Penerimaan PNBP tahun 2024 diprognoiskan sebesar Rp2.649,57 miliar. Dengan rincian realisasi pada triwulan I sebesar Rp262,67 miliar, triwulan II Rp529,15 miliar, triwulan III Rp795,63 miliar, dan triwulan IV sebesar Rp1.062,12 miliar.

Realisasi penerimaan PNBP tahun 2024 pada triwulan I telah direalisasikan sebesar Rp629,51 miliar atau telah direalisasikan sebesar 239,66 persen. Pada triwulan I 2024 ini terdapat percepatan realisasi PNBP di Provinsi Kepulauan Riau, baik itu PNBP BLU BP Batam, maupun PNBP yang dikelola oleh DJKN.

Kinerja optimal realisasi perpajakan dan PNBP pada awal tahun 2024 perlu untuk dijaga, sehingga realisasi pendapatan dapat mencapai kondisi optimal hingga akhir tahun anggaran.

2.1.1.1.5 Rekomendasi Kebijakan Pendapatan

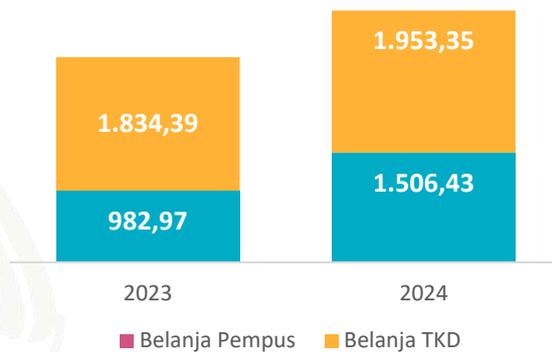
1. Pendekatan dengan pihak swasta untuk meningkatkan penerimaan Bea Masuk, seperti yang telah dilakukan oleh Kanwil DJBC khusus Provinsi Kepri yang telah melakukan pendekatan kepada PT Medco Energy untuk menggali Bea Masuk dari Impor BBM, agar terus diusahakan dalam menggali potensi penerimaan perdagangan internasional.
2. Optimalisasi penerimaan Cukai Hasil Tembakau dapat diusahakan Kanwil DJBC Provinsi Kepulauan Riau dan KPU BC Batam dengan cara berkoordinasi dengan pemerintah daerah untuk melaksanakan inspeksi terhadap pihak terkait dalam upaya pemberantasan maraknya peredaran rokok ilegal tanpa cukai di wilayah Kepri.
3. Kanwil DJP Provinsi Kepulauan Riau agar melaksanakan kegiatan penyuluhan dan sosialisasi terkait pajak kepada masyarakat secara lebih luas dan *massive*, khususnya PPh Pasal 21, untuk menumbuhkan rasa

tanggung jawab dan kesadaran pajak masyarakat.

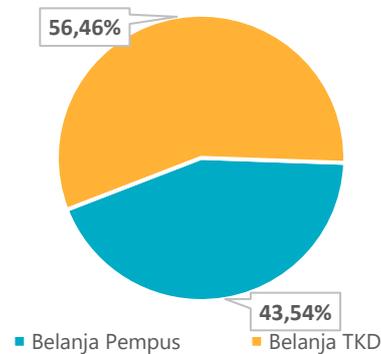
4. Kanwil DJKN Provinsi Kepulauan Riau agar meningkatkan penerimaan PNBP melalui pengelolaan aset, dengan melakukan identifikasi *idle* aset BMN, serta menjaga koordinasi dengan BP Batam yang mengelola aset dalam jumlah besar di Provinsi Kepulauan Riau.

2.1.1.2 Analisis Realisasi Anggaran Belanja Negara

Grafik 2.6 – Realisasi Belanja 2024



Grafik 2.7 – Perbandingan Realisasi BPP dan TKD, 2024



Sumber: OMSPAN, Sintesa, dan Dit APK 2024 (data diolah)

Realisasi Belanja Negara sebesar Rp3.459,78 miliar (19,87 persen dari Pagu), meningkat signifikan sebesar 22,80 persen (*yoy*), menunjukkan kinerja Belanja K/L yang positif pada awal tahun. Apabila dirinci lebih lanjut, Belanja Pemerintah Pusat direalisasikan sebesar Rp1.506,43 miliar (16,08 persen dari Pagu), meningkat 22,80 persen (*yoy*), dan Belanja TKD direalisasikan sebesar Rp1.953,35 miliar (24,29 persen dari Pagu), meningkat 6,49 persen (*yoy*). Komposisi realisasi belanja APBN didominasi

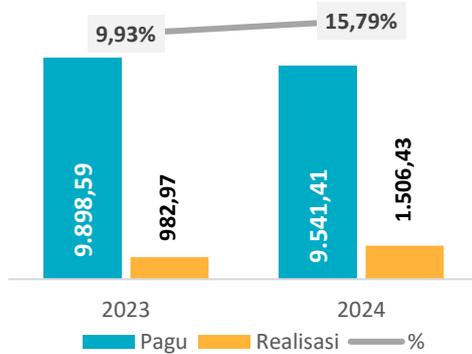




oleh Belanja TKD sebesar 56,46 persen, sedangkan Belanja Pemerintah Pusat sebesar 43,54 persen.

2.1.1.2.1 Analisis Belanja Pemerintah Pusat

Grafik 2.8 – Pagu dan Realisasi Belanja Pemerintah Pusat 2023 - 2024

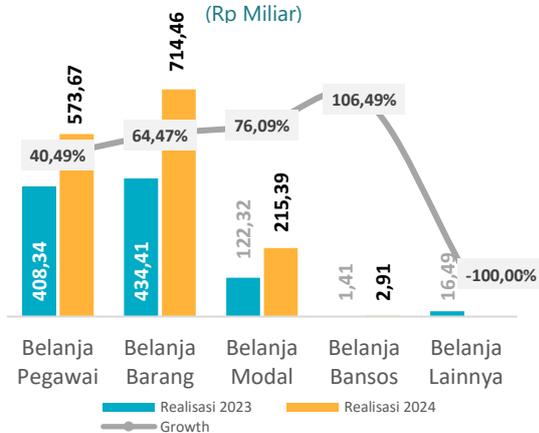


Sumber: OMSPAN, Sintesa, dan Dit APK 2024 (data diolah)

Realisasi Belanja Pemerintah Pusat (BPP) sebesar Rp1.506,43 miliar mengalami pertumbuhan sebesar 15,79 persen (yoy) pada tahun 2024. Tingginya *growth* BPP pada triwulan I 2024 didorong oleh pelaksanaan pemilu presiden dan wakil presiden, serta perayaan HBKN yang mendorong pembayaran gaji dan THR. Selain itu peningkatan kualitas perencanaan dan penganggaran yang semakin baik juga mendorong realisasi anggaran belanja di awal tahun 2024.

A. Analisis Belanja Pemerintah Pusat Berdasarkan Jenis Belanja

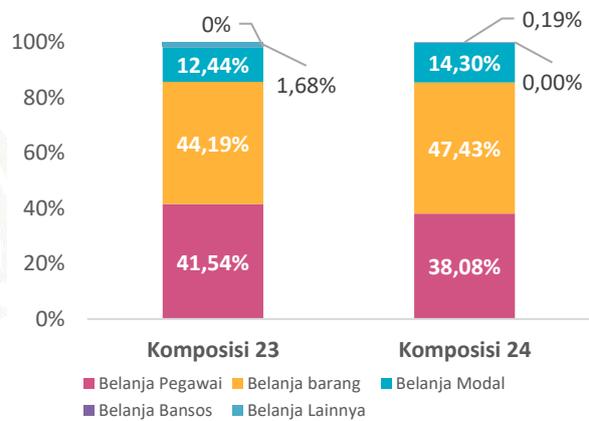
Grafik 2.9 – Pagu dan Realisasi BPP 2023 – 2024 (Rp Miliar)



Sumber: OMSPAN dan Sintesa 2024 (data diolah)

Berdasarkan jenisnya, BPP secara berturut-turut didominasi oleh Belanja Barang Rp714,46 miliar (16,67 persen dari Pagu), mengalami pertumbuhan 64,47 persen (yoy); Belanja Pegawai Rp573,67 miliar (26,93 persen dari Pagu), tumbuh signifikan 40,49 persen (yoy); Belanja Modal Rp215,39 miliar (7,52 persen dari Pagu), tumbuh pesat 76,09 persen (yoy); Belanja Bansos Rp2,91 miliar (49,85 persen dari Pagu), tumbuh sebesar 106,49 persen (yoy); Belanja Lainnya belum terdapat realisasi s.d. triwulan I 2024.

Grafik 2.10 – Komposisi per Jenis Belanja 2024



Sumber: OMSPAN, Sintesa, dan Dit APK 2024 (data diolah)

Hampir **seluruh jenis BPP mengalami kenaikan realisasi** bila dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Peningkatan realisasi dibandingkan dengan tahun 2023 didorong oleh pelaksanaan pemilu presiden dan wakil presiden, serta perayaan HBKN yang mendorong pembayaran gaji dan THR. Namun demikian terdapat kontraksi yang terjadi pada jenis Belanja Lainnya, karena satker BA BUN, yaitu BP Karimun, Bintan, Tanjungpinang yang belum dapat melakukan realisasi anggaran karena terdapat permasalahan kelembagaan s.d. triwulan I 2024.

Komposisi Belanja Pemerintah Pusat pada triwulan I 2024 paling besar berada pada Belanja Barang sebesar 47,43 persen. Disisi lain, Belanja Pegawai mengalami penurunan rasio terhadap total Belanja, dari sebesar 41,54 persen pada tahun 2023, menjadi 38,08 persen pada tahun 2024. Peningkatan Belanja Barang yang





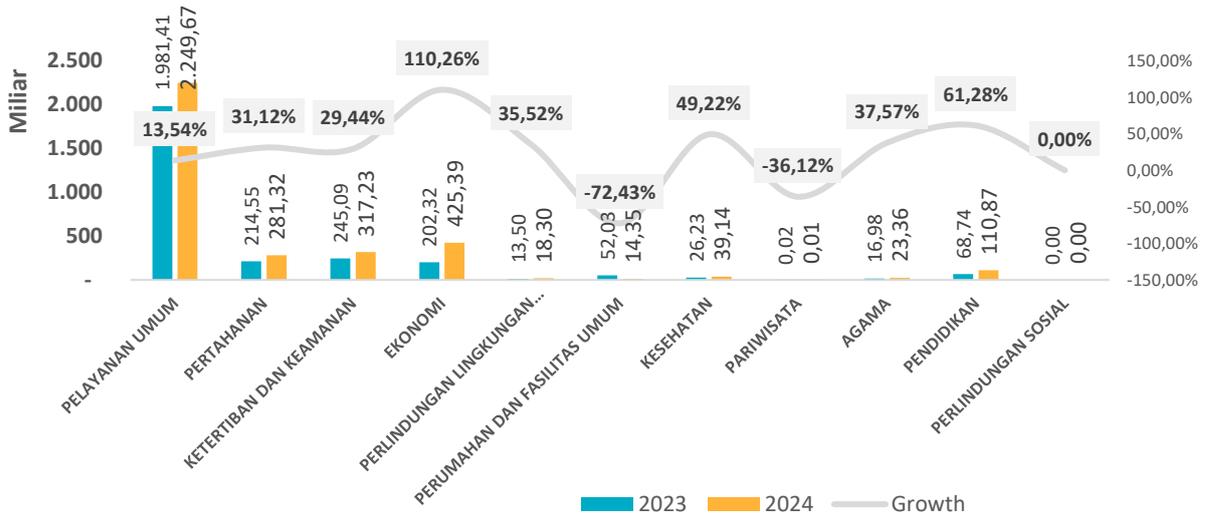
tinggi di triwulan I 2024, diakibatkan oleh pelaksanaan pemilu 2024, yang mendorong Belanja Barang secara signifikan.

Pada **Belanja Modal**, terjadi peningkatan rasio dibandingkan triwulan I 2023, dari

sebelumnya sebesar 12,44 persen, menjadi 14,30 persen pada tahun 2024. Peningkatan rasio Belanja Modal terhadap total Belanja tersebut didorong oleh percepatan pelaksanaan kegiatan belanja modal, yang sudah mulai dilaksanakan kontrak pada triwulan I 2024.

B. Analisis Belanja Pemerintah Pusat Berdasarkan Fungsi

Grafik 2.11 – Realisasi Belanja Pemerintah Pusat per Fungsi Triwulan I 2024 (Rp Miliar)



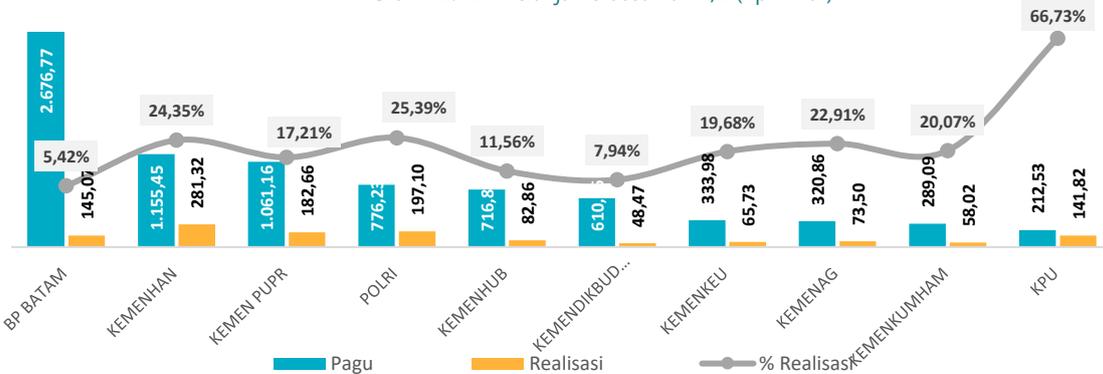
Sumber: OMSPAN dan Sintesa 2024 (data diolah)

Belanja Fungsi Ekonomi tumbuh tertinggi sebesar 110,26 persen (yoy), tingginya realisasi belanja pada sektor ekonomi didorong oleh periode perayaan hari besar nasional. Pemerintah daerah bersama tim TPID dan satker terkait melaksanakan rangkaian kegiatan pasar

murah untuk mengendalikan tingkat inflasi pada momentum HBKN di wilayah Kepri. Sedangkan belanja berdasarkan fungsi yang mengalami penurunan diantaranya, yaitu fungsi perumahan dan fasilitas umum sebesar 72,43 persen (yoy), dan fungsi pariwisata 36,12 persen (yoy).

C. Analisis Belanja Pemerintah Pusat Berdasarkan Kementerian Negara/Lembaga

Grafik 2.12 – Belanja Berdasarkan K/L (Rp Miliar)



Sumber: OMSPAN dan Sintesa 2024 (data diolah)





Berdasarkan 10 K/L dengan Pagu terbesar di Provinsi Kepri, sebagian besarnya telah merealisasikan anggaran 2024 lebih dari 15,00 persen.

Persentase realisasi tertinggi terdapat pada satker KPU, sebesar 66,73 persen dari Pagu, atau Rp141,82 miliar. Tingginya realisasi pada satker KPU didorong oleh pelaksanaan pemilu pada triwulan I 2024 yang mendorong realisasi belanja satker KPU semakin cepat di awal tahun 2024.

Adapun **K/L dengan realisasi Belanja terendah** terdapat pada satker BP Batam yang memiliki Pagu tertinggi di Provinsi Kepulauan Riau. Satker BP Batam telah merealisasikan anggaran 2024 sebesar Rp145,07 miliar (5,42 persen dari Pagu).

Rendahnya realisasi Belanja pada satker BLU BP Batam, dipengaruhi oleh pengajuan SP3B BLU ke KPPN tidak optimal sehingga tidak mencerminkan realisasi belanja BLU yang sesungguhnya. Hal ini juga disebabkan oleh pengajuan SP3B BLU yang dilakukan satu-dua kali dalam satu bulan mengingat *effort* perekaman yang tinggi

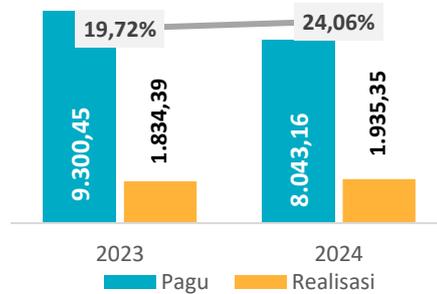
Satker pada Kemendikbud Ristek juga masih memiliki realisasi anggaran yang cukup rendah, yaitu sebesar Rp48,47 miliar (7,94 persen dari Pagu). **Rendahnya realisasi pada Kemendikbud Ristek** dipengaruhi oleh satker BGP Provinsi Kepulauan Riau merupakan satker yang relatif baru pada Kemendikbud Ristek sehingga masih terbatasnya pengetahuan dan pengalaman SDM mengenai pengelolaan anggaran

Realisasi yang cukup rendah juga terdapat pada **satker di Kemenhub** dengan realisasi Rp82,86 miliar (11,56 persen dari Pagu). Rendahnya realisasi pada satker Kemenhub, dikarenakan oleh satker Disnav masih belum terdapat realisasi sampai dengan April, dikarenakan kendala teknis dalam mobilitas barang yang masih tertahan di Batam, sehingga

pelaksanaan kegiatan pembangunan fisik belum dapat dilaksanakan.

2.1.1.2.2 Analisis Belanja Transfer ke Daerah (TKD)

Grafik 2.13 – Realisasi Belanja TKD Triwulan I 2024 (Rp Miliar)

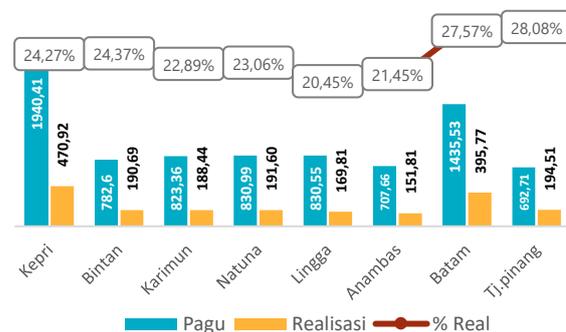


Sumber: OMSPAN dan Sintesa 2024 (data diolah)

Belanja TKD telah terealisasi sebesar Rp1.933,35 miliar (24,29 persen dari Pagu), meningkat 6,49 persen (*yoy*). Realisasi tertinggi secara nominal terdapat pada DAU sebesar Rp1,333,84 miliar (27,69 persen dari Pagu), meningkat 7,14 persen (*yoy*). Sedangkan jenis TKD dengan persentase realisasi tertinggi terdapat pada Dana Desa, sebesar 46,99 persen dari Pagu, atau Rp102,83 miliar, meningkat 31,14 persen (*yoy*).

A. Analisis Belanja TKD per Pemerintah Daerah

Grafik 2.14 – Belanja TKD per Pemda 2024



Sumber: OMSPAN dan Sintesa 2024 (data diolah)

Realisasi TKD tertinggi secara nominal di Pemprov Kepri sebesar Rp470,92 dan secara persentase pada Kota Tanjungpinang sebesar Rp194,51 miliar (28,08 persen dari Pagu).

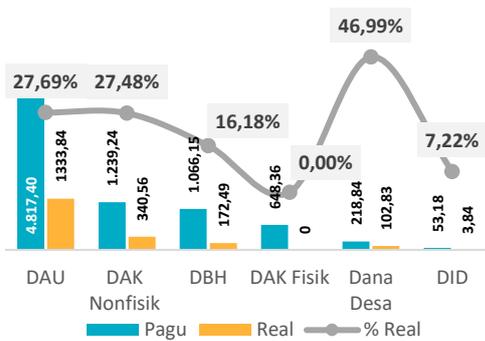




Sedangkan Pemda dengan persentase realisasi terendah, pada Kabupaten Lingga 20,45 persen dari Pagu dan Kabupaten Anambas 21,45 persen dari Pagu.

B. Analisis Belanja TKD per Jenis TKD

Grafik 2.15 – Belanja TKD per Jenis TKD 2024



Sumber: OMSPAN dan Sintesa 2024 (data diolah)

TKD dengan persentase penyaluran tertinggi pada Dana Desa Rp102,83 miliar (46,99 persen ari Pagu). TKD dengan persentase realisasi terendah pada DID sebesar 7,22 persen, dan, DAK Fisik belum direalisasikan. Tingginya realisasi pada Dana Desa didorong oleh perubahan mekanisme Dana Desa yang sebelumnya disalurkan menjadi 3 tahap pada tahun 2023, menjadi 2 tahap pada tahun 2024.

Belum terdapat realisasi DAK Fisik disebabkan oleh terbitnya juknis dan peraturan Menteri Keuangan tentang DAK Fisik pada bulan Mei 2024.

Realisasi DAK Nonfisik yang cukup tinggi pada triwulan I 2024 didorong oleh mekanisme penyaluran yang semula 3 tahap di tahun 2023, menjadi 2 tahap pada tahun 2024.

2.1.1.2.3 Analisis Kontribusi Belanja Pemerintah terhadap PDRB

Tabel 2.12 – Kontribusi Belanja Pemerintah Triwulan I Tahun 2021-2024 terhadap PDRB (Rp M)

Uraian	Belanja Negara	PDRB	% Kontribusi	Growth PDRB	Growth Belanja
TW I 2021	1.957,50	66.896,26	2,93%		
TW I 2022	2.549,07	72.514,88	3,52%	8,40%	30,22%
TW I 2023	2.817,36	80.319,46	3,51%	10,76%	10,53%
TW I 2024	3.459,78	85.595,44	4,04%	6,57%	22,80%

Sumber: OMSPAN, Sintesa, dan BPS, 2024 (data diolah)

Kontribusi Belanja Negara terhadap PDRB mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Pada tahun 2024, kontribusi Belanja Negara sebesar 4,04 persen, meningkat dibandingkan tahun 2023 yang memiliki kontribusi sebesar 3,51 persen. Peningkatan kontribusi Belanja Negara pada PDRB ini didorong oleh peningkatan Belanja Negara yang sangat pesat dibandingkan peningkatan PDRB. Belanja Negara tumbuh 22,80 persen (yoy), sedangkan PDRB mengalami peningkatan 6,57 persen (yoy).

Pemerintah memberikan peran dalam roda perekonomian di Kepri sebesar 4,04 persen. Meningkatnya kontribusi Belanja Negara pada PDRB menunjukkan peningkatan peran

pemerintah dalam pergerakan roda perekonomian di Provinsi Kepulauan Riau. Pemerintah tidak hanya memiliki peran untuk memberikan layanan kepada masyarakat, namun juga membantu roda perekonomian melalui peran fiskal yang cukup besar.

Peran fiskal yang dijalankan pemerintah pada triwulan I ini didorong oleh belanja barang dan jasa yang telah direalisasikan sebesar Rp714,46 miliar, meningkat 64,47 persen (yoy). Belanja Barang ini sebagian besar dimanfaatkan dalam rangka pelaksanaan pemilu presiden dan wakil presiden. Belanja yang dilakukan oleh pemerintah turut membantu perkembangan ekonomi regional melalui *government spending*.





2.1.1.2.4 Analisis Kontribusi Belanja Pemerintah per Kapita

Tabel 2.13 – Kontribusi Belanja Pemerintah per Kapita

Uraian	TW I 2021	TW I 2022	TW I 2023	TW I 2024
Belanja Pemerintah Pusat	352.995.505.802	766.978.951.143	982.972.432.783	1.506.430.820.282
Belanja TKD	1.604.501.315.237	1.782.089.099.670	1.834.389.476.953	1.953.351.083.737
Penduduk	2.118.240	2.179.820	2.152.630	2.168.775
Belanja Perkapita	924.114,75	1.169.393,83	1.308.799,89	1.595.270

Sumber: OMSPAN, Sintesa, dan BPS, 2024 (data diolah)

PDRB per Kapita di Provinsi Kepulauan Riau sebesar Rp39,52 juta, meningkat 5,92 persen (yoy). Secara lebih lanjut Belanja per kapita di Provinsi Kepulauan Riau triwulan I 2024 sebesar Rp1,60 juta, mengalami peningkatan yang signifikan sebesar 22,80 persen (yoy). Realisasi belanja per kapita yang meningkat menunjukkan tingginya pertumbuhan realisasi belanja dibandingkan dengan pertumbuhan penduduk Provinsi Kepulauan Riau. Belanja Negara per kapita menunjukkan besarnya Belanja Negara yang dikeluarkan untuk setiap penduduk yang ada di Provinsi Kepulauan Riau, jadi secara rata-rata Belanja Negara di Provinsi Kepri dikeluarkan oleh pemerintah sebesar Rp1,60 juta untuk setiap penduduk.

Adapun **Belanja Negara per Kapita secara langsung berkontribusi terhadap PDRB** perkapita triwulan I 2024 sebesar 4,04 persen, meningkat dibandingkan tahun 2023. Menunjukkan pertumbuhan Belanja Negara yang solid mengawali tahun 2024.

Belanja Pemerintah Pusat pada triwulan I 2024 meningkat 53,25 persen (yoy), hal ini menunjukkan bahwa pemerintah memberikan perhatian dan dukungan secara langsung terhadap pembangunan ekonomi di Provinsi Kepulauan Riau. Disisi lain, Belanja TKD Provinsi Kepulauan Riau pada triwulan I 2024 juga mengalami peningkatan sebesar 6,48 persen (yoy).

Semakin tinggi nilai belanja per kapita, menunjukkan semakin besarnya *support* yang diberikan oleh pemerintah kepada masyarakat. Belanja ini diharapkan dapat memberikan kemanfaatan yang lebih besar kepada masyarakat. Dengan semakin tingginya Belanja Negara yang didistribusikan kepada penduduk yang lebih sedikit, secara rata-rata outcome yang mungkin dirasakan masyarakat akan semakin besar.

2.1.1.3 Analisis Capaian Output Sektoral dan/atau Program Strategis Pemerintah

Tabel 2.14 – Capaian Output pada Belanja Sektoral/Program Strategis

Program Prioritas Nasional	Kinerja Anggaran			Capaian Output		
	Pagu	Realisasi	% Reali	Volume	Real Fisik	%
Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim	16,78	1,29	7,67%	366.587	34.203	9,33%
Peningkatan Ketahanan Bencana dan Iklim	12,44	1,02	8,17%	366.520	34.154	9,32%
Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup	4,33	0,27	6,24%	67	49	73,13%
Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar	649,20	99,09	15,26%	4.267	749	17,54%
Infrastruktur Ekonomi	456,33	85,68	18,78%	99	3	3,03%
Infrastruktur Pelayanan Dasar	192,87	13,41	6,95%	4.168	746	17,89%
Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan	44,63	2,53	5,68%	599.715	112.706	18,79%





Program Prioritas Nasional	Kinerja Anggaran			Capaian Output		
	Pagu	Realisasi	% Reali	Volume	Real Fisik	%
Penguatan Kewirausahaan, Usaha Mikro, Kecil Menengah (UMKM), dan Koperasi	0,81	0,06	7,47%	148	0	0,20%
Penguatan Pilar Pertumbuhan dan Daya Saing Ekonomi	5,23	0,10	1,92%	44	1	2,68%
Peningkatan Ekspor Bernilai Tambah Tinggi dan Penguatan Tingkat Kandungan Dalam Negeri (TKDN)	0,12	0,00	0,00%	1	-	0,00%
Peningkatan Ketersediaan, Akses, dan Kualitas Konsumsi Pangan	10,61	0,31	2,94%	37.022	25.641	69,26%
Peningkatan Kuantitas/Ketahanan Air untuk Mendukung Pertumbuhan Ekonomi	0,37	0,00	0,61%	26	-	0,00%
Peningkatan Nilai Tambah, Lapangan Kerja, dan Investasi di Sektor Riil, dan Industrialisasi	6,67	0,02	0,25%	1.256	317	25,26%
Peningkatan Pengelolaan Kemaritiman, Perikanan dan Kelautan	20,81	2,04	9,81%	561.218	86.746	15,46%
Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	468,05	202,95	43,36%	8.575	2.904	33,87%
Konsolidasi Demokrasi	266,99	178,96	67,03%	180	16	9,11%
Menjaga Stabilitas Keamanan Nasional	193,89	22,43	11,57%	372	98	26,34%
Optimalisasi Kebijakan Luar Negeri	2,52	0,84	33,31%	564	854	151,42%
Penegakan Hukum Nasional	2,28	0,51	22,18%	7.426	1.930	25,99%
Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola	2,37	0,21	8,93%	33	6	18,18%
Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan	707,22	13,27	1,88%	44.002	469	1,07%
Pembangunan Wilayah Jawa-Bali	3,02	0,21	7,05%	30.334	8	0,03%
Pembangunan Wilayah Maluku	1,66	0,06	3,43%	7.317	300	4,10%
Pembangunan Wilayah Sulawesi	1,54	0,02	1,38%	6.343	160	2,52%
Pembangunan Wilayah Sumatera	701,01	12,98	1,85%	8	0	6,13%
Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing	322,73	39,40	12,21%	121.348	35.228	29,03%
Pengendalian Penduduk dan Penguatan Tata Kelola Kependudukan	3,21	0,12	3,79%	34	-	0,00%
Pengentasan Kemiskinan	7,72	0,39	5,11%	16.890	1.060	6,28%
Penguatan Pelaksanaan Perlindungan Sosial	0,23	0,01	6,18%	41	6	14,63%
Peningkatan Akses dan Mutu Pelayanan Kesehatan	44,74	5,55	12,40%	83.830	23.771	28,36%
Peningkatan Pemerataan Layanan Pendidikan Berkualitas	171,78	32,27	18,79%	20.299	10.391	51,19%
Peningkatan Produktivitas dan Daya Saing	95,04	1,05	1,10%	254	-	0,00%
Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	43,95	6,02	13,69%	17.041	4.229	24,82%
Memperkuat Moderasi Beragama untuk Mengukuhkan Toleransi, Kerukunan dan Harmoni Sosial	33,13	4,86	14,66%	13.471	2.867	21,29%
Meningkatkan Pemajuan dan Pelestarian Kebudayaan untuk Memperkuat Karakter	7,05	0,81	11,56%	143	13	9,09%
Peningkatan Budaya Literasi, Inovasi dan Kreativitas	3,60	0,34	9,48%	3.413	1.343	39,35%
Revolusi Mental dan Pembinaan Ideologi Pancasila	0,17	0,00	2,10%	14	6	42,86%
Total	2.252,57	364,54	16,18%	1.161.535	190.488	16,40%

Sumber: OMSPAN dan Sintesa 2024 (data diolah)





Belanja Prioritas Nasional (PN) dengan Pagu tertinggi terdapat pada sektor Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan, dengan Pagu sebesar Rp707,22 miliar. Diikuti oleh PN Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar dengan Pagu sebesar Rp649,20 miliar, dan PN Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik dengan Pagu sebesar Rp468,05 miliar.

Capaian output tertinggi secara persentase terdapat pada PN Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik dengan realisasi fisik sebanyak 2.904 miliar (33,87 persen dari Target). Diikuti oleh PN Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing dengan realisasi fisik sebanyak 35.228 (29,03 persen dari Target), dan PN Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan dengan realisasi fisik sebanyak 4.229 (24,82 persen dari Target).

A. Program Prioritas Nasional - Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan

PN Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan telah direalisasikan sebesar Rp13,27 (1,88 persen dari Pagu), menunjukkan realisasi anggaran yang masih terbilang kecil. Adapun PN ini terbagi dalam beberapa program prioritas, dengan program prioritas yang memiliki Pagu terbesar pada program Pembangunan Wilayah Sumatera, yang memiliki Pagu sebesar Rp701,01 miliar, dan telah direalisasikan sebesar Rp12,98 (1,85 persen dari Pagu). Capaian output pada PN Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi

Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan juga masih terbilang kecil, sebanyak 469 (1,07 persen dari Target).

Rendahnya realisasi pada PN dan program prioritas ini, karena PN ini terdiri dari belanja infrastruktur yang merupakan Belanja Modal. Sehingga penyerapan belanja belum optimal pada awal tahun anggaran. Selain itu, Belanja Modal pada beberapa satker masih mengalami kendala, diantaranya yaitu blokir anggaran, penyiapan dokumen kontrak, dan pelaksanaan fisik kegiatan yang belum berjalan.

B. Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar

PN dengan pagu terbesar kedua, yaitu Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar yang memiliki Pagu Rp649,20 miliar, telah direalisasikan Rp99,09 atau 15,26 persen dari Pagu. PN ini terbagi menjadi dua program prioritas, yaitu Infrastruktur Ekonomi dengan Pagu sebesar Rp456,33 (70,29 persen dari total

Pagu), telah direalisasikan Rp85,68 miliar atau 18,78 persen dari Pagu, dan program prioritas Infrastruktur Pelayanan Dasar dengan Pagu sebesar Rp192,87 miliar, telah direalisasikan Rp13,41 miliar (6,95 persen dari Pagu). Adapun capaian output realisasi fisik PN Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar, sebanyak 749 (17,54 persen dari Target).

C. Program Prioritas Nasional - Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik

PN Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik memiliki Pagu sebesar Rp468,05 miliar,

telah direalisasikan sebesar Rp202,95 miliar (43,36 persen dari Pagu). Realisasi pada PN ini terbilang cukup tinggi dibandingkan PN lainnya,





didorong oleh pelaksanaan pemilu 2024 yang terkait langsung dengan penguatan polhukhankam.

PN Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik terbagi pada lima program prioritas, dengan Pagu tertinggi pada program prioritas Konsolidasi Demokrasi dengan Pagu sebesar Rp266,99 miliar, telah

direalisasikan Rp178,96 (67,03 persen dari Pagu), kemudian program prioritas Menjaga Stabilitas Keamanan Nasional memiliki Pagu Rp193,89 miliar, telah direalisasikan Rp22,43 miliar (11,57 persen dari Pagu). Nilai capaian output pada PN Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik terbilang tinggi secara persentase, sebanyak 2.904 atau 33,87 persen dari target capaian output.

2.1.1.4 Analisis Prognosis Belanja s.d. Akhir Tahun 2024

Tabel 2.15 – Prognosis Belanja s.d. Akhir Tahun 2024

No	Bulan	Realisasi Belanja K/L Tahun 2024						Realisasi Belanja TKD Tahun 2024					
		Rata-Rata 2020-2023	Realisasi 2023	Proyeksi 2024	Realisasi 2024	Deviasi (Rp)	Deviasi (%)	Rata-Rata	Rata-Rata 2020-2023	Proyeksi 2024	Realisasi 2024	Deviasi (Rp)	Deviasi (%)
1	Jan	150,69	155,6	166,2	203,92	37,72	22,70%	636,58	576,55	648,6	788,68	140,08	21,60%
2	Feb	297,17	365,03	348,36	581,02	232,66	66,79%	622	565,67	601,38	669,98	68,6	11,41%
3	Mar	465,42	469,89	517,1	721,49	204,4	39,53%	521,54	692,17	451,04	494,69	43,65	9,68%
4	Apr	503,36	575,86	576,94				506,2	505,58	533,55			
5	May	517,92	648,54	648,72				891,85	579,03	857,88			
6	Jun	547,35	741,16	633,2				714,48	671,74	691,53			
7	Jul	478,99	631,34	585,42				612,5	977,2	469,84			
8	Aug	676,64	823,78	768,28				748,17	698,65	730,31			
9	Sep	672,31	738,02	753,24				725,22	561,15	654,27			
10	Oct	652,76	835,8	772,13				1.215,00	983,99	1.052,37			
11	Nov	816,02	993,49	931,18				487,91	329,08	482,14			
12	Dec	1.611,22	2.206,12	1.855,33				953,03	2.059,19	773,03			
Total		7.389,85	9.184,64	8.556,10	1.506,43	474,78	129,01%	8.634,48	9.200,00	7.945,94	1.953,35	140,08	21,60%

Sumber: OMSPAN dan Sintesa 2024 (data diolah)

Proyeksi Belanja Pemerintah Pusat tahun 2024 sebesar Rp8.556,10 miliar (91,34 persen dari Pagu), dengan proyeksi bulan Maret 2024 sebesar Rp517,10 miliar. Selanjutnya Belanja TKD tahun 2024 di proyeksikan sebesar Rp7.945,94 miliar (97,79 persen dari Pagu), dengan proyeksi bulan Maret 2024 sebesar Rp451,04 miliar. Sampai dengan akhir tahun diproyeksikan Belanja Pemerintah Pusat akan direalisasikan sebesar 91,34 persen, menunjukkan persentase realisasi belanja yang cukup optimal.

Proyeksi belanja ini perlu menjadi perhatian agar realisasi dapat mencapai atau melebihi nilai proyeksinya. Sepanjang triwulan I 2024 ini, nilai realisasi **Belanja Pemerintah Pusat banyak mengalami deviasi positif** yang tinggi, pada bulan Januari terdeviasi Rp37,72 miliar atau 22,70 persen, bulan Februari terdeviasi Rp232,66 miliar atau 66,79 persen, dan bulan Maret terdeviasi Rp204,40 miliar atau 39,53 persen.

Tingginya deviasi positif pada awal tahun salah satunya dipengaruhi oleh pelaksanaan pemilu 2024, meskipun realisasi belanja pada awal tahun





2024 telah menunjukkan kinerja yang positif, realisasi belanja masih harus terus dikawal sehingga penyerapan, output dan *outcome* dapat berjalan dengan optimal.

Adapun **Belanja TKD** sampai dengan akhir tahun diproyeksikan sebesar Rp7.945,94

miliar, atau 97,79 persen dari Pagu. Sepanjang triwulan I 2024, Belanja TKD telah di realisasikan sebesar Rp1.953,35 miliar, mengalami deviasi positif dari bulan Januari, Februari, dan Maret yang dipengaruhi oleh perubahan mekanisme penyaluran Dana Desa dari yang sebelumnya disalurkan melalui 3 tahap, menjadi 2 tahap.

2.1.1.5 Rekomendasi Kebijakan Belanja Pemerintah

1. Satker yang memiliki blokir karena tidak lengkapnya dokumen perencanaan anggaran agar segera berkoordinasi dengan unit eselon satunya untuk mengurus buka blokir ke DJA.
2. Satker yang memiliki Pagu Belanja Modal agar mempercepat proses pelaksanaan kontrak dan pengerjaan fisik, sehingga tidak menghadapi musim cuaca buruk di Kepri pada akhir tahun anggaran.
3. Agar satker BP Bintan, Karimun, Tanjungpinang segera menyelesaikan pengurusan status kelembagaannya agar pengelolaan dan administrasi keuangannya, termasuk penerimaan hibah, dan PNBK dapat dilakukan sesuai ketentuan.
4. Direktorat Pelaksanaan Anggaran perlu memberikan batas waktu kepada Kementerian Koperasi, Kementerian Perindustrian, Kemenpora, BKPM, dan Kementerian Perdagangan untuk segera menerbitkan petunjuk teknis bagi satker DK TP yang belum dapat merealisasikan anggaran karena belum terdapat petunjuk teknis dari K/L terkait. Terhadap K/L yang tidak mematuhi ketentuan batas waktu tersebut perlu diberikan teguran/sanksi. Juknis DAK Fisik yang telah terbit PMKnya di bulan Mei agar segera disosialisasikan, dipedomani, dan dilaksanakan oleh pemerintah daerah, sehingga capaian output DAK Fisik dapat direalisasikan dengan baik.
5. Pemerintah daerah agar segera menyiapkan dokumen kontrak kegiatan, dan syarat salur DAK Fisik, sehingga dapat segera direalisasikan setelah terbitnya juknis penyaluran DAK Fisik 2024.
6. BPKAD, DPMD dan Inspektorat Daerah agar menjalin komunikasi dan berkoordinasi dengan baik dalam proses penyaluran TKD, khususnya DAK Fisik, baik dalam tahap perencanaan, penyaluran dan pertanggung jawabannya.
7. Kanwil DJPb dan KPPN bekerjasama dan berkoordinasi dalam melakukan monitoring dan menjalin komunikasi rutin dengan BPKAD, DPMD dan Inspektorat Daerah untuk mengingatkan deadline dan ketentuan pengajuan dokumen penyaluran TKD khususnya terkait DAK Fisik, Dana Desa, DAU dan DAK Non Fisik.





2.1.2 Pelaksanaan APBD Tingkat Provinsi (Konsolidasi Pemda)

Sampai dengan 31 Maret 2024, APBD menunjukkan terdapat SILPA Rp997,39 miliar. Realisasi **Pendapatan Daerah sebesar Rp2.624.58 miliar atau terkontraksi 3,83 persen (yoy)**. Di sisi lain, realisasi Belanja Daerah

sebesar Rp1.787,46 miliar atau 11,73 persen dari Pagu, meningkat 3,03 persen (yoy). Kemudian terdapat realisasi penggunaan SILPA tahun anggaran lalu (Sisa Anggaran Lebih – SAL) sebagaimana tergambar pada Tabel 2.16 berikut.

Tabel 2.16 –Pagu dan Realisasi I-Account APBD di Kepri, TW I 2023 dan TW I 2024 (Rp Miliar)

I ACCOUNT (dalam Miliar Rp)	TA 2023			TA 2024			%Growth
	Pagu	Real	%Real	Pagu	Real	%Real	
PENDAPATAN DAERAH	13,755.70	2,729.14	19.84%	14,524.05	2,624.58	18.07%	-3.83%
Pendapatan Asli Daerah	4,282.73	952.68	22.24%	4,810.80	881.17	18.32%	-7.51%
Pendapatan Transfer	9,441.48	1,774.05	18.79%	9,609.46	1,743.41	18.14%	-1.73%
Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	31.49	2.40	7.62%	103.79	0.00	0.00%	-100.00%
BELANJA DAERAH	14,432.58	1,734.93	12.02%	15,232.97	1,787.46	11.73%	3.03%
Belanja Operasi	10,698.79	1,412.87	13.21%	11,719.57	1,571.31	13.41%	11.21%
Belanja Pegawai	5,042.39	839.24	16.64%	5,623.84	1,000.99	17.80%	19.27%
Belanja Barang dan Jasa ⁹	4,936.86	510.06	10.33%	5,114.09	520.03	10.17%	1.96%
Belanja Bunga	13.14	2.14	16.31%	4.68	1.54	32.80%	-28.36%
Belanja Subsidi	2.45	0.00	0.00%	4.93	0.28	5.76%	
Belanja Hibah	690.36	59.71	8.65%	944.96	45.25	4.79%	-24.22%
Belanja Bantuan Sosial	13.58	1.72	12.70%	27.07	3.22	11.88%	86.43%
Belanja Modal	2,429.07	80.74	3.32%	2,116.19	123.97	5.86%	53.55%
Belanja Modal	2,429.07	80.74	3.32%	2,116.19	123.97	5.86%	53.55%
Belanja Tidak Terduga	93.05	1.06	1.14%	85.58	0.31	0.36%	-70.82%
Belanja Tidak Terduga	93.05	1.06	1.14%	85.58	0.31	0.36%	-70.82%
Belanja Transfer	1,211.66	240.26	19.83%	1,311.64	91.88	7.00%	-61.76%
Belanja Bagi Hasil	N/A	167.24	N/A	776.95	21.00	2.70%	-87.44%
Belanja Bantuan Keuangan	N/A	73.02	N/A	534.68	70.87	13.26%	-2.94%
SURPLUS/DEFISIT	-676.87	994.21	-146.88%	-708.93	837.12	-118.08%	-15.80%
PEMBIAYAAN	676.87	4.97	0.73%	708.93	160.27	22.61%	3126.61%
Penerimaan Pembiayaan	761.21	4.97	0.65%	804.48	160.27	19.92%	3126.61%
Pengeluaran Pembiayaan	84.34	0.00	0.00%	95.55	0.00	0.00%	0.00%
SILPA/(SiKPA)	0.00	999.18		0.00	997.39		-0.18%

Sumber: GFS Kanwil DJPb Kepri, 2024 (diolah)





2.1.2.1 Analisis Realisasi Anggaran Pendapatan Daerah

Pendapatan Pemerintah Daerah terdiri dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer, dan Lain-lain Pendapatan yang Sah. Realisasi Pendapatan Daerah sebesar Rp2.624,86 miliar atau 18,07 persen dari Target dan mengalami kontraksi 3,83 persen (yoy). **Pendapatan Transfer masih mendominasi Realisasi Pendapatan Daerah**, yaitu sebesar Rp1.743,41 miliar (67,86 persen dari realisasi Pendapatan Pemerintah Daerah) dibandingkan realisasi PAD sebesar Rp881.172,13 miliar (32,14 persen dari realisasi Pendapatan Pemerintah Daerah). Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah daerah masih belum dapat mengandalkan PAD sebagai penopang utama keuangan daerah dan **masih sangat bergantung pada dana transfer dari pemerintah pusat.**

2.1.2.1.1 Analisis Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Realisasi PAD sebesar Rp881.172,13 miliar atau hanya 18,32 persen dari Target. PAD terdiri dari beberapa komponen, yaitu Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan dan Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah. Pajak Daerah merupakan komponen terbesar penyumbang PAD yaitu Rp758,01 miliar atau 86,02 persen dari total PAD. Kemudian, komponen PAD yang memberikan kontribusi terbesar berturut-turut adalah **Retribusi Daerah** (6,94 persen), Lain-lain PAD yang Sah (6,82 persen), dan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan (0,83 persen).

A. Pajak Daerah

Realisasi Pajak Daerah sebesar Rp758,00 miliar atau 20,48 persen dari Target. Pajak Daerah dengan realisasi terbesar adalah Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) yaitu Rp135,46 miliar dengan kontribusi 17,87 persen terhadap total Pajak Daerah. Kemudian Pajak Kendaraan Bermotor menjadi

penyumbang realisasi terbesar kedua yaitu Rp100,33 miliar dengan kontribusi 13,24 persen terhadap total Pajak Daerah. Pajak Sarang Burung Walet menjadi pajak dengan kontribusi realisasi penyumbang Pajak Daerah terendah, dengan realisasi sebesar Rp6.320.000 atau hanya 0,001 persen dari total Pajak Daerah.

B. Retribusi Daerah

Realisasi Retribusi Daerah sebesar Rp61,16 miliar atau 17,14 persen dari Target. **Retribusi Daerah dengan realisasi terbesar pertama adalah Retribusi Pelayanan Kesehatan yaitu sebesar Rp23,49 miliar.** Kemudian Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA) menjadi penyumbang **realisasi terbesar kedua** yaitu Rp12,07 miliar dengan kontribusi 19,73 persen terhadap total Retribusi Daerah.

C. Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

Realisasi Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan hanya sebesar Rp1,88 miliar atau hanya 2,83 persen dari Target. Realisasi tersebut hanya berasal dari Bagian Laba yang dibagikan Kepada Pemda (dividen) atas penyertaan modal pada Perusahaan Milik Daerah/BUMD.

D. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah

Realisasi Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah masih sangat rendah, yaitu sebesar Rp60,12 miliar atau 8,76 persen. Realisasi tersebut dinilai masih sangat rendah. **Pendapatan BLUD** menjadi pendapatan dengan realisasi tertinggi yaitu Rp41,37 miliar atau memberikan kontribusi sebesar 68,82 persen terhadap total Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah. Fleksibilitas pengelolaan keuangan daerah yang dimiliki satker BLUD sangat mendukung peningkatan pendapatan daerah.

2.1.2.1.2 Analisis Pendapatan Transfer

Realisasi Pendapatan Transfer di Kepri triwulan I 2024 sebesar Rp1.743,41 miliar





atau hanya **18,14 persen** dari Target. Pendapatan Transfer terdiri dari beberapa komponen, yaitu Dana Alokasi Umum (DAU),

Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Khusus (DAK), Dana Isentif Daerah (DID), dan Dana Desa. Realisasi terbesar terdapat pada DAU yaitu sebesar Rp832, 48 miliar, kemudian berturut-turut disusul oleh realisasi DAK sebesar Rp475,56 miliar, DBH sebesar Rp398,13 milar, Dana Desa

sebesar Rp33,41 miliar, dan DID sebesar Rp3,84 miliar.

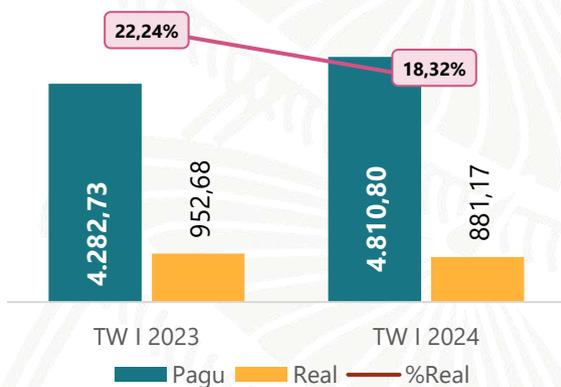
2.1.2.1.3 Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah

Sampai dengan triwulan I 2024, belum terdapat realisasi dari Lain-Lain Pendapatan yang Sah. Hal ini disebabkan oleh belum adanya realisasi dari Pendapatan Hibah, Pendapatan Dana Darurat, maupun Pendapatan Lain-lain.

2.1.2.2 Analisis Pertumbuhan Pendapatan Daerah

2.1.2.2.1 Pendapatan Asli Daerah (PAD)

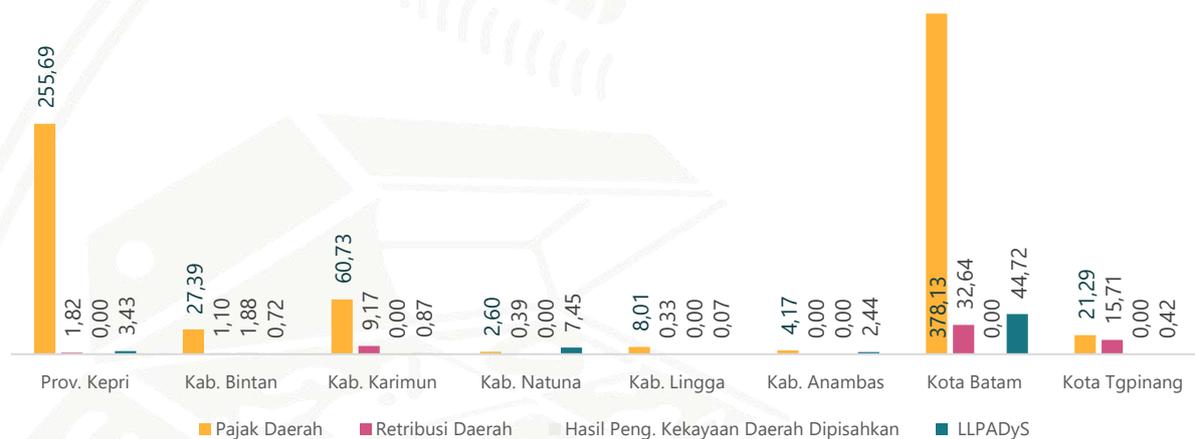
Grafik 2.16 – Pagu dan Realisasi PAD, TW I 2023 dan TW I 2024 (Rp miliar)



Sumber: SIKRI, 2024 (diolah)

PAD mengalami kontraksi sebesar 7,51 persen (yoy). Pendapatan Pajak Daerah terkontraksi sebesar minus 7,35 persen. Sebagai kontributor terbesar pada PAD, turunnya Pendapatan Pajak Daerah memengaruhi pertumbuhan minus PAD. Meskipun Retribusi Daerah (48,94 persen) dan Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan (31,63 persen) mengalami pertumbuhan positif, namun tidak dapat memberikan dampak pertumbuhan positif PAD.

Grafik 2.17 – Breakdown Realisasi PAD per Kab/Kota, TW I 2023 (Rp miliar)



Sumber: SIKRI, 2024 (diolah)





A. Pajak Daerah

Pajak Daerah terkontraksi sebesar Rp60,12 miliar atau 7,35 persen (yoy). Pertumbuhan minus tersebut didorong oleh pertumbuhan minus **Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan** (Rp27,43 miliar atau minus 33,46 persen). Berdasarkan UU HKPD, pertumbuhan dari pajak tersebut seharusnya mengalami peningkatan. Namun, periodisasi pemungutan pajak bisa saja dilakukan pada triwulan II, sehingga pada triwulan I 2024 belum tercermin angka pertumbuhan positif dari peralihan/pergeseran hasil pemungutan PBB dari DJP ke Pemda.

Beberapa Pajak Daerah yang terkontraksi tinggi adalah Pajak Provinsi terkait **Kendaraan Bermotor**, yaitu Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (Rp39,00 miliar atau minus 32,81 persen), Pajak Kendaraan Bermotor (Rp19,21 miliar atau minus 16,07 persen), dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (Rp18,66 miliar atau minus 19,86 persen).

Meskipun beberapa jenis Pajak Daerah mengalami pertumbuhan minus dengan nominal rupiah besar, pertumbuhan Penerimaan BPHTB sebesar 32,56 persen (yoy) atau Rp33.276.704.814 memberikan efek positif terhadap total Pajak Daerah sehingga tidak mengalami kontraksi yang tinggi.

Pada periode triwulan I 2024 penerimaan BPHTB sebesar Rp135.46 miliar sedangkan pada periode triwulan I 2023 sebesar Rp102.19 miliar. **Penerimaan BPHTB paling tinggi terdapat pada Kota Batam**, yaitu Rp126,39 miliar atau 93,30 persen dari total BPHTB lingkup Provinsi Kepri. Penerimaan BPHTB Kota Batam meningkat 53,80 persen (yoy) atau meningkat Rp44,21. Pada periode triwulan I 2023, penerimaan BPHTB Kota Batam sebesar Rp82.75 miliar.

Peningkatan realisasi BPHTB di Kota Batam dipengaruhi oleh inovasi kebijakan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Batam, melalui peraturan Pemko Batam Nomor

2 tahun 2024 tentang Pemberian Pengurangan dan Pembebasan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan. Pada peraturan tersebut, ditetapkan **tarif diskon 50 persen** bagi warga yang menerima sertifikat dalam pendaftaran tanah sistematis dalam program PTSL dengan luas maksimal 600 m². Hal ini sejalan dan untuk mengakomodir kebijakan pemerintah pusat melalui Badan Pertanahan Nasional, yaitu PTSL program sertifikasi tanah. Program ini bertujuan untuk memberikan sertifikat gratis bagi warga yang mendaftarkan tanahnya untuk pertama kali. Dengan kombinasi fasilitas pengajuan sertifikat gratis dan tarif BPHTB hanya 50 persen, hal ini semakin menarik minat warga untuk mendaftarkan sertifikat kepemilikan tanah.

B. Pajak Pengelolaan Barang dan Jasa Tertentu (PBJT)

Pada UU HKPD terdapat restrukturisasi pajak yang dipungut oleh kabupaten/kota melalui reklasifikasi 5 (lima) jenis pajak yang berbasis konsumsi menjadi satu jenis pajak, yaitu Pajak **Pengelolaan Barang dan Jasa Tertentu (PBJT)**. PBJT merupakan pajak yang dibayarkan oleh konsumen akhir atas konsumsi barang dan/atau jasa tertentu yang dijual dan/atau diserahkan kepada konsumen akhir. PBJT sebenarnya merupakan gabungan dari beberapa pajak yang terkait dengan **pemberian jasa yaitu Pajak Restoran, Konsumsi Tenaga Listrik, Jasa Perhotelan, Jasa Parkir, dan Jasa Kesenian dan Hiburan**.

Kemudian, terdapat ketentuan tarif Pajak PBJT paling tinggi 10 persen untuk PBJT. Khusus tarif PBJT terhadap jasa hiburan pada diskotek, karaoke, kelab malam, bar, dan mandi uap/spa ditetapkan paling rendah 40 persen dan paling tinggi 75 persen. Khusus tarif PBJT atas tenaga listrik dari sumber lain oleh industri, pertambangan minyak bumi dan gas alam, ditetapkan paling tinggi sebesar 3 persen, konsumsi listrik yang dihasilkan sendiri ditetapkan paling tinggi 1,5 persen.





Secara keseluruhan di Kepri, **Pajak PBJT meningkat 6,51 persen** atau Rp13,14 miliar (yoy). Pada tahun 2023 sebesar Rp201.88 miliar kemudian meningkat pada tahun 2024 menjadi Rp215.01 miliar. Peningkatan paling tinggi terjadi pada Kota Batam dengan peningkatan 17,57 persen atau sebesar Rp24,11 miliar (yoy). Hal ini menunjukkan bahwa pajak berbasis konsumsi meningkat di Kota Batam yang merupakan kota dengan tingkat kunjungan pariwisata tinggi di lingkup Kepri. Hal ini juga mencerminkan semakin menggeliatnya sektor jasa dan pariwisata di di Batam yang ditunjukkan dengan **peningkatan tertinggi pada Pajak PBJT terdapat pada pajak hotel dengan peningkatan 27,46 persen atau Rp8,76 miliar.**

Kemudian peningkatan unsur Pajak PBJT secara berturut-turut diikuti oleh peningkatan Pajak Restoran (27,46 persen, Rp8,76 miliar), Pajak Parkir (17,10 persen, Rp421 juta), Pajak Hiburan (15,34 persen, Rp1,23 miliar), dan Pajak Penerangan Jalan (10,37 persen, Rp6,79 miliar). **Kebijakan kenaikan Pajak Parkir** ternyata mampu memberikan kontribusi cukup signifikan sebesar 17,10 persen (yoy) terhadap Pajak PBJT.

C. Retribusi Daerah

Retribusi Daerah dapat direalisasikan Rp61,07 miliar dengan pertumbuhan Rp20,10 miliar atau 48,94 persen (yoy). **Retribusi Pelayanan Kesehatan menjadi penyumbang realisasi Retribusi Daerah terbesar**, yaitu Rp23,49 miliar atau 38,40 persen dari total Retribusi Daerah.

Kemudian kontributor terbesar terhadap realisasi Retribusi Daerah adalah Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA) dengan realisasi sebesar Rp12,07 miliar. Retribusi Perpanjangan PIMTA, meningkat sebesar Rp2,45 miliar atau 25,45 persen. Peningkatan ini menunjukkan tingginya tenaga kerja asing yang bekerja di lingkup Kepri. Kota Batam adalah kontributor terbesar bagi Retribusi Perpanjangan Izin Tenaga Kerja Asing karena

Batam merupakan wilayah yang dikhususkan sebagai wilayah industri dan investor asing.

Dilihat dari sisi peningkatan pertumbuhan realisasi, **Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah menjadi Retribusi Daerah dengan growth tertinggi setelah Retribusi Pelayanan Kesehatan.** Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah meningkat 333,41 persen atau Rp1,95 miliar. Pada periode triwulan I 2024 dapat direalisasikan sebesar Rp2,53 miliar sedangkan pada periode triwulan I 2023 sebesar Rp585 juta. **Peningkatan tertinggi** terdapat pada Kota Batam, yaitu meningkat 2.052 persen atau sebesar Rp2,04 miliar (yoy). Pada periode triwulan I 2024, Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah Kota Batam dapat direalisasikan sebesar Rp2,54 miliar sedangkan pada periode triwulan I 2023, hanya dapat direalisasikan sebesar Rp99 juta. Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah Kota Batam dapat mengoptimalkan pemanfaatan Aset yang dimiliki. Adapun Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah Kota Batam berasal dari pemakaian kekayaan daerah laboratorium – Kesehatan hewan, asrama haji, balai benih ikan, laboratorium DKP dan BBI, dll.

D. Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

Realisasi Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan hanya sebesar Rp1,88 miliar atau hanya 2,83 persen dari Target. Realisasi tersebut berasal dari **Bagian Laba yang dibagikan kepada Pemda (dividen) atas penyertaan modal pada Perusahaan Milik Daerah/BUMD.** Namun demikian, realisasi tersebut tumbuh 31,63 persen (yoy). Hal ini menunjukkan hal positif terhadap investasi pemerintah daerah pada BUMD dengan meningkatnya dividen yang diterima.

E. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah

Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah terkonsentrasi sebesar Rp31,94 miliar atau minus

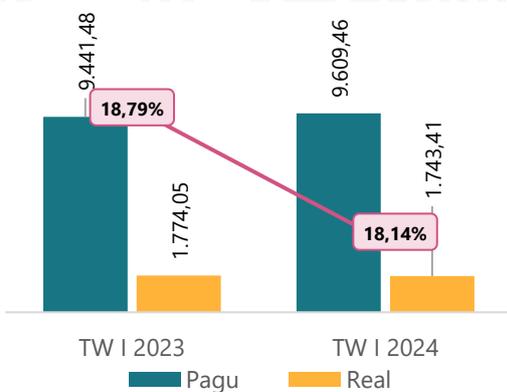




34,69 persen. **Pendapatan BLUD mengalami penurunan secara nominal rupiah tertinggi**, yaitu sebesar Rp30,83 miliar atau 42,70 persen. Namun demikian terdapat beberapa pendapatan pada jenis pendapatan ini yang mengalami pertumbuhan. Pendapatan **Hasil Eksekusi atas Jaminan merupakan pendapatan dengan pertumbuhan nominal rupiah paling tinggi yaitu sebesar Rp3,03 miliar atau 554,13 persen**. Apabila ditinjau dari persentase pertumbuhan, Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan merupakan yang tertinggi dengan pertumbuhan sebesar 677,25 persen atau Rp1,57 miliar. Namun demikian, hal ini menunjukkan bahwa terdapat peningkatan keterlambatan pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan oleh pihak ketiga atas pekerjaan pemerintah daerah yang seharusnya dapat diminimalisir oleh Pemda.

2.1.2.2.2 Pendapatan Transfer

Grafik 2.18– Pagu dan Realisasi Pendapatan Transfer, TW I 2023 dan TW I 2024 (Rp miliar)



Sumber: GFS Kanwil DJPb Kepri, 2024 (data diolah)

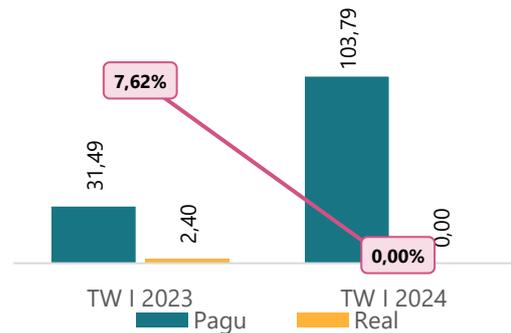
Realisasi Pendapatan Transfer sebesar Rp1.743,41 miliar atau 18,14 persen dari Pagu. Realisasi ini tumbuh minus sebesar 1,73 persen (yoy). Pertumbuhan minus tersebut terjadi sebagai akibat realisasi DBH Bukan Pajak/SDA yang tumbuh minus 49,21 persen (yoy) dan DAU yang tumbuh minus 31,86 persen (yoy). Meskipun demikian, DBH Pajak tumbuh sangat tinggi yaitu 582,75 persen (yoy) dan DAK non Fisik tumbuh 168,36 persen (yoy).

Hingga akhir triwulan I 2024, **pemda belum dapat melaksanakan penyaluran DAK Fisik karena juknis penyaluran DAK Fisik belum terbit**. Namun demikian, pemerintah daerah harus segera menyiapkan persyaratan penyaluran agar dapat segera mengajukan penyaluran saat peraturan DAK Fisik terbit.

Pendapatan Transfer Dana Desa tumbuh Rp1,57 miliar atau 4,93 persen (yoy). Sinergi yang baik antara Pemerintah Desa (pemdes) dan Pemda dapat meningkatkan kemampuan pemdes dan pemda dalam melengkapi persyaratan pengajuan, sehingga dapat mengajukan penyaluran Dana Desa di awal tahun.

2.1.2.2.3 Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah

Grafik 2.19– Pagu dan Realisasi Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah, TW I 2023 dan TW I 2024 (Rp miliar)



Sumber: GFS Kanwil DJPb Kepri, 2024 (data diolah)

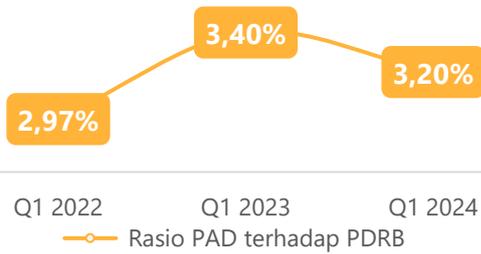
Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah tidak memiliki realisasi sampai dengan triwulan I 2024. Kondisi ini berbeda jika dibandingkan dengan triwulan I 2023 yang memiliki realisasi sebesar Rp2,40 miliar.





2.1.2.3 Analisis Perkembangan Rasio PAD terhadap PDRB

Grafik 2.20 – Tax Ratio Kepri, TW I 2022, 2023, dan 2024



Sumber: SIKRI dan BPS, 2024 (diolah)

Rasio PAD terhadap PDRB pada triwulan I 2024 sebesar 3,20 persen. Rasio tersebut menunjukkan penurunan sebesar 5,82 persen (yoy). Pada periode triwulan I 2023, rasio tersebut sempat mengalami peningkatan (yoy), namun kembali turun di tahun 2024. Rasio PAD terhadap PDRB menurun karena persentase peningkatan PAD lebih kecil dibandingkan persentase peningkatan PDRB. Pada tahun 2023, PAD meningkat 26,98 persen dibandingkan PDRB yang meningkat 10,77 persen (yoy). Pada tahun 2024, persentase peningkatan PAD lebih rendah dibandingkan PDRB, yaitu meningkat 0,37 persen dibandingkan PDRB yang meningkat 6,57 persen. Hal ini menunjukkan penurunan optimalisasi PAD dibandingkan peningkatan PDRB.

2.1.2.4 Analisis Tingkat Kemandirian Daerah

Otonomi daerah adalah pemberian kemandirian kepada pemerintah daerah, berupa wewenang mengatur dan mengurus berbagai kepentingan masyarakat secara mandiri. Kebijakan ini bertujuan untuk memperbaiki kesejahteraan masyarakat secara mandiri melalui peningkatan layanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat. Pemerintah daerah memiliki tanggung jawab lebih besar dalam memberikan pelayanan dan melaksanakan pembangunan di daerahnya sebagai konsekuensi penerapan otonomi daerah. Peningkatan kemampuan fiskal daerah menjadi syarat utama untuk mendukung otonomi tersebut. Oleh karena itu diberikan

perluasan desentralisasi fiskal untuk memperkuat kewenangan daerah dalam memungut pajak dan retribusi daerah sebagai bagian dari Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Meskipun kewenangan dan perluasan desentralisasi fiskal telah diberikan kepada pemerintah daerah, mayoritas **pemerintah daerah di Kepri masih memiliki ketergantungan fiskal yang tinggi pada pemerintah pusat**. Hal ini menunjukkan bahwa tujuan desentralisasi fiskal dalam peningkatan kemampuan keuangan daerah untuk membiayai layanan publik secara mandiri belum sepenuhnya tercapai. Tak terkecuali pada Kepri, mayoritas Belanja Negara masih dibiayai oleh Pendapatan Transfer dari pemerintah pusat.

Tingkat kemandirian keuangan daerah dapat ditunjukkan melalui Indeks Kemandirian Fiskal (IKF) yang akan dibagi ke dalam beberapa kluster sebagaimana Tabel 2.18.

Tabel 2.17 – Klaster Kondisi Kemandirian Fiskal

IKF	Kondisi
	Kemandirian Fiskal
$0,75 \leq IKF \leq 1,00$	Sangat Mandiri
$0,50 \leq IKF < 0,75$	Mandiri
$0,25 \leq IKF < 0,50$	Menuju Kemandirian
$0,00 \leq IKF < 0,25$	Belum Mandiri

Sumber: GFS, 2024

IKF dihitung dengan membandingkan antara PAD dengan Pendapatan Daerah yang diperoleh dari sumber lain, seperti transfer dari pemerintah pusat dan pinjaman.

$$[IKF II = (PAD+DBH)/Total\ Pendapatan]$$

Selain itu, terdapat cara lain untuk menghitung kemandirian daerah yaitu dengan memperhitungkan seluruh pendapatan yang dihasilkan dari suatu daerah, termasuk DBH.

$$[IKF I = PAD/Total\ Pendapatan]$$

Berikut tingkat kemandirian daerah tiap Kabupaten/Kota lingkup Kepri berdasarkan kedua indeks tersebut:



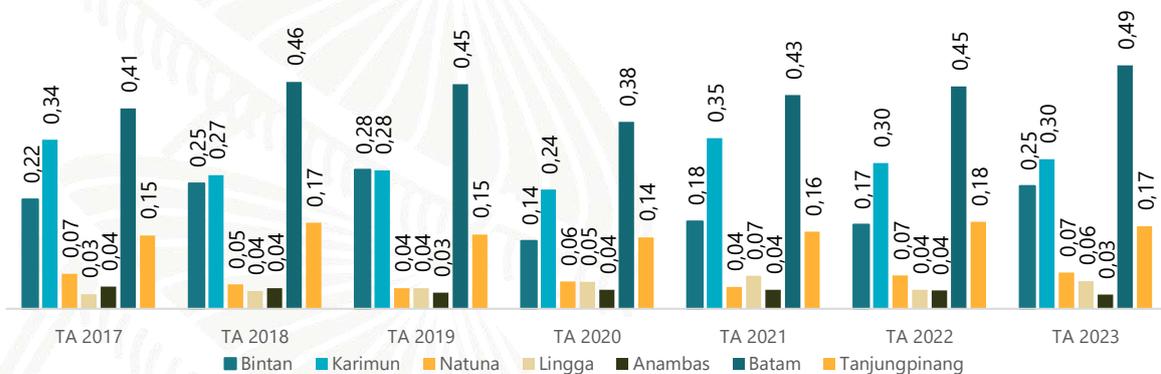


2.1.2.4.1 Indeks Kemandirian Fiskal I

Indeks Kemandirian Fiskal I (IKF I) menghitung kemandirian dengan membandingkan PAD dengan Total Pendapatan. Hasil perhitungan IKF I dari tahun 2017 s.d 2023 antara Kabupaten/Kota di Kepri akan berbeda, untuk itu perlu dibedakan hasil IKF per masing-masing Kabupaten/Kota. Grafik 2.16 menunjukkan bahwa 5 Kabupaten/Kota di lingkup Kepri masih berada pada kluster “Belum Mandiri”. Sementara itu, Kota Batam dan Kabupaten Karimun berada pada kluster “Menuju Kemandirian”.

Walaupun Kabupaten Karimun berada pada kluster “Belum Mandiri” pada tahun 2020 karena IKF I sebesar 0,24. Kota Tanjungpinang, Kabupaten Lingga, Kabupaten Kepulauan Anambas, Kabupaten Natuna, dan Kabupaten Bintan masih berada pada kluster “Belum Mandiri”. Kabupaten Bintan sempat masuk kategori “Menuju Kemandirian” pada tahun 2019, namun tingkat IKF I turun drastis pada tahun 2020 hingga 2022, namun dapat kembali masuk kategori “Menuju Kemandirian” pada tahun 2023 dengan nilai 0,25.

Grafik 2.21 - Indeks Kemandirian Fiskal I, 2017 s.d.2023

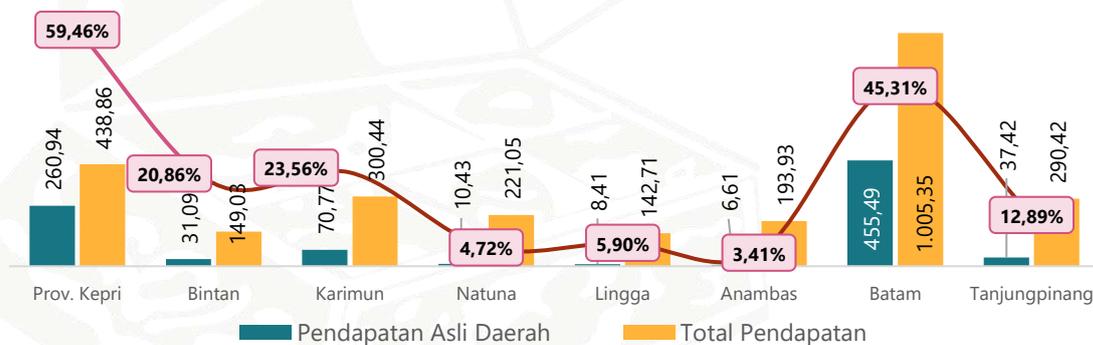


Sumber: GFS Kanwil DJPb Kepri, 2024 (data diolah)

Pada periode triwulan I 2024 sebagaimana Grafik 2.21 IKF I Kepri berada di angka 0,60 atau pada klasifikasi “Kemandirian”. Secara parsial, hanya Kota Batam berada pada klasifikasi “Menuju Kemandirian”. Kota Tanjungpinang, Kabupaten Karimun, Kabupaten Bintan,

Kabupaten Natuna, Kabupaten Lingga, dan Kabupaten Kepulauan Anambas berada pada klasifikasi “Belum Mandiri”. Dapat disimpulkan bahwa mayoritas kabupaten/kota (lima dari tujuh) pada triwulan I 2024 berada pada klasifikasi “Belum Mandiri”

Grafik 2.22 - Indeks Kemandirian Fiskal (IKF) I, Triwulan I 2024



Sumber: GFS, 2024 (data diolah)



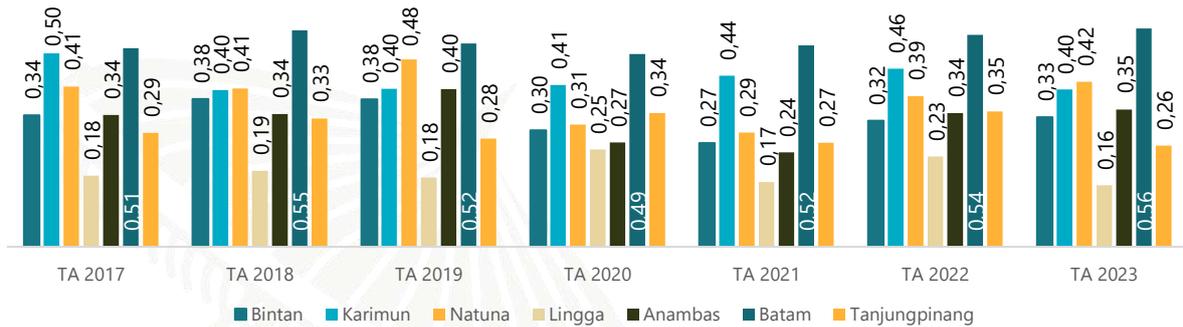


2.1.2.4.2 Indeks Kemandirian Fiskal II

Indeks Kemandirian Fiskal II (IKF II) menghitung kemandirian dengan membandingkan PAD ditambah Dana Bagi Hasil dengan Total Pendapatan. Hasil perhitungan IKF II dari tahun 2017 s.d 2023 sebagaimana Grafik 2.22 menunjukkan bahwa Kota Batam berada pada kluster “Mandiri”.

Lima Kabupaten/Kota lainnya berada pada kluster menuju “Kemandirian”, yaitu Kota Tanjungpinang, Kabupaten Bintan, Kabupaten Karimun, Kabupaten Kepulauan Anambas, Kabupaten Natuna, sedangkan Kabupaten Lingga masih berada pada kluster “Belum Mandiri”.

Grafik 2.23 – Indeks Kemandirian Fiskal II, 2017 s.d. 2023



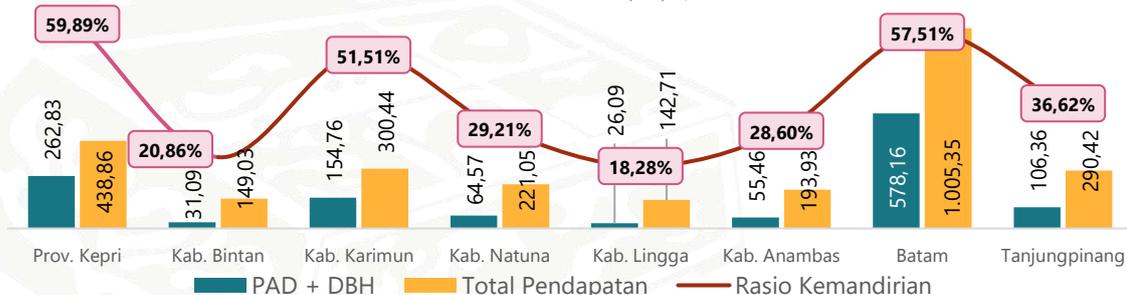
Sumber: GFS Kanwil DJPb Kepri, 2024 (data diolah)

Pada periode triwulan I 2024 sebagaimana Grafik 2.23, IKF II Kepri berada di angka 0,60 atau pada klasifikasi “Mandiri”. Secara parsial Kota Batam dan Kabupaten Karimun yang masuk kluster “Mandiri”. Tiga Kabupaten/Kota yaitu Kabupaten Natuna, Kabupaten Kepulauan Anambas, dan Kota Tanjungpinang berada pada klasifikasi “Menuju Kemandirian”. Kabupaten Bintan dan Kabupaten Lingga berada pada kategori “Belum Mandiri”. Dari hasil IKF II periode Triwulan I 2024, dapat disimpulkan bahwa banyak kabupaten/kota (tiga dari tujuh) berada pada klasifikasi “Menuju Kemandirian” dibandingkan pada klasifikasi “Mandiri” (dua dari tujuh) dan “Belum Mandiri” (dua dari tujuh).

Walaupun telah ditambahkan DBH, Kabupaten Lingga tetap berada pada level “Belum Mandiri”. Kabupaten Lingga belum optimal dalam mengeksplorasi potensi sumber daya alam yang dapat mengangkat tingkat kemandirian.

Sektor pariwisata merupakan sektor utama penopang pendapatan Kabupaten Bintan. Sektor tersebut tidak termasuk yang dibagi hasilkan karena merupakan kontributor secara langsung. Kabupaten Bintan tidak mempunyai potensi SDA yang dapat dieksplorasi dan eksploitasi sehingga dapat menambah pendapatan DBH. Oleh karena itu, Kabupaten Bintan seharusnya lebih berfokus pada peningkatan PAD untuk meningkatkan kemandirian Kab.Bintan.

Grafik 2.24 – Indeks Kemandirian Fiskal (IKF) II, Triwulan I 2024



Sumber: GFS Kanwil DJPb Kepri, 2024 (data diolah)





2.1.2.5 Rekomendasi Kebijakan Pendapatan

1. **Pemda agar mengoptimalkan PAD dari Pendapatan Hasil Pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan** mengingat realisasi masih sangat rendah, yaitu 2,83 persen dari Target.
2. Pendapatan BLUD turun hingga 42,70 persen atau Rp30,83 miliar (yoy). Penurunan ini sangat signifikan pada pos Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah karena sebagai kontributor mayoritas. **Pemerintah daerah perlu memetakan BLUD yang mengalami penurunan pendapatan dan menemukan permasalahannya.** Hal tersebut penting dilakukan mengingat seharusnya BLUD merupakan salah satu penyumbang pendapatan bagi pemerintah daerah.
3. Peningkatan Pendapatan Denda Atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan menunjukkan bahwa terdapat peningkatan keterlambatan pelaksanaan pekerjaan, **Pemda dan dinas terkait agar mengawasi perencanaan, pelaksanaan, pembayaran, dan pertanggungjawaban atas pekerjaan pembangunan fisik sehingga tidak mengalami keterlambatan penyelesaian.**
4. **Untuk meningkatkan tingkat kemandirian fiskal, Kabupaten Lingga dapat meningkatkan penerimaan DBH.** Dinas Dinas DPMPSTSP agar menyusun *mapping* terhadap potensi SDA maupun sektor lainnya yang dapat ditawarkan kepada investor sehingga mampu memberikan bagi hasil kepada Kabupaten Lingga. Saat ini, Kabupaten Lingga belum melakukan *mapping* potensi tersebut, untuk menarik investor menanamkan investasi di Kabupaten Lingga.

Special Case: Optimalisasi Potensi Pajak Sarang Burung Walet

Penerimaan Pajak Sarang Burung Walet menurun 50,38 persen (yoy). Pada periode triwulan I 2024 hanya sebesar Rp6.320.000 sedangkan pada periode triwulan I 2023 sebesar Rp12.736.000. Tarif Pajak Sarang Burung Walet ditetapkan sebesar 10% dari omset. Dengan demikian, penjualan dari Sarang Burung Walet pada Triwulan I tahun 2024 hanya sebesar Rp63.000.000. Dengan perkiraan harga jual Sarang Burung Walet Rp8 juta/kg, berarti sepanjang periode triwulan I 2024, penjualan Sarang Burung Walet hanya sebanyak 8 kg saja di lingkup wilayah Provinsi Kepulauan Riau. Data tersebut tentu berbanding terbalik dengan data ekspor Sarang Burung Walet pada beberapa tahun terakhir yang mencapai miliaran rupiah. Berdasarkan data IQFAST di Karantina Pertanian Karimun, pada 2018 ekspor SBW tercatat 607.7kg dengan nilai ekspor Rp9.1 miliar.

Pada 2019 mencapai 621.3 kg atau setara Rp9.3 miliar. Pada Triwulan I 2020, volume ekspor sarang burung walet mencapai 144.4 kg atay setara dengan Rp2.16 miliar.

Lebih lanjut, penerimaan Pajak Sarang Burung Walet pada periode triwulan I 2024 tersebut hanya pada Kabupaten Karimun. Pada laporan keuangan pemerintah daerah tahun 2023, didapat bahwa **Pajak Sarang Burung Walet terdapat pada 3 (tiga) Kabupaten Bintan, Kabupaten Karimun, dan Kabupaten Lingga.** Dengan demikian tidak terdapat realisasi penerimaan Pajak Sarang Burung Walet pada Kabupaten Bintan dan Kabupaten Lingga pada periode Triwulan I 2024. Agar PAD dapat optimal, pemerintah daerah agar dapat terus memantau potensi dari Pajak Sarang Burung Walet hingga dapat menghasilkan realisasi pajak setiap triwulannya, mengingat Sarang Burung Walet dapat dipanen dengan periode dua hingga tiga bulan.



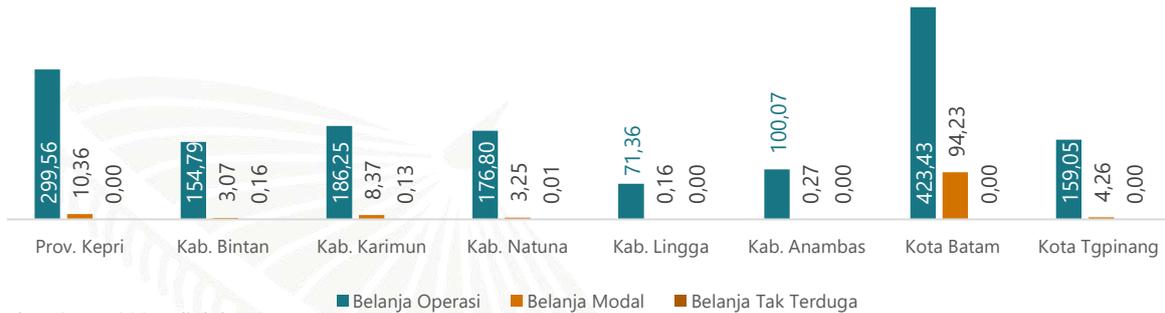


2.1.2.6 Analisis Realisasi Anggaran Belanja Daerah

Belanja Daerah dapat direalisasikan sebesar Rp1.695,58 miliar atau 12,18 persen dari Pagu dengan perkembangan pagu dan realisasi sebagaimana Grafik 2.13. Belanja Daerah tumbuh 13,44 persen (yoy). Pertumbuhan tersebut ditopang oleh tumbuhnya hampir

seluruh komponen Belanja Daerah, yaitu Belanja Operasional yang tumbuh sebesar 11,21 persen dan Belanja Modal yang tumbuh sebesar 53,55 persen.

Grafik 2.25 – Breakdown Realisasi Belanja per Kab/Kota, TW I 2024 (Rp miliar)



Sumber: SIKRI, 2024 (diolah)

2.2.2.6.1 Analisis Belanja Berdasarkan Jenis Belanja

A. Belanja Operasi

Belanja Operasi dapat direalisasikan sebesar **Rp1.571,31 miliar atau 11,21 persen dari Pagu**. Belanja Bunga merupakan Belanja Operasional dengan realisasi persentase tertinggi, yaitu 32,80 persen sedangkan Belanja Pegawai merupakan belanja dengan realisasi Rupiah tertinggi yaitu sebesar Rp1.000,99 miliar.

B. Belanja Modal

Realisasi Belanja Modal sangat rendah. Belanja Modal dapat direalisasikan sebesar Rp123,97 miliar atau 5,86 persen dari pagu. Realisasi terbesar terdapat pada Belanja Modal Gedung dan Bangunan, yaitu sebesar Rp56,37 miliar. Kemudian berturut-turut diikuti oleh Belanja Modal Jalan Irigasi dan Jaringan (Rp53,99 miliar), Belanja Modal Peralatan dan Mesin (Rp11,72), Belanja Modal Aset Tetap Lainnya (Rp1,73 miliar), Belanja Modal BLUD (Rp116,06 juta), dan Belanja Modal Tanah (Rp29,40 juta).

C. Belanja Tidak Terduga

Belanja Tidak Terduga dapat direalisasikan sebesar Rp308,23 juta atau hanya 0,36 persen dari Pagu. Realisasi tersebut sangat rendah, bahkan dibawah 1 persen. Namun demikian, realisasi Belanja Tidak Terduga merupakan pos pengeluaran untuk kegiatan yang tidak direncanakan dan bersifat *force majeure*, misalnya penanggulangan bencana alam dll. Di sisi lain, rendahnya realisasi Belanja ini menunjukkan hal positif, yaitu tidak terdapat bencana atau hal-hal *force majeure* lainnya.

D. Belanja Transfer

Belanja Transfer dapat direalisasikan sebesar Rp209,153 miliar atau 15,95 persen dari Pagu. Belanja Transfer terdiri dari Belanja Bagi Hasil dan Belanja Bantuan Keuangan. Belanja Bagi Hasil dapat direalisasikan sebesar Rp138,28 miliar 15,95 persen dari Pagu, sedangkan Belanja Bantuan Keuangan dapat direalisasikan sebesar Rp70,82 miliar atau 13,26 persen dari Pagu.





2.1.2.7 Analisis Pertumbuhan Belanja

A. Belanja Operasi

Realisasi Belanja Operasi sebesar Rp1.571,31 miliar atau tumbuh sebesar Rp158,44 miliar atau 11,21 persen dari Pagu. Belanja Bantuan Sosial merupakan Belanja Operasional dengan persentase realisasi pertumbuhan tertinggi, yaitu 86,43 persen sedangkan **Belanja Bunga** dengan persentase realisasi pertumbuhan terendah yaitu tumbuh minus 28,36 persen (yoy). Dari sisi nominal realisasi Rupiah, Belanja Pegawai merupakan belanja dengan realisasi pertumbuhan Rupiah tertinggi yaitu sebesar Rp161,76 miliar sedangkan nominal realisasi Rupiah terendah yaitu Belanja Subsidi dengan nominal Rupiah sebesar Rp284,07.

B. Belanja Modal

Pertumbuhan realisasi tertinggi pada Belanja Modal terdapat pada **Belanja Modal Gedung dan Bangunan** yaitu sebesar 457,50 persen (yoy) atau sebesar Rp46,26 miliar. Belanja Modal

Tanah merupakan Belanja Modal dengan pertumbuhan realisasi terendah, yaitu minus 97,47 persen.

C. Belanja Tidak Terduga

Belanja Tidak Terduga dapat direalisasikan sebesar Rp308,23 juta atau hanya 0,36 persen dari Pagu. Realisasi tersebut sangat rendah, hingga membuat pertumbuhan minus sebesar 70,82 persen (yoy) atau sebesar Rp748,10 juta.

D. Belanja Transfer

Belanja Transfer dapat direalisasikan sebesar Rp209,153 miliar atau 15,95 persen dari Pagu. Belanja Transfer tumbuh minus Rp31,11 miliar atau minus 12,95 persen (yoy). Pertumbuhan minus terjadi pada Transfer/Bagi Hasil ke Desa sebesar minus 17,32 persen (yoy) dan Transfer Bantuan Keuangan sebesar minus 2,94 persen (yoyi). Realisasi Belanja Transfer tumbuh minus (yoy) karena terdapat penurunan Pagu yang signifikan pada Belanja Transfer.

2.1.2.8 Rekomendasi Kebijakan Belanja

Realisasi Belanja Pemerintah Daerah masih rendah, yaitu 12,18 persen. Realisasi Belanja Operasi sebesar 13,41 persen dan Realisasi Belanja Modal 5,86 persen. Pemerintah Daerah

perlu mendorong percepatan Belanja Modal, khususnya Belanja Modal dengan realisasi rendah dan pertumbuhan negatif seperti Belanja Modal Tanah dan Belanja Modal Peralatan dan Mesin.

2.1.2.9 Kontribusi Belanja Daerah Terhadap PDRB

Tabel 2.18 – Kontribusi Belanja Daerah terhadap PDRB TW I 2021, 2022, 2023 dan 2024 (Rp miliar)

Uraian	Belanja Daerah	PDRB	% Kontribusi	Growth PDRB	Growth Belanja
TW I 2021	1.188,60	66.896,26	1,78%		
TW I 2022	1.313,99	72.514,88	1,81%	8,40%	10,55%
TW I 2023	1.734,93	80.319,46	2,16%	10,76%	32,04%
TW I 2024	1.787,46	85.595,44	2,09%	6,57%	3,03%

Sumber: SIKRI dan BPS, 2024 (data diolah)

Kontribusi Belanja Daerah terhadap PDRB menunjukkan adanya tren penurunan, yaitu pada triwulan I 2024 sebesar 2,09 persen

bila dibandingkan dengan triwulan I 2023 sebesar 2,16 persen (yoy).





Penurunan ini disebabkan laju pertumbuhan PDRB yang lebih tinggi bila dibandingkan dengan peningkatan Belanja Daerah.

Sebagaimana telah dijelaskan dalam Bab I pada KFR ini, peningkatan PDRB membawa Kepri menjadi peringkat pertumbuhan ekonomi tertinggi ke-2 di Sumatera 5,01 persen (yoy), dan

menyumbang 7,41 persen dari total PDRB di Regional Sumatera. Pertumbuhan ekonomi tersebut dipengaruhi oleh HBKN Ramadhan, Imlek, Nyepi, dan Paskah di triwulan I 2024, kemudian aktivitas parpol menjelang masa kampanye juga turut mendorong pergerakan ekonomi di Kepri.

2.2 Pelaksanaan Anggaran Konsolidasi Triwulan I 2024

Tabel 2.19 – Realisasi Pelaksanaan Anggaran Konsolidasi, TW I 2023 dan TW I 2024 (Rp miliar)

Rincian Anggaran Konsolidasian	TW I 2023	TW I 2024	Growth
Pendapatan Konsolidasi	3,324.72	4,117.01	23.83%
Belanja Konsolidasi	2,778.24	3,892.65	40.11%
Surplus (Defisit) Anggaran	546.49	224.36	-58.94%
Pembiayaan	4.97	160.27	3126.61%
SiLPA/SiKPA	551.45	384.63	-30.25%

Sumber: GFS Kanwil DJPb Kepri, 2024 (diolah)

2.2.1 Pendapatan Konsolidasi

Sampai dengan triwulan I 2024, jumlah Pendapatan Konsolidasi sebesar **Rp4.117,01 miliar**. Jumlah ini tumbuh 23,83 persen (yoy) bila dibandingkan dengan triwulan I 2023 yang sebesar Rp3.324,72 miliar.

2.2.2 Belanja Konsolidasi

Sampai dengan triwulan I 2024, jumlah Belanja Konsolidasi sebesar **Rp3.892,65 miliar**. Jumlah ini tumbuh 40,11 persen (yoy) bila dibandingkan dengan triwulan I 2023 sebesar Rp2.778,24 miliar.

2.2.3 Surplus/Defisit Konsolidasi

Atas posisi Pendapatan Konsolidasian yang lebih tinggi bila dibandingkan dengan Belanja Konsolidasian, maka terjadi Surplus sebesar **Rp224,36 miliar**. Jumlah Surplus ini tumbuh negatif sebesar 58,94 persen (yoy).

2.2.4 Pembiayaan Konsolidasi

Jumlah Pembiayaan Konsolidasi pada triwulan I 2024 sebesar **Rp160,27 miliar**. Adapun jumlah ini seluruhnya disumbang oleh APBD Konsolidasi lingkup Kepri.

2.3 Analisis Neraca Pemerintah Pusat-Tingkat Wilayah

2.3.1 Perkembangan Nilai dan Pertumbuhan Aset, Liabilities, dan Ekuitas

2.3.1.1 Analisis Growth Aset Pemerintah

Pertumbuhan Aset pemerintah pusat di Provinsi Kepulauan Riau mengalami pertumbuhan sebesar Rp2.800,90 miliar, atau 3,48 persen (yoy). Nilai Aset pemerintah pusat pada tahun 2024 sebesar Rp83.249,18 miliar, dari sebelumnya sebesar Rp80.448,28 pada tahun 2023. Pertumbuhan tinggi pada nilai Aset dipengaruhi oleh perubahan pola belanja

pemerintah yang mengoptimalkan **pembangunan fisik infrastruktur** dibandingkan Belanja Barang habis pakai. Pertumbuhan tertinggi secara nominal terjadi pada **Aset Tetap** sebesar Rp2.060,44, atau 2,73 persen (yoy). Nilai Aset Tetap pada tahun 2024 sebesar Rp77.660,54 miliar, dari sebelumnya sebesar Rp75.600,11 miliar pada tahun 2023





Tabel 2.20 – Realisasi Pelaksanaan Anggaran Konsolidasi, TW I 2023 dan TW I 2024 (Rp miliar)

URAIAN	2023	2024	Penambahan/ Pengurangan	Growth
ASET	80.448,28	83.249,18	2.800,90	3,48%
ASET LANCAR	3.958,03	5.050,10	1.092,07	27,59%
Kas dan Setara Kas	1.632,05	2.057,72	425,67	26,08%
Investasi Jangka Pendek	-	12,00	12,00	0,00%
Belanja Dibayar di Muka	33,89	1,95	(31,93)	(94,24%)
Uang Muka Belanja	-	0,00	0,00	0,00%
Pendapatan yang Masih Harus Diterima	-	8,63	8,63	0,00%
Piutang	1.349,61	1.193,54	(156,06)	(11,56%)
Persediaan	942,49	1.735,33	792,84	84,12%
Persediaan yang Belum Diregister	-	40,93	40,93	0,00%
INVESTASI JANGKA PANJANG	-	-	-	0,00%
Investasi Jangka Panjang Non Permanen	-	-	-	0,00%
Investasi Jangka Panjang Permanen	-	-	-	0,00%
ASET TETAP	75.600,11	77.660,54	2.060,44	2,73%
Tanah	49.174,07	48.255,76	(918,31)	(1,87%)
Peralatan dan Mesin	16.661,97	20.818,41	4.156,44	24,95%
Gedung dan Bangunan	8.199,20	9.240,46	1.041,26	12,70%
Jalan, irigasi, dan jaringan	18.593,49	18.570,28	(23,21)	(0,12%)
Aset Tetap Lainnya	1.274,78	784,11	(490,67)	(38,49%)
Konstruksi Dalam Pengerjaan	1.250,75	1.964,35	713,60	57,05%
Aset Tetap Lainnya Yang Belum Diregister	-	10,25	10,25	0,00%
Aset Konsesi Jasa	-	3.317,39	3.317,39	0,00%
Akumulasi Penyusutan	(19.563,87)	(25.300,47)	(5.736,61)	29,32%
Aset Tetap Yang Belum Diregister	9,71	-	(9,71)	(100,00%)
PROPERTI INVESTASI	-	121,38	121,38	0,00%
Properti Investasi	-	122,07	122,07	0,00%
Akumulasi Penyusutan Properti Investasi	-	(0,69)	(0,69)	0,00%
PIUTANG JANGKA PANJANG	0,02	-	(0,02)	(100,00%)
Tagihan Piutang Penjualan Angsuran	-	-	-	0,00%
Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/ TGR	0,02	-	(0,02)	(100,00%)
Penyisihan Piutang Jangka Panjang	-	-	-	0,00%
ASET LAINNYA	890,13	417,17	(472,96)	(53,13%)
Kemitraan dengan Pihak Ketiga	72,44	39,02	(33,42)	(46,14%)
Aset Tidak Berwujud	782,22	893,89	111,68	14,28%
Dana yang Dibatasi Penggunaannya	41,70	291,16	249,46	598,24%
Aset Lain-lain	586,20	432,01	(154,19)	(26,30%)
Aset Lainnya yang Belum Diregister	0,06	-	(0,06)	(100,00%)
Akumulasi Penyusutan/Amortisasi Aset Lainnya	(592,48)	(326,97)	265,51	(44,81%)
Akumulasi Amortisasi Aset Lainnya	-	(147,80)	(147,80)	0,00%
KEWAJIBAN	3.534,76	4.345,86	811,11	22,95%
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	3.534,76	4.342,90	808,14	22,86%
Utang Perhitungan Pihak Ketiga	-	-	-	0,00%
Utang Kepada Pihak Ketiga	292,86	608,22	315,36	107,69%





URAIAN	2023	2024	Penambahan/ Pengurangan	Growth
Utang Transfer	-	11,84	11,84	0,00%
Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan	72,31	1,21	(71,10)	(98,33%)
Pendapatan Diterima di Muka	3.145,45	3.842,00	696,55	22,14%
Utang Jangka Pendek Lainnya	23,85	(116,06)	(139,91)	(586,56%)
Hibah yang Belum Disahkan	0,29	(4,31)	(4,61)	(1563,31%)
KEWAJIBAN JANGKA PANJANG	-	-	-	0,00%
Utang Jangka Panjang Dalam Negeri	-	-	-	0,00%
Utang Jangka Panjang Luar Negeri	-	-	-	0,00%
KEWAJIBAN KONSESI JASA	-	2,97	2,97	0,00%
EKUITAS	76.913,53	78.903,32	1.989,79	2,59%
JUMLAH EKUITAS DAN KEWAJIBAN	80.448,28	83.249,18	2.800,90	3,48%

Sumber: Government Finance Statistic (GFS), 2024 (data diolah)

Pertumbuhan Aset Tetap tertinggi terdapat pada **konstruksi dalam pengerjaan (KDP)**, mengindikasikan banyaknya pembangunan fisik yang dilaksanakan di Provinsi Kepulauan Riau, terutama pembangunan Gedung dan Bangunan. Pertumbuhan nilai Aset Tetap tersebut, sejalan dengan pertumbuhan realisasi Belanja Modal tahun 2023, dan tahun 2024.

Pertumbuhan Aset tertinggi secara persentase terdapat pada **Aset Lancar**, dengan pertumbuhan sebesar Rp1.092,07 miliar, atau 27,59 persen (yoy). Nilai Aset Lancar pada tahun 2024 sebesar Rp5.050,10 miliar, dari tahun 2023 sebesar Rp3.958,03 miliar. Tingginya pertumbuhan Aset Lancar didorong oleh **pertumbuhan Persediaan** sebesar Rp792,84, atau 84,12 persen (yoy). Kemudian juga terjadi pertumbuhan yang signifikan pada **Kas dan Setara Kas**, sebesar Rp425,67 miliar, atau 26,08 persen (yoy). Peningkatan Persediaan, serta Kas dan Setara Kas di Provinsi Kepulauan Riau dipengaruhi oleh percepatan realisasi yang terjadi selama triwulan I 2024. Namun perlu diperhatikan agar, besarnya **idle cash** dan Persediaan yang dimiliki oleh satuan kerja dapat optimal digunakan dengan segera untuk memberikan *output* dan *outcome* kepada masyarakat.

Pada tahun 2024, terdapat komponen Aset baru berupa **Properti Investasi**, yang sebelumnya tidak terdapat dalam Neraca triwulan I 2023. Nilai Properti Investasi di Provinsi Kepulauan Riau sebesar Rp121,38 miliar. Properti Investasi adalah properti yang dimanfaatkan untuk menghasilkan pendapatan sewa atau untuk meningkatkan nilai Aset, atau keduanya, serta tidak dimanfaatkan untuk kegiatan pemerintahan, dimanfaatkan oleh masyarakat, dalam produksi atau penyediaan barang dan atau jasa untuk tujuan administratif, serta dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Tingginya nilai Properti Investasi tersebut, diharapkan dapat dioptimalkan untuk memberikan potensi PNBPN kepada negara.

Penurunan Aset tertinggi terdapat pada **Aset Lainnya**, mengalami penurunan sebesar Rp472,96, atau 53,13 persen. Nilai Aset Lainnya pada tahun 2024 sebesar Rp417,17 miliar, dari sebelumnya Rp890,13 miliar pada tahun 2023. Penurunan tertinggi terdapat pada Aset Lain-Lain sebesar Rp154,19, atau 26,30 persen (yoy).

2.3.1.2 Analisis Growth Kewajiban Pemerintah

Kewajiban pemerintah lingkup wilayah Provinsi Kepri mengalami pertumbuhan signifikan sebesar Rp811,11 miliar, atau 22,95





persen (yoy). Nilai Kewajiban pada tahun 2024 sebesar Rp4.345,86 miliar, dari sebelumnya Rp3.534,76 miliar. Pertumbuhan Kewajiban tertinggi terdapat pada Kewajiban Jangka Pendek, sebesar Rp808,14 miliar, atau 22,86 persen (yoy). Nilai Kewajiban Jangka Pendek pada tahun 2024 sebesar Rp4.342,90, dari sebelumnya Rp3.534,76 miliar.

Kewajiban Jangka Pendek yang mengalami peningkatan tertinggi terdapat pada Pendapatan Diterima di Muka. Nilai Pendapatan Diterima di Muka sebesar Rp3.842,00 miliar, dari sebelumnya Rp3.145,45 pada tahun 2023, atau mengalami peningkatan Rp696,55 miliar (22,14 persen (yoy)). Peningkatan Pendapatan Diterima di Muka yang signifikan tersebut menunjukkan kinerja penerimaan PNBPN yang pesat di awal tahun, namun demikian kewajiban pemberian layanan kepada masyarakat harus dilaksanakan dengan optimal. Adapun Kewajiban yang mengalami penurunan tertinggi terdapat pada Utang Jangka Pendek Lainnya, Utang Jangka

Pendek Lainnya memiliki nilai minus sebesar Rp116,06 miliar, dari sebelumnya memiliki nilai positif sebesar Rp23,85 miliar, mengalami penurunan signifikan sebesar Rp139,91 miliar, atau 586,56 persen (yoy).

2.3.1.3 Analisis Growth Ekuitas Pemerintah

Nilai **Ekuitas pemerintah** di Provinsi Kepri sebesar Rp78.903,32, berdasarkan jumlah Aset sebesar tahun 2024 Rp83.249,18 miliar, dan nilai Kewajiban sebesar Rp4.345,86 miliar. Nilai Ekuitas ini mengalami peningkatan apabila dibandingkan tahun 2023 yang memiliki nilai Ekuitas sebesar Rp76.913,53, atau meningkat Rp1.989,79 atau 2,59 persen. Peningkatan Kewajiban yang cukup tinggi tersebut dipengaruhi oleh peningkatan Aset yang tinggi dibandingkan peningkatan Kewajiban, menunjukkan kinerja pemerintah yang optimal dalam melaksanakan pembangunan infrastruktur untuk menghasilkan Aset Tetap.

2.3.2 Kontribusi Belanja Pemerintah dalam Pembentukan Aset Tetap (Barang Milik Negara) dari Belanja Modal

Tabel 2.21 – Belanja Modal Pemerintah Pusat Tingkat Wilayah, TW I 2023 dan TW I 2024

Blanja Modal	2023 (a)	s.d. TW I 2024 (b)	Jumlah (a+b)	Porsi Belanja
Belanja Modal BLU	794,82	35,28	830,09	33,57%
Belanja Modal Fisik Lainnya	3,80	0,39	4,20	0,17%
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	355,80	22,10	377,90	15,28%
Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	840,82	141,09	981,90	39,71%
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	156,64	16,61	173,25	7,01%
Belanja Modal Tanah	105,55	-	105,55	4,27%
Total	2.257,43	215,46	2.472,89	

Sumber: Government Finance Statistic (GFS), 2024 (data diolah)

Nilai **Aset Tetap** pada tahun 2024 sebesar Rp77.660,54 miliar, dari sebelumnya sebesar Rp75.600,11 miliar pada tahun 2023, mengalami pertumbuhan sebesar Rp2.060,44 miliar, atau

2,73 persen (yoy). Pertumbuhan Aset Tetap tertinggi secara persentase terdapat pada Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP), mengindikasikan banyaknya pembangunan fisik yang dilaksanakan di Provinsi Kepulauan Riau, terutama pembangunan Gedung dan Bangunan.





Adapun pertumbuhan Aset Tetap tertinggi secara nominal terdapat pada Peralatan dan Mesin yang memiliki nilai buku sebesar Rp20.818,41 miliar, dari sebelumnya Rp16.661,97 miliar, meningkat Rp4.156,44 miliar, atau 24,95 persen (yoy). Peningkatan realisasi Peralatan dan Mesin ini digunakan oleh pemerintah dalam peningkatan sarana dan prasarana layanan kepada masyarakat.

Terdapat penambahan jenis akun berupa **Aset Konsesi Jasa** yang sebelumnya tidak terdapat dalam Neraca tahun 2023. Nilai Aset Konsesi Jasa di Kepri cukup signifikan, sebesar Rp3.317,39 miliar (4,27 persen dari total Aset Tetap). Aset Konsesi Jasa ini kemudian dapat menjadi potensi PNBPN yang dapat diterima oleh Negara apabila Aset yang dimaksud dimanfaatkan oleh mitra dalam usaha memperoleh pendapatan.

Berdasarkan nilai pertambahan Aset sebesar Rp2.060,44 miliar, terdapat peran **Belanja Modal Pemerintah** yang mendorong pertumbuhan Aset dan infrastruktur sebesar Rp2.472,89 miliar, atau 120 persen dari pertumbuhan Aset. Peran Belanja Modal yang dikeluarkan pemerintah untuk meningkatkan infrastruktur layanan publik kepada masyarakat.

Belanja Modal sebagian besar digunakan untuk Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan sebesar Rp981,90 miliar. Meskipun

diakibatkan oleh sebagian Aset Jalan, Irigasi dan pada Neraca terdapat penurunan atas nilai Aset Jalan, Irigasi, dan Jaringan, hal tersebut Jaringan tersebut di reklasifikasikan ke dalam Aset Konsesi Jasa.

Peningkatan Aset Gedung dan Bangunan sebesar Rp1.041,26, salah satunya dipengaruhi oleh Belanja Modal Gedung dan Bangunan sebesar Rp377,90 miliar, atau 36,29 persen dari pertumbuhan Aset. Menunjukkan peran yang signifikan dari Belanja Modal Pemerintah dalam meningkatkan infrastruktur layanan publik berupa Gedung dan Bangunan.

Dalam peningkatan Aset Peralatan dan Mesin sebesar Rp4.156,44 miliar, salah satunya dipengaruhi oleh Belanja Modal Gedung dan Bangunan sebesar Rp173,25 miliar, atau 4,16 persen dari pertumbuhan Aset. Menunjukkan peran yang signifikan dari Belanja Modal Pemerintah dalam meningkatkan infrastruktur layanan publik berupa Peralatan dan Mesin.

Adapun belanja modal BLU sebesar Rp830,09 miliar, merupakan Belanja Modal yang dikelola oleh BP Batam dalam meningkatkan infrastruktur di Kota Batam. Belanja Modal tersebut dimanfaatkan oleh BP Batam dalam peningkatan seluruh aspek infrastruktur, mulai dari Jalan, Irigasi, dan Jembatan, Gedung dan Bangunan, Peralatan dan Mesin, serta Aset Tetap infrastruktur lainnya, dalam upaya peningkatan layanan publik kepada masyarakat Kota Batam.





2.2.3 Realisasi dan Potensi PNBPN dan BMN

2.2.3.1 Analisis Realisasi PNBPN Tahunan

Tabel 2.22 – Realisasi PNBPN Tahunan 2021 - 2023

Uraian	TA 2021			TA 2022			TA 2023			Growth (2022-2023)
	Target	Real	%	Target	Real	%	Target	Real	%	
PNBPN Aset	81.85	253.98	310.30%	140.00	298.76	213.40%	174.31	300.19	172.22%	0.48%
PNBPN Piutang Negara	0.03	0.14	451.00%	0.02	0.29	1452.81%	0.06	0.12	200.53%	(58.59%)
PNBPN Lelang	30.41	8.50	27.95%	10.15	12.48	122.88%	25.17	17.02	67.63%	36.42%
Total	112.29	262.62	233.88%	150.17	311.53	207.44%	199.54	317.33	159.03%	1.86%

Sumber: Government Finance Statistic (GFS), 2024 (data diolah)

Realisasi PNBPN yang dikelola oleh KPKNL Batam secara tahunan mengalami terus mengalami peningkatan, pada tahun 2023 dari Target sebesar Rp199,54 miliar, telah direalisasikan Rp317,33 miliar (159,03 persen dari Target), meningkat 1,86 persen (yoy). Meningkatnya PNBPN didorong oleh pengelolaan

PNBPN Lelang sebesar Rp17,03 miliar, yang meningkat 36,42 persen (yoy). Realisasi PNBPN tertinggi, terdapat pada PNBPN Aset dengan realisasi sebesar Rp300,19 miliar (172,22 persen dari Pagu), meningkat 0,48 persen (yoy). Peningkatan PNBPN dari tahun ke tahun didorong oleh pengelolaan Aset BMN yang semakin baik di Provinsi Kepulauan Riau.

2.2.3.2 Analisis Realisasi PNBPN Triwulanan

Tabel 2.23 – Realisasi PNBPN Triwulanan 2023 - 2024

Uraian	TW I 2023			TW I 2024			Growth (2022-2023)
	Target	Real	%	Target	Real	%	
PNBPN Aset	17,43	101,59	582,83%	25,91	62,31	240,43%	(38,67%)
PNBPN Piutang Negara	0,01	0,03	499,78%	0,01	0,09	1010,10%	203,17%
PNBPN Lelang	2,40	1,50	62,62%	2,37	1,53	64,35%	1,77%
Total	19,83	103,12	519,94%	28,30	63,93	225,91%	(38,01%)

Sumber: Government Finance Statistic (GFS), 2024 (data diolah)

Secara triwulanan, PNBPN pada triwulan I 2024 mengalami kontraksi apabila dibandingkan dengan triwulan I 2023, penurunan PNBPN ini terjadi pada penerimaan PNBPN Aset sebesar 38,67 persen (yoy). Nilai penerimaan PNBPN Aset pada triwulan I 2024 sebesar Rp62,31 miliar, turun dibandingkan tahun 2023 dengan nilai penerimaan Rp101,59 miliar.

Penurunan penerimaan PNBPN pada triwulan I 2024 ini dipengaruhi oleh periode pencatatan Pendapatan Sewa yang tidak termasuk pada triwulan I 2024, Pendapatan Sewa diperkirakan akan meningkat pada triwulan ke depan.





2.2.3.3 Analisis Potensi PNBP BMN

Peningkatan PNBP secara tahunan menunjukkan upaya serius pemerintah, khususnya DJKN dalam pemanfaatan *idle* BMN untuk memperoleh potensi PNBP, terlebih lagi

dengan kegiatan yang sangat besar satker BP Batam di Provinsi Kepulauan Riau yang melakukan pengelolaan Aset dalam jumlah besar untuk memperoleh pendapatan, kolaborasi antara DJKN dan BP Batam untuk mengoptimalkan BMN senantiasa dilakukan

Tabel 2.24 – Pertumbuhan Aset Tetap dan Properti Investasi 2023 – 2024

URAIAN	2023	2024	Pertumbuhan	Growth
ASET TETAP	75.600,11	77.660,54	2.060,44	2,73%
Tanah	49.174,07	48.255,76	(918,31)	(1,87%)
Peralatan dan Mesin	16.661,97	20.818,41	4.156,44	24,95%
Gedung dan Bangunan	8.199,20	9.240,46	1.041,26	12,70%
Jalan, irigasi, dan jaringan	18.593,49	18.570,28	(23,21)	(0,12%)
Aset Tetap Lainnya	1.274,78	784,11	(490,67)	(38,49%)
Konstruksi Dalam Pengerjaan	1.250,75	1.964,35	713,60	57,05%
Aset Tetap Lainnya Yang Belum Diregister	-	10,25	10,25	0,00%
Aset Konsesi Jasa	-	3.317,39	3.317,39	0,00%
Akumulasi Penyusutan	(19.563,87)	(25.300,47)	(5.736,61)	29,32%
Aset Tetap Yang Belum Diregister	9,71	-	(9,71)	(100,00%)
PROPERTI INVESTASI	-	121,38	121,38	0,00%
Properti Investasi	-	122,07	122,07	0,00%
Akumulasi Penyusutan Properti Investasi	-	(0,69)	(0,69)	0,00%

Sumber: Government Finance Statistic (GFS), 2024 (data diolah)

Nilai **Aset** yang besar dan terus bertumbuh dari tahun ke tahun perlu dimanfaatkan dengan optimal, terutama *idle* Aset yang tidak dimanfaatkan langsung dalam pelayanan publik. Beberapa jenis Aset yang dapat dimanfaatkan dalam memperoleh PNBP diantaranya yaitu Gedung dan Bangunan, Tanah, Peralatan dan Mesin, serta Tanah.

Saat ini dalam **Neraca Pemerintah Pusat** telah dikenal istilah Aset Konsesi Jasa, dan Properti Investasi. Kedua jenis Aset ini merupakan bentuk pemisahan antara Aset yang digunakan dalam pelayanan publik, serta Aset yang digunakan dalam upaya pemanfaatan Aset untuk memperoleh PNBP, khususnya pada Properti Investasi.

Dibandingkan dengan nilai **Aset Tetap** yang dimiliki oleh pemerintah pusat sebesar Rp77.660,54 miliar, nilai Properti Investasi masih terbilang kecil sebesar Rp121,38 miliar, atau 0,15 persen dari total Aset Tetap. Masih rendahnya nilai Aset yang tergolong menjadi Properti Investasi ini perlu didorong oleh Kementerian Negara/Lembaga yang memiliki *idle* Aset yang dapat dimanfaatkan untuk memperoleh PNBP.

Beberapa bentuk pemanfaatan BMN lainnya yang dapat dimanfaatkan oleh satuan kerja K/L adalah dengan melalui mekanisme kerja sama pemanfaatan, bangun guna serah, bangun serah guna, kerja sama penyediaan infrastruktur, kerja sama terbatas untuk pembiayaan infrastruktur. Beberapa mekanisme ini dapat dilakukan oleh satuan kerja K/L dalam pemanfaatan *idle* Asetnya.



Special Box #2

Local Issue: Analisis Potensi Energi Surya di Kepri:

"Solusi Terhadap Energy Poverty Crisis di Indonesia"

Latar belakang

Kebutuhan dunia terhadap energi meningkat cepat karena pertumbuhan penduduk dan penggunaan teknologi yang semakin canggih (Pegels, 2014). Dilain sisi, sumber energi yang saat ini paling banyak digunakan berasal dari fosil yang persediaannya semakin menurun. Oleh karena itu, diperlukan sumber energi baru, non-fosil yang dapat diandalkan, lebih efisien, dan dapat diperbarui untuk memenuhi kebutuhan energi tersebut.

Potensi Energi Surya sebagai Green Energy

Jumlah energi matahari yang diterima pada suatu permukaan disebut insulasi yang dihitung dengan satuan kWh atau MWh per m². Sebagai contoh, jika sumber daya radiasi matahari didapat selama lima jam dalam sehari, maka insulasi tahunan dihitung sebagai berikut (IEA, 2001).

$$(5/24 \times 8.760) \text{ jam per tahun} \times (1.000 \text{ watt per m}^2)$$

$$/ 1.000 = 1.825 \text{ kWh/m}^2$$

Vashishtha (2012) menyampaikan beberapa jenis radiasi matahari yang diterima di permukaan Bumi, yaitu Direct Normal Irradiance (DNI), Diffuse Horizontal Irradiance (DHI), dan Global Horizontal Irradiance (GHI). DNI adalah jumlah radiasi matahari yang diterima per satuan luas pada suatu permukaan, yang tegak lurus (atau normal) terhadap sinar yang datang langsung dari matahari pada posisinya di langit.

Kepulauan Riau masuk kategori dengan tingkat DNI sedang dengan warna hijau muda kearah kuning. Warna tersebut menunjukkan angka DNI direntang 1022 kWh/m² pertahun, mendekati beberapa lokasi di Negara Cina yang sebagian besar di atas angka 1.022 kWh/m². Namun, Jika dibandingkan dengan Jerman, angka tersebut hampir sama dengan sebagian besar daerah di Jerman. Bahkan jika dibandingkan dengan Jepang, sebagian besar wilayah Negara Jepang bahkan berada dibawah angka DNI Kepri. Perbandingan DNI tersebut menunjukkan bahwa wilayah Kepri potensial untuk pengembangan energi surya.

Studi Komparasi Potensi Energi Surya di Jepang, Jerman, Cina Jepang

Program Sunshine mengembangkan beberapa sumber energi non fosil, terutama energi matahari, energi batubara cair, energi panas, dan hidrogen yang menggunakan anggaran hingga JPY 10 miliar.

Tahun 1980, pemerintah mengesahkan "Alternative Energy Act", dengan kebijakan:

1. Meningkatkan pajak listrik untuk meningkatkan pendapatan guna mendukung kebijakan tersebut.
2. Pembentukan akun khusus pada system keuangan pemerintah untuk pengembangan energi alternatif. Saldo akun ini bersumber dari pendapatan atas pajak listrik dan
3. pajak penggunaan batubara yang akan digunakan khusus untuk pengembangan energi alternatif.

Pembentukan Organisasi Pengembangan Energi Baru (*New Energy Development Organization*).hangat di meja politik terkait ketersediaan politik karena terkait dengan ketersediaan pangan masyarakat

Jerman

Pemerintah Jerman mengeluarkan kebijakan program sumber energi surya pada atap yang diinisiasi pada tahun 1999 yang menyediakan pinjaman dengan bunga rendah untuk jangka waktu sepuluh tahun. Sebagai tambahan dukungan dari pemerintah pusat, pemerintah daerah mendukung penerapan PV dengan berbagai insentif. Tujuan program 100.000 atap PC untuk mencapai total pemasangan dengan kapasitas 300 MWp pada tahun 2023. Aturan Promosi Energi baru terbaru menetapkan tarif "uang Kembali" 51 persen per kWh untuk kelanjutan pengembangan PV (IEA, 2001).

Cina

Pemerintah Cina mengeluarkan kebijakan pemberian insentif ekonomi, subsidi, remisi pajak, dan tarif yang rendah untuk penggunaan tenaga surya. Kebijakan insentif ekonomi yang lebih khusus dan sistem supervisi administrasi yang ditetapkan oleh pemerintah daerah. Perkembangan energi surya dipengaruhi kuat oleh pemerintah daerah karena pemerintah daerah menentukan aturan secara detail.

Analisis SWOT Kepulauan Riau

Strength

1. Penerapan Green Energy diseluruh dunia pada tahun 2050;
2. Dukungan pemerintah untuk menerapkan green energy;
3. Sumber energi surya yang berlimpah.

Weakness

1. Terbatasnya anggaran belanja APBN, sehingga memerlukan pendanaan dari pihak lain.
2. Kondisi geografis kepulauan menyulitkan pengiriman alat-alat dari luar Kepri dan dari aspek teknis, pemasangan memerlukan teknisi yang terlatih.

Opportunity

1. Menciptakan tenaga kerja sebagai operator pemasangan dan pemeliharaan PV.
2. Membuka peluang perusahaan lokal untuk mengembangkan produk utama atau produk pendukung berbasis teknologi PV

Threat

1. PV memerlukan biaya yang tinggi yang mencakup biaya modul dan pemasangan. Biaya pemasangan untuk PV standar berada pada rentang \$5.000 s.d \$7.000 menurut IEA.
2. Kondisi cuaca yang sering terjadi badai angin dapat mempercepat kerusakan alat-alat PV.

Kesimpulan

1. Berdasarkan hasil kajian, dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut:
2. Berdasarkan perbandingan DNI antara wilayah di Jepang, Cina, dan Jerman dengan Kepri, menunjukkan bahwa wilayah Kepri berpotensi memiliki potensi besar untuk pengembangan energi surya.
3. Meluasnya penggunaan energi matahari pada industri dan bangunan dinilai dapat memberikan manfaat lingkungan dan ekonomi yang sangat baik.
4. Dukungan pemerintah terhadap penerapan PV sangat penting. Kebijakan kunci yang dilakukan pemerintah adalah 1) membuat lingkungan yang baik bagi komunitas penelitian, 2) Komitmen jangka panjang pemerintah, 3) Kebijakan untuk menciptakan pasar, 4) Sumber anggaran yang fleksibel.

Pengembangan Ekonomi Daerah

Profiling UMKM Binaan Instansi
Vertikal DJPb





3.1 Pendahuluan

3.1.1 Latar Belakang

Menteri Keuangan berkomitmen agar seluruh elemen di dalam Kementerian Keuangan dapat lebih berperan secara aktif dalam kegiatan **pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM)** melalui Keputusan Menteri Keuangan (KMK) Nomor 396/KMK.01/2022 tentang Program Sinergi Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah Kementerian Keuangan. Arahan ini kemudian diejawantahkan di dalam lingkup Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) melalui Keputusan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor Kep-112/Pb/2023 Tentang Petunjuk Teknis Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah Lingkup Direktorat Jenderal Perbendaharaan.

Dari 64,2 juta UMKM yang ada di Indonesia, **usaha mikro** mendominasi dengan jumlah 63,9 juta atau sebesar 99,6 persen. Oleh karena itu, dukungan pemerintah haruslah difokuskan pada pemberdayaan usaha mikro dikarenakan masing-masing kelompok usaha memiliki kebutuhan yang spesifik bagi pengembangan usahanya namun belum memiliki akses yang optimal untuk menjangkau pelatihan dalam rangka pemenuhan kebutuhan tersebut. Dengan demikian, kegiatan pemberdayaan UMKM lingkup DJPb kemudian difokuskan pada usaha mikro.

Kegiatan **sinergi Kemenkeu Satu** pemberdayaan UMKM DJPb tidak hanya melibatkan Kelompok Kerja (Pokja) sebagaimana diatur dalam KMK Nomor 396/KMK.01/2022, tapi juga melibatkan seluruh unit Eselon II Kantor Pusat DJPb. Kegiatan Pemberdayaan UMKM DJPb diselaraskan dengan tugas dan fungsi masing-masing unit Eselon II Kantor Pusat. Hal ini diharapkan dapat lebih mengefektifkan kegiatan pemberdayaan UMKM DJPb.

Pada konteks regional, tahapan pemberdayaan UMKM yang dilakukan oleh

Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (Kanwil DJPb) dan Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) adalah sebagai berikut:

1. Persiapan Pemberdayaan UMKM, yang meliputi: Profiling UMKM dan Identifikasi Kebutuhan Pemberdayaan UMKM;
2. Pelaksanaan Pemberdayaan UMKM, yang meliputi: Pendampingan Usaha dan Pembiayaan; serta
3. Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan, yang meliputi: Monitoring dan Evaluasi pelaksanaan pemberdayaan UMKM dan Pelaporan pelaksanaan pemberdayaan UMKM.

Pada bab ini akan dibahas kegiatan profiling yang telah dilakukan oleh Kanwil DJPb Prov. Kepri dan KPPN yang berada di wilayah kerjanya yaitu KPPN Tanjung Pinang dan KPPN Batam.

3.1.2 Maksud dan Tujuan

Sesuai dengan **Petunjuk Teknis Pemberdayaan UMKM** Tahun 2024 lingkup DJPb, Pemberdayaan UMKM DJPb dimaksudkan sebagai bagian dari Program Sinergi Pemberdayaan UMKM Kementerian Keuangan dengan fokus pada pelaksanaan tugas dan fungsi DJPb serta kebutuhan pengembangan usaha masing-masing UMKM. Tujuan kegiatan Pemberdayaan UMKM Direktorat Jenderal Perbendaharaan:

1. Mendorong belanja pemerintah untuk UMKM;
2. Mendorong inklusi keuangan UMKM, terutama bagi UMKM yang sulit untuk mendapatkan akses pembiayaan dari perbankan (non-bankable); dan
3. Mendorong pelaku UMKM untuk naik kelas sesuai dengan kriteria yang ditentukan.

3.1.3 Ruang Lingkup

Sesuai dengan Petunjuk Teknis Pemberdayaan UMKM Tahun 2024 lingkup DJPb, kegiatan pemberdayaan UMKM Direktorat Jenderal Perbendaharaan difokuskan pada





pemberdayaan UMKM yang masuk ke dalam kelompok Usaha Mikro yang merupakan 99,6 persen dari total usaha di Indonesia. Pemberdayaan UMKM Direktorat Jenderal Perbendaharaan yang dilakukan oleh Kanwil dan KPPN mencakup dua hal:

1. Pemberdayaan UMKM dalam rangka penguatan tugas dan fungsi DJPb yang dilaksanakan oleh Kanwil dan KPPN sebagaimana tugas rutin/eksisting yang telah dilaksanakan selama ini. Penguatan tugas dan fungsi tersebut disinergikan dengan pemberdayaan UMKM secara umum yang dilakukan oleh seluruh pihak di wilayah kerja Kanwil dan KPPN.
2. Pemberdayaan UMKM terhadap UMKM yang mendapatkan program pemberdayaan oleh Kanwil dan KPPN meliputi tahapan persiapan, pelaksanaan, serta monitoring, evaluasi, dan pelaporan pemberdayaan UMKM.

3.2 Kategori UMKM

Kriteria pelaku UMKM mengikuti kriteria atau klasifikasi sesuai pada Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, yaitu:

1. **Usaha Mikro**, merupakan usaha yang memiliki modal usaha maksimal Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) di luar tanah dan bangunan usaha, dan hasil penjualan tahunan maksimal Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah);
2. **Usaha Kecil**, merupakan usaha yang memiliki modal usaha lebih dari Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) hingga maksimal Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) di luar tanah dan bangunan usaha, dan hasil penjualan tahunan lebih dari Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) hingga maksimal Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah); dan

3. **Usaha menengah**, merupakan usaha yang memiliki modal usaha lebih dari Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) hingga maksimal Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) di luar tanah dan bangunan usaha, dan hasil penjualan tahunan lebih dari Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah) hingga maksimal Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah).

Dalam hal pemberdayaan UMKM Kemenkeu, dikenal istilah **UMKM naik kelas** yang dapat diartikan sebagai peningkatan usaha yang dialami oleh UMKM mulai dari awal merintis usaha yang membutuhkan bimbingan, kemudian berkembang sehingga dapat berusaha secara mandiri, dan terus meningkatkan produktivitas usahanya hingga dipasarkan ke luar negeri. Pelaku UMKM dikelompokkan ke dalam tiga klasterisasi UMKM yaitu UMKM Rintisan, UMKM Siap Mandiri, dan UMKM Siap Ekspor.

UMKM Rintisan merupakan pelaku UMKM yang memiliki kriteria usaha sebagai berikut:

- a) Belum memiliki rekening bank;
- b) Belum melakukan pencatatan usaha;
- c) Belum memisahkan keuangan pribadi dengan usaha;
- d) Belum mampu menyusun laporan keuangan usaha;
- e) Belum mampu mengakses pembiayaan dari lembaga formal;
- f) Belum menggunakan media pemasaran dan promosi secara online;
- g) Belum pernah mengikuti bazar atau pameran baik di dalam maupun luar negeri;
- h) Belum memiliki NPWP, NIB, dan izin usaha lainnya; dan
- i) Produk belum berorientasi ekspor.

UMKM Siap Mandiri merupakan pelaku UMKM yang memiliki kriteria usaha sebagai berikut:

- a) Memiliki rekening bank yang tercampur untuk transaksi pribadi dan usaha;





- b) Telah melakukan pencatatan usaha sederhana, tetapi belum mampu menyusun laporan keuangan usaha;
 - c) Telah mampu mengakses pembiayaan usaha dari lembaga formal;
 - d) Telah aktif menggunakan media pemasaran dan promosi secara *online* dengan jangkauan transaksi hingga ke luar kota;
 - e) Pernah mengikuti bazar atau pameran dalam negeri;
 - f) Sudah memiliki NPWP, NIB, dan izin usaha lainnya;
 - g) Produk belum berorientasi ekspor namun sudah mengetahui mengenai tata cara ekspor; dan
 - h) Sudah mengetahui mengenai cara untuk terhubung dengan calon pembeli dari luar negeri tetapi belum mengimplementasikannya.
- g) Produk berorientasi ekspor dan sudah mengetahui tata cara ekspor dan siap melakukan ekspor; dan/atau
 - h) Sudah mengetahui mengenai cara untuk terhubung dengan calon pembeli dari luar negeri dan secara aktif mengimplementasikannya.

Kegiatan pemberdayaan UMKM DJPb diharapkan dapat mewujudkan “UMKM Naik Kelas” terhadap pelaku UMKM yang akan dilakukan pemberdayaan.

3.3 Hasil Profiling UMKM

3.3.1 Proses Profiling UMKM

Profiling UMKM dilaksanakan oleh Kanwil DJPb dan KPPN. Profiling UMKM dilaksanakan dalam rangka mengumpulkan informasi tentang karakteristik dan kondisi bisnis UMKM. Langkah-langkah yang dilakukan Kanwil dan KPPN dalam rangka Profiling UMKM adalah sebagai berikut:

3.3.1.1 Melakukan Survei Pelaku Usaha

Survei dilakukan bersama-sama oleh Kanwil DJPb dan KPPN dengan target masing-masing unit paling sedikit dua UMKM. Kanwil DJPb Kepri dan KPPN Tanjung Pinang melakukan survei kepada pelaku UMKM di wilayah Tanjungpinang, sedangkan KPPN Batam di wilayah Batam. Hal ini dilakukan dengan pertimbangan efisiensi dan efektifitas kemudahan akses transportasi pada saat akan dilakukan pemberdayaan mengingat Kepri merupakan wilayah kepulauan terluar, biaya transportasi yang tinggi, dan cuaca yang kurang stabil.

UMKM Siap Ekspor merupakan pelaku UMKM yang memiliki kriteria usaha sebagai berikut:

- a) Memiliki rekening bank terpisah antara transaksi pribadi dan usaha;
- b) Telah melakukan pencatatan usaha dan mampu menyusun laporan keuangan usaha;
- c) Telah mampu mengakses pembiayaan usaha dari lembaga formal;
- d) Telah aktif menggunakan media pemasaran dan promosi secara *online* dengan jangkauan transaksi hingga ke luar negeri;
- e) Pernah mengikuti bazar atau pameran di luar negeri;
- f) Sudah memiliki NPWP, NIB, dan izin usaha lainnya;





Kanwil DJPb Kepri

Survei dilaksanakan pada tanggal 30 April 2024 bertempat di Tanjungpinang bekerja sama dengan salah satu pelaku UMKM Syarifah Nurulhuda (*Me'dalicious*) yang juga merupakan ketua Paguyuban UMKM "Bripro UMKM".

Survei dilakukan terhadap dua pelaku UMKM, yaitu: Fenny dan Ema Karmila. Adapun dokumentasi kegiatan survei sebagai mana Gambar 3.1 dan 3.2 berikut.

Gambar 3.1 - Profiling UMKM oleh Kanwil DJPb Kepri (1)



Gambar 3.2 - Profiling UMKM oleh Kanwil DJPb Kepri (2)



Sumber: Kanwil DJPb Provinsi Kepri, 2024

KPPN Tanjung Pinang

Survei dilaksanakan pada tanggal 22 Mei 2024 dan 28 Mei 2024 bertempat di Tanjungpinang Survei dilakukan terhadap dua

pelaku UMKM, yaitu: Farisa Asthri dan Nissa. Adapun dokumentasi kegiatan survei sebagai mana Gambar 3.3 dan 3.4 berikut.

Gambar 3.3 - Profiling UMKM oleh KPPN Tanjungpinang (1)



Sumber: KPPN Tanjungpinang, 2024





Gambar 3.4 - Profiling UMKM oleh KPPN Tanjungpinang (2)



Sumber: KPPN Tanjungpinang, 2024

KPPN Batam

Survei dilaksanakan pada tanggal 28 Mei 2024 bertempat di Batam. Survei dilakukan terhadap dua pelaku UMKM, yaitu: Ratna Sari

Dewi dan Maryani. Adapun dokumentasi kegiatan survei sebagaimana Gambar 3.5 dan 3.6 berikut.

Gambar 3.5 - Profiling UMKM oleh KPPN Batam (1)



Gambar 3.6 - Profiling UMKM oleh KPPN Batam (2)



Sumber: KPPN Batam, 2024





3.3.1.2 Mengklasifikasikan UMKM

Setelah selesai dilakukan survei, seluruh pelaku UMKM kemudian diklasifikasikan berdasarkan kriteria tertentu. Kegiatan mengklasifikasikan UMKM dilakukan dengan cara melihat hasil *profiling* pada dokumen hasil survei yang telah dilakukan. Adapun dokumen survei terlampir pada Lampiran I.

3.3.1.3 Memilih UMKM

Setelah selesai dilakukan **klasifikasi UMKM**, kemudian dipilih pelaku UMKM yang

sesuai untuk diberikan fasilitas pemberdayaan. Adapun terdapat total **enam pelaku UMKM** yang terpilih dengan sebaran masing-masing dua pelaku UMKM di tiap unit.

3.3.2 Hasil *Profiling* UMKM

Dari keenam pelaku UMKM yang dilakukan *profiling*, diperoleh hasil bahwa UMKM yang akan menerima pembinaan dan pemberdayaan yaitu UMKM dengan klasifikasi rintisan. Adapun rincian poin kriteria UMKM sebagai mana tersaji dalam Tabel 3.1 berikut.

Tabel 3.1 - Hasil *Profiling* UMKM

Kriteria	Kanwil DJPb Kepri		KPPN Tanjung Pinang		KPPN Batam	
	Fenny Yara	Ema Karmila	Farisa Asthri	Nissa	Ratna Sari Dewi	Maryanti
Rekening usaha terpisah	X	X	X	X	X	X
Pencatatan usaha sederhana	V	V	X	X	X	X
Laporan keuangan usaha	X	X	X	X	X	X
Akses pembiayaan usaha formal	X	X	X	X	X	V
Pemasaran <i>online</i> ke luar kota	X	X	V	X	X	X
Bazaar/pameran dalam negeri	X	X	X	X	X	X
NIB	V	V	V	V	V	X
NPWP	X	X	V	V	V	X
Produk berorientasi ekspor	V	X	X	X	X	X
Pengetahuan tata cara ekspor	X	X	X	X	X	X
Akses calon pembeli luar negeri	X	X	X	X	X	X
Jumlah Poin	3	2	3	2	2	1
Kriteria UMKM	Rintisan	Rintisan	Rintisan	Rintisan	Rintisan	Rintisan

Sumber: Hasil *Profiling* UMKM Kanwil DJPb Kepri, KPPN Tanjung Pinang, dan KPPN Batam, 2024 (data diolah)

3.3.3 Deskripsi UMKM yang Dipilih untuk Mendapatkan Pemberdayaan

Berikut disajikan deskripsi dari enam pelaku UMKM yang dipilih untuk mendapatkan pemberdayaan.

3.3.3.1 Fenny Yara - Makrame

UMKM berbentuk usaha perorangan pada **sektor usaha industri pengolahan kriya** yang sudah mulai menjalankan usaha sejak Desember 2022. Sumber permodalan dengan modal sendiri

sebesar Rp500.000 dan omzet tahunan sekitar Rp2.500.000 dari penjualan produk makrame seperti gantungan kunci, *wall decor*, dan bentuk *custom* lainnya. UMKM belum memiliki pelanggan reguler.

Dari sisi aspek keuangan, transaksi biasanya dilakukan dalam bentuk kas/tunai sehingga belum memiliki rekening bank yang terpisah antara keperluan pribadi dan transaksi usaha. Pencatatan usaha masih dilakukan secara





sederhana antara arus kas masuk dan keluar dan pencatatan ini masih tidak terlalu lengkap.

Dari sisi aspek pemasaran, UMKM ini telah melakukan pemasaran secara *offline* dan *online*. Pemasaran *online* dilakukan melalui media sosial *facebook*, *instagram*, dan *whatsapp*. Namun demikian, belum dilakukan pemasaran melalui *marketplace online* dikarenakan kekhawatiran tidak dapat menangani pesanan yang masuk serta kesulitan mencari admin.

Dari sisi aspek legalitas usaha, pelaku UMKM telah memiliki NPWP (62.330.434.2-214.000), NIB (0501230064975), dan HAKI. Namun, pelaku UMKM belum pernah menerima pendampingan terkait orisinalitas *branding* produk.

Dari sisi aspek kesiapan ekspor, pelaku UMKM telah berminat untuk melakukan ekspor karena keunikan produk yaitu dapat melakukan *custom* sesuai keinginan pembeli. Namun demikian, ekspor belum dilakukan karena belum mendapatkan informasi jelas terkait tata cara dan syarat-syarat ekspor serta belum memiliki modal yang cukup untuk menerima pesanan dalam jumlah besar. Responden juga belum pernah menerima pendampingan terkait ekspor produk.

3.3.3.2 Ema Karmila - Kue Basah

UMKM berbentuk usaha perorangan pada **sektor usaha industri pengolahan kuliner** dan sudah mulai beroperasi sejak Juni 2022. Sumber permodalan dengan modal sendiri sebesar Rp500.000 dan omzet tahunan sekitar Rp4.000.000 dari penjualan produk kue basah dan makanan khas melayu. UMKM belum memiliki pelanggan reguler.

Dari sisi aspek keuangan, transaksi biasanya dilakukan dalam bentuk kas/tunai dan transfer bank namun belum memiliki rekening bank yang terpisah antara keperluan pribadi dan transaksi usaha. Pencatatan usaha masih dilakukan secara sederhana antara arus kas masuk dan keluar.

Dari sisi aspek pemasaran, UMKM ini telah melakukan pemasaran secara *offline* dan *online*. Pemasaran *online* dilakukan melalui media sosial *facebook* dan *whatsapp*. Namun demikian, belum dilakukan pemasaran melalui *marketplace online* dikarenakan ketakutan tidak dapat menangani pesanan yang masuk, kekurangan pegawai, serta takut ditipu oleh calon pelanggan.

Dari sisi aspek legalitas usaha, pelaku UMKM belum memiliki NPWP, sudah memiliki NIB (0601230092119), dan telah memiliki sertifikat halal. Namun, pelaku UMKM belum pernah menerima pendampingan terkait orisinalitas *branding* produk dan pengemasan produk.

Dari sisi aspek kesiapan ekspor, produk tidak dapat diekspor karena kue basah tidak memiliki daya tahan lama. Responden juga belum pernah menerima pendampingan terkait ekspor produk.

3.3.3.3 Farisa Asthri – Frozen food, aneka kue, dan laksa

UMKM berbentuk usaha perorangan pada **sektor usaha industri pengolahan kuliner** dan sudah mulai beroperasi sejak Januari 2023. Sumber permodalan dengan modal sendiri sebesar Rp1.000.000 dan omzet tahunan sekitar Rp4.000.000 dari penjualan produk *frozen food*, aneka kue, serta laksa. UMKM belum memiliki pelanggan reguler.

Dari sisi aspek keuangan, transaksi biasanya dilakukan dalam bentuk kas/tunai dan transfer bank namun belum memiliki rekening bank yang terpisah antara keperluan pribadi dan transaksi usaha, serta belum melakukan pencatatan keuangan usaha.

Dari sisi aspek pemasaran, UMKM ini telah melakukan pemasaran secara *offline* dan *online*. Pemasaran *online* dilakukan melalui media sosial *facebook*, *instagram* dan *whatsapp*. UMKM ini juga telah melakukan pemasaran melalui *marketplace online* yaitu *gofood*.





Dari sisi aspek legalitas usaha, pelaku UMKM sudah memiliki NPWP, sudah memiliki NIB, namun belum memiliki sertifikat halal. Pelaku UMKM belum pernah menerima pendampingan terkait orisinalitas branding produk dan pengemasan produk

Dari sisi aspek kesiapan ekspor, produk tidak dapat diekspor karena *frozen food* tidak memiliki daya tahan lama. Responden juga belum pernah menerima pendampingan terkait ekspor produk.

3.3.3.4 Nissa – *Frozen food* dan aneka kue

UMKM berbentuk usaha perorangan pada **sektor usaha industri pengolahan kuliner** dan sudah mulai beroperasi sejak Desember 2020. Sumber permodalan dengan modal sendiri sebesar Rp1.000.000 dan omzet tahunan sekitar Rp4.000.000 dari penjualan produk *frozen food* dan aneka kue. UMKM belum memiliki pelanggan reguler.

Dari sisi aspek keuangan, transaksi biasanya dilakukan dalam bentuk kas/tunai dan transfer bank namun belum memiliki rekening bank yang terpisah antara keperluan pribadi dan transaksi usaha, serta belum melakukan pencatatan keuangan usaha.

Dari sisi aspek pemasaran, UMKM ini telah melakukan pemasaran secara *offline* dan *online*. Pemasaran *online* dilakukan melalui media sosial *facebook*. Namun demikian, belum dilakukan pemasaran melalui *marketplace online* dikarenakan ketakutan tidak dapat menangani pesanan yang masuk dan kekurangan pegawai.

Dari sisi aspek legalitas usaha, pelaku UMKM sudah memiliki NPWP, sudah memiliki NIB, namun belum memiliki sertifikat halal. Pelaku UMKM belum pernah menerima pendampingan terkait orisinalitas branding produk dan pengemasan produk.

Dari sisi aspek kesiapan ekspor, produk tidak dapat diekspor karena *frozen food* tidak memiliki daya tahan lama. Responden juga

belum pernah menerima pendampingan terkait ekspor produk.

3.3.3.5 Ratna Sari Dewi – Roti dan Kue

UMKM berbentuk usaha perorangan pada **sektor usaha industri produk roti dan kue** yang sudah mulai menjalankan usaha sejak Bulan September Tahun 2021. Sumber permodalan dengan modal sendiri sebesar Rp1.000.000 dan omzet tahunan sekitar Rp3.000.000 dari penjualan produk roti dan kue. UMKM telah memiliki pelanggan reguler.

Dari sisi aspek keuangan, transaksi biasanya dilakukan dalam bentuk kas/tunai sehingga belum memiliki rekening bank yang terpisah antara keperluan pribadi dan transaksi usaha. Pencatatan usaha masih dilakukan secara sederhana antara arus kas masuk dan keluar dan pencatatan ini masih tidak terlalu lengkap.

Dari sisi aspek pemasaran, UMKM ini telah melakukan pemasaran secara *offline* dan *online*. Pemasaran *online* dilakukan melalui media sosial seperti *facebook*, *instagram*, dan *whatsapp* dan pemasaran melalui *marketplace online Grabfood/Gofood/Shopeefood*.

Dari sisi aspek legalitas usaha, pelaku UMKM telah memiliki NPWP (966822264225000) dan NIB dan HAKI dan telah mempunyai sertifikasi halal pelaku UMKM pernah menerima pendampingan terkait orisinalitas *branding* produk.

Dari sisi aspek kesiapan ekspor, pelaku UMKM tidak berminat untuk melakukan ekspor karena produk yang dihasilkan berupa produk makanan.

3.3.3.6 Maryanti - Makanan

UMKM berbentuk usaha perorangan pada **sektor usaha makanan** berupa makanan bubur jongkong yang sudah mulai menjalankan usaha sejak April 2019. Sumber permodalan dengan modal sendiri sebesar Rp600.000 dan omzet tahunan sekitar Rp3.000.000 dari penjualan





produk makanan bubur jongkong. UMKM belum memiliki pelanggan reguler.

Dari sisi aspek keuangan, transaksi biasanya dilakukan dalam bentuk kas/tunai sehingga belum memiliki rekening bank yang terpisah antara keperluan pribadi dan transaksi usaha. Pencatatan usaha masih dilakukan secara sederhana antara arus kas masuk dan keluar dan pencatatan ini masih tidak terlalu lengkap.

Dari sisi aspek pemasaran, UMKM ini telah melakukan pemasaran secara offline dan untuk pemasaran secara online tidak dilakukan karena keterbatasan SDM tidak dapat menangani pesanan yang masuk serta kesulitan mencari admin seperti melalui media sosial facebook, instagram, dan untuk whatsapp UMKM melayani pembelian.

Dari sisi aspek legalitas usaha, pelaku UMKM belum memiliki NPWP, NIB, dan HAKI. Dan pelaku UMKM juga belum pernah menerima pendampingan terkait orisinalitas *branding* produk.

Dari sisi aspek kesiapan ekspor, pelaku UMKM tidak berminat untuk melakukan ekspor karena produk yang dihasilkan tidak cocok untuk diekspor.

3.3.4 Deskripsi Kebutuhan Pemberdayaan UMKM

Apabila dilihat dari data hasil survei, diketahui bahwa secara umum seluruh pelaku UMKM **belum memiliki rekening usaha yang**

terpisah dengan rekening pribadi, belum melakukan pelaporan keuangan usaha, belum mengikuti bazar/pameran dalam negeri, dan belum berorientasi ekspor dikarenakan belum memiliki pengetahuan terkait tata cara ekspor dan belum memiliki akses calon pembeli luar negeri.

Lebih lanjut, UMKM juga membutuhkan **pendampingan terkait pemasaran online**, baik itu melalui media sosial maupun *marketplace*. Hal ini juga berkaitan dengan pendampingan tata cara membuat konten foto maupun *video* yang menarik bagi calon konsumen.

3.4 Penutup

3.4.1 Kesimpulan

Pada triwulan I 2024, Kanwil DJPb Kepri beserta KPPN di wilayah kerjanya telah melaksanakan *Profiling* UMKM dengan hasil **diperoleh enam UMKM yang akan menerima pembinaan dengan klasifikasi seluruhnya merupakan UMKM Rintisan**.

3.4.2 Tindak Lanjut Pemberdayaan UMKM

Setelah dilakukan *profiling* UMKM binaan oleh Kanwil DJPb Kepri, KPPN Tanjung Pinang, dan KPPN Batam maka langkah selanjutnya yaitu melaksanakan identifikasi kebutuhan pemberdayaan UMKM, pelaksanaan pemberdayaan, dan monitoring evaluasi pemberdayaan. Adapun tindak lanjut ini akan dilaksanakan oleh Kanwil DJPb Kepri bekerja sama dengan Kemenkeu Satu Kepri.



Special Box #3

Suplemen Kajian

Pengaruh Infrastruktur Transportasi Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Kepri dengan Regresi Data Panel *Fixed Effect Model*

Latar belakang

Konektivitas penting karena dapat menurunkan tingkat kemiskinan dengan cara menghubungkan area perdesaan ke pasar yang lebih luas yang tersedia di kota atau pulau lainnya sehingga memberikan akses kepada rumah tangga kepada barang dan jasa dengan harga yang lebih terjangkau dan stabil (Sandee, 2016).

Tingkat kemiskinan di Indonesia lebih tinggi pada daerah terpencil. Selain itu, peningkatan konektivitas berkontribusi terhadap diversifikasi yang lebih besar dalam produksi dan ekspor, dengan membantu pelaku bisnis mengembangkan keunggulan kompetitif dengan produk bernilai tambah lebih tinggi dengan biaya produksi yang lebih rendah secara andal dan akurat (Sandee, 2016).

Hal ini berdasarkan pengakuan eksportir produk olahan yang mengatakan bahwa pada bulan-bulan tertentu di mana load ekspor tinggi, sekitar 10 persen dari barang ekspor Indonesia tidak dapat diekspor karena melewati batas waktu pengiriman yang terkendala oleh kurangnya konektivitas dari daerah industri yang berada di pedalaman dan pelabuhan.

Li et al. (2023) menyatakan bahwa ekspansi infrastruktur pelabuhan di Cina memiliki peran yang signifikan dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi regional. Li dan Qi (2016) menemukan bahwa konektivitas transportasi lebih berperan penting terhadap pertumbuhan ekonomi dibandingkan kontribusi tenaga kerja. Lebih lanjut Li dan Qi (2016) mengungkapkan bahwa kepadatan jaringan jalan dan kereta api serta jumlah pengguna internet aktif memiliki dampak yang signifikan terhadap PDB per kapita.

Menurut Li dan Qi (2016), tingkat perkembangan ekonomi tidak hanya bergantung kepada model perekonomian Cina saat ini, namun juga kebijakan ekonomi dan politik pemerintah yang memiliki peranan penting dalam infrastruktur konektivitas transportasi.



Sumber Gambar: google, 2024

Data dan Metodologi

Data yang digunakan dalam kajian ini yaitu PDRB ADHK, panjang jalan dan jumlah arus barang pelabuhan dari 7 kota dan kabupaten lingkup Kepri tahun 2021-2023. Metode yang digunakan dalam kajian ini adalah analisis regresi data panel dengan model penelitian sebagai berikut:

$$\ln PDRB_{it} = \beta_0 + \beta_1 \ln JALAN_{it} + \beta_2 \ln LABUH_{it} + e_{it}$$

Keterangan:

PDRB = PDRB per kab/kota ke i tahun t

JALAN_{it} = panjang jalan per kab/kota ke i tahun t

LABUH_{it} = jumlah arus barang (bongkar dan muat) di pelabuhan per kab/kota ke i tahun t

e_{it} = residual

β₀ = intersep

β₁, β₂ = koefisien regresi

ln = logaritma natural

Terdapat tiga pendekatan metode estimasi regresi dengan menggunakan data panel yaitu *Common Effect Model*, *Fixed Effect Model* dan *Random Effect Model*. Untuk menentukan model data panel yang paling tepat, dilakukan pengujian yaitu:

1. Chow Test

H₀ : μ_i = 0 (*Common Effect Model*)

H₁ : μ_i ≠ 0 (*Fixed Effect Model*)

2. Hausman Test

H₀ : ((μ_i|x_{it}) = 0 (*Random Effect Model*)

H₁ : ((μ_i|x_{it}) ≠ 0 (*Fixed Effect Model*)

3. Uji Asumsi Klasik (α = 5%)

- Uji Normalitas Kolmogorov-Smirnov
- Uji Multikolinearitas dengan melihat nilai *Tolerance* (>0,10) dan *VIF* (<10,00)
- Uji Heteroskedastisitas dengan *Rank Spearman*
- Uji Autokorelasi dengan *Runs Test*

Kesimpulan

- Infrastruktur transportasi darat dan laut secara bersama-sama memiliki pengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi di seluruh kabupaten dan kota lingkup Kepri secara signifikan dengan koefisien determinasi 99 persen. Hal ini tidak lepas dari faktor Kepri sebagai *archipelagic province* yang membutuhkan kombinasi moda transportasi laut dan darat untuk mengirimkan barang dari satu daerah ke daerah lain.
- Provinsi Kepri memiliki letak yang strategis sehingga hal ini dapat menjadi peluang bagi pemerintah daerah untuk memperoleh keuntungan ekonomi sehingga ketersediaan infrastruktur transportasi penting untuk menjembatani optimalisasi peluang tersebut.

Analisis Tematik

Efektivitas Belanja Pembangunan Infrastruktur Konektivitas



4.1 Pendahuluan

Peran dan kontribusi Fiskal di Kepri terhadap peningkatan pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat sangat dominan. Hal ini dapat dilihat dari terus meningkatnya alokasi pagu belanja baik pemerintah pusat maupun pemda melalui Transfer ke Daerah (TKD) dari tahun ke tahun.

Kajian Fiskal Regional Kepulauan Riau triwulan I 2024 (KFR) menyajikan perkembangan indikator makro dan fenomena sosial ekonomi di regional Kepri pada Bab 1, dilanjutkan kinerja fiskal APBN Regional dan Kinerja APBD di Bab 2 dan 3. Pembahasan lebih spesifik bagaimana fiskal APBN (dikelola oleh Satker pada Kementerian PUPR dan Perhubungan) dan APBD bekerja menjadi bahan bakar (*greasing the wheel*) perekonomian, pada Bab 4 analisis tematik KFR akan fokus pada analisis kontribusi belanja konektivitas APBN dan APBD (transportasi, digitalisasi, IT, jalan dan jembatan, pelabuhan, bandara udara dll) terhadap perkembangan kesejahteraan masyarakat Kepri.

Bab ini menghasilkan analisis tentang fiskal regional Kepri berhasil meningkatkan sarpras konektivitas dalam bentuk pembangunan jalan, jembatan, bandara udara, pelabuhan dan jaringan, serta PDRB dan pertumbuhan ekonomi. Hal ini tidak lepas dari efektifitas kebijakan pemda di seluruh lini dalam menyusun program/kegiatan yang tepat guna, tepat sasaran dan tepat jumlah.

Selain itu peningkatan kompetensi SDM yang selama ini menjadi isu klasik dalam pengelolaan keuangan daerah terus membaik sehingga dapat mengurangi terjadinya keterlambatan bayar, perencanaan yang tidak memadai, dan penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah yang tidak transparan dan akuntabel.

Secara khusus, pada Bab 4 menyoroti tentang pentingnya belanja konektivitas dalam membangun ekosistem maritim pada provinsi Kepri yang memiliki karakteristik sebagai *archipelagic region* (daerah kepulauan).



Analisis dan pembahasan diharapkan dapat memberikan *insights* dan materi evaluasi bagi pemerintah pusat dan pemda apakah belanja konektivitas pada periode triwulan 1 2024 ini telah memberikan dampak positif atau meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Kepri dengan menggunakan **metodologi statistik (Structural Equation Modelling – SEM)** yang dapat diandalkan. Selain itu, belum memadainya kebutuhan fasilitas dasar seperti tenaga listrik (*energy poverty*) dan masih kurangnya jumlah transportasi laut untuk logistik dan penumpang menghasilkan beberapa kabupaten yang berlokasi jauh dari pusat bahan baku kesulitan ketersediaan logistik, kelangkaan kebutuhan sandang, pangan dan papan kehidupan sehari-hari dan perlambatan kesejahteraan masyarakatnya.

Ketimpangan antar daerah di Kepri sangat nyata bila dilihat dari *gap* pertumbuhan ekonomi antar Kabupaten/kota di Kepri sementara pengembangan sarpras konektivitas tidak berjalan cepat. Selain isu tersebut, adanya inefisiensi dalam pengelolaan keuangan daerah yang tidak menghasilkan output sarpras konektivitas yang diharapkan dianalisis menggunakan **metode Data Envelopment Analysis (DEA)**. Penjelasan rinci mengenai hasil analisis dibahas tuntas di Bab 4 ini.

Rekomendasi dari Kanwil Ditjen Perbendaharaan Prov. Kepri sebagai Regional Chief Economist (RCE) dan *Treasury Advisor* adalah agar analisis tematik terkait belanja konektivitas di Kepri dapat memberikan ruang perbaikan bagi pemda untuk menyusun skala prioritas pada saat penyusunan program, terutama program yang menggunakan sumber dana Transfer ke Daerah (TKD). Efisiensi penggunaan TKD lebih diutamakan untuk penyediaan fasilitas dasar masyarakat yang berada di Kabupaten yang masih kekurangan (*scarcity*) sehingga TKD dapat menjadi *stepping stone* (batu loncatan) bagi daerah tsb untuk melewati *threshold scarcity* tersebut. Itulah fungsi

dan manfaat utama dari TKD dan **falsafah Desentralisasi Fiskal** yaitu mengurangi **vertical dan horizontal imbalances** antar daerah. Pemanfaatan dan alokasi TKD yang tepat terus dimonitor oleh pihak terkait agar dapat berjalan baik.

Nilai tambah KFR TW 1 2024 ini adalah menyajikan hasil analisis belanja konektivitas yang sangat relevan dengan kebutuhan pemda/satker di Kepri menggunakan metodologi analisis yang reliable dan robust sehingga dapat digunakan oleh pemda dan satker untuk pengambilan keputusan.

KFR ini kami susun untuk dimanfaatkan seluas-luasnya oleh seluruh stakeholders di regional Kepri.

4.2 Analisis Tematik

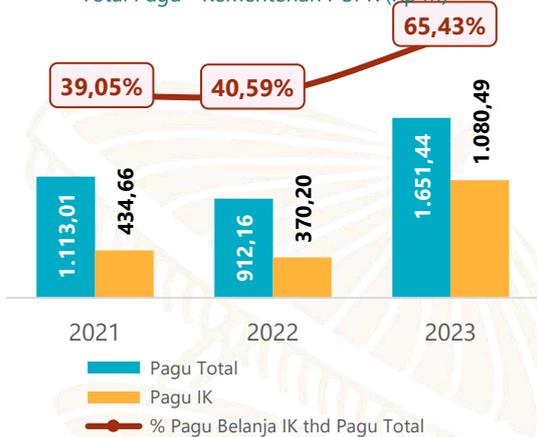
4.2.1 Analisis Perkembangan Belanja Dukungan Infrastruktur Konektivitas - Realisasi Belanja Infrastruktur Optimal Pada Tahun 2023

Pemerintah melaksanakan **pembangunan infrastruktur** untuk mempermudah akses dan mobilitas antar daerah dalam mendukung perekonomian di daerah. Pembangunan infrastruktur ini dilaksanakan oleh pemerintah melalui **belanja infrastruktur konektivitas** yang digunakan untuk membiayai pembangunan infrastruktur yang menghubungkan antara satu daerah dengan daerah lainnya. Beberapa Kementerian Negara/Lembaga yang melaksanakan pembangunan infrastruktur di Kepri, diantaranya yaitu Kementerian PUPR, dan Kementerian Perhubungan yang memiliki tugas dan fungsi utama untuk melaksanakan pembangunan dan penghubung antar daerah.

Kementerian PUPR banyak melaksanakan pembangunan infrastruktur konektivitas pada pembangunan jalan, dan jembatan. Pembangunan jalan dan jembatan ini dilaksanakan untuk mempermudah dan memperbaiki akses antar daerah di Provinsi Kepulauan Riau. Kemudian pada Kementerian Perhubungan, pembangunan infrastruktur

banyak dilaksanakan pada pembangunan konektivitas transportasi laut, udara, serta keselamatan dan keamanan transportasi di laut, udara, dan darat. Total Pagu pada kedua Kementerian Negara/Lembaga tersebut sebagian besar terdapat pada pembangunan fisik infrastruktur, dengan rincian sebagai berikut:

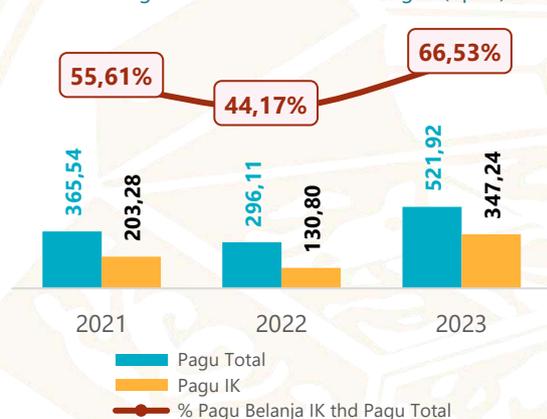
Grafik 4.1 - Pagu Belanja Infrastruktur Terhadap Total Pagu - Kementerian PUPR (Rp M)



Sumber: Data ALCo Program Infrastruktur dan Konektivitas, Triwulan I 2024 (diolah)

Pada **Kementerian PUPR**, belanja Infrastruktur Konektivitas terus mengalami peningkatan dari tahun 2021 s.d. 2023. Pada tahun 2023, Pagu Infrastruktur Konektivitas sebesar Rp1.080,49 miliar, terjadi peningkatan sebesar 191,86 persen (yoy), seperti terlihat pada grafik 4.1. Data ini menunjukkan keseriusan pemerintah dalam meningkatkan Infrastruktur Konektivitas di Prov. Kepri.

Grafik 4.2 - Pagu Belanja Infrastruktur Terhadap Total Pagu - Kementerian Perhubungan (Rp M)

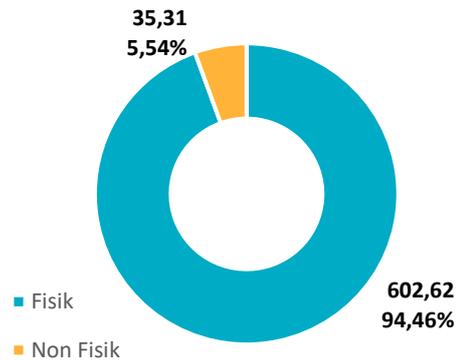


Sumber: Data ALCo Program Infrastruktur dan Konektivitas, Triwulan I 2024 (diolah)

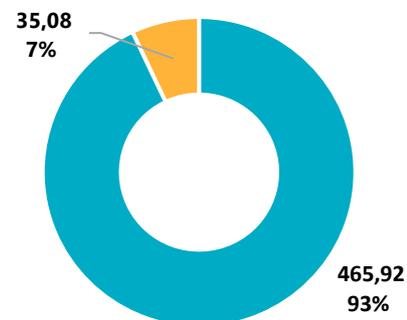
Pada grafik 4.2, Realisasi Belanja Infrastruktur Konektivitas di **Kementerian Perhubungan** terus mengalami pertumbuhan dari tahun 2021 s.d. 2023. Pertumbuhan tertinggi, pada tahun 2023, menjadi Rp347,24 miliar, meningkat 165,48 persen (yoy). *Share* Pagu Infrastruktur Konektivitas terhadap total Pagu, sebesar 66,53 persen, menunjukkan porsi yang besar dalam peningkatan Infrastruktur di Daerah.

Pagu yang tersebar pada Kementerian PUPR dan Kemenhub tersebut kemudian terbagi menjadi **dua output**, yaitu output dalam bentuk fisik dan non-fisik. Berdasarkan Pagu Infrastruktur Konektivitas tahun 2021 Rp601,84 miliar, sebanyak 602,62 miliar (94,46 persen dari total Pagu) merupakan Pagu Fisik. Sedangkan Rp35,31 miliar (5,54 persen dari total Pagu) merupakan Pagu Non Fisik.

Grafik 4.3 - Perbandingan Pagu Fisik dan Non Fisik – Tahun 2021 (Rp M)

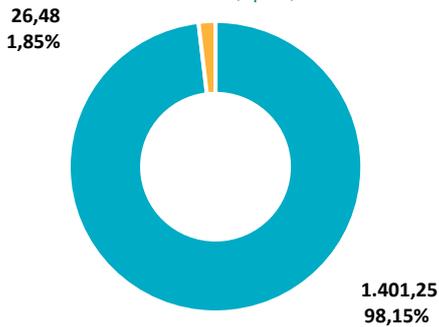


Grafik 4.4 - Perbandingan Pagu Fisik dan Non Fisik – Tahun 2022 (Rp M)



Sumber: Data ALCo Program Infrastruktur dan Konektivitas, Triwulan I 2024 (diolah)

Grafik 4.5 - Perbandingan Pagu Fisik dan Non Fisik – Tahun 2023 (Rp M)



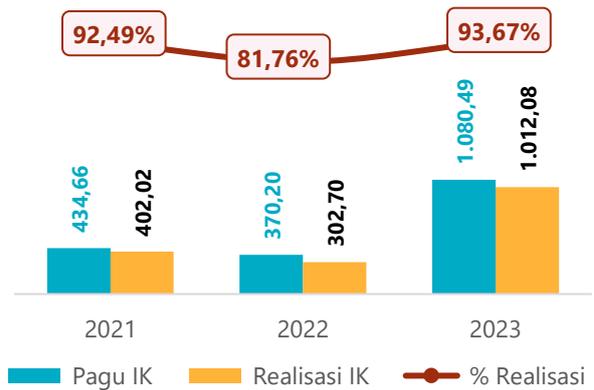
Sumber: Data ALCo Program Infrastruktur dan Konektivitas, Triwulan I 2024 (diolah)

Pagu Infrastruktur Konektivitas pada tahun 2022 sebesar Rp501,00 miliar, sebanyak Rp465,92 miliar (93 persen dari total Pagu) merupakan Pagu Fisik. Sedangkan Rp35,08 miliar (7 persen dari total Pagu) merupakan Pagu Non Fisik. Kemudian, di tahun 2023 dengan Pagu Infrastruktur Konektivitas sebesar Rp1.427,73 miliar, sebanyak 1.401,25 miliar (98,15 persen dari total Pagu) merupakan Pagu Fisik. Sedangkan Rp26,48 miliar (1,85 persen dari total Pagu) merupakan Pagu Non Fisik.

Terlihat bahwa sebagian besar Pagu secara optimal telah diarahkan untuk menghasilkan **output berupa fisik bangunan infrastruktur** dibandingkan output non fisik seperti administrasi dan perencanaan. Persentase output fisik juga terus mengalami peningkatan seiring dengan peningkatan jumlah Pagunya.

Berdasarkan Pagu yang cukup besar tersebut, realisasi yang telah dilaksanakan oleh **Kementerian PUPR** dan **Kementerian Perhubungan** juga telah cukup optimal pada triwulan I 2024. Realisasi anggaran ini dimanfaatkan untuk melaksanakan pembangunan infrastruktur yang semakin baik di Provinsi Kepulauan Riau. Rincian realisasi dan *growth* dari tahun ke tahun dapat dirinci sebagai berikut:

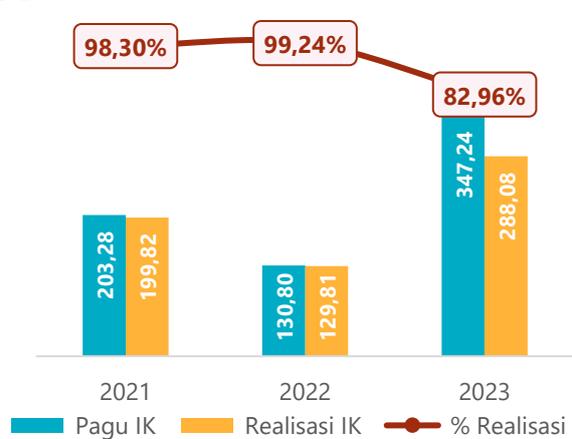
Grafik 4.6 - Realisasi Belanja Infrastruktur Konektivitas – Kementerian PUPR (Rp M)



Sumber: Data ALCo Program Infrastruktur dan Konektivitas, Triwulan I 2024 (diolah)

Pagu sebesar Rp1.080,49 miliar tersebut, pada tahun 2023 telah direalisasikan Rp1.012,08 miliar (93,67 persen dari Pagu). Realisasi tersebut **mengalami peningkatan yang signifikan** apabila dibandingkan tahun 2022, yang direalisasikan 81,76 persen dari Pagu.

Grafik 4.7 - Realisasi Belanja Infrastruktur Konektivitas – Kementerian Perhubungan (Rp M)



Sumber: Data ALCo Program Infrastruktur dan Konektivitas, Triwulan I 2024 (diolah)

Di grafik 4.7 kita lihat bahwa Satker di Kemenhub telah merealisasikan anggaran sebesar Rp288,08 miliar, dari Pagu Rp347,24 miliar pada Kemenhub. **Realisasi ini secara nominal terbilang tinggi**, namun secara persentase menurun dibandingkan tahun 2022. Pada tahun 2023, persentase realisasi 82,96 persen dari Pagu, sedangkan pada tahun 2022, dan 2021, 99,24 persen dan 98,30 persen secara berturut-turut.

Special Issue: Tantangan Pembangunan Infrastruktur Konektivitas di Kementerian PUR dan Kementerian Perhubungan TA 2023:

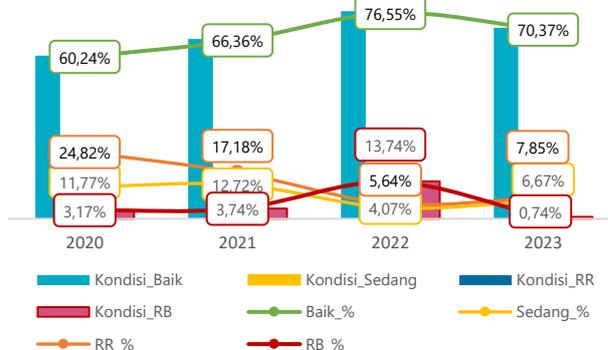
Telah teridentifikasi beberapa **isu dan tantangan dalam pembangunan infrastruktur konektivitas** di wilayah Kepri, sebagai berikut:

1. Terdapat kendala dalam proses pembangunan proyek yang dilaksanakan pada **pulau terluar Kepri** (Pulau Natuna, Pulau Serasan) dan **cuaca ekstrim** yang menimbulkan kesulitan dalam akses orang/alat, khususnya khususnya di periode triwulan IV.
2. Terdapat salah satu Instruksi Presiden Jalan Daerah (IJD) di Kementerian PUPR (Paket penanganan jembatan terdiri dari 2 paket yaitu:
 - a. Penanganan pelantar/jembatan ruas jalan akses Pantai/Jembatan Genting di Kab. Natuna dan
 - b. Penanganan jembatan ruas jalan pesisir Pantai Serasan Timur/Jembatan Air Kambau di Kab. Natuna. Jembatan) yang baru turun pada bulan Juli dan September sehingga waktu persiapan dan eksekusi kegiatan sangat sedikit dan baru dapat dilanjutkan di TA 2024.
3. **Terbatasnya penyedia jasa konstruksi** di Provinsi Kepri, khususnya di pulau terluar yang dapat menimbulkan risiko pengerjaan proyek yang kurang optimal akibat pemilihan vendor penyedia jasa konstruksi dengan spesifikasi yang terbatas.

4.2.2 Analisis Atas Capaian Indikator Infrastruktur Konektivitas – Tumbuh Optimal

Setelah kita melihat bagaimana porsi belanja yang telah dikeluarkan oleh pemerintah dalam mendorong pembangunan infrastruktur di Provinsi Kepulauan Riau, selanjutnya kita akan melihat bagaimana **output infrastruktur yang telah dihasilkan**. Output yang dihasilkan melalui pembangunan pemerintah tersebut tersebar pada beberapa sektor, baik itu konektivitas darat, laut, udara, dan pembangunan akses TIK. Rincian output yang telah dihasilkan sebagai berikut:

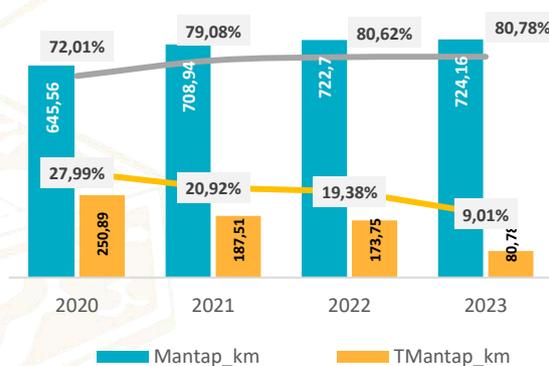
Grafik 4.8 – Perkembangan Konektivitas Darat Tahun 2020-2023 – Kondisi Jalan Provinsi Kepri



Sumber: Data Kementerian PUPR, 2024 (diolah)

Kondisi jalan di Kepri mengalami perbaikan dari tahun ke tahun. Meskipun jumlah jalan kondisi baik sedikit menurun pada tahun 2023 sebesar 8,06 persen (yoy), namun jumlah jalan kondisi rusak berat turun signifikan sebesar 94,58 persen (yoy). Menunjukkan upaya serius dari pemerintah dalam mengatasi jalan dengan kondisi rusak berat.

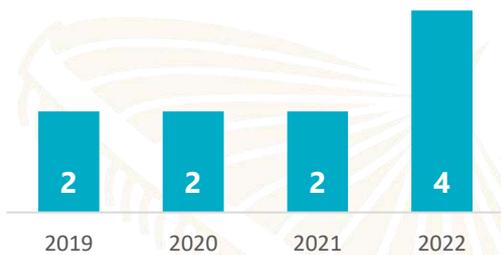
Grafik 4.9 – Perkembangan Konektivitas Jalan Tahun 2020-2023 – Kemantapan Jalan Provinsi Kepri



Sumber: Data Kementerian PUPR, 2024 (diolah)

Kemantapan jalan provinsi di Kepri mengalami pertumbuhan dari tahun ke tahun. Pertumbuhan jalan kondisi Mantap tertinggi ada pada tahun 2021, sebesar 9,82 persen (yoy), dari sebelumnya sebanyak 645,56 km menjadi 708,94 km. Pada tahun 2023 pertumbuhan jalan kondisi Mantap sebesar 0,20 persen (yoy).

Grafik 4.10 – Perkembangan Konektivitas Laut Tahun 2019-2022 – Pelabuhan Yang Tidak Diusahakan



Sumber: Data Kementerian Perhubungan, 2024 (diolah)

Selanjutnya terdapat **perkembangan Pelabuhan yang tidak diusahakan** dari tahun 2019-2022. Pelabuhan tersebut mekesemiliki artian Pelabuhan laut yang dikelola oleh Unit Pelaksana Teknis Kepelabuhanan oleh Direktorat Jenderal Perhubungan Laut (BPS, 2024) sebagai tempat singgah kapal. Terjadi peningkatan jumlah pelabuhan yang tidak diusahakan pada tahun 2022 sebanyak 2 Pelabuhan.

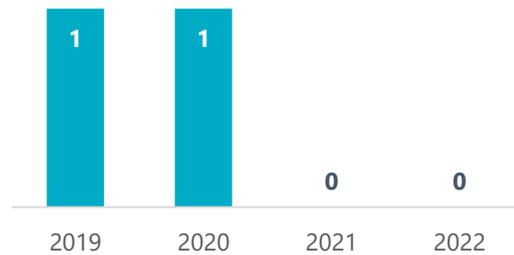
Grafik 4.11– Perkembangan Konektivitas Laut Tahun 2019-2022 – Kapal Penjaga dan Patroli



Sumber: Data Kementerian Perhubungan, 2024 (diolah)

Jumlah kapal penjaga dan patroli di Kepri fluktuatif setiap tahunnya. Pada tahun 2021 mengalami peningkatan jumlah kapal sebanyak 1 buah. Selanjutnya, pada tahun 2022 mengalami penurunan jumlah kapal sebanyak 6 buah.

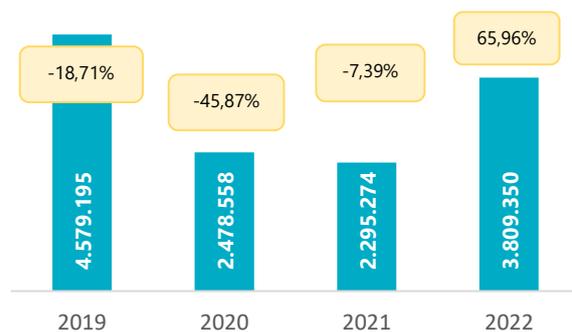
Grafik 4.12 – Perkembangan Konektivitas Udara Tahun 2019 - 2022 – Pembangunan Bandara



Sumber: Data Kementerian Perhubungan, 2024 (diolah)

Terdapat pembangunan 2 bandara sepanjang tahun 2019 – 2022 di wilayah Kepri. Penambahan bandara tersebut terlaksana pada tahun 2019 dan 2020 dengan masing-masing sebanyak 1 bandara.

Grafik 4.13 – Perkembangan Konektivitas Udara Tahun 2019 - 2022 – Penumpang Pesawat Domestik (jiwa)



Sumber: Data Kementerian Perhubungan, 2024 (diolah)

Penumpang pesawat domestik mengalami peningkatan signifikan pada tahun 2022 sebesar 65,9 persen (yoy). Setelah sebelumnya terjadi penurunan akibat pandemi COVID-19 sebesar 45,87 persen (yoy) pada tahun 2020, dan 7,39 persen (yoy) pada tahun 2021.

Infrastruktur konektivitas seperti jalan, pelabuhan, dan bandara yang berkualitas dapat meningkatkan mobilitas barang dan warga antara pulau-pulau di Kepulauan Riau. Ini akan membuka akses ke pasar yang lebih luas bagi produk-produk lokal dan memungkinkan wisatawan untuk lebih mudah mengakses destinasi pariwisata di daerah tersebut.

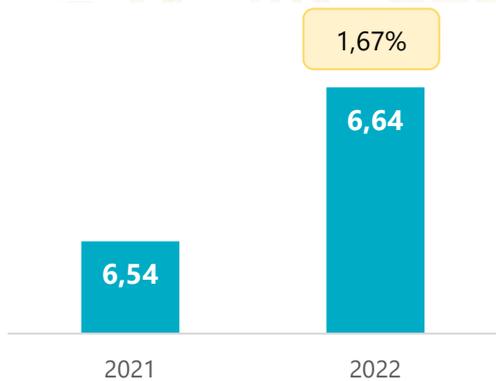
Grafik 4.14 – Perkembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi Tahun 2019-2022 – Indeks Pembangunan TIK



Sumber: Data BPS Kepri, 2024 (diolah)

Indeks Pembangunan TIK di Kepri mengalami peningkatan sebesar 1,67 persen (yoy), meningkat dari 6,54 poin pada tahun 2021, menjadi 6,64 poin pada tahun 2022.

Grafik 4.15 – Perkembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi Tahun 2021-2022 – Indeks Penguatan TIK



Sumber: Data BPS Kepri, 2024 (diolah)

Indeks Penguatan TIK di Kepri mengalami peningkatan sebesar 1,53 persen (yoy), meningkat dari 6,58 poin pada tahun 2021, menjadi 6,69 poin pada tahun 2022. Infrastruktur TIK yang memadai akan meningkatkan akses masyarakat kepulauan terhadap informasi penting, seperti pendidikan jarak jauh, yang memungkinkan masyarakat di daerah terpencil untuk mengakses pendidikan yang berkualitas tanpa harus meninggalkan pulau mereka. Ini dapat meningkatkan akses masyarakat terhadap kesempatan pendidikan yang lebih baik.

Perkembangan infrastruktur IT juga dapat meningkatkan layanan kesehatan telemedicine, di mana masyarakat dapat berkonsultasi dengan

dokter atau tenaga medis (Dokter Online) dari jarak jauh. Hal ini sangat penting bagi masyarakat kepulauan yang mungkin memiliki akses terbatas terhadap fasilitas kesehatan.

Disisi lain juga **dapat meningkatkan akses masyarakat kepulauan ke layanan publik**, seperti pendaftaran kelahiran, pembayaran pajak, dan pengembangan ekonomi digital, seperti *e-commerce* dan penyediaan layanan digital. Hal Ini dapat mengefisienkan proses administrasi dan menciptakan lapangan kerja baru serta meningkatkan pendapatan masyarakat

4.2.3 Analisis Atas Efektivitas Belanja Pembangunan Infrastruktur Konektivitas: Belanja Konektivitas di Provinsi Kepri Efektif Meningkatkan Kemantapan Jalan

4.2.3.1 Analisis Structural Equation Modelling (SEM)

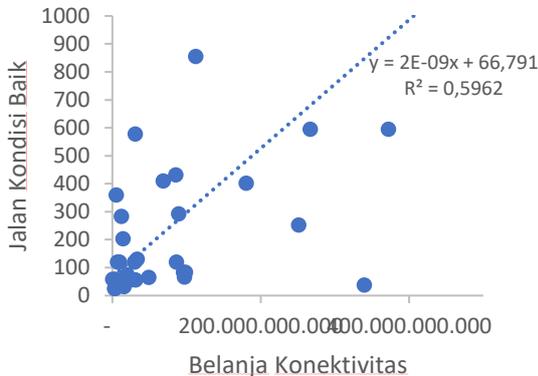
Pendahuluan

Setelah mengetahui besarnya anggaran belanja yang telah dikeluarkan oleh pemerintah dalam pembangunan infrastruktur di wilayah Kepri, serta output yang telah dihasilkan melalui belanja tersebut. Selanjutnya kita akan menilai bagaimana **efektivitas pembangunan infrastruktur yang telah dilaksanakan** tersebut, apakah telah memberikan dampak signifikan terhadap perbaikan kualitas infrastruktur di Kepri, sehingga kemudian dapat memberi dampak pada kemudahan akses, mobilitas, serta mendorong laju perekonomian regional.

Penilaian efektivitas belanja yang telah dilakukan oleh pemerintah tersebut dilakukan dengan menggunakan beberapa metode, mulai dari metode sederhana seperti **grafik scatterplot** maupun dengan metode yang lebih mendalam seperti menggunakan analisis ekonometria melalui metode seperti analisis **Structural Equation Modelling (SEM)**. Dengan demikian, diharapkan melalui kombinasi beberapa metode tersebut dapat memberikan gambaran yang lebih komprehensif terkait

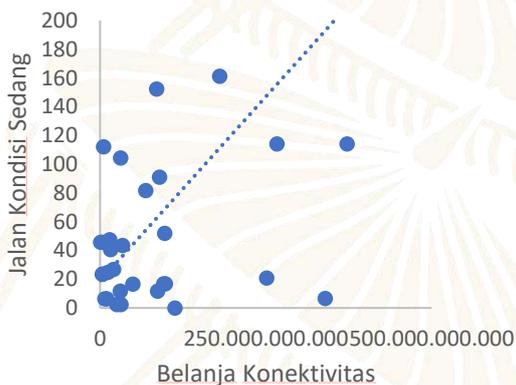
dengan efektivitas belanja yang telah dilaksanakan oleh pemerintah.

Grafik 4.16 – Grafik Scatter Plot – Belanja Konektivitas Tahun 2021-2023 – Kondisi Baik



Sumber: Ms. Excel, 2024

Grafik 4.17 – Grafik Scatter Plot – Belanja Konektivitas Tahun 2021-2023 – Kondisi Sedang



Sumber: Ms. Excel, 2024

Berdasarkan grafik *scatterplot* sederhana, terlihat **hubungan yang signifikan positif antara belanja konektivitas terhadap jalan** dengan kondisi baik dan sedang. Grafik tersebut mengindikasikan bahwa peningkatan belanja konektivitas yang dilakukan pemerintah dalam peningkatan layanan infrastruktur publik, memberikan dampak pada peningkatan kualitas jalan di Provinsi Kepulauan Riau.

Untuk memperkaya analisis terhadap efektivitas belanja pembangunan infrastruktur konektivitas dalam meningkatkan infrastruktur di Provinsi Kepulauan Riau, digunakan metodologi **Structural Equation Modeling (SEM)**. Analisis SEM digunakan untuk membangun dan menguji model statistik dalam bentuk model-model

sebab-akibat. Analisis SEM memadukan analisis regresi, faktor, dan jalur untuk secara bersama-sama mengevaluasi hubungan antara variabel laten, menilai bobot dari indikator-indikator variabel laten, dan menyusun model analisis jalur (**Path Analysis**) yang menggambarkan hubungan di antara variabel laten tersebut.

Metode SEM dipilih karena memiliki kemampuan analisis dan prediksi yang lebih baik dibandingkan analisis jalur dan regresi berganda karena analisis SEM dapat menganalisis lebih dalam terhadap variabel atau konstruk yang diteliti (Haryono, 2012). Metode SEM sangat cocok digunakan dalam penelitian variabel multivariat, dimana banyak variabel yang diukur secara bersamaan pada suatu individu (Kline, 2015). SEM merupakan penyempurnaan dalam menjawab kelemahan dan kebuntuan yang dihadapi metode multivariat generasi sebelumnya, yaitu analisis jalur dan regresi berganda (Haryono, 2012).

Metodologi Penelitian

Variabel yang digunakan untuk menilai efektivitas pembangunan jalan di Provinsi Kepulauan Riau ada 3 (tiga), yaitu 1) **Belanja pemerintah**, sebagai bentuk intervensi pemerintah dalam meningkatkan layanan infrastruktur publik 2) **Kondisi konektivitas jalan**, untuk menilai bagaimana pengaruh dan output yang dihasilkan dari belanja yang telah dikeluarkan pemerintah dalam peningkatan kualitas jalan, 3) **Indikator Kemantapan Jalan**, indikator ini dikeluarkan oleh Badan Pusat

Gambar 4.1 – Alur Pengaruh Antar Variabel dalam Analisis Efektivitas Pembangunan Jalan di Provinsi Kepri



Sumber: Canva dan Kanwil DJPb Provinsi Kepri, 2024.



Statistik untuk menilai bagaimana kondisi jalan di suatu daerah, yang dapat berdampak pada pertumbuhan ekonomi di daerah.

Hasil dan Pembahasan

Uji Validitas

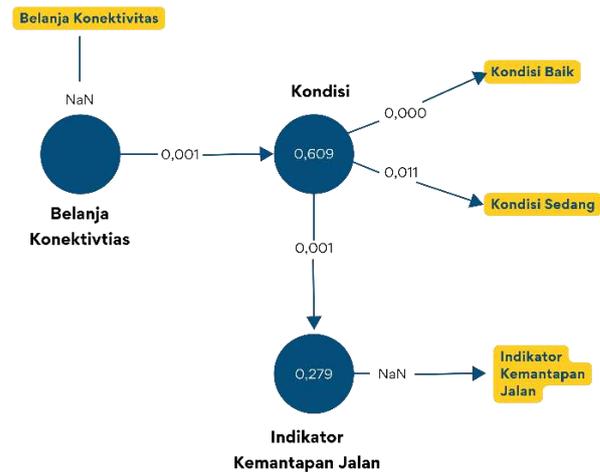
Berdasarkan hasil uji validitas **convergent validity**, nilai *loading factor* seluruh variabel > 0,50, sehingga semua variabel memenuhi *convergent validity* dan memiliki nilai yang tinggi.

Inner Model Evaluation

Berdasarkan hasil pembentukan model SEM menggunakan variabel-variabel sebagaimana dimaksud. Dapat ditarik beberapa kesimpulan, sebagai berikut:

1. Variabel Belanja Infrastruktur Konektivitas terhadap kondisi jalan memiliki **p-value adalah 0,0010**. Karena nilai p-value < 0,05 maka hipotesis diterima, bahwa Belanja Infrastruktur Konektivitas memiliki pengaruh signifikan terhadap kondisi jalan di Provinsi Kepulauan Riau.

Gambar 4.2 – Alur Inner Model Evaluation



2. Variabel kondisi jalan terhadap Indikator kemantapan jalan memiliki **p-value adalah 0,0000**. Karena nilai p-value < 0,05 maka hipotesis diterima, bahwa variabel kondisi jalan berpengaruh signifikan terhadap Indikator Kemantapan Jalan.

Nilai evaluasi inner model secara detail melalui tabel *path coefficients*, sebagaimana pada tabel berikut:

Tabel 4.1 – Path Coefficients Analisis SEM

Variabel	Original Sample	Sample Mean	Standard Dev (STDEV)	t-statistic (O/STDEV)	p-value
Belanja Konektivitas -> Kondisi Jalan	0,781	0,669	0,233	3,3570	0,0010
Kondisi Jalan -> Indikator Kemantapan Jalan	1,007	1,044	0,287	3,5100	0,0000

Sumber: Smart PLS, 2024

Berdasarkan tabel *path coefficients*, Belanja Infrastruktur Konektivitas terhadap kondisi jalan di Provinsi Kepri memiliki nilai p-value adalah 0,0010 dan t-statistik adalah 2,333. Karena memiliki nilai p-value < 0,05 dan t-statistik > 1,99, maka hipotesis diterima, bahwa **Belanja Infrastruktur Konektivitas memiliki pengaruh signifikan terhadap indikator kualitas SDM**, dengan arah positif sesuai nilai *original sample* adalah 0,781. Hal ini berarti, setiap peningkatan Belanja Infrastruktur Konektivitas, berdampak positif pada peningkatan kondisi jalan di Provinsi Kepri. Dalam hal ini, Belanja Infrastruktur Konektivitas berdampak pada peningkatan kondisi jalan menjadi kondisi baik dan sedang.

Selanjutnya variabel kondisi jalan terhadap Indikator Kemantapan Jalan memiliki nilai p-

value adalah 0,0000 dan t-statistik adalah 2,287. Karena nilai p-value < 0,05 dan t-statistik > 1,99, maka hipotesis diterima, bahwa **kondisi jalan memiliki pengaruh signifikan terhadap Indikator Kemantapan Jalan di Provinsi Kepri**, dengan arah positif sesuai nilai *original sample* adalah 1,007. Hal ini berarti, setiap peningkatan kondisi jalan, berdampak positif pada peningkatan Indikator Kemantapan Jalan, berdampak kenyamanan pengguna jalan, kemudahan akses, dan percepatan laju perekonomian.

Kesimpulan:

1. Berdasarkan **hasil analisis metode SEM**, belanja infrastruktur konektivitas di Provinsi Kepri telah efektif dalam meningkatkan kondisi kemantapan jalan.

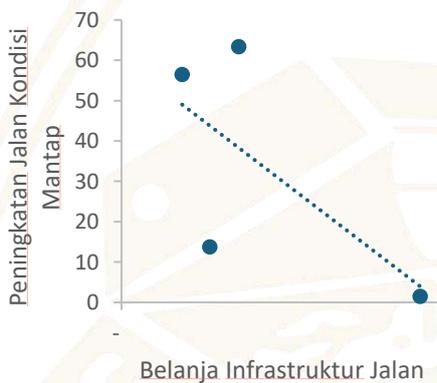
2. Belanja infrastruktur konektivitas memiliki **pengaruh signifikan positif** terhadap kondisi jalan di Kepri, hal ini berdasarkan nilai p-value adalah $0,001 < 0,05$ dan t-statistik $3,357 > 1,999$.
3. Setiap peningkatan belanja infrastruktur konektivitas berdampak pada meningkatnya jalan dengan kondisi baik dan kondisi sedang.
4. Jalan kondisi baik dan kondisi sedang tersebut kemudian menjadi indikator kualitas kemantapan jalan di Provinsi Kepri yang semakin baik.
5. Hasil analisis tersebut sejalan dengan grafik *scatterplot* yang menunjukkan bahwa belanja infrastruktur konektivitas di Kepri berdampak pada peningkatan jalan dengan kondisi baik dan kondisi sedang.

4.2.3.2 Data Envelopment Analysis (DEA) - Efisiensi Belanja Infrastruktur Untuk Optimalisasi Kualitas Infrastruktur (Jalan Provinsi)

Pendahuluan

Selain melakukan analisis terhadap efektivitas belanja infrastruktur konektivitas, dilakukan juga **analisis untuk menilai efisiensi belanja infrastruktur** dalam meningkatkan infrastruktur publik di Kepri.

Grafik 4.18 – Grafik Scatter Plot – Hubungan Belanja Infrastruktur Jalan dengan Peningkatan Jalan Kondisi Mantap Tahun 2020-2023



Sumber: Ms. Excel 2024, (diolah)

Sebelum menggunakan teknik analisis, dilakukan observasi awal *pattern* data dengan membaca grafik *scatterplot*, dimana terlihat **hubungan negatif** antara belanja infrastruktur

terhadap **peningkatan jalan kondisi mantap**. Kondisi ini mengindikasikan bahwa semakin besar jumlah belanja infrastruktur konektivitas yang dikeluarkan oleh pemerintah, jumlah **peningkatan** jalan menjadi kondisi mantap semakin menurun.

Untuk memperkuat dan memperdalam analisis dalam menilai efisiensi belanja, digunakan metode **Data Envelopment Analysis (DEA) yang sangat powerful untuk mengukur efisiensi**. Metode DEA digunakan untuk secara empiris mengukur efisiensi dengan pembuat keputusan atau *Decision Making Unit* (DMU). Dengan menggunakan metode DEA maka dapat diketahui, pada kondisi apa dan kapan terjadinya efisiensi dalam peningkatan kondisi jalan menjadi mantap di Provinsi Kepulauan Riau.

Metodologi Penelitian

Analisis DEA dilakukan dengan menggunakan *software MaxDea*, dengan menggunakan variabel Belanja Infrastruktur Konektivitas dalam output fisik maupun non fisik, terhadap jumlah peningkatan jalan kondisi mantap di Provinsi Kepri dari tahun 2020-2023 sebagai DMU Input dan Output.

Hasil dan Pembahasan

Berdasarkan hasil analisis dengan menggunakan metode DEA, terlihat bahwa **efisiensi tertinggi terjadi pada tahun 2020**, dengan jumlah belanja pemerintah sebesar Rp208,09 miliar, meningkatkan jalan menjadi kondisi mantap sepanjang 56,47 km. Diikuti **tahun 2021**, dengan jumlah belanja infrastruktur fisik sebesar Rp402,02 miliar, meningkatkan jalan menjadi kondisi mantap sepanjang 63,38 km.

Selanjutnya **pada tahun 2022**, peningkatan jalan menjadi kondisi mantap kembali mengalami penurunan, menjadi 13,76 km, dengan jumlah belanja yang dikeluarkan sebesar Rp302,70 miliar. Kondisi yang paling tidak efisien terjadi pada **tahun 2023**, dimana peningkatan jalan menjadi kondisi mantap semakin sedikit, berdasarkan jumlah belanja infrastruktur fisik

Rp1.024,62 miliar dan non fisik sebesar Rp1,38 miliar, meningkatkan jalan menjadi kondisi mantap hanya sepanjang 1,46 km.

Tabel 4.2 – Hasil Koefisien Efisiensi DEA

Provinsi	Score	Rank	Fisik	Non Fisik	Peningkatan Jalan Kondisi Mantap
Kepulauan Riau-2020	1,00	1	208.090.754.364	-	56,47
Kepulauan Riau-2021	0,58	2	402.022.432.731	-	63,38
Kepulauan Riau-2022	0,17	3	302.695.503.660	-	13,76
Kepulauan Riau-2023	0,01	4	1.024.621.489.947	1.382.887.402	1,46

Kesimpulan:

Berdasarkan hasil analisis menggunakan metode DEA, didapat kesimpulan sebagai berikut:

- 1. Belanja Infrastruktur paling efisien di Provinsi Kepri yaitu pada tahun 2020**, dari Belanja Pemerintah sebesar Rp208,09 miliar. Outputnya berupa bertambahnya jalan kondisi Mantap sepanjang 56,47 km, dari sebelumnya sepanjang 589,09 km pada 2019, menjadi 645,56 km pada 2020.
- 2. Kemudian terjadi penurunan efisiensi belanja pada tahun-tahun berikutnya** untuk menghasilkan output paling optimal berupa semakin bertambahnya jalan dengan kondisi mantap.
- 3. Tahun 2023**, berdasarkan Belanja Infrastruktur sebesar 1.024,62 miliar, meningkatkan jalan kondisi Mantap hanya sepanjang 1,46 km, dari sebelumnya sepanjang 722,70 km pada tahun 2022, menjadi 724,16 km pada tahun 2023. **Menunjukkan belanja infrastruktur yang kurang efisien** apabila dibandingkan terhadap output yang dihasilkan.
- 4. Keterbatasan pada analisis DEA**, yaitu tidak dapat mengukur kualitas yang dihasilkan dari output belanja, dan tidak menggunakan *perpetual inventory method* dalam perhitungannya.

Berdasarkan hasil analisis dengan menggunakan dua metode SEM dan DEA yang telah dilakukan, dapat ditarik kesimpulan, bahwa

melalui Belanja yang telah dilakukan oleh pemerintah dengan kekuatan fiskalnya, telah membangun output infrastruktur publik yang bermanfaat bagi masyarakat di Provinsi Kepulauan Riau.

Pembangunan infrastruktur tersebut telah secara signifikan meningkatkan perbaikan akses antar daerah, terutama perbaikan akses jalan dan jembatan. Belanja yang telah dilakukan oleh pemerintah telah secara efektif meningkatkan indikator kemantapan jalan di Provinsi Kepulauan Riau, dengan semakin banyaknya jalan dengan kualitas yang baik.

Namun demikian, pada beberapa tahun terakhir output perbaikan jalan semakin menurun, sedangkan anggaran belanja semakin meningkat. **Pemerintah perlu melakukan evaluasi** terhadap output pembangunan yang dapat memberikan dampak yang lebih besar kepada masyarakat, seperti perbaikan jalan dengan kondisi buruk, pembangunan jalan di pelosok daerah, dan pembangunan jembatan untuk menghubungkan akses antar pulau di Provinsi Kepulauan Riau. Pemda perlu mengkaji ulang berbagai peraturan yang kiranya tidak lagi relevan dengan perkembangan situasi iklim investasi dengan perkembangan teknologi era modern yang begitu cepat dan dinamis sehingga mampu menarik masuknya investor baru ke Provinsi Kepri.

Rekomendasi:

1. Pemda dan pempus agar melakukan **alokasi belanja konektivitas dan menambahkan alokasi anggaran** untuk perbaikan dan perawatan jalan, seperti peningkatan kualitas permukaan jalan dan perbaikan struktur jalan yang rusak.
2. Dalam menunjang optimalisasi kualitas infrastruktur jalan, Pemda dan Pempus perlu melakukan **pengembangan sistem drainase yang lebih baik**. untuk mencegah kerusakan jalan akibat genangan air, terutama di wilayah kepulauan yang cenderung rentan terhadap banjir.
3. Pemda dan pempus perlu **menarik investor untuk melakukan investasi dalam teknologi seperti pemantauan jalan berbasis sensor atau sistem manajemen lalu lintas cerdas** dapat membantu dalam pemeliharaan jalan yang lebih efisien, hemat waktu dan mengurangi biaya pemeliharaan jangka panjang.
4. Pemda melalui Dinas PUPP perlu **melakukan evaluasi dan studi komparasi terhadap penggunaan material jalan yang berkualitas, tahan lama dan lebih ramah lingkungan**. Hal ini dapat membantu dalam memperpanjang umur jalan dan mengurangi biaya pemeliharaan jalan jangka panjang

Special Box #4

Suplemen Kajian

Lesson Learned dari Singapura dan Malaysia untuk Pengembangan Transportasi Maritim di Kepri sebagai Archipelagic Region: Pendekatan Studi Komparasi dan Pearson Correlation

Latar belakang

Indonesia adalah negara kepulauan dengan cakupan wilayah yang cukup luas dan dikelilingi oleh lautan, namun, berdasarkan pemeringkatan Indeks Kinerja Logistik yang dirilis oleh World Bank, pada tahun 2023 Indonesia berada pada peringkat 63 dari 139 negara dibandingkan dengan negara Singapura yang juga merupakan negara kepulauan yang berada pada peringkat pertama. Indeks tersebut diukur dengan menggunakan survei berdasarkan **kriteria penilaian terkait bea cukai, fasilitas dan infrastruktur, pengiriman barang ke negara lain, akurasi jadwal, kompetensi manajemen logistik** serta penelusuran dan pelacakan barang. *World Bank* juga menyampaikan **bahwa rasio biaya logistik** di Indonesia mencapai 23,5% dari PDB pada tahun 2017 dibandingkan Singapura yang hanya sekitar 8%, Korea Selatan sebesar 9% dan Malaysia sebesar 13%.¹

Overview Kepri

Kepri sebagai provinsi kepulauan (archipelagic region) mengandalkan transportasi laut sebagai sarana utama perlintasan antar pulau. Provinsi Kepulauan Riau, meskipun strategis secara geografis, menghadapi kendala biaya logistik yang tinggi, seperti biaya pengiriman kontainer dari Batam ke Singapura yang lebih mahal dibandingkan dari Jakarta. Pelabuhan Batu Ampar di Batam, pelabuhan kontainer internasional utama, belum mampu menyaingi pelabuhan di Malaysia dan Singapura dalam hal throughput kontainer. Hal ini diperburuk oleh kendala anggaran yang membatasi pengembangan infrastruktur, dengan alokasi dana yang tidak mencukupi untuk revitalisasi dan kebutuhan peralatan. Upaya revitalisasi pelabuhan ini juga telah dibatalkan dua kali sebelumnya.

Studi Komparasi Tata Kelola Transportasi Maritim

Malaysia

Pelabuhan Malaysia memiliki interkoneksi dengan moda transportasi lainnya, baik laut, sungai, udara maupun darat, seperti pada Pelabuhan Penang, Port Klang dan Tanjung Pelepas. Pemerintah Malaysia meningkatkan daya tarik dan daya saing pelabuhan dengan cara menyediakan kapasitas yang cukup di pelabuhan untuk mengurangi waktu tunggu, mengembangkan jasa pengumpan (*feeding*), pengisian bahan bakar (*bunkering*), serta jasa tambahan lainnya seperti perbankan, asuransi dan hukum, memfasilitasi kapal besar, memfasilitasi operator jalur utama dengan belanja modal pelabuhan, menggerakkan pendanaan kapal dengan menginstruksikan lembaga keuangan untuk membantu komunitas maritim dengan pendanaan yang kompetitif, mendesain Port Klang sebagai pusat bongkar muat Nasional dan Tanjung Pelepas sebagai pelabuhan pemindahan peti kemas, menyediakan zona bebas komersil, penyederhanaan prosedur, serta penyediaan insentif fiskal bagi pelaku usaha perkapalan.

Singapura

Pelabuhan di Singapura dikelola oleh Badan Otoritas Pelabuhan dan Maritim Singapura (MPA) dan operasionalnya dilakukan oleh PSA Singapore dan Jurong Port, yang dimiliki oleh perbendaharaan negara. Pelabuhan ini memiliki gudang dengan lebih dari 12.000 unit pendingin dan kapasitas lebih dari 1,3 juta TEU kontainer. Sistem

pengawasan pendinginan terintegrasi (IRMS) memungkinkan penelusuran kargo secara real-time dan online, sedangkan sistem pemeliharaan unit pendingin (RMNR) memastikan respons cepat untuk perbaikan. Terminal utama PSA Singapore di Pasir Panjang menggunakan derek listrik otomatis dan kendaraan kontrol otomatis. Kontainer terminal PSA Singapore akan dipindahkan ke Tuas Port dengan kapasitas tahunan 65 juta TEU, yang juga akan menggunakan sistem otomatis untuk sinkronisasi seluruh fasilitas pelabuhan..

Analisis Kuantitatif

Variabel yang digunakan adalah jumlah Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), tingkat pengangguran, volume cargo throughput, jumlah ekspor dan impor periode tahun 2019-2021 di seluruh kabupaten dan kota lingkup Provinsi Kepri. Cargo throughput adalah jumlah total ton dimuat dan dibongkar di pelabuhan dalam satu tahun. Metode yang digunakan adalah uji statistik Pearson Correlation dengan menggunakan SPSS 27. Berdasarkan hasil uji, terdapat korelasi yang signifikan antara tingkat pengangguran, volume cargo throughput dan jumlah impor dengan PDRB (nilai Sig. (2-tailed) < 0,05). Selain itu, terdapat korelasi yang signifikan antara tingkat pengangguran dan jumlah ekspor dengan jumlah impor.

Kesimpulan

1. Pelabuhan Malaysia dan Singapura telah menerapkan teknologi dalam pengelolaan pelabuhan, melalui sistem EDI yang terkoneksi dengan sistem informasi kepabeanan, otomatisasi integrated monitoring system, dan interkoneksi antar moda transportasi.
2. Pembangunan infrastruktur pelabuhan di Indonesia seperti Pelabuhan Batu Ampar di Batam dibutuhkan untuk dapat bersaing dengan Malaysia dan Singapura.
3. Dukungan pemerintah juga dibutuhkan untuk keberlangsungan bisnis transportasi maritim, misalnya melalui Dana Abadi dan insentif khusus bagi pelaku bisnis transportasi maritim.
4. Terdapat korelasi yang signifikan antara tingkat pengangguran, jumlah cargo throughput dan jumlah impor dengan PDRB. Selain itu, terdapat korelasi yang signifikan antara tingkat pengangguran dan jumlah ekspor dengan jumlah impor.

Rekomendasi bagi Pemerintah Pusat dan Pemda

1. Pemerintah Pusat dapat memprioritaskan pembangunan infrastruktur utamanya untuk peningkatan konektivitas antar daerah dan melakukan harmonisasi belanja dengan pemerintah daerah.
2. Memberikan insentif khusus bagi investor untuk menarik investasi dan menjaga kestabilan politik dan melakukan simplifikasi proses birokrasi pemerintahan.
3. Membangun infrastruktur untuk sistem transportasi daerah yang terinterkoneksi antara transportasi laut, darat dan udara misalnya menyediakan light rail transit.
4. Menyiapkan master plan pengembangan infrastruktur (termasuk pelabuhan) yang memadai agar investor tertarik untuk berinvestasi di daerah dan pelabuhan memiliki daya saing.

Kesimpulan dan Rekomendasi





VI. I Kesimpulan

Kesimpulan yang dapat diambil dari Laporan Kajian Fiskal Regional Provinsi Kepulauan Riau periode triwulan I 2024 sebagai berikut:

Analisis Ekonomi Regional

Kinerja ekonomi Kepulauan Riau tumbuh positif dan menjadi provinsi dengan **pertumbuhan ekonomi tertinggi ke-2 di regional Sumatera**. Indikator kesejahteraan rata-rata mengalami peningkatan dengan rincian sebagai berikut:

1. **Pertumbuhan ekonomi** Kepri triwulan I 2024 tumbuh positif sebesar 5,01 persen (*yoy*) dan menjadi provinsi dengan pertumbuhan ekonomi tertinggi ke-2 di regional Sumatera, setelah Sumatera Selatan. **Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)** triwulan I 2024 Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) menyentuh angka Rp87,97 triliun dan Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) sebesar Rp52,72 triliun. Akselerasi pertumbuhan ekonomi di Kepri didominasi oleh komponen **Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) atau Investasi** dengan *share* sebesar 44,62 persen dari total PDRB dan tumbuh 8,36 persen (*yoy*).
Dari sisi lapangan usaha, struktur PDRB Kepri masih didominasi oleh 3 (tiga) sektor utama, yakni **sektor industri pengolahan** dengan kontribusi terhadap PDRB sebesar (41,47 persen), sektor konstruksi sebesar (20,57 persen) dan sektor pertambangan dan penggalian sebesar (9,78 persen).
2. Tingkat **inflasi** Kepri pada triwulan I 2024 mencapai 3,34 persen (*yoy*). Angka inflasi ini diperoleh berdasarkan perhitungan tekanan inflasi pada 2 (dua) kota dan 1 (satu) kabupaten (kota Batam, kota Tanjungpinang dan kabupaten Karimun). Pada bulan Maret 2024 perkembangan Indeks Harga Konsumen mengakibatkan inflasi secara *mtm* sebesar 0,46 persen. Pada Maret 2024, inflasi yang terjadi di Provinsi Kepulauan Riau disebabkan oleh adanya kenaikan harga yang ditunjukkan oleh naiknya sembilan indeks kelompok pengeluaran.
3. **Neraca perdagangan luar negeri** provinsi Kepulauan Riau pada bulan Maret 2024 menghasilkan Surplus Perdagangan sebesar US\$882,63 juta. Jika dihitung secara kumulatif, neraca perdagangan Kepri pada periode triwulan I 2024 juga mencapai Surplus Perdagangan sebesar US\$883,21 Juta. Angka tersebut diperoleh dari total nilai Ekspor Kepri di bulan Maret yang tinggi, khususnya dari golongan barang Bahan Bakar Mineral (Non Migas).
4. Tingkat **kemiskinan** di Provinsi Kepri pada bulan Maret 2023 tercatat sebesar 142,50 ribu jiwa atau 5,69 persen dari total penduduk Kepri. Angka tersebut mengalami penurunan sebesar 0,55 persen bila dibandingkan dengan bulan Maret 2022. **Garis kemiskinan** di Provinsi Kepri per Maret 2023 adalah sebesar Rp747.258,- di daerah Perkotaan dan Rp708.168,- untuk di daerah Pedesaan. Sampai dengan periode Maret 2023, **angka kemiskinan di Perkotaan** sebesar 10,69 persen dan **di Pedesaan** sebesar 5,05 persen.
5. Tingkat ketimpangan kesejahteraan Kepri diukur dengan indikator **Gini Ratio**. Per Maret 2023 tercatat sebesar 0,34, meningkat 0,015 persen dibandingkan September 2022 sebesar 0,325, artinya ketimpangan pengeluaran meningkat pada periode Maret 2023. Angka Gini Ratio Provinsi Kepri per Maret 2023 berada pada peringkat kedua tertinggi di regional Sumatera. Pertumbuhan ekonomi yang terus melaju nyatanya tidak serta merta mengurangi ketimpangan sosial, hal ini menunjukkan bahwa kemanfaatan dari pertumbuhan ekonomi di suatu daerah, khususnya di Kepulauan Riau yang pada periode Maret 2023 tidak dirasakan secara merata.
6. **Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)** Kepri bulan Februari 2024 tercatat 6,94 persen; dengan **Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)** mencapai 67,14 persen. Angka TPT tersebut turun sebesar 0,67 persen poin dibanding dengan Februari 2023 (*yoy*). Provinsi Kepri berada pada





peringkat pertama tertinggi di Regional Sumatera dan tertinggi ke-dua tertinggi Nasional, setelah Banten dengan angka TPT sebesar 7,02. Persentase perubahan penurunan TPT Provinsi Kepri juga menjadi yang tertinggi ke-dua Nasional sebesar 1,58 persen poin (*yoy*), adanya penurunan TPT tersebut menjadi sinyal positif bahwa masyarakat di Provinsi Kepri telah memiliki akses dan kesempatan yang lebih baik terhadap lapangan pekerjaan dan kesempatan untuk berkontribusi dalam perekonomian.

7. **NTP** Provinsi Kepulauan Riau pada bulan Maret 2024 sebesar 105,44 dan menunjukkan pertumbuhan negatif sebesar 0,17 persen (*yoy*). Angka NTP Provinsi Kepri masih berada di bawah angka NTP Nasional (119,39), hal tersebut disebabkan oleh kondisi geografis Kepri yang memang belum optimal dijadikan sebagai lahan pertanian.
8. **NTN** pada Maret 2024 sebesar 105,78 mengalami penurunan sebesar 5,39 persen (*yoy*) dan 0,48 persen (*mtm*), yang disebabkan oleh kondisi geografis Kepri yang masih diterpa angin utara dan menyebabkan kurangnya aktivitas nelayan.
9. Berdasarkan data IPM dengan metode perhitungan baru, **angka IPM Kepri pada tahun 2023 dengan** tingkat IPM tertinggi ke-tiga Nasional sebesar 79,08 dan tumbuh sebesar 0,76 persen (*yoy*). Capaian tersebut merupakan prestasi bagi Kepri yang berhasil menjadi provinsi dan menjadi IPM tertinggi pada Regional Sumatera selama lima tahun berturut-turut.

Analisis Fiskal Regional

Pelaksanaan APBN Tingkat Provinsi

1. **Alokasi Pendapatan APBN** tahun 2024 sebesar Rp14.139,81 miliar, terdiri dari Penerimaan Perpajakan sebesar Rp11.474,64 miliar dan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sebesar Rp2.665,17 miliar.
 - **Realisasi Penerimaan Perpajakan** sampai dengan triwulan I 2024 sebesar Rp2.847,02 miliar mengalami pertumbuhan 4,93 persen (*yoy*). Pertumbuhan tersebut didorong oleh *extra effort* yang dilakukan oleh pemerintah pusat dalam menggali potensi PPh di daerah. Hal tersebut juga sejalan dengan perbaikan aktivitas ekonomi di Regional Kepulauan Riau yang terus memberikan kontribusi positif terhadap Penerimaan Perpajakan.
 - **Realisasi Pendapatan PNBP** sampai dengan triwulan I 2024 sebesar Rp629,51 miliar tumbuh signifikan sebesar 145,62 persen (*yoy*). Capaian tersebut didorong oleh arus lintas keluar masuk Indonesia oleh wisatawan asing maupun wisatawan lokal berdampak pada pertumbuhan realisasi akun PNBP Lainnya, serta kinerja pertumbuhan Pendapatan BLU yang ditopang dengan semakin meningkatnya kinerja empat satker BLU di Provinsi Kepri.
2. **Alokasi Belanja APBN** tahun 2024 sebesar Rp17.584,58 miliar, terdiri dari Belanja Pemerintah Pusat (BPP) Rp9.541,41 miliar, dan Transfer ke Daerah (TKD) sebesar Rp8.043,16 miliar.
 - **Realisasi BPP** sampai dengan triwulan I 2024 sebesar Rp1.506,43 miliar mengalami pertumbuhan sebesar 15,79 persen (*yoy*). Tingginya growth BPP pada triwulan I 2024 didorong oleh pelaksanaan pemilu presiden dan wakil presiden, serta perayaan HBKN yang mendorong pembayaran gaji dan THR. Namun demikian terdapat kontraksi yang terjadi pada jenis Belanja Lainnya, karena satker BA BUN, yaitu BP Karimun, Bintan, Tanjungpinang yang belum dapat melakukan realisasi anggaran karena terdapat permasalahan kelembagaan s.d. triwulan I 2024. Dari sisi Pendapatan, Penerimaan Negara direalisasikan sebesar Rp2.847,02 miliar (20,13 persen dari Target) meningkat 20,15 persen (*yoy*), menunjukkan kinerja yang positif sepanjang triwulan I 2024.





- **Alokasi Belanja TKD** sebagian besar dialokasikan pada Dana Alokasi Umum (DAU) sebesar Rp4.817,40 miliar (59,89 persen dari total Pagu TKD), dan DAK Non Fisik sebesar Rp1.239,24 miliar (15,40 persen dari total Pagu TKD).
- **Realisasi Belanja TKD** tertinggi pada secara nominal DAU sebesar 1.333,84 miliar (27,69 persen dari Pagu), meningkat 7,14 persen (yoy). Peningkatan realisasi TKD di triwulan I tahun 2024 ini dipengaruhi oleh perubahan mekanisme penyaluran dana TKD DAK Nonfisik, dan Dana Desa yang sebelumnya disalurkan sebanyak 3 tahap pada tahun 2023, kemudian disalurkan menjadi 2 tahap pada tahun 2024. Dari sisi Belanja TKD tertinggi berdasarkan persentase realisasi ada pada Dana Desa sebesar Rp102,83 miliar (46,99 persen dari Pagu), meningkat signifikan 31,14 persen (yoy). Selanjutnya DAK Non Fisik turut mengalami peningkatan secara yoy, sebesar 10,39 persen, yang telah direalisasikan sebesar Rp340,56 miliar (27,48 persen dari Pagu).

Pelaksanaan APBD Tingkat Provinsi

1. **Pendapatan Daerah** dapat direalisasikan sebesar 2.741,86 miliar atau 18,88 persen dari Target dan mengalami penurunan 0,47 persen (yoy). Realisasi Pendapatan Daerah masih didominasi oleh Pendapatan Transfer, yaitu sebesar Rp1.860,62 miliar (67,86 persen dari realisasi Pendapatan Pemerintah Daerah) dibandingkan realisasi PAD sebesar Rp881.172,13 miliar (32,14 persen dari realisasi Pendapatan Pemerintah Daerah). Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah daerah masih belum dapat mengandalkan PAD sebagai penopang utama keuangan daerah dan masih sangat bergantung pada dana transfer dari pemerintah pusat.
2. **PAD** dapat direalisasikan sebesar Rp881.172,13 miliar dari target. Dibandingkan Target, realisasi PAD pada Triwulan I masih rendah, hanya 18,32 persen. Pajak Daerah merupakan komponen terbesar penyumbang PAD yaitu Rp758,01 miliar atau 86,02 persen dari total PAD. Kemudian, komponen PAD yang memberikan kontribusi terbesar berturut-turut adalah Retribusi Daerah (6,94 persen), Lain-lain PAD yang Sah (6,82 persen), dan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan (0,83 persen).
3. Meskipun beberapa jenis **Pajak Daerah** mengalami pertumbuhan minus dengan nominal rupiah besar (seperti penerimaan Pajak Sarang Burung Walet yang turun 50,38 persen), pertumbuhan Penerimaan **BPHTB** sebesar 32,56 persen (yoy) atau Rp33.276.704.814 memberikan efek positif terhadap total Pajak Daerah sehingga tidak mengalami pertumbuhan minus yang tinggi. Penerimaan BPHTB paling tinggi terdapat pada Kota Batam, yaitu Rp126.387.248.896 atau 93,30 persen dari total BPHTB lingkup Provinsi Kepri. Penerimaan BPHTB Kota Batam meningkat 53,80 persen (yoy). Peningkatan BPHTB Kota Batam dipengaruhi oleh kebijakan tentang Pemberian Pengurangan dan Pembebasan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan yang juga mengakomodir kebijakan pemerintah pusat yaitu PTSL program sertifikasi tanah. Program ini bertujuan untuk memberikan sertifikat gratis bagi warga yang mendaftarkan tanahnya untuk pertama kali. Dengan kombinasi fasilitas pengajuan sertifikat gratis dan tarif BPHTB hanya 50 persen, hal ini akan semakin menarik minat warga untuk mendaftarkan sertifikat kepemilikan tanah.
4. **Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah** berkontraksi sebesar Rp31,94 miliar atau minus 34,69 persen. Apabila ditinjau dari persentase pertumbuhan, Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan merupakan yang tertinggi dengan pertumbuhan sebesar 677,25 persen atau Rp1,57 miliar. Namun demikian, hal ini menunjukkan bahwa terdapat peningkatan keterlambatan pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan oleh pihak ketiga atas pekerjaan pemerintah daerah yang seharusnya dapat diminimalisir oleh Pemda.





5. **Rasio PAD terhadap PDRB** pada triwulan I 2024 sebesar 3,20 persen. Rasio tersebut menunjukkan penurunan sebesar 5,82 persen (*yoy*). Rasio PAD terhadap PDRB menurun karena persentase peningkatan PAD (0,37 persen) lebih kecil dibandingkan persentase peningkatan PDRB (6,57 persen). Hal ini menunjukkan penurunan optimalisasi PAD dibandingkan peningkatan PDRB.
6. **Indeks Kemandirian Fiskal I** (PAD/Total Pendapatan) menunjukkan bahwa mayoritas kabupaten/kota (enam dari tujuh) berada pada klasifikasi "Belum Mandiri". Hanya Kota Batam berada pada klasifikasi "Menuju Kemandirian". Hasil Indeks Kemandirian Fiskal II (PAD+DBH / Total Pendapatan) menunjukkan bahwa Kota Batam dan Kabupaten Karimun yang masuk klaster "Mandiri". Kabupaten Natuna, Kabupaten Kepulauan Anambas, dan Kota Tanjungpinang berada pada klasifikasi "Menuju Kemandirian". Kabupaten Bintan dan Kabupaten Lingga berada pada kategori "Belum Mandiri".
7. **Belanja Daerah** dapat direalisasikan sebesar Rp1.695,58 miliar atau 12,18 persen dari Pagu. Belanja Daerah tumbuh 13,44 persen (*yoy*). Pertumbuhan tersebut ditopang oleh tumbuhnya hampir seluruh komponen Belanja Daerah, yaitu Belanja Operasional yang tumbuh sebesar 11,21 persen dan Belanja Modal yang tumbuh sebesar 53,55 persen.
8. **Analisis Neraca pemerintah pusat-tingkat wilayah menunjukan penambahan nilai Aset** sebesar Rp2.060,44 miliar, terdapat peran Belanja Modal Pemerintah yang mendorong pertumbuhan Aset dan infrastruktur sebesar Rp2.472,89 miliar, atau 120 persen dari pertumbuhan Aset. Dari sisi pendapatan, **Nilai Penerimaan PNBPAset pada triwulan I 2024 sebesar Rp62,31 miliar, turun dibandingkan tahun 2023** dengan nilai penerimaan Rp101,59 miliar. Penurunan penerimaan PNBPAset pada triwulan I 2024 ini dipengaruhi oleh periode pencatatan Pendapatan Sewa yang tidak termasuk pada triwulan I 2024.

Pengembangan **Ekonomi Daerah**

Hasil **Profiling UMKM** menunjukkan bahwa secara umum seluruh pelaku UMKM termasuk kategori **UMKM Rintisan** dengan karakteristik belum memiliki rekening usaha yang terpisah dengan rekening pribadi, belum melakukan pelaporan keuangan usaha, belum mengikuti bazar/pameran dalam negeri, belum berorientasi ekspor dikarenakan belum memiliki pengetahuan terkait tata cara ekspor, dan belum memiliki akses calon pembeli luar negeri.

Analisis Tematik

1. **Belanja Infrastruktur Konektivitas memiliki pengaruh signifikan terhadap indikator kualitas SDM**, dengan arah positif sesuai nilai *original sample* sebesar 0,781. Hal ini berarti, setiap peningkatan Belanja Infrastruktur Konektivitas, berdampak positif pada peningkatan kondisi jalan di Provinsi Kepri.
2. Beberapa tahun terakhir **output perbaikan jalan semakin menurun, sedangkan anggaran belanja semakin meningkat**, apabila fenomena ini terus terjadi akan menurunkan kualitas infrastruktur yang telah dibangun sebelumnya di wilayah Kepri.
3. **Pelabuhan Malaysia dan Singapura telah menerapkan teknologi** dalam pengelolaan pelabuhan, melalui sistem EDI yang terkoneksi dengan sistem informasi kepabeanan, otomatisasi integrated monitoring system, dan interkoneksi antar moda transportasi.
4. Pembangunan **infrastruktur pelabuhan** yang lebih canggih dan maju di Kepri seperti Pelabuhan Batu Ampar di Batam dibutuhkan untuk dapat bersaing dengan Malaysia dan Singapura.
5. Dukungan pemerintah juga dibutuhkan untuk keberlangsungan **bisnis transportasi maritim**, misalnya melalui Dana Abadi dan insentif khusus bagi pelaku bisnis transportasi maritim.





6. Terdapat **korelasi** yang signifikan antara **tingkat pengangguran, jumlah cargo throughput dan jumlah impor dengan PDRB**. Selain itu, terdapat korelasi yang signifikan antara tingkat pengangguran dan jumlah ekspor dengan jumlah impor.

V.II Rekomendasi

Analisis Ekonomi Regional

1. Pemerintah daerah agar **meningkatkan alokasi belanja pada sektor Industri Pengolahan, Konstruksi dan Pertambangan** dalam rangka meningkatkan Pembentukan Modal Tetap Bruto (investasi) yang memiliki kontribusi paling besar 44,62 persen terhadap PDRB sehingga dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi Kepri 5,01 persen pada triwulan I. Penambahan alokasi belanja pada sektor tersebut diharapkan dapat menstimulasi pertumbuhan ekonomi Kepri pada triwulan selanjutnya.
2. Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) diharapkan memperkuat **sinergi antar instansi daerah untuk menjaga kestabilan target inflasi** dengan menerbitkan kebijakan dan program yang tepat dengan mempertimbangkan kondisi fiskal dan moneter, melalui berbagai upaya meliputi Operasi Pasar Murah secara berkala, kerjasama antar daerah dalam penyediaan pangan dan penyaluran pangan sampai ke pulau terpencil untuk menjaga pasokan.
3. Dalam rangka meningkatkan **Surplus Perdagangan Luar Negeri**, Dinas Perindustrian dan Perdagangan agar melaksanakan pemasaran yang lebih agresif dan partisipasi dalam pameran dagang internasional untuk menggaet pasar ekspor potensial baru khususnya Bahan Bakar Mineral (Non Migas) yang menjadi produk ekspor andalan.
4. Pemerintah daerah agar melaksanakan **upaya pengentasan kemiskinan** dengan cara:
 - a. Dinas Sosial perlu **mengkaji Belanja Perlindungan Sosial dengan mengintegrasikan data penerima bantuan sosial** di daerah dengan data pusat, agar pelaksanaan penyaluran Bansos dapat menjangkau keluarga penerima manfaat secara tepat sasaran.
 - b. Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah agar **melaksanakan pelatihan keterampilan dan pendampingan usaha** untuk meningkatkan pendapatan (mandiri secara ekonomi).
5. Aspek pemerataan harus menjadi perhatian, **Pemprov Kepri agar melakukan upaya menurunkan tingkat ketimpangan (gini ratio)** dengan cara meningkatkan program Balai Latihan Kerja dan penambahan alokasi dana pada Program Kewirausahaan dengan Bunga 0 (nol) persen dari Pemprov Kepri.
6. Pemerintah daerah agar lebih **menggiatkan program pemberdayaan ekonomi untuk menurunkan tingkat pengangguran** meliputi pelatihan keterampilan, memudahkan akses terhadap modal usaha, dan pembangunan infrastruktur yang mendukung pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). **Khusus untuk Pemerintah Kota Batam** yang masih memiliki isu tingkat pengangguran yang tinggi diharapkan untuk menyediakan lebih banyak sekolah vokasi setingkat SMK dan Politeknik melakukan kerja sama dengan industri (program *link and match industry*) sehingga tercipta kualitas tenaga kerja *high-skilled worker* yang sesuai dengan kebutuhan industri di Kota Batam.
7. Dinas ketahanan pangan, pertanian dan kesehatan hewan agar memberikan akses petani terhadap teknologi pertanian modern untuk **meningkatkan Nilai Tukar Petani** dengan cara pemberian insentif berupa benih unggul, pupuk organik, pestisida yang ramah lingkungan, dan teknik pertanian berkelanjutan untuk meningkatkan kualitas produk sehingga meningkatkan nilai jual.





8. Agar Dinas Kelautan dan Perikanan membentuk koperasi nelayan atau kelompok usaha bersama untuk **meningkatkan Nilai Tukar Nelayan** dengan memfasilitasi akses nelayan ke pasar yang lebih besar dan stabil. Pemerintah daerah diharapkan dapat membantu mempromosikan produk ikan lokal, dan membuka akses ke pasar ekspor membangun kemitraan dengan sektor swasta, termasuk perusahaan pengolahan ikan, restoran, hotel, dan ritel, untuk memastikan pasokan ikan yang berkualitas dan berkelanjutan.
9. Untuk meningkatkan skor IPM, Kepulauan Riau sebagai pemilik **IPM tertinggi ketiga Nasional** sebesar 79,08 pada tahun 2023, Pemprov Kepri agar meningkatkan formasi tenaga pendidik (guru) sampai ke pulau perintis, kesehatan (fasilitas kesehatan sampai ke pelosok) dan penguatan mata pencaharian sesuai dengan kondisi daerah kepulauan, seperti pelatihan budidaya perikanan dan kelautan.

Analisis Fiskal Regional

Pelaksanaan APBN Tingkat Provinsi

1. Pemerintah Pusat (Direktorat Jenderal Pajak) agar dapat meningkatkan pengawasan pajak terhadap pengenaan tarif progresif PPh 21 yang mulai berlaku efektif di Januari 2024. Kegiatan **extra effort seperti sosialisasi dan layanan langsung pada perusahaan besar** juga dapat dilakukan dalam meningkatkan potensi penerimaan pajak di Kepri.
2. Badan Layanan Umum (BLU) di Provinsi Kepri agar terus menggali dan meningkatkan potensi pendapatan PNBPN di Kepri, baik melalui **optimalisasi tarif dan diversifikasi layanan** yang sesuai dengan kebutuhan daerah. Peningkatan kualitas dan efisiensi layanan juga terus dioptimalkan melalui **digitalisasi layanan, pelatihan dan pengembangan SDM**, serta **optimalisasi aset** yang dapat dilakukan dengan **kerja sama dengan pihak ketiga**.
3. Pemerintah Pusat (Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian dan Ditjen Perbendaharaan Kementerian Keuangan) agar **berkoordinasi dengan Badan Pengusahaan (BP) Karimun, Bintan, Tanjungpinang untuk menyelesaikan pengurusan status kelembagaannya** dari BA BUN 999.08 menjadi satker Badan Layanan Umum sesuai amanat PP No. 41 Tahun 2021 sehingga pengelolaan dan administrasi keuangannya, termasuk penerimaan hibah, dan PNBPN dapat dilakukan sesuai ketentuan.
4. KPPN dan Kanwil DJPb Prov. Kepri agar secara aktif **berkoordinasi dengan pemerintah daerah untuk mengkonsolidasikan perubahan mekanisme penyaluran** Belanja TKD dan melaksanakan bimbingan pemenuhan dokumen administrasi dalam mempercepat pencairan Dana TKD setelah terbitnya juknis dan peraturan Menteri Keuangan tentang DAK Fisik.

Pelaksanaan APBD Tingkat Provinsi

Untuk meningkatkan PAD hingga dapat meningkatkan **kemandirian fiskal**, pemerintah daerah dapat melakukan hal-hal sebagai berikut:

1. **Mengoptimalkan PAD dari Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah** yang dipisahkan mengingat realisasi masih sangat rendah, yaitu 2,83 persen dari Target sehingga hanya memberikan kontribusi 0,83 persen terhadap PAD. Pemda daerah perlu memetakan BUMD yang belum optimal dalam menghasilkan profit dan menemukan permasalahan serta solusi konkrit hingga menghasilkan profit yang akhirnya dapat memberikan dividen bagi pemda.
2. Pendapatan BLUD turun hingga 42,70 persen atau Rp30,83 miliar (yoy). Penurunan ini sangat signifikan pada pos Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah karena sebagai kontributor mayoritas. **Pemerintah daerah agar memetakan BLUD yang mengalami penurunan**





- pendapatan dan menemukan permasalahan** serta solusi konkrit. Hal tersebut penting dilakukan mengingat seharusnya BLUD merupakan salah satu penyumbang pendapatan bagi pemerintah daerah.
3. Penerimaan Pajak Sarang Burung Walet menurun 50,38 persen (*yoy*) atau hanya sebesar Rp6.320.000 sepanjang periode Triwulan I tahun 2024. Dengan tarif pajak sebesar 10 persen dari omzet, dan perkiraan harga jual Rp8 juta/kg maka penjualan Sarang Burung Walet hanya sebanyak 8 kg saja di lingkup wilayah Provinsi Kepulauan Riau. Potensi Pajak tersebut sangat tinggi mengingat jumlah ekspor sarang burung walet sangat tinggi dalam beberapa tahun terakhir. Agar **PAD dapat optimal, pemerintah daerah agar terus mengembangkan potensi penjualan/ekspor sarang burung walet**. Semakin tinggi penjualan/ekspor sarang burung walet maka seharusnya berbanding lurus dengan penerimaan pajak Sarang Burung Walet.
 4. Peningkatan Pendapatan Denda Atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan menunjukkan bahwa terdapat peningkatan keterlambatan pelaksanaan pekerjaan, **Pemda dan dinas terkait agar mengawasi perencanaan, pelaksanaan, pembayaran sampai dengan pertanggungjawaban** secara terus menerus atas pekerjaan pembangunan fisik sehingga tidak mengalami keterlambatan penyelesaian.
 5. Untuk meningkatkan rasio PAD terhadap PDRB, pemerintah daerah agar melakukan **diversifikasi sumber pendapatan daerah melalui pengembangan sektor potensial** dengan memberikan insentif kepada investor, mendukung pengembangan UMKM meningkatkan promosi produk lokal.
 6. Pemerintah Kabupaten Lingga agar meningkatkan penerimaan DBH untuk **meningkatkan kemandirian fiskal** melalui Dinas Dinas DPMPTSP agar menyusun *mapping* terhadap potensi SDA maupun sektor lainnya yang dapat ditawarkan kepada investor sehingga mampu memberikan bagi hasil kepada Kabupaten Lingga. Saat ini, Kabupaten Lingga belum melakukan *mapping* potensi tersebut, untuk menarik investor menanamkan investasi di Kabupaten Lingga.
 7. Dalam rangka meningkatkan realisasi Belanja Daerah, pemerintah daerah agar **menyusun rencana kerja secara matang dengan prioritas daerah** melalui analisis kebutuhan, konsultasi dan koordinasi kepada semua OPD untuk mendiskusikan rencana bersama menggapai tujuan, sasaran dan tahapan realisasi yang tepat waktu.
 8. Pemerintah pusat dan pemerintah daerah agar berkoordinasi dalam optimalisasi **peningkatan pendapatan PNPB dari pemanfaatan BMN Pelabuhan Moco yang baru saja diresmikan pada awal tahun 2024 setelah lebih dari 10 tahun mangkrak**.

Pengembangan Ekonomi Daerah

Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah agar melakukan **upaya pengembangan sektor UMKM** dengan cara:

1. Memberikan **pelatihan dan bimbingan usaha** kepada para pengusaha UMKM rintisan dalam berbagai aspek bisnis, seperti manajemen, pemasaran, keuangan, dan teknologi untuk meningkatkan kapasitas SDM.
2. Menggiatkan profiling UMKM yang membutuhkan pembiayaan dan menghubungkan dengan lembaga pembiayaan untuk mendapatkan Kredit Usaha Rakyat, kredit UMi dan lainnya.
3. Membangun **jaringan kolaborasi dan kemitraan** antara UMKM rintisan, industri besar, perguruan tinggi, Kanwil DJPB Prov. Kepri, KPPN setempat dan lembaga pendukung ekosistem bisnis lokal lainnya untuk meningkatkan pasar jual dan lebih sering melaksanakan bazar untuk memperkenalkan usaha UMKM binaan.





Analisis Tematik

1. Pemda dan pempus agar **meningkatkan alokasi belanja konektivitas** dan **menambahkan alokasi anggaran untuk perbaikan dan perawatan jalan**, seperti peningkatan kualitas permukaan jalan dan perbaikan struktur jalan yang rusak. Kepri sebagai provinsi kepulauan sangat menggantungkan diri pada transportasi maritim yang menghubungkan antar pulau, belanja konektivitas dapat difokuskan pada pembangunan jembatan, pelabuhan, bandara lokal dan penyediaan transportasi laut yang aman dan cepat.
2. Dalam menunjang **optimalisasi kualitas infrastruktur jalan**, pemerintah daerah agar melakukan:
 - a. **pengembangan sistem drainase** yang lebih baik. untuk mencegah kerusakan jalan akibat genangan air, terutama di wilayah kepulauan yang cenderung rentan terhadap banjir.
 - b. Pemda melalui Dinas PUPP agar melaksanakan **evaluasi dan studi komparasi terhadap penggunaan material jalan** yang berkualitas, tahan lama dan lebih ramah lingkungan. Hal Ini dapat membantu dalam memperpanjang umur jalan dan mengurangi biaya pemeliharaan jalan jangka panjang
3. Pemda dan pempus agar melakukan **investasi teknologi pengelolaan pelabuhan** melalui *Artificial Intelligence* yang terintegrasi dengan kepabeanaan dan *monitoring system* sehingga membantu memelihara pelabuhan secara lebih efisien, hemat waktu dan mengurangi biaya pemeliharaan jangka panjang.
4. Pemda dan pempus agar meningkatkan **alokasi anggaran untuk membangun Pelabuhan Batu Ampar** di Batam yang menjadi sentral keluar masuk wisatawan sehingga memiliki fasilitas dan kenyamanan yang tidak kalah dari Singapura dan Malaysia.
5. Pemerintah daerah agar berkoordinasi dengan pemerintah pusat untuk **menginisiasi pembentukan dana khusus dan pemberian insentif** bagi pelaku bisnis transportasi maritim untuk mengakomodir pengembangan bisnis transportasi maritim.
6. **Pemerintah** daerah agar **melaksanakan pemberdayaan ekonomi** dengan pemberian pelatihan keterampilan, pemberian akses terhadap usaha potensial dan membentuk jaringan pasar komoditi dengan luar negeri dalam rangka meningkatkan bisnis sektor ekspor-impor untuk meningkatkan pendapatan daerah sekaligus mengurangi tingkat pengangguran.



List of Reference

DAFTAR PUSTAKA

Peraturan

Kementerian Sekretariat Negara. 2022. Undang Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah. Jakarta: Kementerian Sekretariat Negara.

----- . 2020. *Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024*. Jakarta: Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Kementerian Keuangan Republik Indonesia. 2015. *Peraturan Menteri Keuangan Nomor 153/PMK.07/2015 tentang Batas Maksimal Kumulatif Defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Batas Maksimal Defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Batas Maksimal Kumulatif Pinjaman Daerah Tahun Anggaran 2016*. Berita Negara RI Tahun 2015, No. 1181. Jakarta: Kementerian Keuangan.

----- . 2014. Surat Edaran Nomor SE-43/PB/2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Kajian Fiskal Regional. Jakarta: Direktorat Jenderal Perbendaharaan.

Laporan dan Buku

Provinsi Kepulauan Riau. 2021. *Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021-2026*. Tanjungpinang: Provinsi Kepulauan Riau.

----- . 2021. *Rencana Strategis Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021-2026*. Tanjungpinang: Provinsi Kepulauan Riau.

----- . 2021. *Rencana Strategis Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Kesehatan Hewan*. Tanjungpinang: Provinsi Kepulauan Riau.

Badan Pusat Statistik. 2023. *Indeks Pembangunan Manusia Provinsi Kepulauan Riau 2023*. Tanjungpinang: Badan Pusat Statistik Provinsi Kepulauan Riau.

----- . 2024. *Provinsi Kepulauan Riau Dalam Angka 2023*. Tanjungpinang: Badan Pusat Statistik Provinsi Kepulauan Riau.

----- . 2024. *Keadaan Ketenagakerjaan Provinsi Kepulauan Riau Februari 2024*. Tanjungpinang: Badan Pusat Statistik Provinsi Kepulauan Riau.

----- . 2024. *PDRB Triwulanan Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha Triwulan I 2024*. Tanjungpinang: Badan Pusat Statistik Provinsi Kepulauan Riau.

----- . 2024. *Pertumbuhan Ekonomi Kepulauan Riau Triwulan I 2024*. Tanjungpinang: Badan Pusat Statistik Provinsi Kepulauan Riau.

----- . 2024. *Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Triwulan I 2024*. Jakarta: Badan Pusat Statistik.

----- . 2023. *Tingkat Ketimpangan Pengeluaran Penduduk Indonesia Maret 2023*. Tanjungpinang: Badan Pusat Statistik Provinsi Kepulauan Riau.

List of Reference

DAFTAR PUSTAKA

----- . 2023. *Tingkat Ketimpangan Pengeluaran Penduduk Indonesia Maret 2023*. Jakarta: Badan Pusat Statistik.

----- . 2023. *Profil Kemiskinan Provinsi Kepulauan Riau Maret 2023*. Tanjungpinang: Badan Pusat Statistik Provinsi Kepulauan Riau.

----- . 2023. *Profil Kemiskinan di Indonesia Maret 2023*. Jakarta: Badan Pusat Statistik.

----- . 2023. *Perkembangan Nilai Tukar Petani Kepulauan Riau Maret 2024*. Tanjungpinang: Badan Pusat Statistik Provinsi Kepulauan Riau.

----- . 2024. *Perkembangan Nilai Tukar Petani dan Harga Produsen Gabah Maret 2024*. Jakarta: Badan Pusat Statistik.

----- . 2024. *Keadaan Ketenagakerjaan Indonesia Februari 2024*. Jakarta: Badan Pusat Statistik.

Jurnal

Haryono, S., & P. Wardoyo. 2012. *Struktural Equation Modelling Untuk Penelitian Manajemen Menggunakan Amos 18.00*. Bekasi: PT. Intermedia Personalia Utama.

Kline, R. B. (2015). *Principles and practice of structural equation modeling*. Guilford Publications.

Cahyo, R. D. (2016). Analisis Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Upah Minimum, 95 Dan Rata-Rata Lama Prndidikan Terhadap Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten/Kota Di Jawa Timur Tahun 2009-2014. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa FEB Universitas Brawijaya*, 4(2).

Ramiayu, D.D. (2016). Analisis Pengaruh Rata-Rata Lama Sekolah, Upah Minimum, dan Pertumbuhan Ekonomi terhadap Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten/Kota Jawa Timur. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa*, 4 (2), 1-16.

Berita

1. <https://bpmpkepri.kemdikbud.go.id/aksi/detailkabar.php?id=288>
2. <https://bpbatam.go.id/en/kepala-bp-batam-bangun-22-infrastruktur-jalan-hingga2024-mendatang/>

Sumber Lain

SIKRI (Sistem Informasi Keuangan Republik Indonesia)
Aplikasi MEBE dan SINTESA <https://ditpa.kemenkeu.go.id/>
Aplikasi OMSPAN <https://spanint.kemenkeu.go.id/>
Aplikasi SIMTRADA <https://djpk.kemenkeu.go.id/simtrada>

Kajian Fiskal Regional Provinsi Kepulauan Riau Triwulan I - 2024

 Kanwil DJPb Kepulauan Riau

 @djpakepri

 @djpakepri

Konten Kajian Fiskal Regional (KFR) Triwulan I Tahun 2024 dilindungi oleh Undang-Undang, hak cipta melekat pada Kanwil DJPb Kepri. Dilarang mengumumkan, mendistribusikan, mengomunikasikan, dan/atau menggandakan sebagian atau seluruh isi tulisan ini tanpa izin dari Kanwil DJPb Kepri.

